



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan.

BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- laporan realisasi anggaran;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - laporan operasional;
  - laporan perubahan ekuitas;
  - neraca;
  - laporan arus kas; dan
  - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp896.117.199.247,20
b. belanja	<u>Rp897.598.260.645,00</u>
surplus/ defisit	(Rp1.481.061.397,80)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp17.140.978.048,39
2. pengeluaran	<u>Rp2.765.857.030,00</u>
3. pembiayaan neto	Rp14.375.121.018,39
d. silpa	
1. surplus/defisit	(Rp1.481.061.397,80)
2. pembiayaan neto	Rp14.375.121.018,39
3. koreksi Silpa	<u>(Rp2.018.000,00)</u>
4. silpa	<u>Rp12.892.041.620,59</u>

- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah (Rp86.685.221.256,80) dengan rincian sebagai berikut:	
1. realisasi	Rp896.117.199.247,20
2. anggaran pendapatan setelah perubahan	<u>Rp982.802.420.504,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp86.685.221.256,80)
b. selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah (Rp94.329.137.907,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. realisasi	Rp897.598.260.645,00
2. anggaran belanja setelah perubahan	<u>Rp991.927.398.552,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp94.329.137.907,00)

c. selisih .....

- c. selisih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah (Rp10.606.039.445,80) dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi                 | (Rp1.481.061.397,80)      |
| 2. surplus/defisit perubahan | <u>Rp9.124.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang)       | (Rp10.606.039.445,80)     |
- d. selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. realisasi  | Rp17.140.978.048,00        |
| 2. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp17.140.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang)                              | Rp0,00                     |
- e. selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp5.250.142.970,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi                       | Rp2.765.857.030,00        |
| 2. anggaran Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp8.016.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang)             | (Rp5.250.142.970,00)      |
- f. selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan neto sejumlah Rp5.250.142.970,39 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. realisasi                                  | Rp14.375.121.018,39       |
| 2. anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan | <u>Rp9.124.978.048,00</u> |
| selisih lebih/(kurang)                        | Rp5.250.142.970,39        |

- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- Lampiran I. : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
  - Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
  - a. Saldo anggaran lebih awal Rp17.140.978.048,39;
  - b. Penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp17.140.978.048,39;
  - c. selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp12.894.059.620,59;
  - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp2.018.000,00);
  - e. lain-lain Rp0,00; dan
  - f. saldo anggaran lebih akhir Rp12.892.041.620,59.
- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. pendapatan daerah Rp921.007.028.277,07;
  - b. beban daerah Rp908.510.532.710,75;
  - c. defisit non operasional Rp5.260.688.869,00; dan
  - d. surplus/defisit Rp7.235.806.697,32.
- (2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. ekuitas awal Rp2.256.870.664.135,65;
  - b. surplus defisit laporan operasional Rp7.235.806.697,32;
  - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp14.213.249.580,03; dan
  - d. ekuitas akhir Rp2.278.319.720.413,00.
- (2) Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Daerah Kota ini.

Pasal 7

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. jumlah Aset Rp2.3322.229.730.008,18;
  - b. jumlah Kewajiban Rp43.910.009.595,18; dan
  - c. jumlah ekuitas dana Rp2.278.319.720.413,00.

(2) Uraian .....

- (2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per  
1 Januari Tahun 2023 Rp17.196.059.004,53;
  - b. arus kas bersih  
dari aktivitas operasi Rp143.409.708.553,20;
  - c. arus kas dari  
aktivitas investasi (Rp144.890.769.951,00);
  - d. arus kas dari  
aktivitas Pendanaan (Rp2.765.857.030,00);
  - e. arus kas dari  
aktivitas transitoris (Rp47.236.394,14); dan
  - f. saldo akhir kas per  
31 Desember Tahun 2023 Rp12.899.886.182,59.
- (2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
- a. piutang pajak daerah Rp10.553.487.873,40;
  - b. piutang retribusi daerah Rp90.063.650,00;
  - c. piutang lain-lain PAD  
yang Sah Rp13.911.493.144,28;
  - d. piutang transfer antar  
daerah Rp18.745.035.087,00; dan
  - e. piutang lainnya Rp1.639.816,00
- (2) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
- a. penyisihan piutang pajak  
daerah Rp4.795.875.506,05;
  - b. penyisihan .....

- b. penyisihan piutang retribusi daerah Rp4.092.776,66;
- c. penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Rp13.865.473.730,02; dan
- d. penyisihan piutang transfer antar daerah Rp18.651.309.911,56.

- (2) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. jumlah dana bergulir Rp1.279.397.268,00;
  - b. jumlah penyisihan (Rp1.279.397.268,00); dan
  - c. jumlah piutang bersih Rp0,00.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

- (1) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. jumlah penyertaan modal daerah Rp93.074.231.741,80;
  - b. penyertaan modal tahun ini Rp10.404.867.131,00; dan
  - c. jumlah sisa modal yang disertakan sampai dengan tahun ini Rp103.479.098.872,80.
- (2) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- a. saldo awal Rp 2.089.309.281.193,44;
  - b. penambahan Rp478.190.419.048,46;
  - c. pengurangan Rp352.679.043.395,44;
  - d. akumulasi penyusutan Tahun 2022 Rp1.431.816.595.189,67;
  - e. akumulasi penyusutan Tahun 2023 Rp1.553.052.713.798,08; dan
  - f. saldo akhir Rp 2.093.584.538.238,04.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 15

- (1) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
  - a. aset tetap tanah Rp597.834.668.181,63;
  - b. aset tetap peralatan dan mesin Rp707.918.334.487,97;
  - c. aset tetap gedung dan bangunan Rp1.114.003.938.188,26;
  - d. aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Rp1.169.826.124.893,83;
  - e. aset tetap lainnya Rp32.006.004.647,01;
  - f. konstruksi dalam pengerjaan Rp25.048.181.637,42; dan
  - g. akumulasi penyusutan aset tetap (Rp1.553.052.713.798,08);
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
  - a. saldo awal Rp50.895.320.239,18;
  - b. mutasi bertambah Rp22.880.563.253,43;
  - c. mutasi berkurang Rp48.727.701.855,18;
  - d. reklasifikasi/penghapusan Rp0,00; dan
  - e. saldo akhir Rp25.048.181.637,42.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
  - a. saldo awal Rp50.754.350.112,75;
  - b. mutasi tambah Rp21.025.379.495,76;
  - c. mutasi kurang Rp13.982.063.871,41; dan
  - d. saldo akhir Rp57.797.665.737,10.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Uraian daftar Dana Cadangan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
  - a. saldo awal Rp0,00;
  - b. transfer dari kas daerah Rp0,00;
  - c. transfer ke kas daerah Rp0,00; dan
  - d. saldo akhir Rp0,00.

(2) uraian .....

- (2) Uraian daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| a. saldo awal    | Rp37.857.312.401,71;      |
| b. mutasi tambah | Rp124.061.189.655,58;     |
| c. mutasi kurang | Rp120.774.349.494,79; dan |
| d. saldo akhir   | Rp41.144.152.562,50.      |
- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| a. saldo awal    | Rp5.531.714.062,68;     |
| b. mutasi tambah | Rp0,00;                 |
| c. mutasi kurang | Rp2.765.857.030,00; dan |
| d. saldo akhir   | Rp2.765.857.032,68.     |
- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya sebesar Rp17.074.790.559,18; dan
- (2) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Uraian Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. total aset      | Rp64.876.504.659,00;     |
| 2. total kewajiban | Rp11.827.405.785,00; dan |
| 3. total ekuitas   | Rp53.049.098.872,80.     |
- (2) Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,



AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 1

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: B.HK.02.053.24



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

### Ayat(1)

- Huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.
- Huruf b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA/Koreksi, dan SAL akhir.
- Huruf c Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus defisit/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Huruf d Laporan Perubahan Ekuitas adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- Huruf e Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- Huruf f Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- Huruf g Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, dan LAK. Dalam rangka pengungkapan yang memudahi.

## Pasal 3

### Ayat (1)

- Huruf a Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf b Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf c Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah

Huruf d Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas



Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Huruf b Ikhtisar laporan Keuangan adalah penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 173

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
 AUDITED

DAI-AMRUPIAH

URAIAN	REFF CALK	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.5.1.1</b>	<b>982.802.420.504,00</b>	<b>896.117.199.247,20</b>	<b>91,18</b>	<b>906.540.019.393,66</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.5.1.1.1</b>	<b>184.161.704.095,00</b>	<b>196.738.798.401,95</b>	<b>106,83</b>	<b>173.758.437.058,66</b>
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.a	40.267.000.000,00	42.384.557.470,55	105,26	38.817.569.022,58
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.b	9.135.735.285,00	7.347.758.332,00	80,43	7.149.830.207,84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.c	8.850.373.578,00	8.850.373.578,00	100,00	8.943.966.033,00
Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.d	125.908.595.232,00	138.156.109.021,40	109,73	118.847.071.795,24
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.5.1.1.2</b>	<b>798.640.716.409,00</b>	<b>699.378.400.845,25</b>	<b>87,57</b>	<b>720.190.932.835,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>7.5.1.1.2.a</b>	<b>636.890.932.000,00</b>	<b>632.754.373.739,00</b>	<b>99,35</b>	<b>624.427.816.018,00</b>
Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.a.1)	608.628.439.000,00	604.491.880.739,00	99,32	603.714.199.018,00
Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.1.1.2.a.2)	28.262.493.000,00	28.262.493.000,00	100,00	20.713.617.000,00
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>7.5.1.1.2.b</b>	<b>161.749.784.409,00</b>	<b>66.624.027.106,25</b>	<b>41,19</b>	<b>95.763.116.817,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.b.1)	153.868.634.409,00	63.627.820.106,25	41,35	61.815.605.817,00
Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.b.2)	7.881.150.000,00	2.996.207.000,00	38,02	33.947.511.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.5.1.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.590.649.500,00</b>
Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.a	0,00	0,00	0,00	12.590.649.500,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.5.1.2</b>	<b>991.927.398.552,00</b>	<b>897.598.260.645,00</b>	<b>90,49</b>	<b>904.426.536.279,66</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.5.1.2.1</b>	<b>791.027.550.012,00</b>	<b>747.490.682.432,00</b>	<b>94,50</b>	<b>701.032.303.654,61</b>
Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.a	366.998.035.648,00	337.773.100.480,00	92,04	337.161.135.455,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.b	404.910.963.460,00	390.492.172.631,00	96,44	353.802.391.174,00
Belanja Bunga	7.5.1.2.1.c	1.000.000.000,00	909.456.815,00	90,95	765.454.390,61
Belanja Hibah	7.5.1.2.1.d	17.793.530.904,00	18.031.878.506,00	101,34	7.522.550.135,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.e	325.020.000,00	284.074.000,00	87,40	1.780.772.500,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.5.1.2.2</b>	<b>192.129.848.540,00</b>	<b>145.499.419.851,00</b>	<b>75,73</b>	<b>199.082.473.360,05</b>
Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.a	1.154.658.000,00	237.142.300,00	20,54	667.419.796,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.b	30.783.541.676,00	28.624.066.144,00	92,98	56.762.798.742,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.c	46.496.014.030,00	39.639.645.218,00	85,25	56.543.087.027,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.1.2.2.d	110.581.534.478,00	73.898.362.333,00	66,83	85.004.417.795,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.e	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	99,55	104.750.000,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>7.5.1.2.3</b>	<b>8.770.000.000,00</b>	<b>4.608.158.362,00</b>	<b>52,54</b>	<b>4.311.759.265,00</b>
Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	52,54	4.311.759.265,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(9.124.978.048,00)</b>	<b>(1.481.061.397,80)</b>	<b>16,23</b>	<b>2.113.483.114,00</b>

URAIAN	REF KALK	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>PEMBIA YAAAN DAERAH</b>	<b>7.5.1.3</b>	<b>9.124.978.048,00</b>	<b>14.375.121.018,39</b>	<b>157,54</b>	<b>15.029.805.562,39</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.3.1</b>	<b>17.140.978.048,00</b>	<b>17.140.978.048,39</b>	<b>100,00</b>	<b>17.795.662.592,76</b>
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	7.5.1.3.1	17.140.978.048,00	17.140.978.048,39	100,00	17.795.662.592,76
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.3.2</b>	<b>8.016.000.000,00</b>	<b>2.765.857.030,00</b>	<b>34,50</b>	<b>2.765.857.030,37</b>
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.a	5.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.1.3.2.b	2.766.000.000,00	2.765.857.030,00	99,99	2.765.857.030,37
<b>PEMBIA YAAAN NETTO</b>		<b>9.124.978.048,00</b>	<b>14.375.121.018,39</b>	<b>157,54</b>	<b>15.029.805.562,39</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894.059.620,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.143.288.676,39</b>
<b>KOREKSI SILPA</b>		<b>0,00</b>	<b>(2.018.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.310.628,00)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>7.5.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>12.892.041.620,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140.978.048,39</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


  
 Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI



Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024



**KOTA PARE PARE**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	4 Pendapatan	982.802.420.504,00	896.117.199.247,20	(86.728.411.496,80)	91,18
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	122.981.549.491,00	163.719.309.680,82	40.694.569.949,82	133,13
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	44.000.000,00	22.693.886.829,00	22.606.696.589,00	51.577,02
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.000.000,00	22.693.886.829,00	22.606.696.589,00	51.577,02
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH	44.000.000,00	22.693.886.829,00	22.606.696.589,00	51.577,02
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.000.000,00	85.375.240,00	(1.815.000,00)	194,03
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah	44.000.000,00	42.185.000,00	(1.815.000,00)	95,88
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	-	43.190.240,00	43.190.240,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER	-	22.608.511.589,00	22.608.511.589,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	22.608.511.589,00	22.608.511.589,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	120.823.049.491,00	138.929.896.519,82	18.106.847.028,82	114,99
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	9.248.145.000,00	14.099.003.654,00	4.850.858.654,00	152,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH	9.248.145.000,00	14.099.003.654,00	4.850.858.654,00	152,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.248.145.000,00	10.008.703.454,00	760.558.454,00	108,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah	1.248.145.000,00	1.377.851.800,00	129.706.800,00	110,39
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	8.630.851.654,00	630.851.654,00	107,89
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER	-	4.090.300.200,00	4.090.300.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	4.090.300.200,00	4.090.300.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009 RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE	13.000.000.000,00	16.839.067.274,82	3.839.067.274,82	129,53



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	13.000.000.000,00	16.839.067.274,82	3.839.067.274,82	129,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.000.000.000,00	16.839.067.274,82	3.839.067.274,82	129,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.000.000.000,00	16.839.067.274,82	3.839.067.274,82	129,53
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		RSUD. A. MAKKASAU	98.574.904.491,00	107.991.825.591,00	9.416.921.100,00	109,55
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	98.574.904.491,00	107.991.825.591,00	9.416.921.100,00	109,55
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.574.904.491,00	107.991.825.591,00	9.416.921.100,00	109,55
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.574.904.491,00	107.991.825.591,00	9.416.921.100,00	109,55
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.100.000.000,00	2.064.391.332,00	(35.608.668,00)	98,30
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM	2.100.000.000,00	2.064.391.332,00	(35.608.668,00)	98,30
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.100.000.000,00	2.064.391.332,00	(35.608.668,00)	98,30
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.100.000.000,00	2.064.391.332,00	(35.608.668,00)	98,30
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	2.064.391.332,00	(35.608.668,00)	98,30
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.500.000,00	31.135.000,00	16.635.000,00	214,72
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.500.000,00	31.135.000,00	16.635.000,00	214,72
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	14.500.000,00	31.135.000,00	16.635.000,00	214,72
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.500.000,00	31.135.000,00	16.635.000,00	214,72
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	14.500.000,00	31.135.000,00	16.635.000,00	214,72
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.655.866.000,00	2.259.561.300,00	(1.396.304.700,00)	61,81
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000,00	50.050.000,00	10.050.000,00	125,13
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000,00	50.050.000,00	10.050.000,00	125,13
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	50.050.000,00	10.050.000,00	125,13
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	50.050.000,00	10.050.000,00	125,13
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	50.050.000,00	10.050.000,00	125,13
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.385.000.000,00	663.777.000,00	(721.223.000,00)	47,93
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.385.000.000,00	663.777.000,00	(721.223.000,00)	47,93
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.385.000.000,00	663.777.000,00	(721.223.000,00)	47,93

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.385.000.000,00	663.777.000,00	(721.223.000,00)	47,93
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.385.000.000,00	663.777.000,00	(721.223.000,00)	47,93
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.590.866.000,00	853.293.000,00	(737.573.000,00)	53,64
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000		DINAS PERHUBUNGAN	1.590.866.000,00	853.293.000,00	(737.573.000,00)	53,64
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.590.866.000,00	853.293.000,00	(737.573.000,00)	53,64
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.590.866.000,00	853.293.000,00	(737.573.000,00)	53,64
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.590.866.000,00	853.293.000,00	(737.573.000,00)	53,64
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	240.000.000,00	261.966.800,00	21.966.800,00	109,15
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	240.000.000,00	261.966.800,00	21.966.800,00	109,15
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	240.000.000,00	261.966.800,00	21.966.800,00	109,15
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.000.000,00	261.966.800,00	21.966.800,00	109,15
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	240.000.000,00	261.966.800,00	21.966.800,00	109,15
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	400.000.000,00	430.474.500,00	30.474.500,00	107,62
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	400.000.000,00	430.474.500,00	30.474.500,00	107,62
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	430.474.500,00	30.474.500,00	107,62
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	430.474.500,00	30.474.500,00	107,62
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00	430.474.500,00	30.474.500,00	107,62
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.070.000.000,00	1.046.031.800,00	(2.023.968.200,00)	34,07
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	170.000.000,00	185.541.000,00	15.541.000,00	109,14
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000		DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	170.000.000,00	185.541.000,00	15.541.000,00	109,14
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	170.000.000,00	185.541.000,00	15.541.000,00	109,14
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.000.000,00	185.541.000,00	15.541.000,00	109,14
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	178.366.000,00	18.366.000,00	111,48
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	7.175.000,00	(2.825.000,00)	71,75
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.900.000.000,00	860.490.800,00	(2.039.509.200,00)	29,67
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000		DINAS PERDAGANGAN	2.900.000.000,00	860.490.800,00	(2.039.509.200,00)	29,67
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.900.000.000,00	860.490.800,00	(2.039.509.200,00)	29,67
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.900.000.000,00	860.490.800,00	(2.039.509.200,00)	29,67
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	860.490.800,00	(539.509.200,00)	61,46

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	853.095.005.013,00	729.092.296.466,38	(124.002.708.546,62)	85,46
5.02			KEUANGAN	853.095.005.013,00	729.092.296.466,38	(124.002.708.546,62)	85,46
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	853.095.005.013,00	729.092.296.466,38	(124.002.708.546,62)	85,46
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	853.095.005.013,00	729.092.296.466,38	(124.002.708.546,62)	85,46
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.454.288.604,00	56.412.707.410,13	1.958.418.806,13	103,60
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.1.01	Pajak Daerah	40.267.000.000,00	42.384.557.470,55	2.117.557.470,55	105,26
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	513.224.285,00	533.777.100,00	20.552.815,00	104,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.850.373.578,00	8.850.373.578,00	-	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.823.690.741,00	4.643.999.261,58	(179.691.479,42)	96,27
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	798.640.716.409,00	672.679.589.056,25	(125.961.127.352,75)	84,23
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.890.932.000,00	606.055.561.950,00	(30.835.370.050,00)	95,16
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.749.784.409,00	66.624.027.106,25	(95.125.757.302,75)	41,19
		5	Belanja	991.927.398.552,00	897.598.260.645,00	(94.329.137.907,00)	90,49
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	623.282.902.521,00	566.193.536.067,00	(57.089.366.454,00)	90,84
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	189.457.942.685,00	178.306.551.591,00	(11.151.391.094,00)	94,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	189.457.942.685,00	178.306.551.591,00	(11.151.391.094,00)	94,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	189.457.942.685,00	178.306.551.591,00	(11.151.391.094,00)	94,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	178.646.154.697,00	167.856.388.909,00	(10.789.765.788,00)	93,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	153.448.120.665,00	143.023.441.033,00	(10.424.679.632,00)	93,21
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.175.234.032,00	20.571.800.274,00	(603.433.758,00)	97,15
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.022.800.000,00	4.261.147.602,00	238.347.602,00	105,92
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.811.787.988,00	10.450.162.682,00	(361.625.306,00)	96,66
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.417.539.042,00	2.189.547.441,00	(227.991.601,00)	90,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.280.148.590,00	5.160.411.385,00	(119.737.205,00)	97,73
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	(13.896.500,00)	99,55
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	259.241.711.123,00	264.229.533.606,00	4.987.822.483,00	101,92
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	84.152.178.974,00	75.080.775.281,00	(9.071.403.693,00)	89,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	84.152.178.974,00	75.080.775.281,00	(9.071.403.693,00)	89,22

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	81.069.539.411,00	72.382.418.086,00	(8.687.121.325,00)	89,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	32.813.079.280,00	28.479.958.626,00	(4.333.120.654,00)	86,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.256.460.131,00	43.902.459.460,00	(4.354.000.671,00)	90,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.082.639.563,00	2.698.357.195,00	(384.282.368,00)	87,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.311.272.534,00	2.033.357.195,00	(277.915.339,00)	87,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.918.000,00	-	(100.918.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.449.029,00	665.000.000,00	(5.449.029,00)	99,19
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE	33.806.870.088,00	36.602.788.426,00	2.795.918.338,00	108,27
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5	BELANJA DAERAH	33.806.870.088,00	36.602.788.426,00	2.795.918.338,00	108,27
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.023.424.976,00	25.277.505.326,00	1.254.080.350,00	105,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	4.340.690.876,00	4.146.290.060,00	(194.400.816,00)	95,52
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.682.734.100,00	21.131.215.266,00	1.448.481.166,00	107,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	9.783.445.112,00	11.325.283.100,00	1.541.837.988,00	115,76
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.383.445.112,00	10.928.102.775,00	1.544.657.663,00	116,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.457.000,00	(1.543.000,00)	99,23
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.723.325,00	(1.276.675,00)	99,36
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		RSUD. A. MAKKASAU	141.282.662.061,00	152.545.969.899,00	11.263.307.838,00	107,97
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	141.282.662.061,00	152.545.969.899,00	11.263.307.838,00	107,97
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	118.592.860.570,00	131.600.281.250,00	13.007.420.680,00	110,97
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	29.182.802.210,00	28.964.953.406,00	(217.848.804,00)	99,25
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.410.058.360,00	102.635.327.844,00	13.225.269.484,00	114,79
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.689.801.491,00	20.945.688.649,00	(1.744.112.842,00)	92,31
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.960.705.491,00	9.414.878.846,00	(1.545.826.645,00)	85,90
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.729.096.000,00	11.530.809.803,00	(198.286.197,00)	98,31
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.610.104.980,00	77.999.246.696,00	(34.610.858.284,00)	69,26
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM	112.610.104.980,00	77.999.246.696,00	(34.610.858.284,00)	69,26
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	112.610.104.980,00	77.999.246.696,00	(34.610.858.284,00)	69,26
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.971.469.645,00	8.606.840.788,00	(2.364.628.857,00)	78,45
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.296.960.733,00	4.220.263.061,00	(1.076.697.672,00)	79,67



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.674.508.912,00	4.386.577.727,00	(1.287.931.185,00)	77,30
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	101.638.635.335,00	69.392.405.908,00	(32.246.229.427,00)	68,27
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.000.000,00	-	(62.000.000,00)	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.637.447.850,00	8.041.784.750,00	(5.595.663.100,00)	58,97
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.939.187.485,00	61.350.621.158,00	(26.588.566.327,00)	69,76
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.541.619.613,00	22.738.860.709,00	(12.802.758.904,00)	63,98
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	35.541.619.613,00	22.738.860.709,00	(12.802.758.904,00)	63,98
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	35.541.619.613,00	22.738.860.709,00	(12.802.758.904,00)	63,98
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.869.191.123,00	11.726.210.663,00	(3.142.980.460,00)	78,86
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.201.906.350,00	2.681.405.364,00	(520.500.986,00)	83,74
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.667.284.773,00	9.044.805.299,00	(2.622.479.474,00)	77,52
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.672.428.490,00	11.012.650.046,00	(9.659.778.444,00)	53,27
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.066.000,00	19.157.000,00	(52.909.000,00)	26,58
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.600.362.490,00	10.993.493.046,00	(9.606.869.444,00)	53,37
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.229.299.565,00	16.472.084.952,00	(757.214.613,00)	95,61
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.911.004.862,00	5.584.238.774,00	(326.766.088,00)	94,47
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	5.911.004.862,00	5.584.238.774,00	(326.766.088,00)	94,47
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.911.004.862,00	5.584.238.774,00	(326.766.088,00)	94,47
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.549.821.119,00	3.253.767.276,00	(296.053.843,00)	91,66
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.361.183.743,00	2.330.471.498,00	(30.712.245,00)	98,70
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.105.953.485,00	7.870.122.731,00	(235.830.754,00)	97,09
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	8.105.953.485,00	7.870.122.731,00	(235.830.754,00)	97,09
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.105.953.485,00	7.870.122.731,00	(235.830.754,00)	97,09
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.738.135.225,00	3.556.164.946,00	(181.970.279,00)	95,13
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.367.818.260,00	4.313.957.785,00	(53.860.475,00)	98,77
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.212.341.218,00	3.017.723.447,00	(194.617.771,00)	93,94
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	3.212.341.218,00	3.017.723.447,00	(194.617.771,00)	93,94
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.142.341.218,00	2.947.782.347,00	(194.558.871,00)	93,81

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.801.573.548,00	1.680.074.168,00	(121.499.380,00)	93,26
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.767.670,00	1.267.708.179,00	(73.059.491,00)	94,55
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.941.100,00	(58.900,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	69.941.100,00	(58.900,00)	99,92
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.202.224.555,00	6.447.258.513,00	(2.754.966.042,00)	70,06
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000		DINAS SOSIAL	9.202.224.555,00	6.447.258.513,00	(2.754.966.042,00)	70,06
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	9.202.224.555,00	6.447.258.513,00	(2.754.966.042,00)	70,06
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.154.265.555,00	6.447.258.513,00	(2.707.007.042,00)	70,43
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.860.994.705,00	2.583.389.389,00	(277.605.316,00)	90,30
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.968.250.850,00	3.579.795.124,00	(2.388.455.726,00)	59,98
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	325.020.000,00	284.074.000,00	(40.946.000,00)	87,40
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	47.959.000,00	-	(47.959.000,00)	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.959.000,00	-	(47.959.000,00)	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	109.996.973.666,00	99.767.074.557,00	(10.229.899.109,00)	90,70
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.085.588.034,00	4.595.299.902,00	(490.288.132,00)	90,36
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000		DINAS TENAGA KERJA	5.085.588.034,00	4.595.299.902,00	(490.288.132,00)	90,36
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	5.085.588.034,00	4.595.299.902,00	(490.288.132,00)	90,36
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.588.034,00	4.590.299.902,00	(490.288.132,00)	90,35
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.765.256.320,00	3.482.580.466,00	(282.675.854,00)	92,49
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.331.714,00	1.107.719.436,00	(207.612.278,00)	84,22
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.397.814.773,00	4.056.105.660,00	(341.709.113,00)	92,23
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.397.814.773,00	4.056.105.660,00	(341.709.113,00)	92,23
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	4.397.814.773,00	4.056.105.660,00	(341.709.113,00)	92,23
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.366.814.773,00	4.025.105.660,00	(341.709.113,00)	92,17
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.158.472.823,00	1.957.592.599,00	(200.880.224,00)	90,69
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.208.341.950,00	2.067.513.061,00	(140.828.889,00)	93,62

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.548.122.556,00	3.117.660.224,00	(430.462.332,00)	87,87
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	3.548.122.556,00	3.117.660.224,00	(430.462.332,00)	87,87
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	3.548.122.556,00	3.117.660.224,00	(430.462.332,00)	87,87
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.521.160.400,00	3.095.269.224,00	(425.891.176,00)	87,90
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.220.316.827,00	2.030.031.765,00	(190.285.062,00)	91,43
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.843.573,00	1.065.237.459,00	(235.606.114,00)	81,89
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	26.962.156,00	22.391.000,00	(4.571.156,00)	83,05
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.962.156,00	22.391.000,00	(4.571.156,00)	83,05
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.214.658.000,00	281.342.300,00	(933.315.700,00)	23,16
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.214.658.000,00	281.342.300,00	(933.315.700,00)	23,16
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.214.658.000,00	281.342.300,00	(933.315.700,00)	23,16
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	34.200.000,00	(15.800.000,00)	68,40
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.200.000,00	(15.800.000,00)	68,40
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.164.658.000,00	247.142.300,00	(917.515.700,00)	21,22
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.154.658.000,00	237.142.300,00	(917.515.700,00)	20,54
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.960.165.060,00	17.405.927.238,00	(1.554.237.822,00)	91,80
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.960.165.060,00	17.405.927.238,00	(1.554.237.822,00)	91,80
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	18.960.165.060,00	17.405.927.238,00	(1.554.237.822,00)	91,80
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.871.569.670,00	17.341.426.248,00	(1.530.143.422,00)	91,89
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.301.091.490,00	4.950.815.397,00	(350.276.093,00)	93,39
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.570.478.180,00	12.390.610.851,00	(1.179.867.329,00)	91,31
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	88.595.390,00	64.500.990,00	(24.094.400,00)	72,80
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.500.990,00	64.500.990,00	-	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.379.400,00	-	(12.379.400,00)	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.715.000,00	-	(11.715.000,00)	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.615.409.045,00	3.526.646.397,00	(88.762.648,00)	97,54

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.615.409.045,00	3.526.646.397,00	(88.762.648,00)	97,54
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	3.615.409.045,00	3.526.646.397,00	(88.762.648,00)	97,54
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.512.764.045,00	3.424.661.397,00	(88.102.648,00)	97,49
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.925.268.545,00	1.877.248.928,00	(48.019.617,00)	97,51
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.587.495.500,00	1.547.412.469,00	(40.083.031,00)	97,48
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	102.645.000,00	101.985.000,00	(660.000,00)	99,36
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.645.000,00	101.985.000,00	(660.000,00)	99,36
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.016.498.138,00	5.943.562.852,00	(1.072.935.286,00)	84,71
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.016.498.138,00	5.943.562.852,00	(1.072.935.286,00)	84,71
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	7.016.498.138,00	5.943.562.852,00	(1.072.935.286,00)	84,71
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.574.904.688,00	5.538.511.178,00	(1.036.393.510,00)	84,24
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.207.904.014,00	1.730.776.398,00	(477.127.616,00)	78,39
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.367.000.674,00	3.807.734.780,00	(559.265.894,00)	87,19
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	441.593.450,00	405.051.674,00	(36.541.776,00)	91,73
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.593.450,00	207.096.000,00	(29.497.450,00)	87,53
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.000.000,00	197.955.674,00	(7.044.326,00)	96,56
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.363.419.150,00	9.767.015.682,00	(1.596.403.468,00)	85,95
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000		DINAS PERHUBUNGAN	11.363.419.150,00	9.767.015.682,00	(1.596.403.468,00)	85,95
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	11.363.419.150,00	9.767.015.682,00	(1.596.403.468,00)	85,95
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.255.876.980,00	9.168.735.822,00	(1.087.141.158,00)	89,40
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.607.120.100,00	3.416.228.543,00	(190.891.557,00)	94,71
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.648.756.880,00	5.752.507.279,00	(896.249.601,00)	86,52
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.107.542.170,00	598.279.860,00	(509.262.310,00)	54,02
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.704.170,00	399.128.070,00	(58.576.100,00)	87,20
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	649.838.000,00	199.151.790,00	(450.686.210,00)	30,65
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.745.091.429,00	16.786.248.300,00	(958.843.129,00)	94,60
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.745.091.429,00	16.786.248.300,00	(958.843.129,00)	94,60
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5	BELANJA DAERAH	17.745.091.429,00	16.786.248.300,00	(958.843.129,00)	94,60



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.278.684.429,00	16.599.282.300,00	(679.402.129,00)	96,07
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.941.823.029,00	2.617.528.657,00	(324.294.372,00)	88,98
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.336.861.400,00	13.981.753.643,00	(355.107.757,00)	97,52
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	466.407.000,00	186.966.000,00	(279.441.000,00)	40,09
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.907.000,00	186.966.000,00	(135.941.000,00)	57,90
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.500.000,00	-	(143.500.000,00)	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.477.800.000,00	2.551.639.220,00	(926.160.780,00)	73,37
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000		DINAS TENAGA KERJA	3.477.800.000,00	2.551.639.220,00	(926.160.780,00)	73,37
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	3.477.800.000,00	2.551.639.220,00	(926.160.780,00)	73,37
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.099.090.200,00	2.172.929.420,00	(926.160.780,00)	70,12
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.099.090.200,00	2.172.929.420,00	(926.160.780,00)	70,12
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	378.709.800,00	378.709.800,00	-	100,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	378.709.800,00	378.709.800,00	-	100,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.538.759.476,00	5.169.704.506,00	(369.054.970,00)	93,34
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.538.759.476,00	5.169.704.506,00	(369.054.970,00)	93,34
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	5.538.759.476,00	5.169.704.506,00	(369.054.970,00)	93,34
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.249.817.685,00	4.921.886.306,00	(327.931.379,00)	93,75
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.163.197.709,00	2.952.176.168,00	(211.021.541,00)	93,33
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.086.619.976,00	1.969.710.138,00	(116.909.838,00)	94,40
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	288.941.791,00	247.818.200,00	(41.123.591,00)	85,77
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.941.791,00	247.818.200,00	(41.123.591,00)	85,77
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.076.607.018,00	11.442.075.071,00	(634.531.947,00)	94,75
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	12.076.607.018,00	11.442.075.071,00	(634.531.947,00)	94,75
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	12.076.607.018,00	11.442.075.071,00	(634.531.947,00)	94,75
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.894.790.198,00	9.602.326.702,00	(292.463.496,00)	97,04
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.189.183.215,00	3.085.109.569,00	(104.073.646,00)	96,74
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.755.606.983,00	4.567.217.133,00	(188.389.850,00)	96,04
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.181.816.820,00	1.839.748.369,00	(342.068.451,00)	84,32
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.699.500,00	35.000.000,00	(247.699.500,00)	12,38
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.899.117.320,00	1.804.748.369,00	(94.368.951,00)	95,03
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.326.600,00	131.791.207,00	(43.535.393,00)	75,17
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	175.326.600,00	131.791.207,00	(43.535.393,00)	75,17
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	5	BELANJA DAERAH	175.326.600,00	131.791.207,00	(43.535.393,00)	75,17
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	133.226.600,00	131.791.207,00	(1.435.393,00)	98,92
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.226.600,00	131.791.207,00	(1.435.393,00)	98,92
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	42.100.000,00	-	(42.100.000,00)	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.100.000,00	-	(42.100.000,00)	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	65.933.500,00	65.610.481,00	(323.019,00)	99,51
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.933.500,00	65.610.481,00	(323.019,00)	99,51
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	5	BELANJA DAERAH	65.933.500,00	65.610.481,00	(323.019,00)	99,51
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	65.933.500,00	65.610.481,00	(323.019,00)	99,51
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.933.500,00	65.610.481,00	(323.019,00)	99,51
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.047.579.100,00	1.017.096.400,00	(30.482.700,00)	97,09
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.047.579.100,00	1.017.096.400,00	(30.482.700,00)	97,09
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.047.579.100,00	1.017.096.400,00	(30.482.700,00)	97,09
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	521.311.000,00	507.065.800,00	(14.245.200,00)	97,27
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.311.000,00	507.065.800,00	(14.245.200,00)	97,27
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	526.268.100,00	510.030.600,00	(16.237.500,00)	96,91
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	526.268.100,00	510.030.600,00	(16.237.500,00)	96,91
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.606.333.710,00	13.859.271.017,00	(747.062.693,00)	94,89
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000		DINAS PERPUSTAKAAN	14.606.333.710,00	13.859.271.017,00	(747.062.693,00)	94,89
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	14.606.333.710,00	13.859.271.017,00	(747.062.693,00)	94,89
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.350.952.910,00	3.174.444.433,00	(176.508.477,00)	94,73
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.490.920.910,00	2.360.647.030,00	(130.273.880,00)	94,77
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.032.000,00	813.797.403,00	(46.234.597,00)	94,62
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.255.380.800,00	10.684.826.584,00	(570.554.216,00)	94,93
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	412.503.216,00	(387.496.784,00)	51,56

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.455.380.800,00	10.272.323.368,00	(183.057.432,00)	98,25
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	61.868.077,00	50.078.100,00	(11.789.977,00)	80,94
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000		DINAS PERPUSTAKAAN	61.868.077,00	50.078.100,00	(11.789.977,00)	80,94
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	61.868.077,00	50.078.100,00	(11.789.977,00)	80,94
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	61.868.077,00	50.078.100,00	(11.789.977,00)	80,94
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.868.077,00	50.078.100,00	(11.789.977,00)	80,94
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.792.122.942,00	20.808.900.915,00	(4.983.222.027,00)	80,68
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	857.566.800,00	619.031.798,00	(238.535.002,00)	72,18
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000		DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	857.566.800,00	619.031.798,00	(238.535.002,00)	72,18
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	857.566.800,00	619.031.798,00	(238.535.002,00)	72,18
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	847.566.800,00	609.031.798,00	(238.535.002,00)	71,86
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.566.800,00	609.031.798,00	(238.535.002,00)	71,86
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.957.611.600,00	1.882.298.280,00	(75.313.320,00)	96,15
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.957.611.600,00	1.882.298.280,00	(75.313.320,00)	96,15
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	1.957.611.600,00	1.882.298.280,00	(75.313.320,00)	96,15
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.952.646.200,00	1.882.298.280,00	(70.347.920,00)	96,40
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.646.200,00	1.882.298.280,00	(70.347.920,00)	96,40
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.965.400,00	-	(4.965.400,00)	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.965.400,00	-	(4.965.400,00)	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.904.803.462,00	10.835.989.256,00	(1.068.814.206,00)	91,02
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000		DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	11.904.803.462,00	10.835.989.256,00	(1.068.814.206,00)	91,02
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	11.904.803.462,00	10.835.989.256,00	(1.068.814.206,00)	91,02
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.417.231.862,00	9.699.896.320,00	(717.335.542,00)	93,11
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.199.661.066,00	6.005.830.497,00	(193.830.569,00)	96,87
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.217.570.796,00	3.694.065.823,00	(523.504.973,00)	87,59
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.487.571.600,00	1.136.092.936,00	(351.478.664,00)	76,37
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.985.500,00	300.259.700,00	(2.725.800,00)	99,10
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.090.456.300,00	760.153.436,00	(330.302.864,00)	69,71

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.129.800,00	75.679.800,00	(18.450.000,00)	80,40
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.745.888.190,00	6.384.770.754,00	(361.117.436,00)	94,65
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000		DINAS PERDAGANGAN	6.745.888.190,00	6.384.770.754,00	(361.117.436,00)	94,65
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	6.745.888.190,00	6.384.770.754,00	(361.117.436,00)	94,65
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.520.888.190,00	6.187.190.754,00	(333.697.436,00)	94,88
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.525.527.989,00	3.282.498.934,00	(243.029.055,00)	93,11
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.360.201,00	2.904.691.820,00	(90.668.381,00)	96,97
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	197.580.000,00	(27.420.000,00)	87,81
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000,00	197.580.000,00	(27.420.000,00)	87,81
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	(3.239.442.063,00)	25,12
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000		DINAS PERDAGANGAN	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	(3.239.442.063,00)	25,12
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	(3.239.442.063,00)	25,12
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	(3.239.442.063,00)	25,12
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	(3.239.442.063,00)	25,12
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	98.396.181.796,00	92.097.448.174,00	(6.298.733.622,00)	93,60
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	49.583.315.996,00	46.887.974.023,00	(2.695.341.973,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000		SEKRETARIAT DAERAH KOTA	49.583.315.996,00	46.887.974.023,00	(2.695.341.973,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	49.583.315.996,00	46.887.974.023,00	(2.695.341.973,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	49.133.038.996,00	46.445.704.023,00	(2.687.334.973,00)	94,53
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.764.448.612,00	11.106.367.581,00	(658.081.031,00)	94,41
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.463.590.384,00	34.434.336.442,00	(2.029.253.942,00)	94,43
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.05	Belanja Hibah	905.000.000,00	905.000.000,00	-	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	450.277.000,00	442.270.000,00	(8.007.000,00)	98,22
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.329.000,00	442.270.000,00	(3.059.000,00)	99,31
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.948.000,00	-	(4.948.000,00)	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	48.812.865.800,00	45.209.474.151,00	(3.603.391.649,00)	92,62
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000		SEKRETARIAT DPRD	48.812.865.800,00	45.209.474.151,00	(3.603.391.649,00)	92,62
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	48.812.865.800,00	45.209.474.151,00	(3.603.391.649,00)	92,62
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	47.713.232.230,00	44.504.548.201,00	(3.208.684.029,00)	93,28
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.408.390.917,00	13.484.168.785,00	(1.924.222.132,00)	87,51

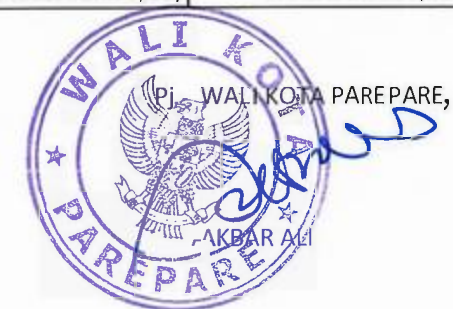


KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.304.841.313,00	31.020.379.416,00	(1.284.461.897,00)	96,02
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.099.633.570,00	704.925.950,00	(394.707.620,00)	64,11
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	667.527.500,00	308.075.200,00	(359.452.300,00)	46,15
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	432.106.070,00	396.850.750,00	(35.255.320,00)	91,84
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	71.139.379.503,00	57.466.310.985,00	(13.673.068.518,00)	80,78
5.01			PERENCANAAN	6.805.469.752,00	6.281.874.734,00	(523.595.018,00)	92,31
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.805.469.752,00	6.281.874.734,00	(523.595.018,00)	92,31
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	6.805.469.752,00	6.281.874.734,00	(523.595.018,00)	92,31
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.804.620.752,00	6.281.025.734,00	(523.595.018,00)	92,31
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.213.075.452,00	2.929.046.046,00	(284.029.406,00)	91,16
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.591.545.300,00	3.351.979.688,00	(239.565.612,00)	93,33
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	849.000,00	849.000,00	-	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	849.000,00	849.000,00	-	100,00
5.02			KEUANGAN	55.887.764.326,00	43.765.249.085,00	(12.122.515.241,00)	78,31
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	55.887.764.326,00	43.765.249.085,00	(12.122.515.241,00)	78,31
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	55.887.764.326,00	43.765.249.085,00	(12.122.515.241,00)	78,31
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.979.231.386,00	38.149.615.529,00	(7.829.615.857,00)	82,97
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	24.747.993.703,00	20.376.298.102,00	(4.371.695.601,00)	82,34
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.231.237.683,00	16.863.860.612,00	(3.367.377.071,00)	83,36
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.1.03	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	909.456.815,00	(90.543.185,00)	90,95
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.138.532.940,00	1.007.475.194,00	(131.057.746,00)	88,49
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	926.532.940,00	796.064.911,00	(130.468.029,00)	85,92
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.000.000,00	211.410.283,00	(589.717,00)	99,72
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	(4.161.841.638,00)	52,54
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	(4.161.841.638,00)	52,54
5.03			KEPEGAWAIAN	7.295.968.925,00	6.396.830.671,00	(899.138.254,00)	87,68
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.295.968.925,00	6.396.830.671,00	(899.138.254,00)	87,68
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	7.295.968.925,00	6.396.830.671,00	(899.138.254,00)	87,68
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.153.116.925,00	6.258.470.171,00	(894.646.754,00)	87,49

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.316.427.225,00	3.092.498.056,00	(223.929.169,00)	93,25
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.836.689.700,00	3.165.972.115,00	(670.717.585,00)	82,52
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	142.852.000,00	138.360.500,00	(4.491.500,00)	96,86
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.852.000,00	138.360.500,00	(4.491.500,00)	96,86
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	679.245.200,00	587.668.829,00	(91.576.371,00)	86,52
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	679.245.200,00	587.668.829,00	(91.576.371,00)	86,52
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	679.245.200,00	587.668.829,00	(91.576.371,00)	86,52
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	679.245.200,00	587.668.829,00	(91.576.371,00)	86,52
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.245.200,00	587.668.829,00	(91.576.371,00)	86,52
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	470.931.300,00	434.687.666,00	(36.243.634,00)	92,30
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	470.931.300,00	434.687.666,00	(36.243.634,00)	92,30
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	470.931.300,00	434.687.666,00	(36.243.634,00)	92,30
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	470.931.300,00	434.687.666,00	(36.243.634,00)	92,30
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.931.300,00	434.687.666,00	(36.243.634,00)	92,30
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.664.284.105,00	7.180.360.085,00	(483.924.020,00)	93,69
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	7.664.284.105,00	7.180.360.085,00	(483.924.020,00)	93,69
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		INSPEKTORAT DAERAH	7.664.284.105,00	7.180.360.085,00	(483.924.020,00)	93,69
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	7.664.284.105,00	7.180.360.085,00	(483.924.020,00)	93,69
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.633.134.605,00	7.163.360.085,00	(469.774.520,00)	93,85
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.578.525.505,00	5.393.226.591,00	(185.298.914,00)	96,68
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.054.609.100,00	1.770.133.494,00	(284.475.606,00)	86,15
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.149.500,00	17.000.000,00	(14.149.500,00)	54,58
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.149.500,00	17.000.000,00	(14.149.500,00)	54,58
7			UNSUR KEWILAYAHAN	38.503.616.405,00	37.253.746.100,00	(1.249.870.305,00)	96,75
7.01			KECAMATAN	38.503.616.405,00	37.253.746.100,00	(1.249.870.305,00)	96,75
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		KECAMATAN BACUKIKI	7.581.469.685,00	7.445.464.045,00	(136.005.640,00)	98,21
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	7.581.469.685,00	7.445.464.045,00	(136.005.640,00)	98,21
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.428.469.685,00	7.292.464.045,00	(136.005.640,00)	98,17
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.475.247.885,00	3.359.610.794,00	(115.637.091,00)	96,67

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.953.221.800,00	3.932.853.251,00	(20.368.549,00)	99,48
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2	BELANJA MODAL	153.000.000,00	153.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		KECAMATAN BACUKIKI BARAT	10.260.506.970,00	9.903.941.464,00	(356.565.506,00)	96,52
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5	BELANJA DAERAH	10.260.506.970,00	9.903.941.464,00	(356.565.506,00)	96,52
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.117.106.896,00	9.768.113.971,00	(348.992.925,00)	96,55
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.687.447.270,00	4.484.386.694,00	(203.060.576,00)	95,67
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.429.659.626,00	5.283.727.277,00	(145.932.349,00)	97,31
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2	BELANJA MODAL	143.400.074,00	135.827.493,00	(7.572.581,00)	94,72
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.375.000,00	25.375.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.572.400,00	35.000.000,00	(7.572.400,00)	82,21
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.452.674,00	75.452.493,00	(181,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		KECAMATAN SOREANG	11.498.098.780,00	11.121.007.677,00	(377.091.103,00)	96,72
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5	BELANJA DAERAH	11.498.098.780,00	11.121.007.677,00	(377.091.103,00)	96,72
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.189.698.780,00	10.812.766.956,00	(376.931.824,00)	96,63
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.359.474.780,00	5.046.735.178,00	(312.739.602,00)	94,16
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.830.224.000,00	5.766.031.778,00	(64.192.222,00)	98,90
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2	BELANJA MODAL	308.400.000,00	308.240.721,00	(159.279,00)	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	268.400.000,00	268.240.721,00	(159.279,00)	99,94
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		KECAMATAN UJUNG	9.163.540.970,00	8.783.332.914,00	(380.208.056,00)	95,85
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5	BELANJA DAERAH	9.163.540.970,00	8.783.332.914,00	(380.208.056,00)	95,85
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.133.640.970,00	8.753.473.914,00	(380.167.056,00)	95,84
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.837.665.670,00	3.643.426.082,00	(194.239.588,00)	94,94
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.295.975.300,00	5.110.047.832,00	(185.927.468,00)	96,49
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.900.000,00	29.859.000,00	(41.000,00)	99,86
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.900.000,00	29.859.000,00	(41.000,00)	99,86
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	(321.053.852,00)	98,13
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	(321.053.852,00)	98,13

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	(321.053.852,00)	98,13
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	5	BELANJA DAERAH	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	(321.053.852,00)	98,13
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	(321.053.852,00)	98,13
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.679.509.881,00	2.518.564.291,00	(160.945.590,00)	93,99
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.556.696.829,00	3.396.588.567,00	(160.108.262,00)	95,50
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.05	Belanja Hibah	10.915.730.904,00	10.915.730.904,00	-	100,00
			Jumlah	(9.124.978.048,00)	(1.481.061.397,80)	7.643.916.650,20	16,23



Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

PEMERINTAHAN KOTA PARE PARE

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TA 2023



URAIAN 1	ANGGARAN 2,00	REALISASI 2023 3	%2023 4 = (4 / 3) * 100	REALISASI 2022 5
PENDAPATAN	982.802.420.504,00	896.117.199.247,20	91,18	906.540.019.393,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.161.704.095,00	196.738.798.401,95	106,83	173.758.437.058,66
Pajak Daerah	40.267.000.000,00	42.384.557.470,55	105,26	38.817.569.022,58
Retribusi Daerah	9.135.735.285,00	7.347.758.332,00	80,43	7.149.830.207,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.850.373.578,00	8.850.373.578,00	100,00	8.943.966.033,00
Lain-lain PAD yang Sah	125.908.595.232,00	138.156.109.021,40	109,73	118.847.071.795,24
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.161.704.095,00	196.738.798.401,95	106,83	173.758.437.058,66
PENDAPATAN TRANSFER	798.640.716.409,00	699.378.400.845,25	87,57	720.190.932.835,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	8.402.237.000,00	9.962.901.171,00	118,57	14.711.095.448,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.314.268.000,00	5.240.488.402,00	158,12	12.511.778.497,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	445.715.665.000,00	445.268.434.128,00	99,90	428.796.588.152,00
Dana Alokasi Khusus	151.196.269.000,00	144.020.057.038,00	95,25	147.694.736.921,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DANA PERIMBANGAN	608.628.439.000,00	604.491.880.739,00	99,32	603.714.199.018,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
DID	28.262.493.000,00	28.262.493.000,00	100,00	20.713.617.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	28.262.493.000,00	28.262.493.000,00	100,00	20.713.617.000,00



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2,00	3	4 = (4 / 3) * 100	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	153.868.634.409,00	63.627.820.106,25	41,35	61.815.605.817,00
Bantuan Keuangan	7.881.150.000,00	2.996.207.000,00	38,02	33.947.511.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	7.881.150.000,00	2.996.207.000,00	38,02	33.947.511.000,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	161.749.784.409,00	66.624.027.106,25	41,19	95.763.116.817,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	798.640.716.409,00	699.378.400.845,25	87,57	720.190.932.835,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	12.590.649.500,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	12.590.649.500,00
JUMLAH PENDAPATAN	982.802.420.504,00	896.117.199.247,20	91,18	906.540.019.393,66
BELANJA	991.927.398.552,00	897.598.260.645,00	90,49	904.426.536.279,66
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	366.998.035.648,00	337.773.100.480,00	92,04	337.161.135.455,00
Belanja Barang dan Jasa	404.910.963.460,00	390.492.172.631,00	96,44	353.802.391.174,00
Belanja Bunga	1.000.000.000,00	909.456.815,00	90,95	765.454.390,61
Belanja Hibah	17.793.530.904,00	18.031.878.506,00	101,34	7.522.550.135,00
Belanja Bantuan Sosial	325.020.000,00	284.074.000,00	87,40	1.780.772.500,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	791.027.550.012,00	747.490.682.432,00	94,50	701.032.303.654,61
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	1.154.658.000,00	237.142.300,00	20,54	667.419.796,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.783.541.676,00	28.624.066.144,00	92,98	56.762.798.742,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.496.014.030,00	39.639.645.218,00	85,25	56.543.087.027,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.581.534.478,00	73.898.362.333,00	66,83	85.004.417.795,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	99,55	104.750.000,00
Belanja Aset Lainnya	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	99,55	104.750.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	192.129.848.540,00	145.499.419.851,00	75,73	199.082.473.360,05
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	52,54	4.311.759.265,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	52,54	4.311.759.265,00
JUMLAH BELANJA	991.927.398.552,00	897.598.260.645,00	90,49	904.426.536.279,66

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%2023	REALISASI 2022
1	2,00	3	4 = (4 / 3) * 100	5
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	991.927.398.552,00	897.598.260.645,00	90,49	904.426.536.279,66
SURPLUS/DEFISIT	(9.124.978.048,00)	(1.481.061.397,80)	16,23	2.113.483.114,00
PEMBIAYAAN DAERAH	9.124.978.048,00	14.373.103.018,39	157,51	15.027.494.934,39
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	17.140.978.048,00	17.138.960.048,39	99,99	17.793.351.964,76
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.140.978.048,00	17.138.960.048,39	99,99	17.793.351.964,76
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.766.000.000,00	2.765.857.030,00	99,99	2.765.857.030,37
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000,00	2.765.857.030,00	34,50	2.765.857.030,37
PEMBIAYAAN NETTO	9.124.978.048,00	14.373.103.018,39	157,51	15.027.494.934,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	12.892.041.620,59	0,00	17.140.978.048,39


 Pj. WALI KOTAPAREPARE,  
 A. KARALI

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PARE PARE**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	454.486.205.542,00	440.299.047.387,00	168.796.696.979,00	125.894.488.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	178.646.154.697,00	167.856.388.909,00	10.811.787.988,00	10.450.162.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	178.646.154.697,00	167.856.388.909,00	10.811.787.988,00	10.450.162.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.585.573.195,00	145.955.022.406,00	225.514.500,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153.539.920.665,00	143.115.241.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	153.448.120.665,00	143.023.441.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	36.534.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	27.534.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.164.744.200,00	1.156.600.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.900.000,00	143.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.000.000,00	114.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	233.800.000,00	233.790.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.044.200,00	555.539.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	225.514.500,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	50.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	98.614.500,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.250.932,00	1.089.118.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.000.000,00	87.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	541.650.532,00	505.955.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.600.400,00	495.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.377.398,00	542.248.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.348.898,00	20.752.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	412.369.000,00	337.304.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.192.000,00	50.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.467.500,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.040.581.502,00	21.881.366.503,00	10.586.273.488,00	10.430.062.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12.342.578.144,00	12.214.391.701,00	5.994.877.756,00	5.920.289.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	364.523.900,00	308.161.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	2.644.777.000,00	2.613.657.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	90.000.000,00	89.752.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	163.150.000,00	163.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000,00	69.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	155.600.000,00	144.890.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	735.200.000,00	669.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	263.505.000,00	256.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	92.100.000,00	90.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.773.023.144,00	10.730.751.110,00	2.985.576.856,00	2.998.471.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.932.903.358,00	6.738.308.302,00	4.541.805.642,00	4.465.886.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	109.504.000,00	105.357.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	3.220.009.000,00	3.154.945.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	71.500.000,00	71.311.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	304.451.000,00	301.756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	201.750.000,00	187.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	349.200.000,00	333.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	182.295.000,00	176.904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	95.123.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.574.707.358,00	5.473.835.923,00	1.212.292.642,00	1.205.584.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.164.850.000,00	2.331.208.300,00	49.590.090,00	43.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	0,00	49.590.090,00	43.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.483.800.000,00	1.663.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	613.200.000,00	607.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	67.850.000,00	60.194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.250.000,00	597.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	29.650.000,00	29.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	538.600.000,00	537.668.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32.000.000,00	30.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	223.685.824.957,00	229.260.204.662,00	35.555.886.166,00	34.969.328.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	63.081.746.002,00	56.847.295.939,00	2.747.220.586,00	2.439.056.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.714.791.498,00	29.566.888.916,00	231.186.500,00	159.440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.405.800,00	11.187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.043.100,00	2.022.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.687.700,00	1.683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.687.700,00	1.679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.687.700,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000,00	580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.619.235.480,00	27.919.995.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.597.958.280,00	27.908.892.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.828.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.699.800,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.049.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.699.600,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00	42.834.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	42.834.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	603.087.000,00	483.561.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.957.000,00	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.108.500,00	9.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.625.000,00	22.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	36.860.500,00	31.559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.536.000,00	396.192.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	229.686.500,00	159.440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	229.686.500,00	159.440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.463.218,00	742.604.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.999.800,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.377.418,00	216.394.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.086.000,00	502.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.600.000,00	366.704.695,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379.500.000,00	248.931.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	8.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	106.676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.661.754.104,00	26.119.439.917,00	2.516.034.086,00	2.279.615.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.829.055.541,00	2.776.586.060,00	2.386.797.006,00	2.216.058.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	99.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	776.953.029,00	770.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	1.510.425.977,00	1.445.108.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.731.538.906,00	1.691.384.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.094.348.635,00	1.085.201.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.829.320.063,00	23.339.764.857,00	129.237.080,00	63.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.000.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.819.900,00	4.784.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.542.800,00	2.789.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.154.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.205.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.000.000,00	4.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.999.500,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	144.110.700,00	139.116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.999.600,00	4.939.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86.770.000,00	84.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	61.000.000,00	56.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.522.700,00	162.652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.912.000,00	13.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.587.700,00	9.912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	46.370.200,00	29.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	29.649.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	59.449.800,00	58.586.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	489.782.100,00	403.787.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.072.700.018,00	19.827.104.260,00	53.557.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.550.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	127.000.000,00	119.756.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.383.622.345,00	2.339.679.960,00	75.679.350,00	63.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9.459.500,00	8.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3.378.500,00	3.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.378.500,00	3.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	527.124.300,00	293.633.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	69.186.000,00	48.085.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	23.181.000,00	13.830.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	46.005.000,00	34.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	452.938.500,00	240.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	452.938.500,00	240.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	330.908.000,00	272.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	63.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	63.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	267.178.000,00	208.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	267.178.000,00	208.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	847.168.100,00	594.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.356.500,00	136.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	196.356.500,00	136.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.811.600,00	458.311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	650.811.600,00	458.311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		UPTD PUSKESMAS LAKESSI	2.414.377.034,00	2.034.915.324,00	66.762.500,00	66.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.271.977.034,00	1.892.515.324,00	66.762.500,00	66.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.938.000,00	7.775.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.938.000,00	7.775.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.264.039.034,00	1.884.739.774,00	66.762.500,00	66.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84.300.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.000.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.800.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.100.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.450.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.298.050,00	128.804.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.964.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.850.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146.450.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	151.610.000,00	92.771.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.514.216.184,00	1.401.333.474,00	66.762.500,00	66.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		UPTD PUSKESMAS CEMPAE	2.625.813.953,00	2.331.863.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.492.343.953,00	2.210.533.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.552.511,00	13.691.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.552.511,00	13.691.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.475.791.442,00	2.196.841.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.400.000,00	59.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.700.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.800.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.800.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.850.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	147.306.250,00	86.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.800.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	58.410.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.750.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.957.600,00	53.607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	245.070.000,00	188.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.771.947.592,00	1.653.720.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	133.470.000,00	121.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.770.000,00	25.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37.770.000,00	25.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		UPTD PUSKESMAS LAPADDE	2.863.275.954,00	2.460.971.204,00	55.872.000,00	55.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.496.855.954,00	2.151.146.204,00	55.872.000,00	55.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.885.000,00	19.069.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.885.000,00	19.069.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.465.970.954,00	2.132.076.404,00	55.872.000,00	55.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.490.000,00	58.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.650.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.700.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.150.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	310.979.600,00	210.869.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.800.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.600.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.187.699,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.450.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	151.250.000,00	123.252.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.643.313.655,00	1.462.104.854,00	55.872.000,00	55.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	366.420.000,00	309.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.520.000,00	294.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	347.520.000,00	294.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.900.000,00	15.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.900.000,00	15.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO	2.281.408.059,00	2.109.383.160,00	41.827.200,00	41.827.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.106.110.259,00	1.966.592.360,00	41.827.200,00	41.827.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.680.534,00	10.156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.680.534,00	10.156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.078.429.725,00	1.956.435.860,00	41.827.200,00	41.827.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.200.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.200.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	101.930.000,00	75.829.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.250.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.900.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80.695.000,00	68.881.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.730.854.725,00	1.678.475.510,00	41.827.200,00	41.827.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	175.297.800,00	142.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.412.000,00	134.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	167.412.000,00	134.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.885.800,00	7.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.885.800,00	7.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		UPTD PUSKESMAS LOMPOE	2.170.749.566,00	1.794.082.423,00	50.145.500,00	49.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.077.149.566,00	1.701.382.423,00	50.145.500,00	49.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.547.776,00	18.237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.547.776,00	18.237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.054.601.790,00	1.683.145.123,00	50.145.500,00	49.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.800.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.000.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.400.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.400.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	258.204.250,00	211.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.700.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.549.800,00	87.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	170.740.000,00	113.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.318.907.740,00	1.135.312.623,00	50.145.500,00	49.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	93.600.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.600.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	93.600.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		UPTD PUSKESMAS LUMPUE	3.365.114.839,00	2.943.837.574,00	29.800.000,00	29.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.142.814.839,00	2.754.237.574,00	29.800.000,00	29.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.287.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.287.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.119.527.168,00	2.754.237.574,00	29.800.000,00	29.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.600.000,00	77.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	41.775.000,00	41.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	489.176.168,00	353.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.000.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.000.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	115.440.000,00	99.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.195.686.000,00	2.020.807.574,00	29.800.000,00	29.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	222.300.000,00	189.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.200.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	178.200.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.100.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.100.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		UPTD PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN	977.231.530,00	811.928.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	897.806.530,00	734.188.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.524.000,00	22.494.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.524.000,00	22.494.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	875.282.530,00	711.694.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.280.000,00	29.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.900.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.200.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.300.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.115.250,00	71.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.050.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.400.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.550.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	102.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.823.750,00	14.823.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	503.663.530,00	417.347.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	79.425.000,00	77.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.425.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.425.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		UPTD PUSKESMAS LEMOE	1.289.822.474,00	1.048.140.245,00	91.011.777,00	15.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.208.622.474,00	971.940.245,00	91.011.777,00	15.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.211.845,00	3.590.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	23.211.845,00	3.590.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.185.410.629,00	968.349.395,00	91.011.777,00	15.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.440.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	62.500.000,00	59.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.900.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	133.945.057,00	105.434.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.500.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70.300.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	52.797.000,00	45.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	708.378.572,00	574.678.896,00	91.011.777,00	15.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	81.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE	24.023.424.976,00	25.277.505.326,00	9.783.445.112,00	11.325.283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.135.963.376,00	17.260.388.553,00	3.120.487.500,00	4.995.260.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.256.450.876,00	4.070.450.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.256.450.876,00	4.070.450.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.879.512.500,00	13.189.938.493,00	3.120.487.500,00	4.995.260.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.879.512.500,00	13.189.938.493,00	3.120.487.500,00	4.995.260.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.409.550.100,00	7.546.517.264,00	6.662.957.612,00	6.330.022.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.675.257.848,00	1.653.702.273,00	6.345.657.612,00	6.249.322.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	200.000.000,00	198.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.196.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	200.000.000,00	198.723.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	745.657.612,00	656.092.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	999.250.448,00	979.339.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	376.007.400,00	374.366.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	299.996.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.734.292.252,00	5.892.814.991,00	317.300.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64.783.000,00	56.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	700.000.000,00	316.282.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.969.509.252,00	5.519.917.511,00	317.300.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	407.931.500,00	401.419.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	407.931.500,00	401.419.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	349.310.000,00	346.359.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	58.621.500,00	55.059.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.980.000,00	69.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.980.000,00	69.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.980.000,00	69.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		RSUD. A. MAKKASAU	118.592.860.570,00	131.600.281.250,00	22.689.801.491,00	20.945.688.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.446.339.102,00	27.277.565.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.446.339.102,00	27.277.565.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.446.339.102,00	27.277.565.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.146.521.468,00	104.322.715.338,00	22.689.801.491,00	20.945.688.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	12.665.051.295,00	11.257.927.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	7.500.000.000,00	7.408.293.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	5.165.051.295,00	3.849.633.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.146.521.468,00	104.322.715.338,00	10.024.750.196,00	9.687.761.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000,00	37.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.219.000.000,00	3.555.523.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	85.827.521.468,00	100.729.841.811,00	10.024.750.196,00	9.687.761.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.971.469.645,00	8.606.840.788,00	101.638.635.335,00	69.392.405.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM	10.971.469.645,00	8.606.840.788,00	101.638.635.335,00	69.392.405.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.153.433.933,00	5.878.185.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000,00	28.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.200.733,00	4.529.903.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.290.960.733,00	4.214.263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	383.240.000,00	307.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	5.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000,00	86.802.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	55.798.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	21.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.668.000,00	452.247.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.900.000,00	21.899.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113.218.000,00	113.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	29.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.950.000,00	240.018.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.897.650,00	302.506.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	246.038.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.897.650,00	31.467.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.667.550,00	468.726.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.487.550,00	198.164.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	81.500.000,00	81.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.300.000,00	125.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	200.000.000,00	199.983.800,00	1.952.003.870,00	1.203.615.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.850.003.870,00	1.187.878.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,00	0,00	1.364.113.870,00	1.136.351.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,00	0,00	300.000.000,00	13.171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0,00	0,00	185.890.000,00	38.355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.983.800,00	102.000.000,00	15.736.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	102.000.000,00	15.736.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	199.983.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	261.000.000,00	13.271.800,00	4.162.324.800,00	3.995.592.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	261.000.000,00	13.271.800,00	4.162.324.800,00	3.995.592.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	261.000.000,00	13.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0,00	0,00	4.156.174.800,00	3.989.442.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.001.500.000,00	726.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.001.500.000,00	726.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	175.000.000,00	90.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	639.000.000,00	635.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	200.000.000,00	200.000.000,00	1.831.980.860,00	1.453.327.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	1.831.980.860,00	1.453.327.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	1.236.665.410,00	1.006.317.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	0,00	0,00	260.284.000,00	217.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	0,00	0,00	335.031.450,00	229.653.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	110.000.000,00	79.406.260,00	6.419.039.100,00	4.383.593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	110.000.000,00	79.406.260,00	6.419.039.100,00	4.383.593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	110.000.000,00	79.406.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.021.000.000,00	1.020.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	5.398.039.100,00	3.362.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	0,00	7.218.408.750,00	3.658.191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	7.218.408.750,00	3.658.191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	0,00	7.218.408.750,00	3.658.191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	725.000.000,00	508.470.000,00	79.992.877.955,00	54.698.085.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	725.000.000,00	508.470.000,00	79.992.877.955,00	54.698.085.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	8.836.250.319,00	4.656.127.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	7.913.362.306,00	3.250.034.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	0,00	0,00	49.212.054.730,00	33.700.993.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	600.000.000,00	414.013.000,00	914.229.600,00	913.942.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	12.486.981.000,00	11.582.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	0,00	0,00	630.000.000,00	594.307.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	125.000.000,00	94.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	125.000.000,00	70.247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	55.317.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	55.317.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10.000.000,00	9.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	15.000.000,00	5.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.195.535.712,00	931.235.856,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	737.666.712,00	620.433.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	707.666.712,00	615.433.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	157.869.000,00	72.951.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	75.000.000,00	72.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	82.869.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	237.851.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	73.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000,00	164.771.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.869.191.123,00	11.726.210.663,00	20.672.428.490,00	11.012.650.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	14.869.191.123,00	11.726.210.663,00	20.672.428.490,00	11.012.650.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.269.318.950,00	3.487.682.294,00	72.066.000,00	19.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.250.000,00	17.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.233.206.350,00	2.711.880.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.201.906.350,00	2.681.405.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	35.634.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00	35.634.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.665.600,00	332.902.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.966.000,00	9.460.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	10.687.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00	24.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	40.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.249.600,00	227.389.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	72.066.000,00	19.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	13.567.000,00	13.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	58.499.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.297.000,00	194.096.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	9.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.315.000,00	60.922.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.982.000,00	123.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.900.000,00	195.484.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.650.000,00	114.962.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.250.000,00	25.521.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.041.000,00	14.877.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.041.000,00	14.877.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	9.100.000,00	7.277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	20.941.000,00	7.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.246.365.300,00	1.965.832.169,00	13.724.228.590,00	6.436.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	13.724.228.590,00	6.436.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	13.724.228.590,00	6.436.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.246.365.300,00	1.965.832.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	772.789.500,00	492.332.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.473.575.800,00	1.473.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.280.265.873,00	6.247.575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.280.265.873,00	6.247.575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.280.265.873,00	6.247.575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.200.000,00	10.243.000,00	6.876.133.900,00	4.557.194.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.200.000,00	10.243.000,00	6.876.133.900,00	4.557.194.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	0,00	0,00	6.876.133.900,00	4.557.194.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.05.0000	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	23.200.000,00	10.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.159.299.565,00	16.402.143.852,00	70.000.000,00	69.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.911.004.862,00	5.584.238.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.578.191.639,00	5.256.757.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.728.000,00	7.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	988.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	988.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	988.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	988.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	988.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.570.221.119,00	3.274.167.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.549.821.119,00	3.253.767.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	44.284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.769.700,00	403.771.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.520.000,00	2.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.682.400,00	31.578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.892.900,00	40.779.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.674.400,00	313.920.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.267.567.320,00	1.248.810.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.731.000,00	7.719.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.950.320,00	68.570.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.181.886.000,00	1.172.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.905.500,00	278.020.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.574.000,00	251.119.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.001.500,00	15.570.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	332.813.223,00	327.481.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	296.696.400,00	294.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.995.000,00	14.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4.095.000,00	4.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	276.006.400,00	274.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.600.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.116.823,00	33.029.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	26.654.700,00	26.139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9.462.123,00	6.889.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.105.953.485,00	7.870.122.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.194.909.185,00	6.971.612.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.714.487.225,00	5.512.014.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.135.225,00	3.556.164.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.976.352.000,00	1.955.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.891.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	34.891.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.155.200,00	213.154.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.155.200,00	210.154.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.024.960,00	111.358.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000,00	11.096.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.504.960,00	87.842.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.241.800,00	1.092.553.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.350.000,00	110.921.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	875.891.800,00	873.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	73.552.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	911.044.300,00	898.510.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	755.790.500,00	751.291.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.632.500,00	53.859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	670.772.000,00	668.513.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.386.000,00	28.918.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	155.253.800,00	147.218.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	155.253.800,00	147.218.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.07.0000	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.142.341.218,00	2.947.782.347,00	70.000.000,00	69.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.418.125.048,00	2.266.060.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.794.500,00	17.794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.149.500,00	8.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.490.548,00	1.910.881.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.801.573.548,00	1.680.074.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	226.551.500,00	225.441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.150.500,00	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.210.600,00	163.149.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.050.500,00	2.928.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.845.000,00	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.434.500,00	8.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.640.600,00	139.713.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.036.400,00	9.025.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.400,00	3.873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.020.000,00	5.151.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.593.000,00	130.233.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.263.000,00	57.097.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.870.000,00	62.696.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.460.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	724.216.170,00	681.722.320,00	70.000.000,00	69.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	9.988.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	9.988.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	629.232.370,00	622.985.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	190.026.570,00	183.780.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	427.800.000,00	427.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.655.800,00	5.655.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	84.995.000,00	58.736.455,00	70.000.000,00	69.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.995.800,00	9.995.800,00	70.000.000,00	69.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	74.999.200,00	48.740.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.154.265.555,00	6.447.258.513,00	47.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000		DINAS SOSIAL	9.154.265.555,00	6.447.258.513,00	47.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.864.458.155,00	3.441.647.163,00	47.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.892.874.705,00	2.615.269.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.857.994.705,00	2.580.689.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.200.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.175.000,00	89.716.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.175.000,00	89.716.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.526.550,00	277.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.216.000,00	13.214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.630.850,00	20.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.652.000,00	27.650.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.360.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	58.434.500,00	58.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.233.200,00	146.263.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	47.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	16.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	31.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.756.900,00	242.367.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	12.593.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.086.900,00	57.319.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.670.000,00	172.454.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.805.000,00	195.331.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.885.000,00	132.664.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.670.000,00	27.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	21.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.250.000,00	8.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	181.048.500,00	121.894.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	181.048.500,00	121.894.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.308.500,00	65.054.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	113.740.000,00	56.840.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	87.135.000,00	74.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	87.135.000,00	74.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	87.135.000,00	74.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	832.495.000,00	639.003.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	274.111.000,00	93.887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	129.737.500,00	9.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	89.122.000,00	36.126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.251.500,00	48.257.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	558.384.000,00	545.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	32.364.000,00	20.381.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	526.020.000,00	524.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.907.187.400,00	1.922.287.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	93.788.700,00	64.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	43.962.000,00	28.758.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	49.826.700,00	35.946.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.813.398.700,00	1.857.583.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.724.800,00	116.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	111.170.300,00	78.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.500.700.000,00	1.469.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.082.803.600,00	192.140.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	152.577.200,00	130.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	152.577.200,00	130.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	122.578.700,00	104.323.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	19.502.500,00	15.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.496.000,00	10.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	129.364.300,00	117.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	129.364.300,00	117.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	129.364.300,00	117.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.889.353.189,00	84.443.624.180,00	18.107.620.477,00	15.323.450.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.080.588.034,00	4.590.299.902,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000		DINAS TENAGA KERJA	5.080.588.034,00	4.590.299.902,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.704.174.874,00	4.229.218.960,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.349.800,00	17.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.089.800,00	7.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.923.500,00	1.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.707.500,00	1.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.660.500,00	1.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.290.820,00	3.500.614.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.765.256.320,00	3.482.580.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.581.500,00	1.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.732.500,00	36.792.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.497.000,00	3.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.235.500,00	2.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	16.380.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	14.694.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.719.100,00	177.685.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.260.500,00	10.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.318.800,00	140.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.721.404,00	252.457.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.219.904,00	80.565.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.251.500,00	168.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.361.250,00	244.368.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.041.250,00	227.052.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	263.476.960,00	253.601.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	244.482.360,00	236.108.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	234.482.360,00	226.208.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	7.999.800,00	7.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	7.999.800,00	7.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.994.800,00	10.093.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.994.800,00	10.093.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	47.996.100,00	43.705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.998.800,00	33.759.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	12.999.700,00	12.841.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	12.999.400,00	9.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	11.999.700,00	11.518.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.997.300,00	9.946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.997.300,00	9.946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	64.940.100,00	63.773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.373.700,00	27.590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.378.900,00	10.050.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	8.994.900,00	8.539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8.999.900,00	8.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	36.566.400,00	36.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.677.700,00	11.677.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.995.400,00	7.720.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1.500.000,00	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	15.393.300,00	15.393.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.366.814.773,00	4.025.105.660,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.366.814.773,00	4.025.105.660,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.076.273,00	2.879.676.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.699.750,00	18.340.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.315.500,00	10.054.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.444.250,00	3.346.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.172.173.823,00	1.971.285.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.158.472.823,00	1.957.592.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.580.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.239.600,00	63.408.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.039.600,00	4.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	34.919.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	19.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.045.100,00	294.017.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.563.000,00	13.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.046.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.370.000,00	12.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.507.500,00	24.761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.860.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.698.600,00	210.124.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.173.000,00	277.127.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.194.000,00	11.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.025.200,00	93.490.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.953.800,00	172.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.745.000,00	255.495.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.825.000,00	127.624.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.500.000,00	100.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	764.507.400,00	739.814.984,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	44.743.200,00	43.613.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	26.385.600,00	25.823.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	13.517.600,00	13.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	4.840.000,00	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	710.849.200,00	687.353.166,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10.630.000,00	10.125.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	700.219.200,00	677.227.207,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.915.000,00	8.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.915.000,00	8.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	205.418.500,00	182.417.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.350.000,00	9.345.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.350.000,00	9.345.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	140.068.500,00	120.051.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.068.500,00	120.051.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	53.019.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000,00	53.019.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	68.185.000,00	56.927.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.130.000,00	30.424.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.675.000,00	12.503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.260.000,00	9.569.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11.195.000,00	8.351.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.055.000,00	14.737.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.735.000,00	8.791.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.320.000,00	5.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	11.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	11.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	23.205.000,00	20.966.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.205.000,00	20.966.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.775.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.430.000,00	13.126.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	92.622.600,00	78.828.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.122.600,00	63.164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.122.600,00	63.164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500.000,00	15.664.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.433.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	74.800.000,00	66.475.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.267.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.267.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.800.000,00	14.760.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15.800.000,00	14.760.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000,00	43.447.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000,00	29.580.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.867.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.521.160.400,00	3.095.269.224,00	26.962.156,00	22.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	3.521.160.400,00	3.095.269.224,00	26.962.156,00	22.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.887.700,00	2.763.858.227,00	22.572.500,00	21.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.518.500,00	38.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.116.800,00	12.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.999.900,00	6.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.402.600,00	11.402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.214.827,00	2.057.929.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.316.827,00	2.030.031.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.954.000,00	2.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	22.860.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	22.860.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.915.125,00	213.139.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.385.300,00	5.385.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.206.025,00	6.206.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.148.800,00	15.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.276.000,00	23.510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.899.000,00	162.891.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	22.572.500,00	21.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	22.572.500,00	21.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.449.248,00	199.755.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.412.200,00	9.412.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.022.048,00	52.003.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.015.000,00	110.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.790.000,00	231.655.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.700.000,00	202.565.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	205.000.400,00	0,00	3.463.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	205.000.400,00	0,00	3.463.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	205.000.400,00	0,00	3.463.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	250.490.800,00	249.648.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	117.164.800,00	117.017.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	11.813.300,00	11.730.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	18.351.500,00	18.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	35.880.000,00	35.873.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35.880.000,00	35.873.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	97.446.000,00	96.757.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	33.425.500,00	33.388.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	64.020.500,00	63.369.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	18.399.000,00	18.398.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.399.000,00	18.398.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	18.399.000,00	18.398.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	66.382.500,00	63.363.950,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	66.382.500,00	63.363.950,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.308.500,00	39.290.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.074.000,00	24.073.900,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.000.000,00	34.200.000,00	1.164.658.000,00	247.142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50.000.000,00	34.200.000,00	1.164.658.000,00	247.142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	0,00	1.100.000.000,00	239.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.100.000.000,00	239.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	1.100.000.000,00	239.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	0,00	64.658.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	0,00	0,00	64.658.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.05.0000	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	0,00	0,00	64.658.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.871.569.670,00	17.341.426.248,00	88.595.390,00	64.500.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.871.569.670,00	17.341.426.248,00	88.595.390,00	64.500.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.799.787.490,00	6.267.603.665,00	66.975.990,00	64.500.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.500.000,00	24.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	12.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.338.691.490,00	4.978.514.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.301.091.490,00	4.950.815.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.600.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.200.000,00	75.304.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.200.000,00	75.304.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.450.000,00	361.447.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.987.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.450.000,00	99.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000,00	69.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.763.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	64.500.990,00	64.500.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	64.500.990,00	64.500.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.146.000,00	451.531.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.400.000,00	12.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.272.000,00	216.467.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.474.000,00	222.665.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.800.000,00	376.433.485,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.900.000,00	286.182.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.800.000,00	40.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.100.000,00	20.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.994.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	169.402.400,00	151.521.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	169.402.400,00	151.521.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	109.402.400,00	91.885.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.635.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.880.669.900,00	1.642.592.179,00	9.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.880.669.900,00	1.642.592.179,00	9.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	318.430.000,00	305.548.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.562.239.900,00	1.337.043.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	0,00	0,00	9.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000,00	23.661.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	25.000.000,00	23.661.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25.000.000,00	23.661.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000,00	207.967.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	207.967.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	207.967.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.746.709.880,00	9.048.079.782,00	11.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.746.709.880,00	9.048.079.782,00	11.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	44.530.480,00	29.836.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.281.579.900,00	8.946.417.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	420.599.500,00	71.826.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	11.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.512.764.045,00	3.424.661.397,00	102.645.000,00	101.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.512.764.045,00	3.424.661.397,00	102.645.000,00	101.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.303.808.145,00	3.215.941.497,00	102.645.000,00	101.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.136.800,00	32.350.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.010.800,00	8.848.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.021.000,00	3.916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.021.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.021.000,00	3.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.021.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.021.000,00	3.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.021.000,00	3.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.331.545,00	1.928.002.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.268.545,00	1.877.248.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.021.000,00	3.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.021.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.021.000,00	3.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.000.000,00	26.634.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	17.634.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	467.811.600,00	467.123.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.005.500,00	12.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.125.900,00	123.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.002.000,00	9.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.986.000,00	24.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.743.800,00	26.743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	46.273.000,00	45.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.035.400,00	204.794.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	102.645.000,00	101.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	102.645.000,00	101.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.808.200,00	548.157.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.449.000,00	51.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.263.200,00	84.947.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.546.000,00	385.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.720.000,00	213.673.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.400.000,00	192.723.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	84.838.000,00	84.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52.757.500,00	52.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	13.129.500,00	13.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9.484.500,00	9.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11.752.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.226.500,00	9.226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.165.000,00	9.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	32.080.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	32.080.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	55.387.000,00	55.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	22.564.500,00	22.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.439.500,00	9.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	13.125.000,00	13.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	32.822.500,00	32.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	32.822.500,00	32.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	64.468.400,00	64.408.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	19.428.500,00	19.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.683.000,00	9.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.745.500,00	9.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.039.900,00	45.009.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.046.500,00	14.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.543.500,00	9.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	8.372.000,00	8.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	13.077.900,00	13.067.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	4.262.500,00	4.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	4.262.500,00	4.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	4.262.500,00	4.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.574.904.688,00	5.538.511.178,00	441.593.450,00	405.051.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.574.904.688,00	5.538.511.178,00	441.593.450,00	405.051.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.367.891.479,00	2.770.514.841,00	441.593.450,00	405.051.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.955.329,00	33.144.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.567.138,00	9.567.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.109.691,00	5.547.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.164.500,00	2.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.982.000,00	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.152.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.430.000,00	7.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.241.477.414,00	1.763.825.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.207.904.014,00	1.730.776.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.098.500,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.680.400,00	10.206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.394.500,00	3.364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.619.000,00	47.256.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.980.500,00	2.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.588.500,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	41.687.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.416.350,00	299.230.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.387.400,00	10.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.315.500,00	10.315.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.174.500,00	8.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.660.000,00	50.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.523.750,00	21.512.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.355.200,00	198.681.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	236.593.450,00	207.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	17.874.000,00	17.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	218.719.450,00	189.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.209.386,00	325.821.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.485.700,00	27.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.899.686,00	127.413.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.824.000,00	171.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.214.000,00	301.236.720,00	205.000.000,00	197.955.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.748.000,00	244.719.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.816.000,00	28.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	205.000.000,00	197.955.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	407.358.700,00	305.586.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100.506.000,00	63.583.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	32.083.500,00	10.452.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	19.792.500,00	6.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	15.585.500,00	15.307.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	33.044.500,00	31.793.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	306.852.700,00	242.003.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	40.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	67.774.400,00	67.276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	62.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	80.418.800,00	70.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000,00	11.537.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.179.699.109,00	1.016.485.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	554.599.509,00	541.951.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	132.000.000,00	125.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	192.599.509,00	187.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	79.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	432.697.600,00	313.297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	353.887.000,00	240.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.500.000,00	10.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	22.245.000,00	20.324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	32.565.600,00	28.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	144.402.000,00	113.236.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	57.902.000,00	26.816.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.619.955.400,00	1.445.923.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.549.248.400,00	1.379.576.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	234.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23.227.000,00	22.813.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	737.100.000,00	723.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	304.348.000,00	299.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	124.573.400,00	99.064.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	70.707.000,00	66.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.15.0000	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	70.707.000,00	66.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.255.876.980,00	9.168.735.822,00	1.107.542.170,00	598.279.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000		DINAS PERHUBUNGAN	10.255.876.980,00	9.168.735.822,00	1.107.542.170,00	598.279.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.874.918.100,00	4.616.254.013,00	280.704.170,00	257.270.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000,00	18.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.823.959.100,00	3.632.025.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.607.120.100,00	3.416.228.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	212.839.000,00	211.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000,00	1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.600.000,00	44.689.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.800.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00	41.097.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.320.000,00	211.147.406,00	169.803.870,00	146.876.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	169.803.870,00	146.876.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.320.000,00	17.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	23.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.867.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	134.924.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	110.900.300,00	110.393.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	73.022.000,00	73.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	37.878.300,00	37.371.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.800.000,00	148.398.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000,00	95.628.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.239.000,00	561.176.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	567.039.000,00	526.255.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000,00	24.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.380.958.880,00	4.552.481.809,00	826.838.000,00	341.009.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.582.728.880,00	3.756.368.309,00	826.838.000,00	341.009.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	826.838.000,00	341.009.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.582.728.880,00	3.756.368.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	318.400.000,00	317.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	318.400.000,00	317.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52.580.000,00	51.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	14.580.000,00	14.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	6.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	401.900.000,00	401.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	91.100.000,00	91.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.800.000,00	25.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.16.0000	2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.278.684.429,00	16.599.282.300,00	466.407.000,00	186.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.278.684.429,00	16.599.282.300,00	466.407.000,00	186.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.570.673.429,00	4.156.232.314,00	198.737.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.182.000,00	30.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.182.000,00	16.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.973.023.029,00	2.648.728.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.823.029,00	2.617.528.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.909.000,00	130.020.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.006.000,00	62.273.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.903.000,00	63.746.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.609.800,00	378.120.377,00	2.211.500,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.500,00	9.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	2.211.500,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.200,00	12.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	34.214.500,00	34.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	18.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.767.600,00	274.767.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	53.025.500,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	40.699.500,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.978.100,00	421.877.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000,00	10.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.178.100,00	140.459.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.300.000,00	270.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.971.500,00	539.323.760,00	143.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.786.500,00	151.506.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.099.000,00	81.000.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.336.000,00	200.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.500.000,00	101.477.000,00	143.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.810.206.300,00	9.579.685.814,00	267.670.000,00	159.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.810.206.300,00	9.579.685.814,00	267.670.000,00	159.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	71.800.000,00	71.665.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	110.975.000,00	110.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	90.275.000,00	86.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	719.049.700,00	707.014.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.945.921.100,00	1.773.616.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	98.067.200,00	88.017.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	6.286.640.500,00	6.282.661.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	146.391.000,00	146.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	20.994.800,00	18.504.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	40.950.000,00	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	68.744.000,00	56.016.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	210.398.000,00	199.456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	267.670.000,00	159.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.897.804.700,00	2.863.364.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.143.484.700,00	2.139.492.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.143.484.700,00	2.139.492.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	754.320.000,00	723.871.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	560.510.000,00	536.472.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	28.636.000,00	28.551.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	81.600.000,00	79.025.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	34.394.000,00	34.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.099.090.200,00	2.172.929.420,00	378.709.800,00	378.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000		DINAS TENAGA KERJA	3.099.090.200,00	2.172.929.420,00	378.709.800,00	378.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.998.200,00	8.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	15.998.200,00	8.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.998.600,00	4.150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.999.600,00	4.834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	29.995.600,00	22.351.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.995.600,00	22.351.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.400,00	14.266.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.996.200,00	8.085.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.370.000,00	419.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.370.000,00	419.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	420.370.000,00	419.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	21.999.600,00	13.111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.999.600,00	13.111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.999.600,00	13.111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.610.726.800,00	1.709.048.000,00	378.709.800,00	378.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.610.726.800,00	1.709.048.000,00	378.709.800,00	378.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.594.249.800,00	1.696.446.500,00	378.709.800,00	378.709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.07.2.17.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	6.477.000,00	2.601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.249.817.685,00	4.921.886.306,00	288.941.791,00	247.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.249.817.685,00	4.921.886.306,00	288.941.791,00	247.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.666.882.785,00	4.348.680.306,00	288.941.791,00	247.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.784.900,00	11.612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.484.900,00	8.414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	550.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.183.765.709,00	2.972.682.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.163.197.709,00	2.952.176.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.468.000,00	19.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.035.300,00	67.271.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.835.300,00	30.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.650.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	34.441.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.905.000,00	335.355.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.718.200,00	17.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.373.000,00	15.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.996.000,00	13.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.560.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.716.800,00	13.716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.325.000,00	5.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.216.000,00	249.173.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	288.941.791,00	247.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	77.311.291,00	73.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	48.663.500,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	162.967.000,00	158.574.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.286.876,00	615.404.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.152.000,00	34.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.380.876,00	250.889.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.754.000,00	330.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.105.000,00	346.354.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.845.000,00	136.856.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.270.000,00	147.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.050.000,00	41.017.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	22.825.000,00	22.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.585.000,00	8.287.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.585.000,00	8.287.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	14.240.000,00	14.080.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.240.000,00	14.080.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	49.880.000,00	49.467.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.880.000,00	49.467.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	35.000.000,00	34.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	14.880.000,00	14.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	78.619.900,00	76.749.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	78.619.900,00	76.749.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.034.900,00	50.910.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	11.535.000,00	11.441.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	14.465.000,00	14.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000,00	379.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	386.000.000,00	379.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	289.010.900,00	282.110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.989.100,00	96.989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	45.610.000,00	45.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.610.000,00	45.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.19.0000	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	45.610.000,00	45.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.894.790.198,00	9.602.326.702,00	2.181.816.820,00	1.839.748.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.894.790.198,00	9.602.326.702,00	2.181.816.820,00	1.839.748.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.869.603.548,00	5.634.291.356,00	313.337.100,00	65.637.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.420.000,00	24.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.420.000,00	4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.230.383.215,00	3.126.309.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.189.183.215,00	3.085.109.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	162.114.125,00	158.150.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	162.114.125,00	158.150.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	46.487.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00	46.487.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.847.200,00	472.215.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.993.500,00	19.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.004.800,00	20.004.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.099.600,00	20.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.648.000,00	18.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	39.498.300,00	39.444.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	54.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.603.000,00	299.397.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	282.699.500,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	206.008.500,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	76.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.325.029.008,00	1.265.786.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.125.500,00	11.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.843.508,00	419.391.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.060.000,00	835.279.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.810.000,00	539.037.643,00	30.637.600,00	30.637.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.300.000,00	192.217.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.760.000,00	156.029.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.995.500,00	30.637.600,00	30.637.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	121.044.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	428.750.350,00	424.733.550,00	644.949.870,00	644.949.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	379.610.400,00	375.659.200,00	644.949.870,00	644.949.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	17.490.000,00	17.482.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	96.440.000,00	95.032.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	54.100.400,00	51.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	644.949.870,00	644.949.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	11.580.000,00	11.544.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.139.950,00	49.074.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	49.139.950,00	49.074.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.342.112.100,00	3.290.466.796,00	1.223.529.850,00	1.129.160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	0,00	0,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	581.628.300,00	539.338.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	269.180.500,00	261.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	263.711.900,00	228.736.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	48.735.900,00	48.721.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	949.533.300,00	944.385.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	24.123.300,00	23.580.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	907.500.000,00	907.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	17.910.000,00	13.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	260.950.500,00	256.742.623,00	1.217.644.850,00	1.129.160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	120.950.500,00	120.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	140.000.000,00	136.292.123,00	1.217.644.850,00	1.129.160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	254.324.200,00	252.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	254.324.200,00	252.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	35.502.000,00	34.933.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.20.0000	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	18.822.200,00	17.901.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	133.226.600,00	131.791.207,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	133.226.600,00	131.791.207,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	133.226.600,00	131.791.207,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	133.226.600,00	131.791.207,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	57.604.000,00	57.406.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18.945.000,00	17.912.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.088.000,00	17.075.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34.814.600,00	34.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	4.775.000,00	4.609.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	65.933.500,00	65.610.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.933.500,00	65.610.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	65.933.500,00	65.610.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.929.200,00	34.865.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.071.000,00	8.068.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	26.858.200,00	26.796.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	31.004.300,00	30.745.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.17.0000	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.004.300,00	30.745.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	521.311.000,00	507.065.800,00	526.268.100,00	510.030.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	521.311.000,00	507.065.800,00	526.268.100,00	510.030.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	148.515.000,00	147.238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.225.000,00	80.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	80.225.000,00	80.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.290.000,00	67.051.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	68.290.000,00	67.051.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	130.196.000,00	117.355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.196.000,00	117.355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	130.196.000,00	117.355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	161.400.000,00	161.272.000,00	526.268.100,00	510.030.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	43.800.000,00	43.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	43.800.000,00	43.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	117.600.000,00	117.600.000,00	526.268.100,00	510.030.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	0,00	0,00	526.268.100,00	510.030.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.350.952.910,00	3.174.444.433,00	11.255.380.800,00	10.684.826.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000		DINAS PERPUSTAKAAN	3.350.952.910,00	3.174.444.433,00	11.255.380.800,00	10.684.826.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.173.952.910,00	3.005.220.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.874.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	2.859.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	2.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.673.077.910,00	2.536.269.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.490.920.910,00	2.360.647.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	182.157.000,00	175.622.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	19.434.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	19.434.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.035.000,00	188.383.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00	31.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	23.360.000,00	23.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.175.000,00	113.113.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.400.000,00	66.134.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.900.000,00	60.638.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.440.000,00	186.273.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.500.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.270.000,00	140.124.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.510.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	177.000.000,00	169.224.200,00	11.255.380.800,00	10.684.826.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	103.081.000,00	800.000.000,00	412.503.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	300.000.000,00	240.485.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	500.000.000,00	172.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	24.509.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.841.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000,00	24.481.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000,00	66.143.200,00	10.455.380.800,00	10.272.323.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.000.000,00	24.996.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	10.455.380.800,00	10.272.323.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25.000.000,00	19.640.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	22.000.000,00	21.506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	61.868.077,00	50.078.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000		DINAS PERPUSTAKAAN	61.868.077,00	50.078.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	48.818.077,00	48.566.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	10.450.000,00	10.419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	10.450.000,00	10.419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12.380.500,00	12.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.380.500,00	12.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	25.987.577,00	25.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25.987.577,00	25.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	13.050.000,00	1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13.050.000,00	1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.21.0000	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	13.050.000,00	1.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.064.585.942,00	19.465.227.979,00	1.727.537.000,00	1.343.672.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	847.566.800,00	609.031.798,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000		DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	847.566.800,00	609.031.798,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.646.200,00	96.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.646.200,00	96.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.929.600,00	21.301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	1.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.428.200,00	56.355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.288.400,00	12.403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	517.703.500,00	294.204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	319.259.100,00	97.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.361.300,00	19.361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	299.897.800,00	78.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.185.900,00	130.345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	8.000.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	113.245.900,00	112.285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10.940.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	66.258.500,00	66.258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	66.258.500,00	66.258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	129.332.600,00	128.539.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	13.700.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	2.500.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	115.632.600,00	114.869.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.887.600,00	102.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	7.745.000,00	7.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	92.884.500,00	89.862.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	87.884.500,00	84.862.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.070.000,00	17.892.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.814.500,00	66.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.952.646.200,00	1.882.298.280,00	4.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.952.646.200,00	1.882.298.280,00	4.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	359.298.200,00	321.443.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	184.804.200,00	147.194.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	184.804.200,00	147.194.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	169.519.500,00	169.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	169.519.500,00	169.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	4.974.500,00	4.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4.974.500,00	4.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.512.225.500,00	1.480.621.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.512.225.500,00	1.480.621.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	419.356.300,00	419.355.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.092.869.200,00	1.061.266.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	4.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	4.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	0,00	0,00	4.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	81.122.500,00	80.232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	36.960.500,00	36.070.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	20.011.000,00	19.820.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	16.949.500,00	16.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	44.162.000,00	44.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.20.0000	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	44.162.000,00	44.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.417.231.862,00	9.699.896.320,00	1.487.571.600,00	1.136.092.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000		DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	10.417.231.862,00	9.699.896.320,00	1.487.571.600,00	1.136.092.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.618.048.272,00	7.313.590.081,00	1.465.206.600,00	1.136.092.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.450.034.766,00	6.249.946.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.199.661.066,00	6.005.830.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238.373.700,00	235.720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.000.000,00	62.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.705.400,00	356.507.788,00	120.201.500,00	117.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	68.377.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	51.824.500,00	51.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.998.000,00	14.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.060.000,00	28.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	52.660.400,00	52.660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.305.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.682.000,00	253.100.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.345.005.100,00	1.018.310.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	167.772.000,00	167.465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	427.680.000,00	138.973.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	749.553.100,00	711.872.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.023.606,00	289.183.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.123.606,00	126.283.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.250.000,00	149.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.284.500,00	355.367.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.900.000,00	132.933.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.299.500,00	148.501.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.710.000,00	15.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000,00	48.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.792.192.600,00	1.555.905.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	799.092.600,00	753.449.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	758.592.600,00	712.949.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.909.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20.000.000,00	19.909.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.100.000,00	48.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	49.100.000,00	48.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	924.000.000,00	733.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	924.000.000,00	733.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	267.989.790,00	123.134.953,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	63.289.790,00	62.262.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	63.289.790,00	62.262.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	204.700.000,00	60.872.063,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	3.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	204.700.000,00	60.872.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	255.399.000,00	253.325.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	54.613.000,00	53.037.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	54.613.000,00	53.037.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	7.740.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.740.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.891.500,00	53.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	33.841.500,00	33.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	139.154.500,00	138.976.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	82.854.500,00	82.676.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	57.760.000,00	28.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	57.760.000,00	28.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	20.000.000,00	19.772.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	37.760.000,00	9.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	425.842.200,00	425.054.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	425.842.200,00	425.054.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	43.349.900,00	43.146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	370.065.000,00	369.643.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.3.25.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12.427.300,00	12.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.520.888.190,00	6.187.190.754,00	225.000.000,00	197.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000		DINAS PERDAGANGAN	6.520.888.190,00	6.187.190.754,00	225.000.000,00	197.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.471.823.090,00	5.164.310.498,00	225.000.000,00	197.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.567.500,00	27.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.467.500,00	8.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.350.000,00	2.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.350.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.350.000,00	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.350.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.350.000,00	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.537.227.989,00	3.294.024.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.525.527.989,00	3.282.498.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.350.000,00	8.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.350.000,00	3.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	79.995.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	79.995.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.402.825,00	502.213.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.522.000,00	11.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.939.250,00	35.269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.030.400,00	20.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.235.000,00	22.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	150.695.375,00	149.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.980.800,00	263.460.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	225.000.000,00	197.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	225.000.000,00	197.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.519.776,00	913.524.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.504.000,00	2.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.999.776,00	135.526.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.016.000,00	775.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.105.000,00	347.313.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.275.000,00	243.576.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.580.000,00	22.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.250.000,00	74.156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	204.943.700,00	201.319.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	204.943.700,00	201.319.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	104.943.700,00	102.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000,00	98.755.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	694.121.400,00	672.901.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	671.929.000,00	651.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	83.259.500,00	75.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	588.669.500,00	576.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.192.400,00	21.233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	22.192.400,00	21.233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150.000.000,00	148.659.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150.000.000,00	148.659.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000,00	48.679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000,00	99.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000		DINAS PERDAGANGAN	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.326.252.890,00	1.086.810.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	99.999.600,00	98.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	614.568.600,00	562.849.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.18.0000	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.611.684.690,00	425.027.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	96.846.271.226,00	90.950.252.224,00	1.549.910.570,00	1.147.195.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	49.133.038.996,00	46.445.704.023,00	450.277.000,00	442.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000		SEKRETARIAT DAERAH KOTA	49.133.038.996,00	46.445.704.023,00	450.277.000,00	442.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.504.597.266,00	36.302.935.647,00	445.329.000,00	442.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.075.000,00	131.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.000.000,00	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.075.000,00	88.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.629.727.712,00	10.999.180.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.977.450.612,00	10.373.266.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.899.700,00	35.775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	297.000.000,00	281.804.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	178.742.000,00	178.162.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	140.635.400,00	130.170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	94.729.000,00	93.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	94.729.000,00	93.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	817.268.300,00	755.014.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	561.898.400,00	561.149.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	71.369.900,00	70.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.000.000,00	123.393.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.813.977.200,00	11.507.722.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	205.100.000,00	204.689.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.100.000,00	221.482.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.629.700,00	100.118.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.810.000,00	300.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.554.099.500,00	9.274.861.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.406.238.000,00	1.405.994.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	350.600.000,00	348.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	350.600.000,00	348.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.352.938.504,00	4.010.515.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.100.000,00	138.096.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.588.177.504,00	1.463.233.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.045.000,00	171.586.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.452.616.000,00	2.237.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.994.805.000,00	4.609.435.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.611.360.000,00	2.543.090.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	34.625.000,00	34.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.818.250.000,00	1.544.308.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.200.000,00	170.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	359.370.000,00	317.041.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.017.749.000,00	944.194.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	186.998.000,00	139.101.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	205.751.000,00	202.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.000.000,00	8.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	594.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.269.851.450,00	2.212.632.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.083.404.000,00	1.074.422.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	359.800.000,00	357.160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	826.647.450,00	781.049.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	658.851.600,00	320.734.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	95.000.000,00	84.614.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	408.406.600,00	123.444.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	155.445.000,00	112.675.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	812.353.500,00	811.513.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	578.725.200,00	578.009.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	173.226.300,00	173.138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60.402.000,00	60.365.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.999.091.230,00	8.608.334.977,00	4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	478.804.900,00	461.493.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	103.293.600,00	94.813.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	157.058.500,00	154.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	218.452.800,00	212.538.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.503.718.200,00	5.394.797.931,00	4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.360.003.200,00	5.273.569.632,00	4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	143.715.000,00	121.228.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	2.827.076.130,00	2.564.370.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	918.874.130,00	892.216.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	1.697.160.000,00	1.469.533.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	211.042.000,00	202.620.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04	Fasilitas Kerja Sama Daerah	189.492.000,00	187.672.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	189.492.000,00	187.672.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.629.350.500,00	1.534.433.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	409.047.200,00	402.308.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	300.127.200,00	296.110.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	108.920.000,00	106.198.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	344.000.400,00	264.198.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	100.015.300,00	78.667.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	133.997.300,00	111.125.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	109.987.800,00	74.405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	829.547.600,00	822.187.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	585.073.600,00	580.522.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	212.524.000,00	210.707.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	31.950.000,00	30.958.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	46.755.300,00	45.738.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	46.755.300,00	45.738.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	47.713.232.230,00	44.504.548.201,00	1.099.633.570,00	704.925.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000		SEKRETARIAT DPRD	47.713.232.230,00	44.504.548.201,00	1.099.633.570,00	704.925.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.171.209.030,00	32.530.394.648,00	1.099.633.570,00	704.925.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.415.180.917,00	3.025.528.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.407.180.917,00	3.017.528.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.700.000,00	159.734.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.500.000,00	150.534.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.225.700,00	1.091.416.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.051.000,00	56.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	248.150.600,00	239.322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.850.500,00	44.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.000.000,00	199.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	159.307.100,00	157.663.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	363.866.500,00	363.791.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	667.527.500,00	308.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	30.587.500,00	29.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	600.000,00	0,00	34.523.500,00	34.210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	435.648.000,00	244.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	166.768.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.237.195.708,00	2.083.154.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	29.969.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	817.282.008,00	719.289.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.389.913.700,00	1.333.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.802.870.000,00	1.579.172.507,00	432.106.070,00	396.850.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	744.468.000,00	584.071.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	40.000.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	596.902.000,00	553.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.500.000,00	402.340.000,00	432.106.070,00	396.850.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.720.078.405,00	11.166.134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.001.210.000,00	10.466.640.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	686.368.405,00	685.005.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	32.500.000,00	14.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	13.697.358.300,00	13.402.804.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.02	Fasilitas Fraksi DPRD	146.000.000,00	145.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12.711.358.300,00	12.596.804.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	840.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.542.023.200,00	11.974.153.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.390.969.700,00	5.336.923.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.823.808.000,00	1.791.149.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.260.697.100,00	3.256.753.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	26.464.600,00	9.020.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	210.000.000,00	193.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	50.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	50.000.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50.000.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.664.328.500,00	2.355.737.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	957.722.200,00	724.362.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	632.403.900,00	567.562.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	240.600.000,00	240.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.600.000,00	360.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	155.449.500,00	152.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	317.552.900,00	309.679.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.171.725.000,00	4.021.856.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	62.317.000,00	62.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	17.770.500,00	17.770.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.091.637.500,00	3.941.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	55.000.000,00	28.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.000.000,00	4.954.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50.000.000,00	23.582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	61.087.145.563,00	51.711.467.929,00	1.282.233.940,00	1.146.684.694,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00
5.01			PERENCANAAN	6.804.620.752,00	6.281.025.734,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.804.620.752,00	6.281.025.734,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.421.561.252,00	4.053.782.470,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.588.300,00	6.368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.800,00	4.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.988.500,00	1.268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.584.952,00	3.021.555.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.213.075.452,00	2.929.046.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.510.000,00	84.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.999.500,00	3.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.985.000,00	85.318.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	19.434.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	59.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.548.000,00	386.947.051,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.150.500,00	7.150.500,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.999.400,00	14.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	94.280.000,00	93.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.118.200,00	211.895.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.125.000,00	315.951.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.344.200,00	75.759.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.380.800,00	225.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.730.000,00	237.641.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.580.000,00	133.903.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	31.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.050.000,00	31.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.600.000,00	32.438.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.172.965.200,00	1.119.423.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	723.401.700,00	683.881.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	33.999.600,00	33.102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3.529.500,00	3.529.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.099.800,00	18.859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.050.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	257.000.400,00	238.679.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	402.722.400,00	382.840.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.600.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.600.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	293.963.800,00	282.345.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	80.000.000,00	78.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	213.963.800,00	203.502.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	139.999.700,00	138.555.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	139.999.700,00	138.555.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.210.094.300,00	1.107.819.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	452.285.800,00	431.730.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.884.000,00	149.661.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.517.900,00	3.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	999.500,00	750.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	15.000.000,00	11.449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	268.799.800,00	256.199.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	875.000,00	871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.504.700,00	2.490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.704.900,00	6.808.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	210.297.100,00	177.676.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.249.300,00	56.262.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.699.500,00	1.676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.432.000,00	1.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	15.142.200,00	14.759.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	115.163.700,00	85.083.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.250.000,00	2.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	16.360.400,00	16.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	547.511.400,00	498.412.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	148.894.300,00	105.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.974.500,00	1.953.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	950.000,00	946.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	19.490.000,00	19.256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	355.744.700,00	350.202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1.974.800,00	1.954.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1.820.300,00	1.814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	16.662.800,00	16.461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	45.979.231.386,00	38.149.615.529,00	1.138.532.940,00	1.007.475.194,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	45.979.231.386,00	38.149.615.529,00	1.138.532.940,00	1.007.475.194,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.259.872.379,00	30.421.936.012,00	896.532.940,00	796.064.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.266.750,00	25.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.439.600,00	8.107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.199.000,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.199.000,00	2.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.199.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.199.000,00	1.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.399.400,00	4.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.631.750,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.845.594.153,00	20.483.140.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.727.993.703,00	20.375.275.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.200.150,00	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.200.150,00	2.102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.200.150,00	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.595.200,00	208.131.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.595.200,00	208.131.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.561.807.500,00	1.316.910.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.502.000,00	36.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.310.000,00	124.820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	478.359.500,00	363.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.320.000,00	50.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	129.349.000,00	127.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.592.400,00	407.140.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	286.374.600,00	206.262.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	896.532.940,00	796.064.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	833.015.440,00	737.031.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	63.517.500,00	59.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.631.188.776,00	7.859.018.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.399.600,00	106.112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.889.859.176,00	6.458.078.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.633.930.000,00	1.294.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.420.000,00	529.324.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	572.900.000,00	397.349.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.100.000,00	38.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.420.000,00	66.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.000.000,00	27.173.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.834.904.157,00	4.311.706.217,00	0,00	0,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.223.286.257,00	1.125.248.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	66.007.757,00	62.248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.066.000,00	44.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	52.001.900,00	49.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	52.001.900,00	50.371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	127.848.400,00	114.849.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	192.764.600,00	176.220.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	226.504.300,00	206.609.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	240.897.000,00	206.861.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	217.194.400,00	214.484.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	823.803.900,00	672.097.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	125.163.500,00	116.655.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60.861.500,00	57.707.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	198.451.000,00	196.716.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	207.000.000,00	110.582.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	232.327.900,00	190.434.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	877.841.000,00	847.021.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	115.869.200,00	115.719.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	96.292.000,00	96.030.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	140.458.000,00	111.319.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	239.299.000,00	238.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	271.678.800,00	271.536.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	14.244.000,00	13.507.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	909.456.815,00	0,00	0,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	909.456.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	909.973.000,00	757.882.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	225.374.000,00	218.900.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	337.320.000,00	261.039.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	347.279.000,00	277.942.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.300.145.850,00	873.706.240,00	242.000.000,00	211.410.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.300.145.850,00	873.706.240,00	242.000.000,00	211.410.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	55.000.000,00	32.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.199.600,00	33.946.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	190.147.900,00	180.665.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	66.313.100,00	49.381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	204.205.450,00	66.664.680,00	242.000.000,00	211.410.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	200.000.000,00	149.594.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42.924.800,00	42.055.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.599.600,00	73.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	184.955.400,00	121.376.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	143.800.000,00	123.926.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.584.309.000,00	2.542.267.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.584.309.000,00	2.542.267.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	223.299.100,00	115.928.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	282.770.000,00	113.281.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	188.410.300,00	146.287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.193.900,00	51.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	480.700.000,00	388.874.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72.637.000,00	55.092.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.958.499.600,00	1.618.631.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	180.949.100,00	43.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	108.850.000,00	8.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	7.153.116.925,00	6.258.470.171,00	142.852.000,00	138.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.153.116.925,00	6.258.470.171,00	142.852.000,00	138.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.724.652.725,00	4.186.575.449,00	142.852.000,00	138.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.329.000,00	42.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.125.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.379.000,00	10.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.370.958.725,00	3.146.179.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.316.427.225,00	3.092.498.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.112.500,00	20.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.169.000,00	24.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000,00	163.398.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	50.000.000,00	42.609.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	65.789.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.970.800,00	370.843.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.997.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.771.000,00	20.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	36.400.000,00	36.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.999.800,00	219.916.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	142.852.000,00	138.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	50.500.500,00	50.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	92.351.500,00	87.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.615.200,00	195.526.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.181.200,00	110.866.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.934.000,00	80.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.779.000,00	268.363.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	376.300.000,00	232.700.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.704.000,00	19.887.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.428.464.200,00	2.071.894.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	638.011.000,00	588.481.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	26.200.000,00	25.727.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	120.000.000,00	116.519.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	46.200.000,00	29.216.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	271.595.000,00	245.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.016.000,00	154.796.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	863.485.000,00	764.314.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	85.000.000,00	84.631.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	145.000.000,00	118.671.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	633.485.000,00	561.011.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	335.000.000,00	242.063.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	50.000.000,00	43.479.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	125.000.000,00	103.511.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	50.000.000,00	33.850.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50.000.000,00	31.222.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	591.968.200,00	477.034.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000,00	48.372.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	387.618.200,00	276.677.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	48.125.000,00	48.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	44.500.000,00	43.278.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	26.475.000,00	25.331.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	679.245.200,00	587.668.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	679.245.200,00	587.668.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	679.245.200,00	587.668.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	565.565.000,00	489.480.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	30.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	535.000.000,00	489.480.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	113.680.200,00	98.188.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.26.0000	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	113.680.200,00	98.188.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	470.931.300,00	434.687.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	470.931.300,00	434.687.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	470.931.300,00	434.687.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	82.677.400,00	76.926.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	82.677.400,00	76.926.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	388.253.900,00	357.761.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	285.370.900,00	267.339.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	85.462.500,00	84.458.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.25.0000	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	17.420.500,00	5.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.633.134.605,00	7.163.360.085,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	7.633.134.605,00	7.163.360.085,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		INSPEKTORAT DAERAH	7.633.134.605,00	7.163.360.085,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.144.697.805,00	6.780.636.368,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000,00	18.211.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.988.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.983.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.621.409.305,00	5.435.766.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.578.525.505,00	5.393.226.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.675.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.604.400,00	1.585.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.604.400,00	1.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	630.067.800,00	532.663.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.839.400,00	1.839.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.952.800,00	1.952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	626.275.600,00	528.871.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.099.100,00	320.883.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.500.000,00	8.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.465.600,00	11.605.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.880.000,00	28.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	39.273.900,00	34.876.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.995.000,00	9.913.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.484.600,00	224.136.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	31.149.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.501.600,00	72.290.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.122.000,00	11.325.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.979.600,00	49.564.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.620.000,00	400.821.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.380.000,00	364.886.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.740.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	239.722.700,00	186.957.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	211.454.000,00	160.181.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51.537.000,00	16.129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19.287.700,00	13.212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	8.117.400,00	8.037.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	12.157.400,00	12.085.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	95.215.000,00	91.809.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25.139.500,00	18.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28.268.700,00	26.775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28.268.700,00	26.775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	248.714.100,00	195.766.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	207.979.900,00	173.978.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	35.024.700,00	25.826.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	172.955.200,00	148.152.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	40.734.200,00	21.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.302.400,00	512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16.772.400,00	10.565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.659.400,00	10.709.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	37.868.916.331,00	36.626.818.886,00	634.700.074,00	626.927.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	37.868.916.331,00	36.626.818.886,00	634.700.074,00	626.927.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		KECAMATAN BACUKIKI	7.428.469.685,00	7.292.464.045,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.189.267.485,00	5.060.190.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.494.847.885,00	3.379.210.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.475.247.885,00	3.359.610.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.000.000,00	68.913.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000,00	64.913.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.224.000,00	643.661.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.608.000,00	56.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.580.000,00	34.564.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.640.000,00	44.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	241.578.000,00	240.717.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.818.000,00	242.433.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.806.600,00	636.681.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.125.000,00	43.320.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.681.600,00	578.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.389.000,00	314.723.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.389.000,00	191.320.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	8.488.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	109.913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.500.000,00	25.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.500.000,00	25.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.500.000,00	25.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.180.179.200,00	2.173.950.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	695.500.000,00	691.456.500,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411.847.200,00	411.847.200,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	263.152.800,00	261.109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.484.679.200,00	1.482.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.679.200,00	198.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.284.000.000,00	1.283.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.523.000,00	32.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.523.000,00	32.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.123.000,00	8.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		KECAMATAN BACUKIKI BARAT	10.117.106.896,00	9.768.113.971,00	143.400.074,00	135.827.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.930.804.670,00	6.630.939.503,00	29.812.400,00	25.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.707.047.270,00	4.503.986.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.687.447.270,00	4.484.386.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.800.000,00	42.657.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	37.857.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.079.300,00	774.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.900.000,00	12.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.853.500,00	81.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	81.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.700.000,00	32.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	237.560.000,00	232.848.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.065.800,00	332.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	976.519.100,00	941.036.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.500.000,00	14.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.196.600,00	206.339.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.822.500,00	720.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.359.000,00	351.698.351,00	4.437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.239.000,00	238.255.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000,00	897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.120.000,00	50.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.000.000,00	61.805.000,00	4.437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.445.000,00	60.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.445.000,00	60.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.445.000,00	60.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.089.932.226,00	3.041.074.468,00	113.587.674,00	110.452.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	546.271.500,00	545.550.661,00	113.587.674,00	110.452.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.500.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	26.043.840,00	26.042.502,00	113.587.674,00	110.452.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	495.727.660,00	495.258.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.543.660.726,00	2.495.523.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	208.000.900,00	179.465.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.716.434.000,00	1.697.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	619.225.826,00	619.004.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.925.000,00	35.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.925.000,00	35.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		KECAMATAN SOREANG	11.189.698.780,00	10.812.766.956,00	308.400.000,00	308.240.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.879.297.780,00	7.525.446.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.385.574.780,00	5.072.835.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.359.474.780,00	5.046.735.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	86.247.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	86.247.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.011.636.000,00	1.009.641.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.642.000,00	54.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.374.000,00	66.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.386.000,00	41.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	485.821.000,00	485.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.733.000,00	317.738.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.842.000,00	866.437.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.380.000,00	47.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.100.000,00	221.837.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.362.000,00	597.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.245.000,00	469.284.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.275.000,00	275.314.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.812.000,00	18.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.812.000,00	18.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.812.000,00	18.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.255.989.000,00	3.232.908.750,00	308.400.000,00	308.240.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.146.480.000,00	1.145.425.150,00	308.400.000,00	308.240.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	354.000.000,00	352.945.150,00	308.400.000,00	308.240.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	761.480.000,00	761.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.109.509.000,00	2.087.483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	188.985.000,00	188.823.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.920.524.000,00	1.898.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		KECAMATAN UJUNG	9.133.640.970,00	8.753.473.914,00	29.900.000,00	29.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.029.089.470,00	5.672.972.474,00	29.900.000,00	29.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.886.265.670,00	3.690.476.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.837.665.670,00	3.643.426.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000,00	41.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.605.000,00	129.846.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.605.000,00	125.846.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.557.800,00	644.380.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.046.500,00	20.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.948.500,00	34.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.505.000,00	44.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.960.000,00	33.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	238.243.000,00	230.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.854.800,00	280.040.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	29.900.000,00	29.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	29.900.000,00	29.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.751.000,00	843.791.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.500.000,00	27.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.341.000,00	151.194.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.910.000,00	665.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.910.000,00	345.976.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.460.000,00	191.300.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000,00	46.603.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.450.000,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000,00	64.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.000.000,00	54.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.000.000,00	54.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.000.000,00	54.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.007.301.500,00	2.983.281.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.208.982.500,00	1.206.903.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.300.000,00	135.288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.049.682.500,00	1.047.614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.798.319.000,00	1.776.378.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	317.339.000,00	315.548.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.480.980.000,00	1.460.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.151.937.614,00	16.830.883.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.552.995.347,00	3.336.346.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.700.000,00	12.698.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.709.209.881,00	2.548.264.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.679.509.881,00	2.518.564.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.419.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.419.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.721.988,00	248.342.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.690.000,00	16.849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.131.988,00	28.243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	173.349.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.441.878,00	194.224.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	17.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.221.878,00	76.272.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.220.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.921.600,00	283.397.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.922.500,00	134.062.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.999.100,00	144.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.114.314.375,00	1.092.141.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.114.314.375,00	1.092.141.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.800.000,00	65.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.009.314.375,00	993.659.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	23.200.000,00	23.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000,00	4.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.901.479.992,00	10.883.049.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10.901.479.992,00	10.883.049.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000,00	4.946.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	67.814.600,00	67.713.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.782.349.392,00	10.764.721.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45.306.000,00	44.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.010.000,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	524.498.700,00	520.763.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	524.498.700,00	520.763.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.999.500,00	28.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	426.999.700,00	424.982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	33.000.000,00	32.951.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.499.500,00	28.830.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	313.499.200,00	309.299.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	313.499.200,00	309.299.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	164.599.600,00	163.319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	97.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	33.000.000,00	32.820.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10.899.600,00	10.571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	745.150.000,00	689.283.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	745.150.000,00	689.283.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.700.000,00	4.354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Anggaran	Realisasi
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	144.975.500,00	144.567.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.250.000,00	51.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	41.224.500,00	41.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.33.0000	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	447.962.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				791.027.550.012,00	747.490.682.432,00	192.129.848.540,00	145.499.419.851,00	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	0,00	0,00



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
AUDITED

DALAM RUPIAH

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
			2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	17.140.978.048,39	17.795.662.592,76
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	17.140.978.048,39	17.795.662.592,76
3	Subtotal ( 1 - 2 )		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	12.894.059.620,59	17.143.288.676,39
5	Subtotal ( 3 + 4 )		12.894.059.620,59	17.143.288.676,39
6	Koreksi Kesalahan +/- Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	(2.018.000,00)	(2.310.628,00)
7	Lain-lain (LP SAL)	7.5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7 )		12.892.041.620,59	17.140.978.048,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Pj. WALI KOTA PAREPARE,

AKBAR ALI



3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 LAPORAN OPERASIONAL  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
 AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	<b>7.5.4.1</b>	<b>921.007.028.277,07</b>	<b>912.610.940.617,70</b>	<b>8.396.087.659,4</b>	<b>0,92</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>7.5.4.1.1</b>	<b>206.289.738.035,14</b>	<b>157.538.611.762,89</b>	<b>48.751.126.272,25</b>	<b>30,95</b>
Pendapatan Pajak Daerah-LO	7.5.4.1.1.a	44.159.260.036,68	39.010.359.552,35	5.148.900.484,33	13,20
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	7.5.4.1.1.b	7.395.077.915,44	7.057.697.524,40	337.380.391,04	4,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.5.4.1.1.e	8.850.373.578,00	8.943.966.033,00	(93.592.455,00)	(1,05)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.5.4.1.1.d	145.885.026.505,02	102.526.588.653,14	43.358.437.851,88	42,29
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	<b>7.5.4.1.2</b>	<b>699.420.305.454,25</b>	<b>718.008.031.679,00</b>	<b>(18.587.726.224,75)</b>	<b>(2,59)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	7.5.4.1.2.a	632.640.145.326,00	626.922.903.431,00	5.717.241.895,00	0,91
Dana Perimbangan-LO	7.5.4.1.2.a.1)	604.377.652.326,00	606.209.286.431,00	(1.831.634.105,00)	(0,30)
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	7.5.4.1.2.a.2)	28.262.493.000,00	20.713.617.000,00	7.548.876.000,00	36,44
Transfer Antar Daerah-LO	7.5.4.1.2.b	66.780.160.128,25	91.085.128.248,00	(24.304.968.119,75)	(26,68)
Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	7.5.4.1.2.b.1)	60.948.564.628,25	57.137.617.248,00	3.810.947.380,25	6,67
Bantuan Keuangan-LO	7.5.4.1.2.b.2)	5.831.595.500,00	33.947.511.000,00	(28.115.915.500,00)	(82,82)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>7.5.4.1.3</b>	<b>15.296.984.787,68</b>	<b>35.550.273.913,81</b>	<b>(20.253.289.126,13)</b>	<b>(56,97)</b>
Pendapatan Hibah-LO	7.5.4.1.3.a.	15.296.984.787,68	35.550.273.913,81	(20.253.289.126,13)	(56,97)
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>7.5.4.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.023.262,00</b>	<b>(1.514.023.262,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	1.514.023.262,00	(1.514.023.262,00)	(100,00)
<b>BEBAN DAERAH-LO</b>	<b>7.5.4.2</b>	<b>908.510.532.710,75</b>	<b>848.005.007.704,04</b>	<b>61.310.908.340,04</b>	<b>7,23</b>
<b>BEBAN OPERASI-LO</b>	<b>7.5.4.2.1</b>	<b>768.516.047.835,55</b>	<b>717.036.410.692,64</b>	<b>51.479.637.142,91</b>	<b>7,18</b>
Beban Pegawai-LO	7.5.4.2.1.a	337.812.071.998,00	337.869.043.491,00	(56.971.493,00)	(0,02)
Beban Barang dan Jasa-LO	7.5.4.2.1.b	410.773.793.616,81	349.046.434.296,92	61.727.359.319,89	17,68
Beban Bunga-LO	7.5.4.2.1.c	883.080.479,91	607.467.100,44	275.613.379,47	45,37
Beban Hibah-LO	7.5.4.2.1.d	18.105.980.834,00	27.469.489.435,36	(9.363.508.601,36)	(34,09)
Beban Bantuan Sosial-LO	7.5.4.2.1.e	284.074.000,00	1.749.962.500,00	(1.465.888.500,00)	(83,77)
Beban Penyisihan Piutang - LO	7.5.4.2.1.f	657.046.906,83	294.013.868,92	363.033.037,91	123,47
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI-LO</b>	<b>7.5.4.2.2</b>	<b>135.386.326.513,20</b>	<b>129.834.727.405,07</b>	<b>5.551.599.108,13</b>	<b>4,28</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	7.5.4.2.2.a	60.355.448.218,03	65.321.858.902,19	(4.966.410.684,16)	(7,60)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan- LO	7.5.4.2.2.b	22.444.171.162,97	21.718.982.655,47	725.188.507,50	3,34
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi- LO	7.5.4.2.2.c	52.214.105.813,87	42.305.055.030,77	9.909.050.783,10	23,42
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya- LO	7.5.4.2.2.d	153.519.208,34	143.933.791,66	9.585.416,68	6,66
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- LO	7.5.4.2.2.e	219.082.109,99	344.897.024,98	(125.814.914,99)	(36,48)
<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>7.5.4.2.3</b>	<b>4.608.158.362,00</b>	<b>328.486.273,00</b>	<b>4.279.672.089,00</b>	<b>(92,25)</b>
Beban Tak Terduga		4.608.158.362,00	328.486.273,00	4.279.672.089,00	1.302,85
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>7.5.4.2.4</b>	<b>5.260.688.869,00</b>	<b>805.383.333,33</b>	<b>4.455.305.535,67</b>	<b>553,19</b>
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.4.2.4.a	132.556.000,00	0,00	132.556.000,00	100,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	7.5.4.2.4.b	5.128.132.869,00	805.383.333,33	4.322.749.535,67	536,73
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>7.235.806.697,32</b>	<b>64.605.932.913,66</b>	<b>(57.370.126.216,34)</b>	<b>(88,80)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>7.5.4.3</b>	<b>7.235.806.697,32</b>	<b>64.605.932.913,66</b>	<b>(57.370.126.216,34)</b>	<b>(88,80)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALI KOTA PAREPARE,  
 IKOTAPAREPARE,  
 AKBAR ALI

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
 AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>7.5.6.1</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>	<b>2.190.061.652.653,56</b>
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>7.5.6.2</b>	<b>7.235.806.697,32</b>	<b>64.605.932.913,66</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>7.5.6.3</b>	<b>14.213.249.580,03</b>	<b>2.203.078.568,43</b>
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	7.5.6.3.1	(2.018.000,00)	(2.310.628,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	7.5.6.3.2	(13.063.894,00)	(98.461.235,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	7.5.6.3.3	(257.021.639,00)	355.000,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	7.5.6.3.4	15.533.000.000,00	(0,60)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	7.5.6.3.5	11.270.591.469,43	2.282.769.703,83
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	7.5.6.3.6	(12.323.568.434,80)	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	7.5.6.3.7	0,00	20.725.728,20
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	7.5.6.3.8	5.330.078,40	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>7.5.6.4</b>	<b>2.278.319.720.413,00</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. WALIKOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI



5. NERACA



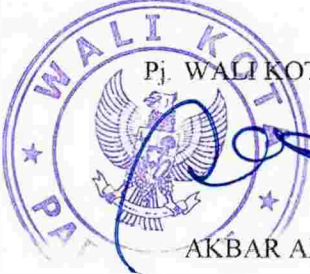

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 NERACA  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SA MPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
 AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFFCALK	TAHUN2023	TAHUN2022
<b>ASET</b>		<b>2.322.229.730.008,18</b>	<b>2.300.259.690.600,04</b>
<b>ASETLANCAR</b>	<b>7.5.3.1</b>	<b>67.368.427.160,24</b>	<b>67.121.827.552,05</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>7.5.3.1.1</b>	<b>12.899.886.182,59</b>	<b>17.198.681.035,53</b>
Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.a	175.421.627,31	966.132.412,93
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.b	22.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.c	11.807.980,00	57.615.259,00
Kas diBLUD	7.5.3.1.1.d	12.227.750.713,28	15.978.886.369,46
Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.e	176.476.391,00	91.617.492,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.1.1.f	206.059.650,00	25.953.046,00
Kas Lainnya	7.5.3.1.1.g	7.844.562,00	78.476.456,14
Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.3.1.1.h	72.525.259,00	0,00
<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>7.5.3.1.2</b>	<b>43.300.079.754,68</b>	<b>33.691.068.109,02</b>
Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.2.a	10.553.487.873,40	8.791.482.189,10
Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.2.b	90.063.650,00	83.904.633,34
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.2.c	13.911.493.144,28	6.226.779.221,58
Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.2.d	18.745.035.087,00	18.588.902.065,00
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>7.5.3.1.3</b>	<b>1.639.816,00</b>	<b>1.639.816,00</b>
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.3.a	1.257.900,00	1.257.900,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.3.b	381.916,00	381.916,00
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>7.5.3.1.4</b>	<b>(5.984.967.646,39)</b>	<b>(5.333.250.817,96)</b>
Penyisihan Piutang Pendapatan	7.5.3.1.4.a	(5.983.327.830,39)	(5.331.611.001,96)
Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.4.b	(1.639.816,00)	(1.639.816,00)
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>7.5.3.1.5</b>	<b>81.498.430,00</b>	<b>21.314.349,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>7.5.3.1.6</b>	<b>17.070.290.623,36</b>	<b>21.542.375.060,46</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.3.2</b>	<b>103.479.098.872,80</b>	<b>93.074.231.741,80</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>7.5.3.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Bergulir	7.5.3.2.1.a	1.279.397.268,00	1.279.497.268,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.3.2.1.b	(1.279.397.268,00)	(1.279.497.268,00)
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>7.5.3.2.3</b>	<b>103.479.098.872,80</b>	<b>93.074.231.741,80</b>
Penyertaan Modal kepada BUMD		103.479.098.872,80	93.074.231.741,80
<b>ASETTETAP</b>	<b>7.5.3.3</b>	<b>2.093.584.538.238,04</b>	<b>2.089.309.281.193,44</b>
Tanah	7.5.3.3.1	597.834.668.181,63	589.113.386.201,22
Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2	707.918.334.487,97	695.296.901.324,30

URAIAN	REF KALK	TAHUN2023	TAHUN2022
Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3	1.114.003.938.188,26	1076.245.841.496,38
Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.3.3.4	1.169.826.124.893,83	1.080.696.516.331,02
Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5	32.006.004.647,01	28.877.910.791,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.3.6	25.048.181.637,42	50.895.320.239,18
Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7	(1.553.052.713.798,08)	(1.431.816.595.189,67)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>7.5.3.5</b>	<b>57.797.665.737,10</b>	<b>50.754.350.112,76</b>
Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.5.1	7.270.904.332,28	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.5.2	20.250.200.000,00	24.361.466.180,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.3.5.3	2.294.676.112,18	2.294.676.112,18
Aset Lain-lain	7.5.3.5.4	90.513.781.200,99	70.378.513.415,81
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.5.5	(2.043.077.586,34)	(1.823.995.476,35)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.5.6	(62.869.677.322,01)	(46.951.397.531,88)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.5.7	2.380.859.000,00	2.495.087.413,00
<b>KEWAJIBAN</b>		<b>43.910.009.595,18</b>	<b>43.389.026.464,39</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7.5.3.5</b>	<b>41.144.152.562,50</b>	<b>37.857.312.401,71</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.5.1	7.844.562,00	55.080.956,14
Utang Bunga	7.5.3.5.2	259.055.500,76	285.431.835,85
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.5.3	2.765.857.030,74	2.765.857.030,74
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.5.4	628.027.102,35	737.171.556,88
Utang Belanja	7.5.3.5.5	37.483.368.366,65	34.013.771.022,10
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.3.6</b>	<b>2.765.857.032,68</b>	<b>5.531.714.062,68</b>
Utang Pemerintah Pusat		2.765.857.032,68	5.531.714.062,68
<b>EKUITAS</b>		<b>2.278.319.720.413,00</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>7.5.3.7</b>	<b>2.278.319.720.413,00</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>
Ekuitas		2.278.319.720.413,00	2.256.870.664.135,65
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>2.322.229.730.008,18</b>	<b>2.300.259.690.600,04</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*


  
 Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI



6. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAHKOTA PAREPARE  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
 AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>7.5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.a	42.384.557.470,55	38.817.569.022,58
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.b	7.347.758.332,00	7.149.830.207,84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.c	8.850.373.578,00	8.943.966.033,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.5.1.1.d	137.547.459.121,40	118.847.071.795,24
Dana Perimbangan	7.5.5.1.1.e	604.491.880.739,00	603.714.199.018,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.5.1.1.f	28.262.493.000,00	20.713.617.000,00
Dana Desa		0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	7.5.5.1.1.g	63.627.820.106,25	61.815.605.817,00
Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.h	2.996.207.000,00	33.947.511.000,00
Pendapatan Hibah	7.5.5.1.1.i	0,00	12.590.649.500,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>895.508.549.347,20</b>	<b>906.540.019.393,66</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai	7.5.5.1.2.a	337.773.100.480,00	337.161.135.455,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.5.1.2.b	390.492.172.631,00	353.802.391.174,00
Belanja Bunga	7.5.5.1.2.c	909.456.815,00	765.454.390,61
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.5.1.2.d	18.031.878.506,00	7.522.550.135,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.2.e	284.074.000,00	1.780.772.500,00
Belanja Tak Terduga	7.5.5.1.2.f	4.608.158.362,00	4.311.759.265,00
Bagi Hasil		0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>752.098.840.794,00</b>	<b>705.344.062.919,61</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>143.409.708.553,20</b>	<b>201.195.956.474,05</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>7.5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.2.1</b>		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		608.649.900,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>608.649.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.5.2.2</b>		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Modal - Tanah	7.5.5.2.2.a	237.142.300,00	667.419.796,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2.b	28.624.066.144,00	56.762.798.742,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2.c	39.639.645.218,00	56.543.087.027,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2.d	73.898.362.333,00	85.004.417.795,05
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2.e	3.100.203.856,00	104.750.000,00
Belanja Modal - Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>145.499.419.851,00</b>	<b>199.082.473.360,05</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(144.890.769.951,00)</b>	<b>(199.082.473.360,05)</b>



URAIAN	REF KALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>7.5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.3.1</b>		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.5.3.2</b>		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		2.765.857.030,00	2.765.857.030,37
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.765.857.030,00</b>	<b>2.765.857.030,37</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(2.765.857.030,00)</b>	<b>(2.765.857.030,37)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>7.5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.4.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		50.660.991.071,00	30.620.008.755,14
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>50.660.991.071,00</b>	<b>30.620.008.755,14</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.5.4.2</b>		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		50.708.227.465,14	30.605.456.258,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		0,00	0,00
Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>50.708.227.465,14</b>	<b>30.605.456.258,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(47.236.394,14)</b>	<b>14.552.497,14</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>(4.294.154.821,94)</b>	<b>(637.821.419,23)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>7.5.5.6</b>	<b>17.196.059.004,53</b>	<b>17.836.191.051,76</b>
<b>Koreksi SILPA Tahun Lalu</b>	<b>7.5.5.7</b>	<b>(2.018.000,00)</b>	<b>(2.310.628,00)</b>
<b>Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>7.5.5.8</b>	<b>12.899.886.182,59</b>	<b>17.196.059.004,53</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALI KOTA PAREPARE,



AKBAR ALI



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 7.1 PENDAHULUAN

#### 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Selain itu juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan aturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menerapkan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan Keuangan yang merupakan akumulasi representasi dari seluruh komponen kegiatan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan juga merupakan siklus pengelolaan Anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri yang sekaligus merupakan bagian dari pertanggungjawaban daerah tentang pelaksanaan anggaran itu kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan Otonomi Daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa komponen Laporan Keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan .

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:



**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-Undangan.

**d. Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan merupakan laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna (masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemerintah, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah). Tujuan pelaporan menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan untuk tujuan utama juga mempunyai peranan produktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah di peroleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi apakah sumber daya di peroleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana dan Arus Kas Pemerintah Daerah.

#### **7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah;





- l. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3718 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2023;
- cc. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2023;
- dd. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ff. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- gg. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;



- hh. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ii. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

### **7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Pendahuluan
  - 1) Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ;
  - 2) Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan ; dan
  - 3) Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan .
- b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 1) Ekonomi Makro;
  - 2) Kebijakan Keuangan; dan
  - 3) Pencapaian target kinerja APBD.
- c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- d. Kebijakan Akuntansi
  - 1) Entitas akuntansi dan entitas peLaporan Keuangan Daerah;
  - 2) Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan ;
  - 3) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan ; dan
  - 4) Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- e. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- f. Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan
- g. Penutup



## 7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 7.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun Anggaran 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Parepare yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 5,34%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,86%;
- Gini Ratio sebesar 0,381;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,03;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,88% ;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,22%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) (PDRB ADHB) sebesar Rp 9.311.604,00.

#### 7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 7.2.1.1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Parepare**

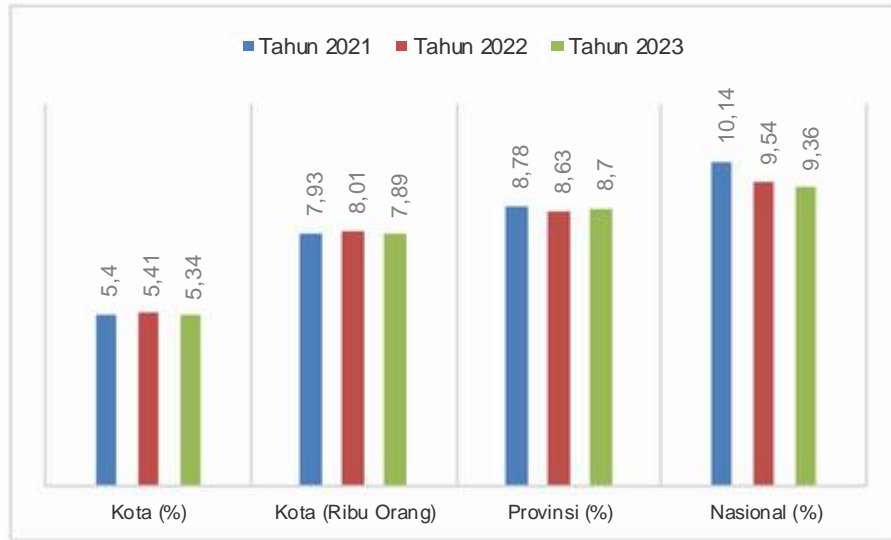
No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Kota (%)	5,40	5,41	5,34	0,07
2	Kota (Ribuan Orang)	7,93	8,01	7,89	0,12
3	Provinsi (%)	8,78	8,63	8,70	0,07



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

4	Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	0,18
---	--------------	-------	------	------	------

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Parepare**

Persentase penduduk miskin Kota Parepare mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 5,41% menjadi 5,34% pada Tahun Anggaran 2023. Persentase penduduk miskin Kota Parepare masih di bawah Provinsi dan Nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

**Tabel 7.2.1.1. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Parepare**

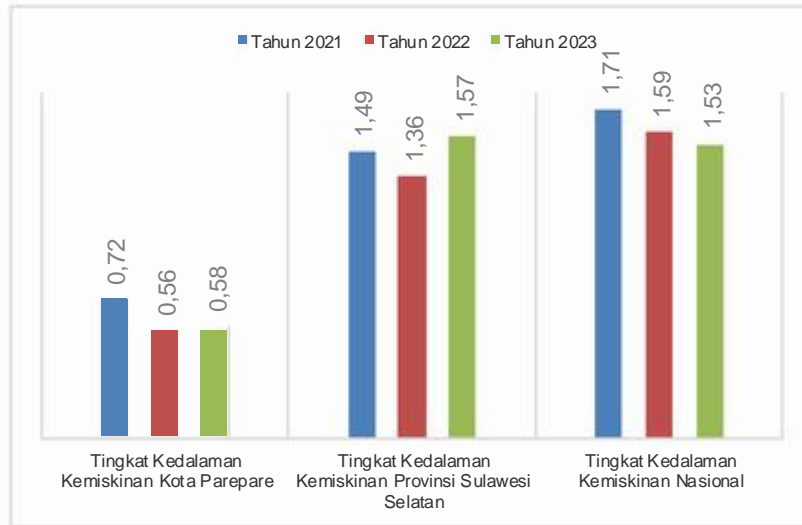
No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Parepare	0,72	0,56	0,58	0,02
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1,49	1,36	1,57	0,21
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,59	1,53	0,06

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

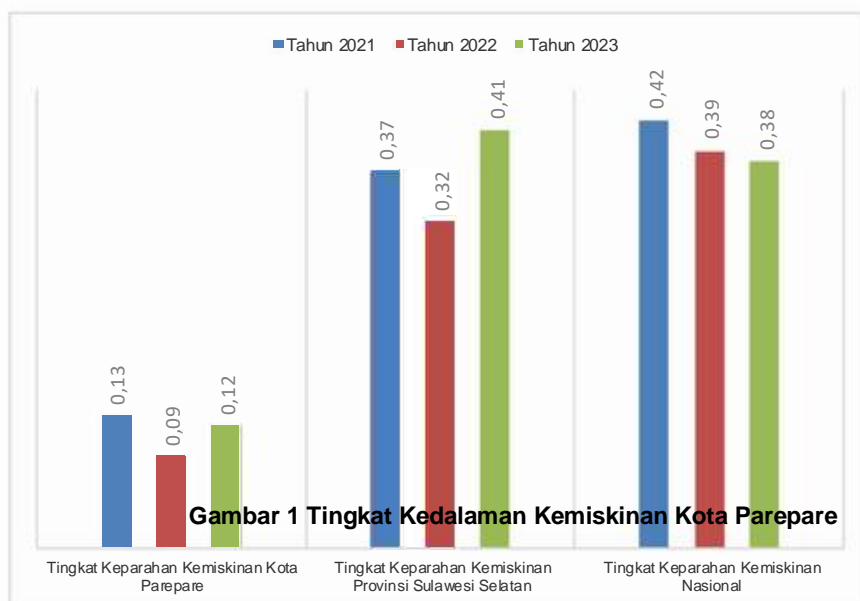


**Gambar 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Parepare**

**Tabel 7.2.1.1. 3 Tingkat Keparahan Kimiskinan Kota Parepare**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Parepare	0,13	0,09	0,12	0,03
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0,37	0,32	0,41	0,09
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38	0,01

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Parepare**



### 7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

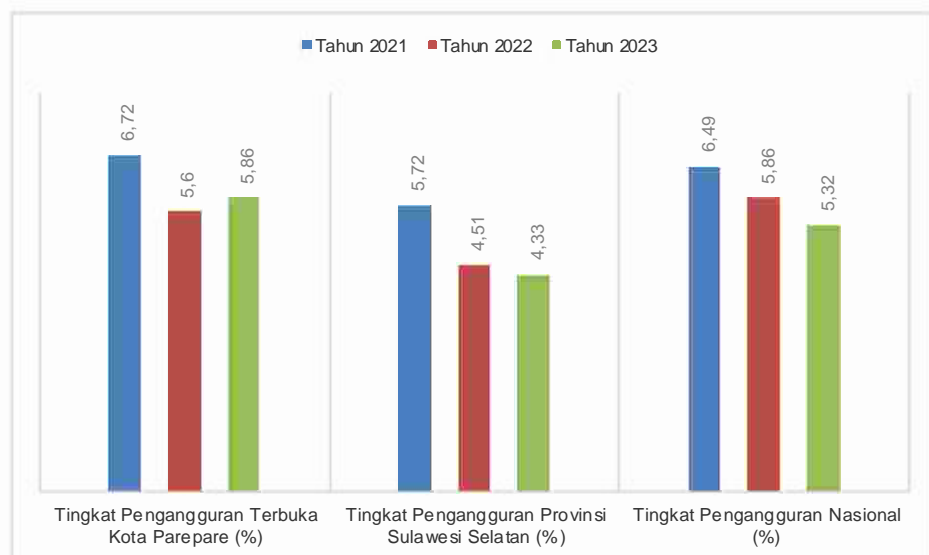
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 5,86%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.1.2. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare (%)	6,72	5,6	5,86	0,26
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5,72	4,51	4,33	0,18
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	0,54

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka sebesar 5,86%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,6% atau mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023 sebesar 4,33% dan 5,32%, TPT Kota Parepare masih lebih



tinggi sebesar 1,53% dari TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan 0,54% dari TPT Nasional.

### 7.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

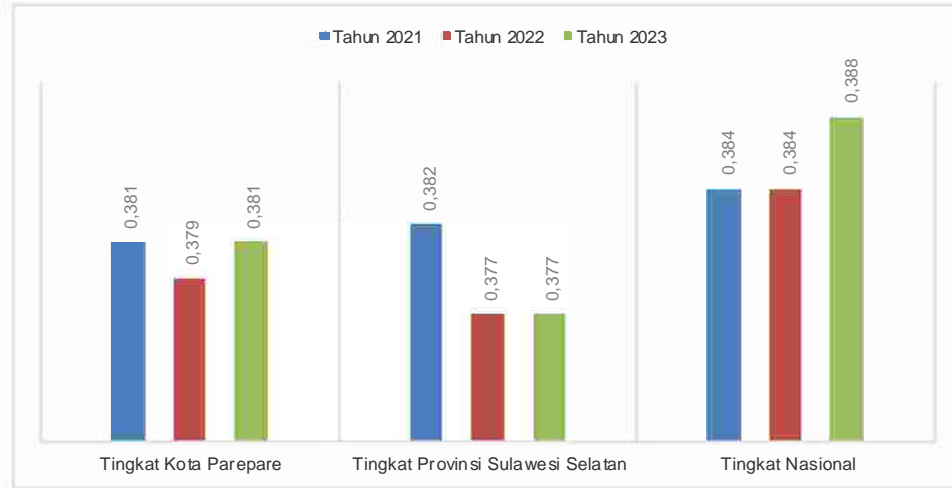
- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 0,381 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.1.3. 1 Gini Ratio Kota Parepare**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Tingkat Kota Parepare	0,381	0,379	0,381	0,002
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0,382	0,377	0,377	0,000
3	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	0,004

*Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023*



**Gambar 5 Gini Ratio Kota Parepare**

Pada Tahun Anggaran 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Parepare yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 sebesar 0,379. Persentase peningkatan Gini Rasio Kota Parepare dari tahun 2022 ke 2023. Jika dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023 sebesar 0,377 dan 0,388, Gini Ratio Kota Parepare masih lebih tinggi sebesar 0,004 dari Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih rendah 0,007 dari Gini Ratio Nasional.

#### 7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, dan Pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ );
- Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ );
- Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ); dan
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2023 adalah sebesar 79,03 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

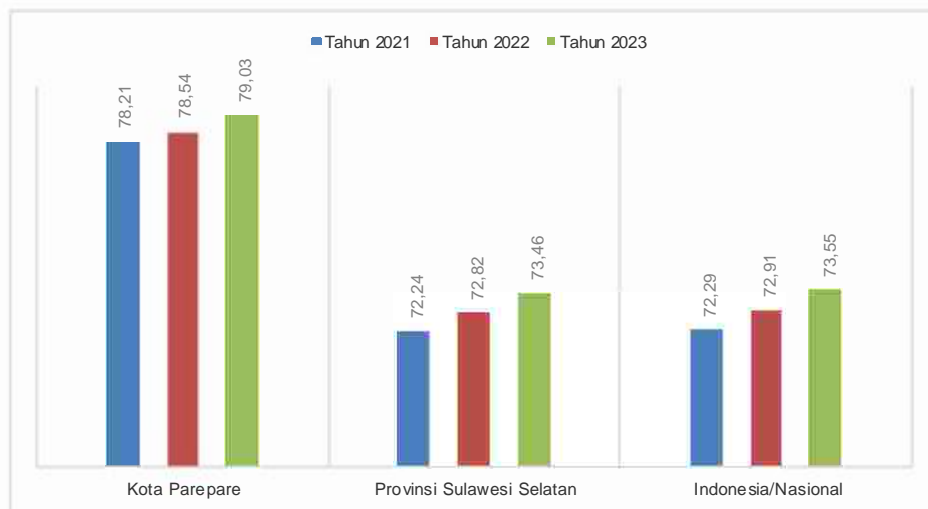


PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.2.1.4. 1 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Kota Parepare	78,21	78,54	79,03	0,49
2	Provinsi Sulawesi Selatan	72,24	72,82	73,46	0,64
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	73,55	0,64

Sumber Dokumen BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 6 Indeks Pembangunan Manusia**

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare adalah sebesar 79,03 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 78,54 poin mengalami kenaikan sebesar 0,49 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

**Tabel 7.2.1.4. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare**

No	Uraian	Kota Parepare			Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (milliar Rp)	5.161,92	5.468,43	5.680,82	377.162,17	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,41	5,93	3,88	4,51	5,05

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare**

PDRB (Harga Kontan 2010) Kota Parepare pada Tahun 2023 sebesar Rp5.680,82 miliar mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2022 sebesar Rp5.468,43 miliar, sedangkan persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

#### 7.2.1.5 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Parepare dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- a) **Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*)**  
Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- b) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)**  
Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c) **Inflasi Berat (*High Inflation*)**  
Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

d) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)

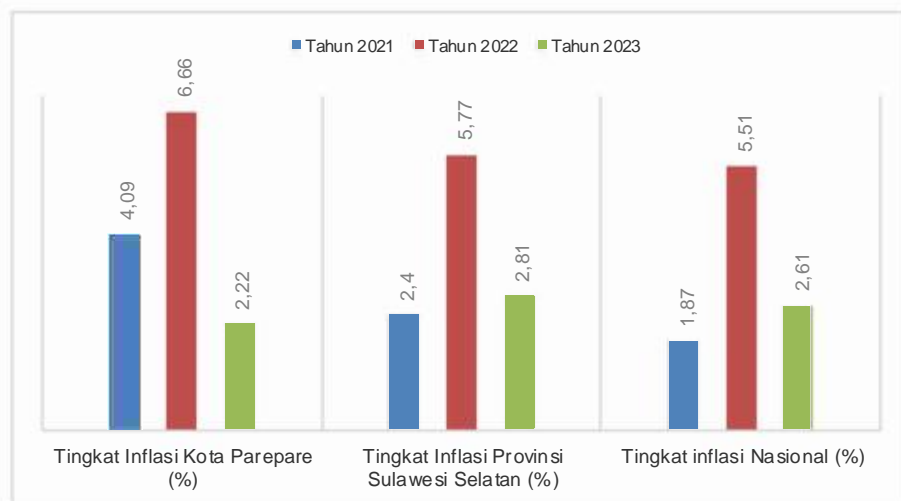
Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare Tingkat Inflasi Kota Parepare Tahun 2023 adalah sebesar 2,22% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.1.5. 1 Tingkat Inflasi Kota Parepare**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Inflasi Kota Parepare (%)	4,09	6,66	2,22	4,44
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	2,40	5,77	2,81	2,96
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	2,90

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 8 Tingkat Inflasi Kota Parepare**

Tingkat inflasi di Kota Parepare Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka sebesar 2,22% atau mengalami penurunan sebesar 4,44% dari tahun sebelumnya dan lebih rendah 0,59% dari inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan 0,39% dari Inflasi Nasional.

#### 7.2.1.6 Struktur Perekonomian Kota Parepare

Struktur perekonomian Kota Parepare dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.





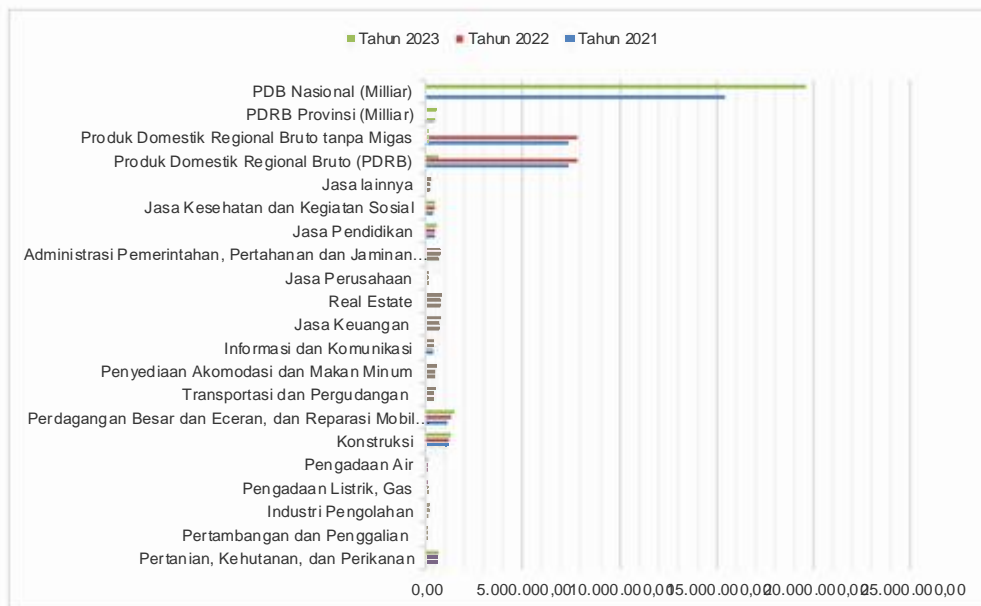
PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.2.1.6. 1 PDRB Seri 2021-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

*dalam jutaan rupiah*

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun Anggaran 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	545,279.11	572,869.65	667,265.97
2	Pertambangan dan Penggalian	21,974.53	22,171.20	23,639.67
3	Industri Pengolahan	148,833.94	161,173.01	190,080.11
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,774.47	5,724.69	6,503.52
5	Pengadaan Air	19,945.73	20,316.73	26,873.65
6	Konstruksi	1,131,620.42	1,199,364.00	1,430,622.57
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,136,602.60	1,250,184.73	1,575,479.20
8	Transportasi dan Pergudangan	339,510.25	374,338.09	553,646.16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	461,613.80	495,394.91	622,200.24
10	Informasi dan Komunikasi	344,750.79	365,385.14	393,784.89
11	Jasa Keuangan	625,788.98	690,056.09	721,600.45
12	Real Estate	761,812.91	785,754.74	859,877.37
13	Jasa Perusahaan	17,490.53	18,554.15	22,985.86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	669,367.21	718,916.20	756,011.60
15	Jasa Pendidikan	502,623.34	504,761.90	672,707.75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	388,869.90	436,492.61	496,810.27
17	Jasa lainnya	201,792.79	204,780.37	291,514.74
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7,826,238.24	8,697,277.09	9,311,604.00
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	7,826,238.24	8,697,277.09	9,311,604.00
20	PDRB Provinsi (Miliar)	545 230,03	605 148,86	652 574,05
21	PDB Nasional (Miliar)	16 970 789,20	19.588.089,9	20.892.376,7

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2023



**Gambar 9 PDRB Seri 2021-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**



### **7.2.2 Kebijakan Keuangan**

Pendapatan Daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka Otonomi Daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di Perkotaan dan Pedesaan, Pembangunan Irigasi, Jaringan Jalan dan Jembatan, Pelestarian Lingkungan Areal Pertambangan, Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan. Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi Kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang layak serta mengembangkan Sistem Jaminan Sosial.

### **7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Parepare, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi Pencapaian Target Kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam Laporan Kinerja Keuangan Daerah.



### 7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.3.1. 1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

*dalam rupiah*

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	982.802.420.504,00	896.117.199.247,20	91,18
Belanja Daerah	991.927.398.552,00	897.598.260.645,00	90,49
Penerimaan Pembiayaan Daerah	17.140.978.048,00	17.138.960.048,39	99,99
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.016.000.000,00	2.765.857.030,00	34,50

**Tabel 7.3.1. 2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

*dalam rupiah*

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Perkembangan	%
Pendapatan Daerah	906.540.019.393,66	896.117.199.247,20	(10.422.820.146,46)	1,15
Belanja Daerah	904.426.536.279,66	897.598.260.645,00	(6.828.275.634,66)	0,75
Penerimaan Pembiayaan Daerah	17.793.351.964,76	17.138.960.048,39	(654.391.916,37)	3,68
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.765.857.030,37	2.765.857.030,00	(0,37)	0,00

#### 7.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dialami atau dihadapi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja khususnya pendapatan, antara lain:

- Pendapatan Bagi Hasil Provinsi tidak tercapai 100%. Terutama Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, serta Bantuan Keuangan Khusus.
- Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Pendapatan Daerah perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang tidak mencapai realisasi target pendapatan sampai dengan akhir tahun berkenaan.
- Masih adanya subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang terkait dengan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pengendalian dan pengawasan perlu dilaksanakan secara periodik dan menghimbau Wajib Pajak untuk membuat pembukuan.
- Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan khususnya Wajib Pajak Daerah yang menggunakan M-Pos (Alat Online Pajak Daerah).



- e. Untuk penerimaan lain-lain pada Dinas Perdagangan adalah penerimaan uang muka atas Los dan Kios Pasar Semi Modern Lakessi. Langkah-langkah identifikasi lebih lanjut atas hambatan pemungutan uang muka pasar perlu untuk dievaluasi lebih lanjut, salah satunya adalah telah dilakukan pendataan jumlah piutang dan nama pedagang pemilik pasar yang belum melunasi uang muka pasar. Diharapkan dengan adanya data tersebut, solusi dan langkah penanganan pemungutan uang muka Pasar Lakessi segera membaik dan peningkatan PAD lebih optimal.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belanja antara lain:

- a. Terdapat beberapa kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak direalisasikan pembayarannya 100% berhubung karena realisasi fisiknya belum capai 100%, sehingga pekerjaan tersebut didenda karena melewati batas kontrak dan terdapat pekerjaan fisik sudah 100% belum dibayarkan diakui sebagai Utang Belanja pada Neraca;
- b. Paradigma baru Pengelolaan Keuangan Daerah, masih ada Peraturan Pengelolaan Keuangan yang terkadang tidak simetris dengan peraturan lainnya, di samping itu reformasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang keuangan yang berjalan dengan cepat, sehingga masih ada perangkat daerah yang belum memahami sepenuhnya mekanisme serta data-data yang mendukung dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
- c. Terdapat belanja yang melebihi anggaran hal ini terjadi pada RSUD Andi Makkasau yang berstatus BLUD. Adapun belanja yang melebihi anggaran pada RSUD Andi Makkasau yaitu:
- 1) Belanja Barang terjadi kelebihan sebesar 17,61% merupakan kelebihan Belanja Obat-obatan dan Belanja Makanan dan Minuman fasilitas kesehatan dan dampak dari peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap.
  - 2) Belanja Jasa terjadi kelebihan sebesar 14,29% hal ini terjadi karena komponen utama Belanja Jasa Tenaga Kesehatan adalah Belanja Jasa Pelayanan untuk dokter, perawat, dan administrasi. Belanja Jasa Pelayanan berbanding lurus dengan penerimaan rumah sakit. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan adalah dampak dari peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap juga merupakan Belanja Rutin Dan Fleksibel yang pembayarannya tidak bisa ditunda/ditahan.

### **7.3.3 Penerimaan Dana Transfer**

Dana Transfer ke daerah adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan salah satu sumber pendanaan bagian dari Belanja Negara yang selanjutnya akan dialokasikan atau disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ranah kewenangan daerah.

Berikut data tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Parepare secara umum disajikan dalam tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.3.3. 1 Pendapatan Transfer**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.890.932.000,00	632.754.373.739,00	99,35	624.427.816.018,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.749.784.409,00	66.624.027.106,25	41,19	95.763.116.817,00
<b>Jumlah</b>		<b>798.640.716.409,00</b>	<b>699.378.400.845,25</b>	<b>87,57</b>	<b>720.190.932.835,00</b>

Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer pada Pemerintah Kota Parepare secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yaitu:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.3.3. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Perimbangan	608.628.439.000,00	604.491.880.739,00	99,32	603.714.199.018,00
2	Dana Insentif Fiskal	28.262.493.000,00	28.262.493.000,00	100,00	20.713.617.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>636.890.932.000,00</b>	<b>632.754.373.739,00</b>	<b>99,35</b>	<b>624.427.816.018,00</b>

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat terbagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal. Adapun realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp604.491.880.739,00 dengan anggaran sebesar Rp608.628.439.000,00 atau mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp777.681.721,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya yaitu terealisasi sebesar Rp603.714.199.018,00. Sementara Dana Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp28.262.493.000,00 dengan nilai anggaran yang sama atau mencapai persentase realisasi 100,00%. Realisasi tersebut terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7.548.876.000,00.

Dana transfer dimaksud memiliki klasifikasi dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang diberikan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk persentase tersendiri yang bertujuan untuk pelaksanaan desentralisasi dan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah penghasil dengan yang bukan penghasil sumber daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Secara spesifik penggunaan Dana DBH tidak dikhususkan namun ada beberapa bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DBH yang telah ditetapkan dalam bentuk *grant*. Pada Pemerintah Kota Parepare DBH dianggarkan sebesar Rp11.716.505.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.205.389.573,00 atau dengan nilai persentase 129,76%.



- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN kepada daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah secara menyeluruh utamanya yang menjadi Belanja Wajib atau yang menjadi kegiatan prioritas, seperti Belanja Gaji, Pelayanan Publik, maupun belanja Kegiatan Operasional. Pemerintah Kota Parepare sendiri mempunyai DAU yang dianggarkan sebesar Rp445.715.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp445.268.434.128,00 atau dengan persentase perbandingan sebesar 99,90%.
  - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari Pemerintah Pusat yang bertujuan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkhusus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, maupun Perlindungan Sosial serta konektivitas antar wilayah di daerah. Untuk Pemerintah Daerah Kota Parepare menganggarkan DAK Fisik sebesar Rp68.512.788.000,00 yang terealisasi sebesar Rp65.244.248.080,00 dengan nilai persentase 95,23%.
  - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang diberikan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui dana yang sifatnya khusus misalnya untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Publik yang penggunaannya telah ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kota Parepare menganggarkan DAK Non Fisik sebesar Rp82.683.481.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.775.808.958,00 dengan persentase 95,27%.
  - 5) Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu yang bertujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, Pelayanan Umum Pemerintahan, Pelayanan Dasar Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat. Pada Pemerintah Daerah Kota Parepare DID dianggarkan sebesar Rp28.262.493.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.262.493.000,00 atau nilai persentase mencapai 100,00%.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- Terdapat realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp66.624.027.106,25 dengan nilai persentase 41,19% berdasarkan anggaran sebesar Rp161.749.784.409,00 Capaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.139.089.710,75 atau 30,43% dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya yang sebesar Rp95.763.116.817,00.

Secara garis besar anggaran dan realisasi dari Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.3.3. 3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	153.868.634.409,00	63.627.820.106,25	41,35	61.815.605.817,00
2	Bantuan Keuangan	7.881.150.000,00	2.996.207.000,00	38,02	33.947.511.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>161.749.784.409,00</b>	<b>66.624.027.106,25</b>	<b>41,19</b>	<b>95.763.116.817,00</b>

Ketidakefektifan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak diakibatkan karena tidak terselurnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan pada Bulan Oktober, November dan Desember serta tidak terselurnya Pendapatan Bagi Hasil Rokok Triwulan Keempat.

Sedangkan, Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.951.304.000,00 atau dengan persentase 91,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp33.947.511.000,00. Bantuan Keuangan tersebut merupakan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Parepare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdapat sisa Dana Transfer Tahun Anggaran 2023 yang tersaji pada **Lampiran 1**.

#### **7.3.4 Program Prioritas**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, prioritas belanja daerah harus digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dimana terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Terkait Urusan Pemerintahan Wajib, belanja daerah dialokasikan dengan prioritas pendanaan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Sedangkan urusan pemerintah pilihan, belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut di atas dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018 s.d. 2023, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

a. Tujuan

**Tabel 7.3.4. 1 Tujuan Program Prioritas**

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Strategis Bidang Kesehatan Pendidikan dan Kepariwisata	Kontribusi Sektor Prioritas Terhadap PDRB
2	Memberikan Pelayanan yang prima dan profesional serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	PDRB per kapita
4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan manusia
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi
6	Mendorong iklim keutamaan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat berbasis budaya lokal	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

b. Sasaran Strategis

**Tabel 7.3.4. 2 Sasaran Strategis**

No	Sasaran Pembangunan Kota Parepare	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan	Kontribusi lapangan usaha Kesehatan terhadap PDRB
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan	Kontribusi lapangan usaha Pendidikan terhadap PDRB
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pariwisata	Kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB dan PAD sector pariwisata terhadap total PAD
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan capaian SPM
5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Rata-rata indeks pelayanan public
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
7	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Gini Ratio)
8	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
9	Terjaganya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dalam Mendukung kegiatan perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan
12	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
13	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks pemberdayaan gender
14	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini BPK
15	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Predikat SPBE (Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik)
16	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Angka kriminalitas yang tertangani





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Kinerja belanja pemerintah kota parepare program prioritas Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp478.505.045.404,00 dan terealisasi sebesar Rp419.820.914.121,00 atau persentase mencapai 87,74% yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.3.4. 3 Sasaran Strategis pada Program Prioritas**

*dalam rupiah*

No	Program Prioritas	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan	13.593.191.090,00	7.129.925.053,00	55,96%
2	Pengembangan infrastruktur daerah untuk penguatan pemulihan ekonomi daerah.	154.457.847.878,00	107.848.106.768,00	69,82%
3	Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif	216.424.117.946,00	221.005.311.632,00	102,12%
4	Pengembangan kepariwisataan.	1.952.646.200,00	1.882.298.280,00	96,40%
5	Perluasan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran	376.413.160,00	361.080.942,00	95,93%
6	Pengembangan Ketahanan pangan serta peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan	4.116.131.546,00	3.241.249.334,00	78,75%
7	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.	13.004.445.880,00	11.972.333.103,00	92,06%
8	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara menuju reformasi birokrasi yang melayani	74.580.251.704,00	66.380.609.009,00	89,01%
<b>TOTAL</b>		<b>478.505.045.404,00</b>	<b>419.820.914.121,00</b>	<b>87,74%</b>

Rincian atas masing-masing program prioritas tersaji dalam **Lampiran 2**.

### 7.3.5 *Mandatory Spending*

*Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan); dan
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Urusan wajib yang merupakan kewenangan daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat guna mencapai standar pelayanan minimal yaitu terkait pendidikan dan kesehatan.

a. Pendidikan

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan *mandatory spending* pada bidang Pendidikan adalah sebesar Rp224.847.284.360,00 dan terealisasi sebesar Rp212.046.681.574,00 dengan angka persentase 94,31%. Anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2023 dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Berikut rincian program berdasarkan *mandatory spending* yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.3.5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Pendidikan**

*dalam rupiah*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	166.167.981.253,00	154.680.271.595,00	93,09
Program Pengelolaan Pendidikan	32.626.854.990,00	32.311.429.185,00	99,03
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Program Pengembangan Kebudayaan	148.515.000,00	147.238.200,00	99,14
Program Pembinaan Sejarah	130.196.000,00	117.355.600,00	90,14
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	687.668.100,00	671.302.600,00	97,62
Program Pengelolaan Permuseuman	81.200.000,00	81.200.000,00	100,00
Program Pembinaan Perpustakaan	11.432.380.800,00	10.854.050.784,00	94,94
Program Pengelolaan Arsip	48.818.077,00	48.566.200,00	99,48
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	13.050.000,00	1.511.900,00	11,59
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.073.700.220,00	1.069.683.419,00	99,63
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.565.641.950,00	4.419.627.696,00	96,80
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	254.324.200,00	252.835.000,00	99,41
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	359.298.200,00	321.443.969,00	89,46
Program Pemasaran Pariwisata	1.517.190.900,00	1.480.621.911,00	97,59
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	81.122.500,00	80.232.400,00	98,90
<b>Total</b>	<b>219.207.942.190,00</b>	<b>206.557.370.459,00</b>	<b>94,23</b>

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Rincian Program yang bersumber dari pendanaan *Mandatory Spending* terbagi atas dua SKPD dirinci sebagai berikut:



- 1) Dinas Pendidikan
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 di alokasikan sebesar Rp156.811.087.695,00 dan terealisasi sebesar Rp145.975.122.406,00 atau 93,09% dari anggaran yang direncanakan.
  - b) Program Pengelolaan Pendidikan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp32.626.854.990,00 dan terealisasi sebesar Rp32.311.429.185,00 atau 99,03% dari anggaran yang direncanakan.
  - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang direncanakan.
  - d) Program Pengembangan Kebudayaan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp148.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp147.238.200,00 atau 99,14% dari anggaran yang direncanakan.
  - e) Program Pembinaan Sejarah  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp130.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp117.355.600,00 atau 90,14% dari yang direncanakan.
  - f) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp687.668.100,00 dan terealisasi sebesar Rp671.302.600,00 atau 97,62% dari yang direncanakan.
  - g) Program Pengelolaan Permuseuman  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp81.200.000,00** dan terealisasi sebesar Rp81.200.000,00 atau 100,00% dari yang direncanakan.
- 2) Dinas Perpustakaan
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.173.952.910,00 dan terealisasi sebesar Rp3.005.220.233,00 atau 94,68% dari yang direncanakan.
  - b) Program Pembinaan Perpustakaan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.432.380.800,00 dan terealisasi sebesar Rp10.854.050.784,00 atau 94,94% dari yang direncanakan.
  - c) Program Pengelolaan Arsip  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp48.818.077,00 dan terealisasi sebesar Rp48.566.200,00 atau 99,48% dari yang direncanakan.



- 
- d) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.511.900,00 atau 11,59% dari yang direncanakan.
- 3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 6.182.940.648,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.699.928.956,00 atau 92,19% dari yang direncanakan.
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.073.700.220,00 dan terealisasi sebesar Rp1.069.683.419,00 atau 99,63% dari yang direncanakan.
- c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.565.641.950,00 dan terealisasi sebesar Rp4.419.627.696,00 atau 96,80% dari yang direncanakan.
- d) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp254.324.200,00 dan terealisasi sebesar Rp252.835.000,00 atau 99,41% dari yang direncanakan.
- e) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp359.298.200,00 dan terealisasi sebesar Rp321.443.696,00 atau 89,46% dari yang direncanakan.
- f) Program Pemasaran Pariwisata  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.517.190.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.480.621.911,00 atau 97,59% dari yang direncanakan.
- g) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp81.122.500,00 dan terealisasi sebesar Rp80.232.400,00 atau 98,90% dari yang direncanakan.
- b. Kesehatan  
Pemerintah Kota Parepare dalam pemenuhan *mandatory spending* bidang Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp259.241.711.123,00 dan terealisasi sebesar Rp264.229.533.606,00 atau dengan nilai persentase sebesar 101,92%. *Mandatory Spending* bidang kesehatan tersebut dikelola penganggarnya oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD A. Makassar dan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Adapun program yang dikelola oleh kedua SKPD tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.3.5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kesehatan**

*dalam rupiah*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.648.767.976,00	79.259.543.896,00	99,51
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	176.115.718.447,00	182.265.118.095,00	103,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	935.055.800,00	695.052.015,00	74,33
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	330.908.000,00	272.336.000,00	82,30
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.211.260.900,00	1.737.483.600,00	78,57
<b>Total</b>	<b>259.241.711.123,00</b>	<b>264.229.533.606,00</b>	<b>101,92</b>

Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun fungsi Kesehatan di anggarkan pada dua SKPD yang mencakup program sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.945.977.998,00 dan terealisasi sebesar Rp29.726.329.316,00 atau 87,57% dari yang direncanakan.
  - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.206.887.776,00 dan terealisasi sebesar Rp43.120.173.859,00 atau 91,34% dari yang direncanakan.
  - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp527.124.300,00 dan terealisasi sebesar Rp293.633.006,00 atau 55,70% dari yang direncanakan.
  - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp330.908.000,00 dan terealisasi sebesar Rp272.336.000,00 atau 82,30% dari yang direncanakan.
  - e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.141.280.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.668.303.100,00 atau 77,91% dari yang direncanakan.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- 2) RS dr. Hasri Ainun Habibie
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp18.256.450.876,00 dan terealisasi sebesar Rp22.255.648.668,00 atau 121,91% dari yang direncanakan.
  - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.072.507.712,00 dan terealisasi sebesar Rp13.876.540.249,00 atau 92,07% dari yang direncanakan.
  - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp407.931.500,00 dan terealisasi sebesar Rp401.419.009,00 atau 98,40% dari yang direncanakan.
  - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp69.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.180.500,00 atau 98,86% dari yang direncanakan.
- 3) RSUD A. Makkasau
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.446.339.102,00 dan terealisasi sebesar Rp27.277.565.912,00 atau 99,39% dari yang direncanakan.
  - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp113.836.322.959,00 dan terealisasi sebesar Rp125.268.403.987,00 atau 110,04% dari yang direncanakan.
- c. Infrastruktur
- Belanja *Mandatory Spending* bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kota Parepare dianggarkan sebesar Rp149.366.382.593,00 dan terealisasi sebesar Rp101.019.449.705,00 dengan angka persentase 67,63%. Penganggaran belanja tersebut dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Parepare.

**Tabel 7.3.5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Infrastruktur**

*dalam rupiah*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.494.818.883,00	9.385.025.166,00	81,65
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2.152.003.870,00	1.403.599.210,00	65,22





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.423.324.800,00	4.008.864.434,00	90,63
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.001.500.000,00	726.040.000,00	72,50
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.031.980.860,00	1.653.327.200,00	81,37
Program Penataan Bangunan Gedung	6.529.039.100,00	4.462.999.860,00	68,36
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.218.408.750,00	3.658.191.150,00	50,68
Program Penyelenggaraan Jalan	80.717.877.955,00	55.206.555.914,00	68,39
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	125.000.000,00	70.247.200,00	56,20
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.257.535.712,00	931.235.856,00	74,05
Program Pengembangan Perumahan	50.041.000,00	14.877.800,00	29,73
Program Kawasan Permukiman	15.970.593.890,00	8.402.130.886,00	52,61
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.280.265.873,00	6.247.575.400,00	75,45
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	6.899.333.900,00	4.567.437.329,00	66,20
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000,00	34.200.000,00	68,40
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.100.000.000,00	239.197.300,00	21,75
Program Pengelolaan Tanah Kosong	64.658.000,00	7.945.000,00	12,29
<b>Total</b>	<b>149.366.382.593,00</b>	<b>101.019.449.705,00</b>	<b>67,63</b>

d. Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan anggaran pengawasan ke dalam APBD TA 2023 sebesar Rp 7.664.284.105,00 atau 0,77% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp991.927.398.552,00

Anggaran Mandatory Spending bidang pengawasan Pemerintah Kota Parepare dikelola oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Kota Parepare. Berikut program yang dikelola terkait bidang pengawasan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.3.5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Pengawasan**

*dalam rupiah*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.175.847.305,00	6.797.636.368,00	94,73
Program Penyelenggaraan Pengawasan	239.722.700,00	186.957.497,00	77,99



Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	248.714.100,00	195.766.220,00	78,71
<b>Total</b>	<b>7.664.284.105,00</b>	<b>7.180.360.085,00</b>	<b>93,69</b>

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare wajib mengalokasikan anggaran sebesar 1% dari total Belanja Daerah, sementara pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Parepare hanya menganggarkan Rp7.664.284.105,00 atau sebesar 0,77% dari total Belanja Daerah, hal dikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat belum sesuai dengan jumlah yang diperkenankan. Adapun program Inspektorat sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.175.847.305,00 dan terealisasi sebesar Rp6.797.636.368,00 atau 94,73% dari yang direncanakan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp239.722.700,00 dan terealisasi sebesar Rp186.957.497,00 atau 77,99% dari yang direncanakan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  
Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp248.714.100,00 dan terealisasi sebesar Rp195.766.220,00 atau 78,71% dari yang direncanakan.

### 7.3.6 Penanganan *Stunting*

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (bayi di bawah umur 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *Stunting* baru nampak setelah bayi umur 2 tahun.

Pencegahan *Stunting* pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR) adalah upaya untuk memperkuat program Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi ibu dan anak pada periode mulai hamil (9 bulan = 270 hari) sampai anak usia 2 tahun (24 bulan – 730 hari).

Pada masa ini perlu diperhatikan jenis makanan, porsi serta frekuensi makanan yang diberikan kepada buah hati. Stimulasi dari lingkungan sekitar juga sangat penting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak dalam kandungan hingga dua tahun pertama.

Dalam mengatasi *Stunting* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana siap menggerakkan 114 Kader PKK, 120 Kader KB, 117 Tenaga Kesehatan, 182 Tenaga Sub PPKBD dan 20 Kader PPKBD.

Menjalani program keluarga Berencana (KB) setelah melahirkan ternyata bisa mencegah *Stunting* pada anak, perlu diketahui KB merupakan program pemerintah yang sejak ada tahun 1920 penggunaan KB mampu mencegah terjadinya *Stunting*,





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

yaitu ibu mempunyai Banyak Waktu, Energi, dan Sumber Daya Untuk Menyusui Bayi yang dilahirkan dan fokus terhadap pengasuhan anak pada periode 1000 pertama kelahiran.

Terdapat beberapa manfaat dalam melakukan Program Keluarga Berencana (KB) yaitu Mencegah Kehamilan yang tidak diinginkan, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Mengatur dan Mejalankan Kehamilan, Meningkatkan Kecukupan Pola Asuh Yang Baik Bagi Anak, Meningkatkan Resiko Kematian Ibu dan Anak.

Hal ini sesuai dengan strategi yang telah diterbitkannya Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden tersebut merupakan Payung Hukum dari Staregis Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilaksanakan Tahun 2018, Peraturan Presiden Memberiakan Pengutan Kerangka Intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan Yang Bertanggungjawab dalam percepatan penurunan *Stunting*, sedangkan Kepala BKKBN ditunjuk menjadi ketua Pelaksanaan dalam Peraturan Presiden tersebut dan di daerah Kota Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjuk sebagai Sekretaris Percepatan Penurunan *Stunting* dan Kota Parepare saat ini sudah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penuruan *Stunting*, Peraturan Wali Kota ini hadir sebagai Bentuk Komitmen Pemerintah Kota Parepare, dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Peurunan *Stunting* di Kota Parepare.

Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Wali Kota ini hadir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam upaya Percepatan Penanganan dan Penurunan *Stunting* di Kota Parepare dan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mejadi pedoman dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Parepare.

Berikut Tabel Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi pada Pemerintah Kota Parepare.

**Tabel 7.3.6. 1 Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi di Kota Parepare**  
Keadaan: s.d. Triwulan IV TA 2023

No	kegiatan	Jumlah Dana Pokok(Rp)	Dana Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
1.	Program: Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	200.000.000,00	192.009.000,00	96,00	100,00
	Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000.000,0000</b>	<b>192.009.000,0000</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

#### 7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

##### 7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau Organisasi Lainnya. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Parepare selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Adapun jumlah Entitas Akuntansi yang ada di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Parepare sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja adalah tiga puluh empat (34) unit kerja sebagai berikut:

**Tabel 7.4. 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Parepare**

No	Kode Rekening	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan
3	1.02.0.00.0.00.03.0000	RSUD A. Makkasau
4	1.02.0.00.0.00.02.0009	Rs Hasri Ainun Habibie
5	1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	1.04.2.10.0.00.05.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
7	1.05.0.00.0.00.06.0000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.05.0.00.0.00.07.0000	Dinas Pemadam Kebakaran
9	1.05.0.00.0.00.08.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	1.06.0.00.0.00.09.0000	Dinas Sosial
11	2.07.2.17.0.00.10.0000	Dinas Tenaga Kerja
12	2.08.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan
14	2.11.0.00.0.00.13.0000	Dinas Lingkungan Hidup
15	2.12.0.00.0.00.14.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	2.14.0.00.0.00.15.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	2.15.0.00.0.00.16.0000	Dinas Perhubungan
18	2.16.2.20.2.21.17.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	2.18.0.00.0.00.19.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2.19.3.26.0.00.20.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
21	2.23.2.24.0.00.21.0000	Dinas Perpustakaan
22	3.27.3.25.0.00.22.0000	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Kode Rekening	Satuan Kerja Perangkat Daerah
23	3.30.3.31.0.00.18.0000	Dinas Perdagangan
24	4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah Kota
25	4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD
26	6.01.0.00.0.00.28.0000	Inspektorat Daerah
27	5.01.5.05.0.00.25.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Keuangan Daerah
29	5.03.5.04.0.00.26.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
30	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Bacukiki
31	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Bacukiki Barat
32	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Soreang
33	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Ujung
34	8.01.0.00.0.00.33.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare sebagai berikut.

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diawali dengan penetapan tujuan peLaporan Keuangan . Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur Laporan Keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan peLaporan Keuangan .

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai acuan bagi:

- Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- Para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi,



maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### **Ruang Lingkup**

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual ini berlaku bagi peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah membahas:

- a. Tujuan Kerangka Konseptual;
- b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- d. Peranan dan Tujuan PeLaporan Keuangan ;
- e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan ;
- f. Komponen Laporan Keuangan ;
- g. Definisi unsur Laporan Keuangan ;
- h. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan ;
- i. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan ;
- j. Asumsi Dasar;
- k. Prinsip-Prinsip;
- l. Kendala Informasi Akuntansi; dan
- m. Dasar Hukum.

### **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan peLaporan Keuangan nya. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan peLaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur Pemerintah Daerah dan pelayanan yang diberikan:
  - 1) Bentuk umum Pemerintah Daerah dan pemisahan kekuasaan;
  - 2) Sistem pemerintahan otonomi;
  - 3) Adanya pengaruh proses politik; dan
  - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Daerah.
- b. Ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting bagi pengendalian:
  - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;



- 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan
- 3) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

### **Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan**

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan Pemerintah Daerah, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

### **Sistem Pemerintahan Otonomi**

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

### **Pengaruh Proses Politik**

Salah satu tujuan utama Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

### **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah**

Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan Laporan Keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela;



- b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- c. Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan Pemerintah Daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih mudah; dan
- d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah relatif sulit.

### **Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan peLaporan Keuangan , antara lain karena:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah; dan
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik.

### **Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan**

Pemerintah Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Daerah, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.



### **Penyusutan Aset Tetap**

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), dimana masa manfaat aset tetap diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi Kota Parepare.

## **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

### **Pengguna Laporan Keuangan**

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:

- a. Masyarakat;
- b. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

### **Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan**

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, kecuali Dana Alokasi Umum, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, maka ketentuan Laporan Keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan penyajian suatu Laporan Keuangan dengan basis kas, maka Laporan Keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.





---

## **PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

### **Peranan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **Tujuan PeLaporan Keuangan**

PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

#### **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

#### **Relevan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna Laporan Keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi Laporan Keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna Laporan Keuangan ; dan



- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### **Andal**

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda; dan
- c. Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

#### **Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

#### **Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna Laporan Keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna



laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
  - 2) Neraca SKPD;
  - 3) Laporan Operasional (LO);
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
  - 3) Neraca PPKD;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
- c. Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
  - 3) Neraca Pemerintah Daerah;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, LO, LPE, LAK dan CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun Laporan Keuangan dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

#### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya



ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah. Penbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Neraca**

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi piutang



masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah; dan
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

### **Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

### **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.



Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas

dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan





- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

#### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- d. Ekuitas akhir.

#### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi regional/ Ekonomi Makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan ;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan ; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan .

#### **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,



belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah; dan
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

### **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi**

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

### **Keandalan Pengukuran**

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

### **Pengakuan Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan



tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

#### **Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### **Pengakuan Pendapatan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan Pajak diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait sedangkan pendapatan Retribusi diakui ketika pembayaran telah diterima.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pendapatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penetapan, PAD tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

#### **Pengakuan Beban dan Belanja**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

### **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi lebih dahulu



(menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

### **ASUMSI DASAR**

Asumsi dasar dalam peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

#### **Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam peLaporan Keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

#### **Kesinambungan Entitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

#### **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Prinsip akuntansi dan peLaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan peLaporan



Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

### **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas, maka Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

### **Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.



**Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**

Ketersediaan pendapatan basis kas daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

**Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

**Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Kegiatan akuntansi dan peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama peLaporan Keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

**Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas pertimbangan perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

**Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan .

**Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan .



Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga Laporan Keuangan tidak netral dan tidak andal.

### **KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### **Materialitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

#### **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi





oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

### **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara (pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah;
- o. Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Parepare;
- p. Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

---

- q. Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;
- r. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare; dan
- s. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



## 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan Sumber Pendapatan, Transfer, Belanja, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Parepare TA 2023 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp982.802.420.504,00 dan terealisasi sebesar Rp896.117.199.247,20 atau 91,18%.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Daerah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp991.927.398.552,00 dan terealisasi sebesar Rp897.598.260.645,00 atau 90,49%.

Transfer Daerah merupakan Pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Parepare tidak menganggarkan Transfer Daerah sehingga tidak terdapat realisasi pada Transfer Daerah Kota Parepare.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pembiayaan bersih pada pemerintah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.124.987.048,00 dan terealisasi sebesar Rp14.375.121.018,39 atau 157,54%.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Anggaran SiLPA Pemerintah Kota Parepare dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp12.892.041.620,59.

<b>7.5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp896.117.199.247,20</b>	<b>Rp906.540.019.393,66</b>

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp896.117.199.247,20 atau mencapai 91,18% dari anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp982.802.420.504,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp196.738.798.401,95,



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Transfer sebesar Rp699.378.400.845,25, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.466.010.386,46 atau lebih rendah 1,15% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp906.540.019.393,66. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 10 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023**

**Tabel 7.5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	184.161.704.095,00	196.738.798.401,95	106,83	173.758.437.058,66
2	Pendapatan Transfer	798.640.716.409,00	699.378.400.845,25	87,57	720.190.932.835,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	12.590.649.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>982.802.420.504,00</b>	<b>896.117.199.247,20</b>	<b>91,18</b>	<b>906.540.019.393,66</b>

**7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp196.738.798.401,95</b>	<b>Rp173.758.437.058,66</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.738.798.401,95 atau mencapai 106,83% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp184.161.704.095,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.980.361.343,29 atau lebih tinggi 13,23% dibandingkan dengan Tahun



## PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Anggaran 2022 yang sebesar Rp173.758.437.058,66. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

**Tabel 7.5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah***dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Pajak Daerah	40.267.000.000,00	42.384.557.470,55	105,26	38.817.569.022,58
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.135.735.285,00	7.347.758.332,00	80,43	7.149.830.207,84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.850.373.578,00	8.850.373.578,00	100,00	8.943.966.033,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	125.908.595.232,00	138.156.109.021,40	109,73	118.847.071.795,24
<b>Jumlah</b>		<b>184.161.704.095,00</b>	<b>196.738.798.401,95</b>	<b>106,83</b>	<b>173.758.437.058,66</b>

**7.5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah****2023****2022****Rp42.384.557.470,55****Rp38.817.569.022,58**

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.384.557.470,55 atau mencapai 105,26% dari anggaran Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp40.267.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.566.988.447,97 atau lebih tinggi 9,19% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp38.817.569.022,58. Realisasi Pajak Daerah berasal dari:

**Tabel 7.5. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah***dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	1.120.000.000,00	1.199.482.545,00	107,10	1.014.321.848,00
2	Pajak Restoran	6.750.000.000,00	8.176.787.266,00	121,14	6.944.330.434,90
3	Pajak Hiburan	1.300.000.000,00	467.341.358,00	35,95	922.007.869,00
4	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.755.391.866,00	125,39	1.499.656.403,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.700.000.000,00	14.112.923.380,00	111,13	13.114.982.206,00
6	Pajak Air Tanah	125.000.000,00	159.044.956,00	127,24	142.056.479,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	40.951.900,00	58,50	70.042.400,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.777.000.000,00	5.218.321.252,00	90,33	5.605.617.694,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.000.000.000,00	11.254.312.947,55	102,31	9.504.553.688,68
<b>Jumlah</b>		<b>40.267.000.000,00</b>	<b>42.384.557.470,55</b>	<b>105,26</b>	<b>38.817.569.022,58</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>1) Pajak Hotel</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.199.482.545,00</b>	<b>Rp1.014.321.848,00</b>

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp185.160.697,00 atau lebih tinggi 18,25% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.014.321.848,00.

<b>2) Pajak Restoran</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp8.176.787.266,00</b>	<b>Rp6.944.330.434,90</b>

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1.232.456.831,10 atau lebih tinggi 17,75% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp6.944.330.434,90. Pada pajak jasa Boga/Katering dan sejenisnya terdapat realisasi namun target penganggaran tidak ada, bahwa ini terkait pembagian dalam penggolongan rincian objek pajak restoran karena untuk belanja makan minum SKPD dimasukkan dalam golongan ini yaitu pajak jasa Boga/Katering dan sejenisnya. Realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 4 Rincian Pajak Restoran**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.700.000.000,00	3.414.104.101,00	126,45	2.240.283.588,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.025.000.000,00	1.431.100.086,00	70,67	3.185.542.866,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.025.000.000,00	2.325.054.584,00	114,82	1.518.503.980,90
4	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	0,00	1.006.528.495,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.750.000.000,00</b>	<b>8.176.787.266,00</b>	<b>121,14</b>	<b>6.944.330.434,90</b>

<b>3) Pajak Hiburan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp467.341.358,00</b>	<b>Rp922.007.869,00</b>

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp467.341.358,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.300.000.000,00 atau 35,95%. Realisasi pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp454.666.511,00 atau lebih rendah 49,31% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp922.007.869,00. Realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target karena penetapan target Pajak Hiburan belum berdasarkan potensi yang sebenarnya. Realisasi Pajak Hiburan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 5 Rincian Pajak Hiburan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	0,00	42.182.125,00	0,00	0,00
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	118.639.291,00	93.959.308,00	79,20	75.327.294,00
3	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	520.000.000,00	5.232.000,00	1,01	2.170.400,00
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	28.714.175,00	0,00	0,00
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	141.360.709,00	76.415.650,00	54,06	59.753.925,00
6	Pajak Pertandingan Olahraga	520.000.000,00	220.838.100,00	42,47	784.756.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.300.000.000,00</b>	<b>467.341.358,00</b>	<b>39,95</b>	<b>922.007.869,00</b>

Terdapat anggaran Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebesar Rp520.000.000,00 tetapi terealisasi pada Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp42.182.125,00. Terdapat anggaran Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp141.360.709,00 tetapi realisasinya pada Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp28.714.175,00.

**4) Pajak Reklame**

**2023**  
**Rp1.755.391.866,00**

**2022**  
**Rp1.499.656.403,00**

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp255.735.463,00 atau lebih tinggi 17,05% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.499.656.403,00. Realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 6 Rincian Pajak Reklame**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	700.000.000,00	1.091.552.150,00	155,94	1.132.094.750,00
2	Pajak Reklame Kain	560.000.000,00	631.784.000,00	112,82	363.681.000,00
3	Pajak Reklame Berjalan	70.000.000,00	3.900.716,00	5,57	3.880.653,00
4	Pajak Reklame Film/Slide	70.000.000,00	26.280.000,00	37,54	0,00
5	Pajak Reklame Peragaan	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.755.391.866,00</b>	<b>125,39</b>	<b>1.499.656.403,00</b>





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Pajak Reklame Peragaan terdapat realisasi sebesar Rp1.875.000,00 tetapi penganggarnya dianggarkan pada Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron. Realisasi Pajak Reklame Berjalan dan Pajak Reklame Film/Slide tidak mencapai target karena penetapan target Pajak Reklame Berjalan dan Pajak Reklame Film/Slide belum berdasarkan potensi yang sebenarnya.

<b>5) Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp14.112.923.380,00</b>	<b>Rp13.114.982.206,00</b>

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp997.941.174,00 atau lebih tinggi 7,61% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp13.114.982.206,00. Realisasi Pajak tersebut merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

<b>6) Pajak Air Tanah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp159.044.956,00</b>	<b>Rp142.056.479,00</b>

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.988.477,00 atau lebih tinggi 11,96% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp142.056.479,00.

<b>7) Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp40.951.900,00</b>	<b>Rp70.042.400,00</b>

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.090.500,00 atau lebih rendah 41,53% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp70.042.400,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target karena penetapan target Pajak Sarang Burung Walet belum berdasarkan potensi yang sebenarnya.

<b>8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi dikarenakan adanya keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1417/VI/Tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan bahan mineral bukan logam dan batuan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Wilayah Parepare tidak memuat penetapan harga patokan penjualan sehingga dalam proses perhitungan dan penetapan pajak sesuai perda kota parepare tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dilakukan karena salah satu variabel perhitungan yang tidak ada yaitu harga Mineral.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**9) Pajak Bumi dan**

<b>Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp5.218.321.252,00</b>	<b>Rp5.605.617.694,00</b>

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp387.296.442,00 atau lebih rendah 6,91% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp5.605.617.694,00.

**10) Bea Perolehan Hak Atas**

<b>Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp11.254.312.947,55</b>	<b>Rp9.504.553.688,68</b>

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.749.759.258,87 atau lebih tinggi 18,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp9.504.553.688,68. Realisasi pajak tersebut merupakan BPHTB-Pemindahan Hak.

**7.5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp7.347.758.332,00</b>	<b>Rp7.149.830.207,84</b>

Pendapatan Retribusi Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut dari Wajib Retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.347.758.332,00 atau mencapai 80,43% dari anggaran Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.135.735.285,00 Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp197.928.124,16 atau lebih tinggi 2,77% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp7.149.830.207,84. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

**Tabel 7.5. 7 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Jasa Umum	5.809.101.000,00	3.988.014.400,00	68,65	4.504.452.662,24
2	Retribusi Jasa Usaha	1.326.634.285,00	1.316.002.600,00	99,20	1.089.353.549,60
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000.000,00	2.043.741.332,00	102,19	1.556.023.996,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.135.735.285,00</b>	<b>7.347.758.332,00</b>	<b>80,43</b>	<b>7.149.830.207,84</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

1) <b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.988.014.400,00</b>	<b>Rp4.504.452.662,24</b>

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp516.438.262,24 atau lebih rendah 11,47% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp4.504.452.662,24. Realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 8 Rincian Retribusi Jasa Umum**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.243.735.000,00	1.373.441.800,00	110,43	1.414.812.962,24
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.300.000.000,00	576.097.000,00	44,32	1.029.303.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.866.000,00	770.558.000,00	51,34	831.035.400,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.325.000.000,00	784.634.000,00	59,22	781.739.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	77.925.000,00	103,90	85.835.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14.500.000,00	31.135.000,00	214,72	15.105.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	36.400.000,00	104,00	36.800.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000,00	75.856.800,00	101,14	75.017.600,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	240.000.000,00	261.966.800,00	109,15	234.804.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.809.101.000,00</b>	<b>3.988.014.400,00</b>	<b>68,65</b>	<b>4.504.452.662,24</b>

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya terealisasi sebesar Rp576.097.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp453.206.000,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2022 karena tidak dilakukan pemungutan kepada penumpang kapal laut. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target karena penetapan target retribusi tersebut belum berdasarkan potensi yang sebenarnya.

2) <b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.316.002.600,00</b>	<b>Rp1.089.353.549,60</b>

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp226.649.050,40 atau lebih tinggi 20,81% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.089.353.549,60. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 9 Rincian Retribusi Jasa Usaha**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	851.634.285,00	823.772.100,00	96,37	584.380.550,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
3	Retribusi Terminal	15.000.000,00	4.810.000,00	32,07	10.853.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	100.850.000,00	100,85	124.475.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	90.000.000,00	108.366.000,00	120,41	107.304.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00	208.204.500,00	104,10	192.340.999,60
<b>Jumlah</b>		<b>1.326.634.285,00</b>	<b>1.316.002.600,00</b>	<b>99,20</b>	<b>1.089.353.549,60</b>

Realisasi Retribusi Terminal tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurang angkutan umum yang beroperasi pada tahun 2023.

<b>3) Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.043.741.332,00</b>	<b>Rp1.556.023.996,00</b>

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp487.717.336,00 atau lebih tinggi 31,34% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.556.023.996,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 10 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.556.023.996,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	2.043.741.332,00	102,19	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.043.741.332,00</b>	<b>102,19</b>	<b>1.556.023.996,00</b>

<b>7.5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp8.850.373.578,00</b>	<b>Rp8.943.966.033,00</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.850.373.578,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.850.373.578,00 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp93.592.455,00 atau lebih rendah 1,05% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp8.943.966.033,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulsebar).

7.5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2023	2022
	Rp138.156.109.021,40	Rp118.847.071.795,24

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.156.109.021,40 atau mencapai 109,73% dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.908.595.232,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.309.037.226,16 atau lebih tinggi 16,25% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp118.847.071.795,24. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

**Tabel 7.5. 11 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	658.414.247,00	608.649.900,00	92,44	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	46.636.892,00
3	Jasa Giro	1.115.276.494,00	1.479.758.595,00	132,68	1.270.111.780,84
4	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	61.297.772,00	12,26	637.534.238,00
5	Penerimaan atas Tuntutan ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	534.242.098,06	106,85	925.420.494,23
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	7.175.000,00	71,75	11.145.200,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	1.390.457.696,32	308,99	4.535.370.540,84
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	244.636.475,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.520.360,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.820,00	0,00	5.650.000,00
11	Pendapatan BLUD	111.574.904.491,00	124.830.892.865,82	111,88	103.757.680.032,63



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.000.000.000,00	8.630.307.615,00	107,88	7.046.732.739,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.600.000.000,00	367.166.824,20	22,95	610.789.877,70
<b>Jumlah</b>		<b>125.908.595.232,00</b>	<b>138.156.109.021,40</b>	<b>109,73</b>	<b>118.847.071.795,24</b>

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2023 2022  
**Rp608.649.900,00** **Rp0,00**

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp608.649.900,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp0,00. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 12 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	658.414.247,00	606.437.900,00	92,11	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	2.212.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>658.414.247,00</b>	<b>608.649.900,00</b>	<b>92,44</b>	<b>0,00</b>

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terdapat realisasi sebesar Rp2.212.000,00 tetapi tidak dianggarkan karena kegiatan tersebut bersifat temporer.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2023 2022  
**Rp0,00** **Rp46.636.892,00**

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi, karena kurangnya karena pengunjung/pembeli yang datang ke Pasar tidak kondusif sehingga hal ini menjadi alasan pedagang pasar tidak melakukan pembayaran karena kesenjangan pembeli. Tahun 2021 sampai sekarang, uang muka 5 tahunan dan sewa bulanan pada Pasar Semi modern lakessi tidak dilakukan penagihan disebabkan belum adanya regulasi baru yang mengatur terkait hal ini.

3) Jasa Giro 2023 2022  
**Rp1.479.758.595,00** **Rp1.270.111.780,84**



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp209.646.814,16 atau lebih tinggi 16,51% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.270.111.780,84. Rincian Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP terealisasi sebesar Rp540.219,00 Realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 13 Rincian Jasa Giro**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.115.276.494,00	1.479.218.376,00	132,63	1.260.125.666,84
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	9.744.419,00
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	540.219,00	0,00	241.695,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.115.276.494,00</b>	<b>1.479.758.595,00</b>	<b>132,68</b>	<b>1.270.111.780,84</b>

Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp540.219,00 pada Dinas Kesehatan tetapi penganggaran Jasa Giro hanya dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah pada rekening Jasa Giro pada Kas Daerah. Adapun Rincian Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP terdiri dari:

**Tabel 7.5. 14 Rincian Jasa Giro Dana Kapitasi FKTP**

*dalam rupiah*

No	Puskesmas	Bank	No Rekening	Nama Rekening	TA 2023
1	Puskesmas Lemoe	BNI	1179252390	UPTD Puskesmas Lemoe	33.969,00
2	Puskesmas Lakessi	BNI	0342691453	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lakessi	115.392,00
3	Puskesmas Madising	BNI	0342692297	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Labukkang	1.079,00
4	Puskesmas Lumpue	BNI	0342686249	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lumpue	168.425,00
5	Puskesmas Lompoe	BNI	0342690551	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lompoe	45.277,00
6	Puskesmas Luleng Bukit Harapan	BNI	0912326766	UPTD Puskesmas Luleng Bukit Harapan	5.958,00
7	Puskesmas Lapadde	BNI	0342700322	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lapadde	48.434,00
8	Puskesmas Cempae	BNI	0342696961	Bend Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cempae	121.685,00
<b>Jumlah</b>					<b>540.219,00</b>

**4) Pendapatan Bunga**

**2023**

**Rp61.297.772,00**

**2022**

**Rp637.534.238,00**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp576.236.466,00 atau lebih rendah 90,39% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp637.534.238,00 dikarenakan pemerintah tidak melakukan penempatan deposito di Tahun Anggaran 2023.

<b>5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp534.242.098,06</b>	<b>Rp925.420.494,23</b>

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp391.178.396,17 atau lebih rendah 42,27% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp925.420.494,23. Adapun rincian realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 7.5. 15 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	43.190.240,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	491.051.858,06	98,21	925.420.494,23
<b>Jumlah</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>534.242.098,06</b>	<b>106,85</b>	<b>925.420.494,23</b>

<b>6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp7.175.000,00</b>	<b>Rp11.145.200,00</b>

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.970.200,00 atau lebih rendah 35,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp11.145.200,00 dikarenakan lahan tersebut merupakan sawah tadah hujan dimana pada Tahun Anggaran 2023 terjadi musim kemarau panjang sehingga hanya sekali panen saja yang biasanya dilakukan dua kali panen dalam setahun.

<b>7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.390.457.696,32</b>	<b>Rp4.535.370.540,84</b>

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.144.912.844,52 atau



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

lebih rendah 69,34% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp4.535.370.540,84.

<b>8) Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp244.636.475,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp244.636.475,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 16 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	5.551.290,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	21.811.510,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	8.953.207,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	17.658.050,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	125.666,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	49.420,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	190.487.332,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>244.636.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.520.360,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.520.360,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.

<b>10) Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.820,00</b>	<b>Rp5.650.000,00</b>

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.646.180,00 atau lebih rendah 99,93% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp5.650.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Puskesmas	Realisasi TA 2023
5	Puskesmas Madising	1.456.636.946,00
6	Puskesmas Lakessi	1.231.272.223,00
7	Puskesmas Lauleng Bukit Harapan	152.324.613,00
8	Puskesmas Lemoe	277.832.285,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.630.307.615,00</b>

<b>13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>2023</b> <b>Rp367.166.824,20</b>	<b>2022</b> <b>Rp610.789.877,70</b>
---	--	--

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp243.623.053,50 atau lebih rendah 39,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp610.789.877,70. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tidak mencapai target karena penetapan target Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah belum berdasarkan potensi yang sebenarnya.

- Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp145.863.373,00 dan TA 2022 sebesar Rp471.727.590,70;
- Pengembalian Dana BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.682.045,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00;
- Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.770.818,20 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar 66.632.885,00; dan
- Penerimaan Lain-lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.850.588,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.429.402,00.

<b>7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>2023</b> <b>Rp699.378.400.845,25</b>	<b>2022</b> <b>Rp720.190.932.835,00</b>
--------------------------------------	--	--

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.378.400.845,25 atau mencapai 87,57% dari anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.640.716.409,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.812.531.989,75 atau lebih rendah 2,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp720.190.932.835,00. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:

**Tabel 7.5. 20 Rincian Pendapatan Transfer**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.890.932.000,00	632.754.373.739,00	99,35	624.427.816.018,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.749.784.409,00	66.624.027.106,25	41,19	95.763.116.817,00
<b>Jumlah</b>		<b>798.640.716.409,00</b>	<b>699.378.400.845,25</b>	<b>87,57</b>	<b>720.190.932.835,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp632.754.373.739,00</b>	<b>Rp624.427.816.018,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp632.754.373.739,00 atau mencapai 99,35% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp636.890.932.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.326.557.721,00 atau lebih tinggi 1,33% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp624.427.816.018,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari:

**Tabel 7.5. 21 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Perimbangan	608.628.439.000,00	604.491.880.739,00	99,32	603.714.199.018,00
2	Dana Insentif Daerah	28.262.493.000,00	28.262.493.000,00	100,00	20.713.617.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>636.890.932.000,00</b>	<b>632.754.373.739,00</b>	<b>99,35</b>	<b>624.427.816.018,00</b>

<b>7.5.1.1.2.a.1) Dana Perimbangan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp604.491.880.739,00</b>	<b>Rp603.714.199.018,00</b>

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp777.681.721,00 atau lebih tinggi 0,13% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp603.714.199.018,00. Realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri dari:

**Tabel 7.5. 22 Rincian Dana Perimbangan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.716.505.000,00	15.203.389.573,00	129,76	27.222.873.945,00
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	445.715.665.000,00	445.268.434.128,00	99,90	428.796.588.152,00
3	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Fisik	68.512.788.000,00	65.244.248.080,00	95,23	82.993.049.300,00
4	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.683.481.000,00	78.775.808.958,00	95,27	64.701.687.621,00
<b>Jumlah</b>		<b>608.628.439.000,00</b>	<b>604.491.880.739,00</b>	<b>99,32</b>	<b>603.714.199.018,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>a) Dana Transfer</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>Rp15.203.389.573,00</b>	<b>Rp27.222.873.945,00</b>

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp15.203.389.573,00 atau 129,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.716.505.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 23 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	568.462.000,00	1.105.545.766,00	194,48	5.481.820.736,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.560.347.000,00	8.569.540.043,00	113,35	8.090.016.776,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	954.584.674,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	273.428.000,00	287.815.362,00	105,26	184.673.262,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	150.287,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212.760.000,00	291.662.523,00	137,09	729.644.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.817.705.000,00	3.449.659.947,00	189,78	9.769.505.740,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	13.802.000,00	17.411.721,00	126,15	54.167.470,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.270.001.000,00	1.481.754.211,00	116,67	1.958.311.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.716.505.000,00</b>	<b>15.203.389.573,00</b>	<b>129,76</b>	<b>27.222.873.945,00</b>

<b>b) Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp445.268.434.128,00</b>	<b>Rp428.796.588.152,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2023, Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum tidak ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan, Dana Alokasi Umum Pendanaan Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Umum Pendanaan Bidang Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Pendanaan Penggajian PPPK yang dianggarkan sebesar Rp445.715.665.000,00 terealisasi sebesar Rp445.268.434.128,00 atau 99,90%.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

c) Dana Alokasi Khusus Fisik	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp65.244.248.080,00</b>	<b>Rp82.993.049.300,00</b>

Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kota Parepare TA 2023 terealisasi sebesar Rp65.244.248.080,00 atau 95,23% dari target yang direncanakan sebesar Rp68.512.788.000,00. Adapun rincian DAK Fisik TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 24 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.644.777.000,00	2.613.956.250,00	98,83	4.090.352.500,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.220.009.000,00	3.155.038.900,00	97,98	3.694.345.500,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.800.000.000,00	10.270.450.000,00	95,10	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	745.633.036,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.081.123.229,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.440.599.000,00	5.019.942.500,00	77,94	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	532.852.529,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	27.740.633.520,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.051.954.000,00	20.897.471.000,00	99,27	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	424.746.700,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.067.187.000,00	3.939.456.350,00	96,86	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.609.485.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.150.000.000,00	630.000.000,00	54,78	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	41.073.877.286,00
15	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	8.956.000.000,00	8.629.103.450,00	96,35	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	198.160.000,00	195.216.000,00	98,51	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.984.102.000,00	9.893.613.630,00	99,09	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>68.512.788.000,00</b>	<b>65.244.248.080,00</b>	<b>95,23</b>	<b>82.993.049.300,00</b>







PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 26 Rincian Pembagian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Tanggul Sungai	296.685.000,00	296.685.000,00
		Pembangunan Jalan	8.302.200.000,00	8.302.200.000,00
		Rekonstruksi Jalan	6.154.589.000,00	6.154.589.000,00
		Rehabilitasi Jalan	6.834.615.700,00	6.834.615.700,00
		Pembangunan Jembatan	630.000.000,00	630.000.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	125.000.000,00	125.000.000,00
2	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosialisasi Kesejahteraan Keluarga	1.457.115.000,00	1.457.115.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	2.415.358.500,00	2.415.358.500,00
4	Dinas Tenaga Kerja	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.046.929.800,00	2.046.929.800,00
<b>Jumlah</b>			<b>28.262.493.000,00</b>	<b>28.262.493.000,00</b>

<b>7.5.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp66.624.027.106,25</b>	<b>Rp95.763.116.817,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.624.027.106,25 atau mencapai 41,19% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.749.784.409,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.139.089.710,75 atau lebih rendah 30,43% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp95.763.116.817,00.

Tidak optimalnya realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah diakibatkan karena tidak tersalurnya:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan (bulan Oktober, November dan Desember);
2. Pendapatan Bagi Hasil Rokok Triwulan Keempat;
3. Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga dan Keempat; dan
4. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

<b>7.5.1.1.2.b.1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp63.627.820.106,25</b>	<b>Rp61.815.605.817,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.812.214.289,25 atau lebih tinggi 2,93% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp61.815.605.817,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.27 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Dasar Hukum
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.038.403.280,25	16.273.707.790,00	SK Gubernur Nomor: a. 2442/XI/TAHUN 2022 (September 2022); b. 2619/XII/TAHUN 2022 (Oktober 2022); c. 431/II/Tahun 2023 (November 2022); d. 571/III/Tahun 2023 (Desember 2022); e. 673/III/Tahun 2023 (Januari 2023); f. 886/V/Tahun 2023 (Februari 2023); g. 989/VI/Tahun 2023 (Maret 2023); h. 1020/VI/Tahun 2023 (April 2023); i. 1371/IX/Tahun 2023 (Mei 2023); j. 1376/IX/Tahun 2023 (Juni 2023); k. 1437/X/Tahun 2023 (Juli 2023); l. 1687/XI/Tahun 2023 (Agustus 2023); dan m. 1688/XI/Tahun 2023 (September 2023)
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.223.642.354,00	10.370.977.175,00	
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.904.225.175,00	19.435.511.409,00	
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	86.408.196,00	81.044.148,00	
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.375.141.101,00	15.654.365.295,00	
<b>Jumlah</b>		<b>63.627.820.106,25</b>	<b>61.815.605.817,00</b>	

**7.5.1.1.2.b.2) Bantuan Keuangan**

**2023**

**2022**

**Rp2.996.207.000,00**

**Rp33.947.511.000,00**

Realisasi

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.951.304.000,00 atau lebih rendah 91,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp33.947.511.000,00. Bantuan Keuangan merupakan Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Parepare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5.28 Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran	TA 2023	TA 2022	Dasar Hukum
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.881.150.000,00	500.000.000,00	28.830.000.000,00	SK Gubernur Sulawesi Selatan, No. 1240/VIII/Tahun 2023
			1.222.095.000,00	1.266.662.250,00	SK Gubernur Sulawesi Selatan, No. 988/VI/Tahun 2023
			1.274.112.000,00	1.266.662.250,00	SK Gubernur Sulawesi Selatan, No. 1381/IX/Tahun 2023
			0,00	1.266.662.250,00	-
			0,00	1.317.524.250,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>7.881.150.000,00</b>	<b>2.996.207.000,00</b>	<b>33.947.511.000,00</b>	

- Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1240/VIII/Tahun 2023 digunakan dalam Penanganan Stunting dan Gizi Buruk, dan Peningkatan UMKM. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke rekening kas daerah tanggal 6 Desember 2023.
- SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 988/VI/Tahun 2023 merupakan Dana Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan penyaluran tahap I. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke rekening kas daerah tanggal 9 Agustus 2023.
- SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1381/IX/Tahun 2023 merupakan Dana Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan penyaluran tahap II. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke rekening kas daerah tanggal 29 September 2023.

<b>7.5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp12.590.649.500,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari:

<b>7.5.1.1.3.a Pendapatan Hibah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp12.590.649.500,00</b>

Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp12.590.649.500,00</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

<b>7.5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp897.598.260.645,00</b>	<b>Rp904.426.536.279,66</b>

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp897.598.260.645,00 atau 90,49% dari anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp991.927.398.552,00.

Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp6.828.275.634,66 atau lebih rendah 0,75% dibandingkan dengan belanja tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp904.426.536.279,66. Rincian masing-masing kenaikan/penurunan Belanja Daerah:

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp46.458.378.777,39 atau lebih tinggi 6,63% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp701.032.303.654,61;
2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp53.583.053.509,05 atau lebih rendah 26,92% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp199.082.473.360,05; dan
3. Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan sebesar Rp296.399.097,00 atau lebih tinggi 6,87% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.311.759.265,00.

Rincian Belanja Daerah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	791.027.550.012,00	747.490.682.432,00	94,50	701.032.303.654,61
2	Belanja Modal	192.129.848.540,00	145.499.419.851,00	75,73	199.082.473.360,05
3	Belanja Tak Terduga	8.770.000.000,00	4.608.158.362,00	52,54	4.311.759.265,00
<b>Jumlah</b>		<b>991.927.398.552,00</b>	<b>897.598.260.645,00</b>	<b>90,49</b>	<b>904.426.536.279,66</b>

<b>7.5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp747.490.682.432,00</b>	<b>Rp701.032.303.654,61</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp747.490.682.432,00 atau 94,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp791.027.550.012,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 30 Rincian Belanja Operasi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	366.998.035.648	337.773.100.480,00	92,04	337.161.135.455,00
2	Belanja Barang dan Jasa	404.910.963.460	390.492.172.631,00	96,44	353.802.391.174,00
3	Belanja Bunga	1.000.000.000	909.456.815,00	90,95	765.454.390,61
4	Belanja Hibah	17.793.530.904	18.031.878.506,00	101,34	7.522.550.135,00
5	Belanja Bantuan Sosial	325.020.000	284.074.000,00	87,40	1.780.772.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>791.027.550.012</b>	<b>747.490.682.432,00</b>	<b>94,50</b>	<b>701.032.303.654,61</b>

**7.5.1.2.1.a Belanja Pegawai**      2023      2022  
    **Rp337.773.100.480,00**      **Rp337.161.135.455,00**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp337.773.100.480,00 atau 92,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp366.998.035.648,00. Adapun rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.31 Rincian Belanja Pegawai**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	259.722.730.001,00	240.560.867.956,00	92,62	245.561.471.729,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	38.423.261.169,00	33.418.273.293,00	86,97	30.110.175.921,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.492.171.370,00	51.032.131.542,00	93,65	50.091.439.700,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.799.610.000,00	10.265.040.195,00	86,99	10.273.509.640,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	364.938.465,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	795.600.000,00	99,25	759.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.758.663.108,00	1.701.187.494,00	96,75	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>366.998.035.648,00</b>	<b>337.773.100.480,00</b>	<b>92,04</b>	<b>337.161.135.455,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**7.5.1.2.1.b Belanja Barang dan  
 Jasa**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp390.492.172.631,00</b>	<b>Rp353.802.391.174,00</b>

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp404.910.963.460,00 dan terealisasi sebesar Rp390.492.172.631,00 atau 96,44%.

**1) Belanja Barang**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp74.654.803.510,00</b>	<b>Rp91.673.614.554,00</b>

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa pakai habis dan barang tak pakai habis. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp89.014.708.948,00 dan terealisasi sebesar Rp74.654.803.510,00 atau 83,87%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 32 Rincian Belanja Barang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	88.995.487.637,00	74.635.671.811,00	83,86	91.673.614.554,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	19.221.311,00	19.131.699,00	99,53	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>89.014.708.948,00</b>	<b>74.654.803.510,00</b>	<b>83,87</b>	<b>91.673.614.554,00</b>

**2) Belanja Jasa**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp115.070.993.595,00</b>	<b>Rp168.326.763.626,00</b>

Belanja Jasa adalah belanja yang diperoleh dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp126.388.467.537,00 dan terealisasi sebesar Rp115.070.993.595,00 atau 91,05%, dengan rincian sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5.33 Rincian Belanja Jasa**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Kantor	89.467.086.507,00	82.040.858.595,00	91,70	140.805.715.872,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.934.671.318,00	20.543.605.460,00	93,66	17.106.095.125,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.868.205.000,00	5.252.230.303,00	89,50	2.981.758.321,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.053.018.000,00	2.648.529.714,00	86,75	2.076.842.959,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	896.666.712,00	492.011.662,00	54,87	459.569.863,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	310.000.000,00	60.000.000,00	19,35	284.960.550,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	914.710.000,00	888.571.500,00	97,14	989.037.699,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.914.110.000,00	3.115.186.361,00	79,59	3.621.783.237,00
<b>Jumlah</b>		<b>126.388.467.537,00</b>	<b>115.070.993.595,00</b>	<b>91,05</b>	<b>168.326.763.626,00</b>

**3) Belanja Pemeliharaan**      **2023**      **2022**  
**Rp11.782.849.415,00**      **Rp15.304.294.018,00**

Belanja Pemeliharaan digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja pemeliharaan aset tetap lainnya. Pada Tahun Anggaran 2023, belanja pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp13.761.599.883,00 dan terealisasi sebesar Rp11.782.849.415,00 atau 85,62%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.34 Rincian Belanja Pemeliharaan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	140.000.000,00	136.292.123,00	97,35	179.906.850,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.220.076.625,00	5.622.823.948,00	90,40	7.694.013.745,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.388.336.778,00	2.939.822.414,00	86,76	5.912.348.923,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.013.186.480,00	3.083.910.930,00	76,84	1.518.024.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.761.599.883,00</b>	<b>11.782.849.415,00</b>	<b>85,62</b>	<b>15.304.294.018,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

	2023	2022
<b>4) Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp45.297.596.786,00</b>	<b>Rp43.845.693.962,00</b>

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri. Pada Tahun Anggaran 2023, belanja perjalanan dinas dianggarkan sebesar Rp48.515.206.030,00 dan terealisasi sebesar Rp45.297.596.786,00 atau 93,37%.

	2023	2022
<b>5) Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat</b>	<b>Rp17.365.697.084,00</b>	<b>Rp13.436.634.677,00</b>

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp17.365.697.084,00 atau sebesar 96,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.032.279.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.35 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.669.580.500,00	4.243.480.500,00	90,87	2.124.360.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.362.699.200,00	13.122.216.584,00	98,20	11.312.274.677,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.032.279.700,00</b>	<b>Rp17.365.697.084,00</b>	<b>96,30</b>	<b>13.436.634.677,00</b>

	2023	2022
<b>6) Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>Rp14.101.639.431,00</b>	<b>Rp17.871.792.853,00</b>

Belanja Barang dan Jasa BOS diperoleh dari realisasi belanja Dana BOS Reguler. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp14.250.330.502,00 dan terealisasi sebesar Rp14.101.639.431,00 atau 98,96%.

	2023	2022
<b>7) Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>Rp112.218.592.810,00</b>	<b>Rp3.343.597.484,00</b>

Belanja Barang dan Jasa BLUD diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa BLUD RS dr.Hasri Ainun Habibie. Belanja Barang dan Jasa BLUD pada



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp94.948.370.860,00 dan terealisasi sebesar Rp112.218.592.810,00 atau 118,19%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD melebihi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa belanja seperti Belanja Obat-obatan, Belanja Makan Minum Pasien dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang penggunaannya tidak bisa di tunda dan harus bersifat fleksibel.

**7.5.1.2.1.c Belanja Bunga**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp909.456.815,00</b>	<b>Rp765.454.390,61</b>

Belanja Bunga merupakan belanja yang dibayarkan untuk membayar bunga utang jangka panjang dalam negeri. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp909.456.815,00 atau 90,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Belanja Bunga Pinjaman SLA-1205/DP3/2006.

**7.5.1.2.1.d Belanja Hibah**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp18.031.878.506,00</b>	<b>Rp7.522.550.135,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp18.031.878.506,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp17.793.530.904,00 atau 101,34% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 7.5. 36 Rincian Belanja Hibah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.636.600.000	9.636.600.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.195.400.000	5.428.000.000,00	104,48	6.643.419.231,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	2.082.400.000	2.088.147.602,00	100,28	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	879.130.904	879.130.904,00	100,00	879.130.904,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.793.530.904</b>	<b>18.031.878.506,00</b>	<b>101,34</b>	<b>7.522.550.135,00</b>

**1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp9.636.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.636.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp9.636.600.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.5. 37 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	2.036.600.000,00	0,00
2	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	7.600.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.636.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

**2) Belanja Hibah kepada  
Badan,  
Lembaga,  
Organisasi  
Kemasyarakatan  
yang Berbadan  
Hukum Indonesia**

	2023	2022
<b>Rp5.428.000.000,00</b>	<b>Rp5.428.000.000,00</b>	<b>Rp6.643.419.231,00</b>

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia selama Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp5.428.000.000,00 atau 104,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.195.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.38 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	1.506.019.231,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.290.400.000,00	2.573.000.000,00	112,34	92.400.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	955.000.000,00	905.000.000,00	94,76	5.045.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.195.400.000,00</b>	<b>5.428.000.000,00</b>	<b>104,48</b>	<b>6.643.419.231,00</b>

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar melampaui anggaran terdapat pada Dinas Pendidikan yaitu dikarenakan pada



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

tahap kedua terdapat 12 satuan pendidikan PAUD yang mendapat dana BOP PAUD dengan nomor SP2D: 230571302002560 pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp282.600.000,00 dan masuk langsung ke rekening sekolah.

<b>3) Belanja Hibah Dana</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>BOS</b>	<b>Rp2.088.147.602,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp2.088.147.602,00 atau 100,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.082.200.000,00 Belanja Hibah kepada Pemerintah pusat berasal dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS melebihi target yang ditetapkan karena terdapat Satdikdas yang masih menerima dana tetapi sekolah tersebut sudah tutup dikarenakan sudah dua tahun tidak menerima siswa sebanyak lima siswa pertahun, akan tetapi kementerian tetap menyalurkan dana bos kesekolah tersebut.

<b>4) Belanja Hibah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Bantuan Keuangan</b>		
<b>kepada Partai Politik</b>	<b>Rp879.130.904,00</b>	<b>Rp879.130.904,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp879.130.904,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp879.130.904,00.

**Tabel 7.5.39 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023
1	Bantuan kepada Partai Golongan Karya (Golkar)	196.361.536,00	196.361.536,00
2	Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	59.491.436,00	59.491.436,00
3	Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	56.963.776,00	56.963.776,00
4	Bantuan kepada Partai Demokrat	104.386.980,00	104.386.980,00
5	Bantuan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	41.173.968,00	41.173.968,00
6	Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	23.286.740,00	23.286.740,00
7	Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	155.693.100,00	155.693.100,00
8	Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	65.073.800,00	65.073.800,00
9	Bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	33.074.700,00	33.074.700,00
10	Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	104.053.544,00	104.053.544,00
11	Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39.571.324,00	39.571.324,00
	<b>Jumlah</b>	<b>879.130.904,00</b>	<b>879.130.904,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp284.074.000,00</b>	<b>Rp1.780.772.500,00</b>

Belanja Bantuan Sosial diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp325.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp284.074.000,00 atau 87,40%.

<b>7.5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp145.499.419.851,00</b>	<b>Rp199.082.473.360,05</b>

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp145.499.419.851,00 atau 75,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp192.129.848.540,00.

**Tabel 7.5.40 Rincian Belanja Modal**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	1.154.658.000,00	237.142.300,00	20,54	667.419.796,00
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	30.783.541.676,00	28.624.066.144,00	92,98	56.762.798.742,00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	46.496.014.030,00	39.639.645.218,00	85,25	56.543.087.027,00
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	110.581.534.478,00	73.898.362.333,00	66,83	85.004.417.795,05
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	99,55	104.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>192.129.848.540,00</b>	<b>145.499.419.851,00</b>	<b>75,73</b>	<b>199.082.473.360,05</b>

<b>7.5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp237.142.300,00</b>	<b>Rp667.419.796,00</b>

Belanja Modal Tanah merupakan Belanja Modal Tanah Persil Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp1.154.658.000,00 dan terealisasi sebesar Rp237.142.300,00 atau 20,54%.

<b>7.5.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp28.624.066.144,00</b>	<b>Rp56.762.798.742,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp30.783.541.676,00 dan terealisasi sebesar Rp28.624.066.144,00 atau 92,98%.

<b>1) Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp20.535.000,00</b>	<b>Rp68.596.700,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Alat Besar diperoleh dari Belanja Modal Alat Bantu yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.535.000,00 atau 82,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.

2) <b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp210.443.100,00</b>	<b>Rp840.434.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan pada Tahun Anggaran 2023 berasal dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp210.443.100,00 atau 72,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp291.820.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 41 Rincian Belanja Modal Alat Angkutan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	221.820.500,00	140.502.000,00	63,34	840.434.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	70.000.000,00	69.941.100,00	99,92	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>291.820.500,00</b>	<b>210.443.100,00</b>	<b>72,11</b>	<b>840.434.000,00</b>

3) <b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp9.161.900,00</b>	<b>Rp9.562.078,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp9.161.900,00 atau 61,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.011.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 42 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.441.000,00	0,00	0,00	8.271.703,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	10.570.500,00	9.161.900,00	86,67	1.290.375,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.011.500,00</b>	<b>9.161.900,00</b>	<b>61,03</b>	<b>9.562.078,00</b>

4) <b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.800.000,00</b>	<b>Rp16.200.000,00</b>

Belanja Modal Alat Pertanian diperoleh dari Belanja Modal Alat Pengolahan yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Rp3.800.000,00 atau 65,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.767.000,00.

<b>5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.229.483.791,00</b>	<b>Rp3.984.928.896,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp3.229.483.791,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.989.644.338,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 43 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	455.854.774,00	279.677.965,00	61,35	471.713.379,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.264.274.264,00	2.761.100.893,00	84,59	3.342.766.684,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	269.515.300,00	188.704.933,00	70,02	170.448.833,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.989.644.338,00</b>	<b>3.229.483.791,00</b>	<b>80,95</b>	<b>3.984.928.896,00</b>

<b>6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp147.536.050,00</b>	<b>Rp646.162.174,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp147.536.050,00 atau 39,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp378.295.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.44 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Studio	307.983.400,00	77.336.000,00	25,11	504.850.224,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	70.312.500,00	70.200.050,00	99,84	141.311.950,00
<b>Jumlah</b>		<b>378.295.900,00</b>	<b>147.536.050,00</b>	<b>39,00</b>	<b>646.162.174,00</b>

<b>7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp11.249.912.155,00</b>	<b>Rp43.186.871.589,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp11.249.912.155,00 atau 88,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.747.612.255,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.45 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.727.612.255,00	11.229.912.155,00	88,23	43.101.763.736,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	85.107.853,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.747.612.255,00</b>	<b>11.249.912.155,00</b>	<b>88,25</b>	<b>43.186.871.589,00</b>

<b>8) Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp912.345.250,00</b>	<b>Rp5.447.909.424,00</b>

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp912.345.250,00 atau 93,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp976.090.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.46 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6.129.580,00	6.044.250,00	98,61	3.246.219.424,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	913.961.000,00	871.301.000,00	95,33	2.171.720.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	56.000.000,00	35.000.000,00	62,50	29.970.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>976.090.580,00</b>	<b>912.345.250,00</b>	<b>93,47</b>	<b>5.447.909.424,00</b>

<b>9) Belanja Modal Komputer</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.003.092.496,00</b>	<b>Rp2.252.626.602,00</b>

Realisasi Belanja Modal Komputer pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp2.003.092.496,00 atau 63,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.167.898.765,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5.47 Rincian Belanja Modal Komputer**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Komputer Unit	2.220.299.460,00	1.516.804.060,00	68,32	1.844.973.367,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	947.599.305,00	486.288.436,00	51,32	407.653.235,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.167.898.765,00</b>	<b>2.003.092.496,00</b>	<b>63,23</b>	<b>2.252.626.602,00</b>

<b>10) Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp141.858.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Belanja Modal Rambu-Rambu diperoleh dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yang terealisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp141.858.000,00 atau 80,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.000.000,00.

<b>11) Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp6.639.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp6.639.800,00 atau 69,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.490.000,00.

<b>12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp1.103.852.041,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.103.852.041,00 atau 101,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.083.769.142,00. Kelebihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terjadi karena adanya satuan pendidikan yang melakukan penganggaran yang seharusnya melakukan kode rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin akan tetapi menggunakan kode rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya atau kode rekening Belanja Barang dan Jasa. Saat satuan pendidikan melakukan realisasi penggunaan dana, satuan pendidikan memasukkan belanja tersebut ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sehingga terjadinya selisih dimana realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih besar dibandingkan dengan anggarannya.

<b>13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp9.585.406.561,00</b>	<b>Rp309.507.279,00</b>



Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD diperoleh dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang terealisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.585.406.561,00 atau 121,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.916.141.696,00. Terjadi pada RS Hasri Ainun Habibie dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan dari yang ditargetkan tetapi realisasi ini masih dalam batas penggunaan ambang batas. Fleksibilitas pemakaian ambang batas pada BLUD RS dr Hasri Ainun Habibie telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 46 Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2023 pemakaian ambang batas atau realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran sebesar 30%. Besaran presentase ambang batas ini telah ditetapkan pada dokumen RBA Rumah Sakit yang telah disahkan oleh pemimpin BLUD dan PPKD.

**7.5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp39.639.645.218,00</b>	<b>Rp56.543.087.027,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Parepare. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp46.496.014.030,00 dan terealisasi sebesar Rp39.639.645.218,00 atau 85,25% .

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>1) Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>Rp33.988.358.929,00</b>	<b>Rp55.888.838.677,00</b>

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp33.988.358.929,00 atau 83,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.643.594.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.48 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.998.644.170,00	33.343.409.060,00	83,36	55.744.181.477,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	644.949.870,00	644.949.869,00	100,00	144.657.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.643.594.040,00</b>	<b>33.988.358.929,00</b>	<b>83,63</b>	<b>55.888.838.677,00</b>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>2) Belanja Modal Monumen</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Belanja Modal Monumen diperoleh dari Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.965.400,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau nihil dikarenakan sub



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

kegiatan ini merupakan utang, disebabkan pihak ketiga belum ada keinginan untuk mengambil dananya.

<b>3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp553.671.163,00</b>	<b>Rp654.248.350,00</b>

Belanja Modal Monumen diperoleh dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp618.358.590,00 dan terealisasi sebesar Rp553.671.163,00 atau 89,54%.

<b>4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp5.097.615.126,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.229.096.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.097.615.126,00 atau 97,49%.

<b>7.5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp73.898.362.333,00</b>	<b>Rp85.004.417.795,05</b>

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan belanja yang menambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kota Parepare. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp110.581.534.478,00 dan terealisasi sebesar Rp73.898.362.333,00 atau 66,83%.

<b>1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp64.109.344.099,00</b>	<b>Rp71.173.916.224,05</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp64.109.344.099,00 atau 66,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp96.782.274.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.49 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan	83.665.293.692,00	51.932.356.293,00	62,07	50.081.577.307,05
2	Belanja Modal Jembatan	13.116.981.000,00	12.176.987.806,00	92,85	21.092.338.917,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.782.274.692,00</b>	<b>64.109.344.099,00</b>	<b>66,24</b>	<b>71.173.916.224,05</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>2) Belanja Modal</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
<b>Bangunan Air</b>	<b>Rp2.908.795.103,00</b>	<b>Rp9.243.762.645,00</b>

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.908.795.103,00 atau 71,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.045.542.404,00. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.50 Rincian Belanja Modal Bangunan Air**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	111.705.000,00	15.736.800,00	14,09	47.831.800,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.865.003.870,00	1.202.878.610,00	64,50	4.204.927.730,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.068.833.534,00	1.690.179.693,00	81,70	4.991.003.115,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.045.542.404,00</b>	<b>2.908.795.103,00</b>	<b>71,90</b>	<b>9.243.762.645,00</b>

<b>3) Belanja Modal</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
<b>Instalasi</b>	<b>Rp4.997.287.684,00</b>	<b>Rp2.505.762.865,00</b>

Realisasi Belanja Modal Instalasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.997.287.684,00 atau 67,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.414.200.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.51 Rincian Belanja Modal Instalasi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.166.074.800,00	3.995.592.634,00	95,91	1.090.186.800,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.160.731.153,00	926.015.250,00	29,30	1.213.776.065,00
3	Belanja Modal Instalasi Gas	11.715.000,00	0,00	0,00	184.800.000,00
4	Belanja Modal Instalasi Pengaman	75.679.800,00	75.679.800,00	100,00	17.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.414.200.753,00</b>	<b>4.997.287.684,00</b>	<b>67,40</b>	<b>2.505.762.865,00</b>

<b>4) Belanja Modal</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
<b>Jaringan</b>	<b>Rp1.882.935.447,00</b>	<b>Rp2.080.976.061,00</b>

Belanja Modal Jaringan diperoleh dari Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.339.516.629,00 yang terealisasi sebesar Rp1.882.935.447,00 atau 80,48%



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.100.203.856,00</b>	<b>Rp104.750.000,00</b>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kota Parepare. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp3.114.100.356,00 dan terealisasi sebesar Rp3.100.203.856,00 atau 99,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.52 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	104.750.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.114.100.356,00	3.100.203.856,00	99,55	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.114.100.356,00</b>	<b>3.100.203.856,00</b>	<b>99,55</b>	<b>104.750.000,00</b>

<b>7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp4.608.158.362,00</b>	<b>Rp4.311.759.265,00</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga yang dibayarkan dalam Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp4.608.158.362,00 atau 52,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.770.000.000,00. Adapun rincian Belanja Tak Terduga sebagai berikut:

**Tabel 7.5.53 Rincian Belanja Tak Terduga**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Bantuan kepada Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun Anggaran 2023		4.066.329.500,00
2	Bantuan Kepada Korban Bencana Angin Kencang	8.770.000.000,00	162.612.333,00
3	Bantuan Kepada Korban Kebakaran		379.216.529,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.770.000.000,00</b>	<b>4.608.158.362,00</b>

<b>7.5.1.3 Pembiayaan Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp14.375.121.018,39</b>	<b>Rp15.029.805.562,39</b>

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.375.121.018,39 atau mencapai 157,51% dari anggaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp9.124.978.048,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp654.391.916,00 atau lebih rendah 4,35% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.029.805.562,39.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp17.140.978.048,39</b>	<b>Rp17.795.662.592,76</b>

Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp17.140.978.048,39 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.140.978.048,00 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan komponen penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023.

<b>7.5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.765.857.030,00</b>	<b>Rp2.765.857.030,37</b>

Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp2.765.857.030,00 atau 34,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.016.000.000,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp2.765.857.030,37 dimana terjadi penurunan sebesar Rp0,37.

<b>7.5.1.3.2.a Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau nihil. Penyertaan modal tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Parepare.

<b>7.5.1.3.2.b Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.765.857.030,00</b>	<b>Rp2.765.857.030,37</b>

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berasal dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.765.857.030,00 atau 99,99% dari Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2.766.000.000,00.

<b>7.5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp12.892.041.620,59</b>	<b>Rp17.140.978.048,39</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) TA 2023 sebesar Rp12.892.041.620,59 merupakan selisih Surplus/Defisit dengan pembiayaan neto dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5.54 Rincian Selisih Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto TA 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan	896.117.199.247,20
2	Belanja	897.598.260.645,00
3	Transfer	0,00
<b>4</b>	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(1.481.061.397,80)</b>
5	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17.140.978.048,39
6	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.765.857.030,00
<b>7</b>	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>14.375.121.018,39</b>
<b>8</b>	<b>Koreksi SILPA</b>	<b>2.018.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>12.892.041.620,59</b>

SILPA sebesar Rp12.892.041.620,59 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 55 Rincian SILPA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	175.421.627,31
2	Kas di Bendahara Penerimaan	22.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	11.807.980,00
4	Kas di BLUD (RSUD Andi Makkasau)	12.106.981.170,56
5	Kas di BLUD (RS dr. Hasri Ainun Habibie)	120.769.542,72
6	Kas Dana BOS (BOS Reguler Negeri)	172.868.772,00
<b>7</b>	<b>Kas Dana BOS (BOS Kinerja Negeri)</b>	<b>3.607.619,00</b>
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP (JKN Kapitasi)	205.519.431,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP (Jasa Giro)	540.219,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	72.525.259,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.892.041.620,59</b>

Koreksi SiLPA sebesar Rp2.018.000,00 merupakan kesalahan Transfer Bank Sulselbar yang masuk ke RKUD Parepare berupa Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 dan di kembalikan pada bulan Februari 2023 ke RKUD Provinsi Sulawesi Selatan.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

### 7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5. 56 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	17.140.978.048,39	17.795.662.592,76
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	17.140.978.048,39	17.795.662.592,76
<b>3</b>	<b>Subtotal (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	12.894.059.620,59	17.143.288.676,39
<b>5</b>	<b>Subtotal (3+4)</b>	<b>12.894.059.620,59</b>	<b>17.143.288.676,39</b>
6	Koreksi Kesalahan +/- Pembukuan Tahun Sebelumnya	( 2.018.000,00)	(2.310.628,00)
7	Lain-lain (LP SAL)	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>	<b>12.892.041.620,59</b>	<b>17.140.978.048,39</b>

#### 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	2023	2022
	<b>Rp17.140.978.048,39</b>	<b>Rp17.795.662.592,76</b>

Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.140.978.048,39 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Rp17.795.662.592,76. Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal mengalami penurunan sebesar Rp 654.684.544,37 atau turun sebesar 3,68% dari saldo tahun 2022.

#### 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

	2023	2022
	<b>Rp17.140.978.048,39</b>	<b>Rp17.795.662.592,76</b>

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.140.978.048,39 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Rp17.795.662.592,76. Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan mengalami penurunan sebesar Rp654.684.544,37 atau turun sebesar 3,68% dari saldo tahun 2022.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

---

<b>7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp12.894.059.620,59</b>	<b>Rp17.143.288.676,39</b>

Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.894.059.620,59 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Rp17.143.288.676,39. Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) mengalami penurunan sebesar Rp4.248.936.427,80 atau turun sebesar 24,79% dari saldo tahun 2022.

<b>7.5.2.4 Koreksi Kesalahan +(-) Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp2.018.000,00)</b>	<b>(Rp2.310.628,00)</b>

Realisasi Koreksi Kesalahan (-) Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.018.000,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2022 (Rp2.310.628,00). Realisasi Koreksi Kesalahan (-) Pembukuan Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp292.628,00 atau turun sebesar 12,66% dari saldo tahun 2022.

<b>7.5.2.5 Lain-Lain (LP SAL)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Realisasi Lain-lain (LP SAL) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**7.5.3 NERACA**

Neraca (*statement of financial performance*) menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Parepare.

<b>7.5.3.1 Aset Lancar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp66.089.029.892,24</b>	<b>Rp67.121.827.552,05</b>
<b>7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp12.899.886.182,59</b>	<b>Rp17.198.681.035,53</b>
<b>7.5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp175.421.627,31</b>	<b>Rp966.132.412,93</b>

Kas di Kasda per 31 Desember 2023 merupakan saldo Kas Pemerintah Kota Parepare yang berada di rekening Kas Daerah sebesar Rp175.421.627,31 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp966.132.412,93 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.57 Saldo Kas di Rekening Kas Daerah Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Rekening Kas Umum Daerah Kota Parepare	PT Bank Sulselbar Cabang Parepare	0030-001-000003585-6	1/10/1989	175.421.627,31	966.132.412,93
<b>Jumlah</b>					<b>175.421.627,31</b>	<b>966.132.412,93</b>

<b>7.5.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp22.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.000.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan, dan dilakukan penyetoran pada tanggal 9 Maret 2024 sebesar Rp15.000.000,00 dan 10 Maret 2024 sebesar Rp 7.000.000,00.

<b>7.5.3.1.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp11.807.980,00</b>	<b>Rp57.615.259,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.807.980,00 terdiri dari:

**Tabel 7.5. 58 Kas di Bendahara Pengeluaran**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Per 31 Desember 2023			Per 31 Desember 2022		
		Sisa Kas	Tanggal Penyetoran	Nomor Rekening	Sisa Kas	Tanggal Penyetoran	Nomor Rekening
1	Dinas Pendidikan	0,00	-	-	4.939.000,00	STS tgl 9 Januari 2023	030-002-000002203-4
2	Dinas Kesehatan	0,00	-	-	11.693.481,00	STS tgl 26 dan 27 Januari 2023	030-002-000003253-6
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	-	-	4.737.800,00	STS tgl 21 Februari 2023	030-002-000003107-6
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	-	-	22.606.500,00	STS tgl 7 Februari 2023	030-002-000009400-1
5	Sekretariat Daerah Kota	0,00	-	-	13.638.478,00	STS tgl 1 Maret 2023	030-002-000002645-5
6	Sekretariat DPRD	9.850.000,00	30 Januari 2024	030-001-000003146-7	0,00	-	-
7	Kecamatan Bacukiki	1.957.980,00	24 Januari 2024	030-002-000003887-9	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>11.807.980,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.615.259,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.807.980,00 merupakan UYHD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp9.850.000,00; dan
- 2) Kecamatan Bacukiki sebesar Rp1.957.980,00.

**7.5.3.1.1.d Kas di BLUD**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp12.227.750.713,28</b>	<b>Rp15.978.886.369,46</b>

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.227.750.713,28 yang merupakan Kas di BLUD pada RSUD Andi Makkasau sebesar Rp12.106.981.170,56 dan RS dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp120.769.542,72 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 59 Kas di BLUD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
RSUD Andi Makkasau				
1	Kas Bendahara Penerimaan	-	2.090.923,00	7.857.467,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran	-	0,00	0,00
3	Bank Sulselbar	300020000060793	1.593.688.079,83	382.594.709,83
4	Bank BNI	7890090908	0,00	0,00
5	Bank BRI	0064-01-000968-30-5	10.511.202.167,73	14.142.306.785,73
Dinas Kesehatan (RS dr. Hasri Ainun Habibie)				
1	Kas Bendahara Penerimaan	-	0,00	45.000,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran	-	0,00	1.527.231,00
3	Bank Sulselbar	030-002-000-015-938-2	0,00	1.488.668.414,90
4	Bank Sulselbar	030-002-000-015-942-1	120.769.542,72	0,00
5	Utang PFK	-	0,00	(44.113.239,00)
<b>Jumlah</b>			<b>12.227.750.713,28</b>	<b>15.978.886.369,46</b>

**7.5.3.1.1.e Kas Dana BOS**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp176.476.391,00</b>	<b>Rp91.617.492,00</b>

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp176.476.391,00 merupakan saldo Kas Dana BOS Reguler sebesar Rp129.678.532,00 ditambah dengan saldo dana BOS Kinerja sebesar Rp3.607.619,00. Adapun rincian saldo Kas Dana BOS sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 60 Rincian Saldo Kas Dana Bos**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir 2023
1	SDN Reguler	33.154.006,00	12.152.833.923,00	12.128.505.651,00	57.482.278,00
2	SDN Kinerja	0,00	305.000.000,00	301.392.381,00	3.607.619,00
3	SMPN Reguler	58.463.486,00	5.847.720.304,00	5.790.797.296,00	115.386.494,00
4	SMPN Kinerja	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>91.617.492,00</b>	<b>18.390.554.227,00</b>	<b>18.305.695.328,00</b>	<b>176.476.391,00</b>

Rincian penerimaan, pengeluaran dan saldo dana BOS Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**7.5.3.1.1.f Kas Dana Kapitasi pada FKTP** **2023**  
**Rp206.059.650,00** **2022**  
**Rp25.953.046,00**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp206.059.650,00 terdiri dari sisa belanja JKN Kapitasi sebesar Rp205.519.431,00 dan Jasa Giro sebesar Rp540.219,00 merupakan saldo rekening di Bendahara Dana Kapitasi JKN yang ada di delapan FKTP dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7.5. 61 Kas di Bendahara FKTP**

*dalam rupiah*

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo 2023			Saldo 2022		
			Giro	Bank	Tunai	Giro	Bank	Tunai
1	Cempae	0342696961/JKN	121.685,00	57.674.901,00	0,00	15.618,00	3.106,00	0,00
2	Lakessi	0342691453/JKN	115.392,00	31.974.493,00	0,00	56.629,00	26.517,00	0,00
3	Madising Na Mario	0342692297/JKN	1.079,00	0,00	0,00	33.911,00	11.080.077,00	0,00
4	Lumpue	0342686249/JKN	168.425,00	48.058.838,00	0,00	72.392,00	32,00	0,00
5	Lompoe	0342690551/JKN	45.277,00	743.733,00	0,00	49.490,00	164.975,00	0,00
6	Lapadde	0342700322/JKN	48.434,00	23.543.943,00	0,00	13.655,00	14.346.644,00	0,00
7	Lemoe	1179252390/JKN	33.969,00	34.044.878,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
8	Lauleng	0912326766/JKN	5.958,00	9.478.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>540.219,00</b>	<b>205.519.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.695,00</b>	<b>25.711.351,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

**7.5.3.1.1.g Kas Lainnya** **2023**  
**Rp7.844.562,00** **2022**  
**Rp78.476.456,14**

Kas Lainnya merupakan Utang PFK dan Pajak Daerah yang belum disetor per 31 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan dan RS dr. Hasri Ainun Habibie. Adapun rincian pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 62 Daftar PFK dan Pajak Daerah di Bendahara Pengeluaran/BOS**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Per 31 Desember 2023			Per 31 Desember 2022		
		PFK/Pajak Daerah	Tanggal Penyetoran	Nomor Rekening	PFK/Pajak Daerah	Tanggal Penyetoran	Nomor Rekening
1	Dinas Pendidikan	6.665.962,00	STS tgl 4,5,12,15,16,19, 22,23,24,26,29, 30 dan 31 Januari 2024  STS tgl 1,2,6,7,8,9,10,1 2,16,21 dan 22 Februari 2024	Tunai	28.386.790,14	STS tgl 3,10,11,12 April 2023	030-002- 000002203-4
2	RS dr. Hasri Ainun Habibie	1.178.600,00	STS tgl 10 Januari 2024	Tunai	0,00	-	-
3	Dinas Tenaga Kerja	0,00	-	-	3.101.952,00	STS tgl 2 dan 4 Januari 2023	030-002- 000005444-1
4	Dinas Perumahan Kawasan, permukiman dan Pertanahan	0,00	-	-	25.836,00	STS tgl 4 Januari 2023	030-002- 000003112-2
5	Dinas Perpustakaan	0,00	-	-	458.085,00	STS tgl 16 Januari 2023	030-002- 000012729-4
6	Sekretariat Daerah Kota	0,00	-	-	2.340.554,00	STS tgl 10,13,25, Februari 2023	030-002- 000002645-5
7	Dinas Kesehatan	0,00	-	-	44.163.239,00	STS tgl 23 dan 22 Februari 2023	030-002- 000003253-6
<b>Jumlah</b>		<b>7.844.562,00</b>	-	-	<b>78.476.456,14</b>	-	-

**7.5.3.1.1.h Kas Dana BOK  
Puskesmas**

**2023**  
**Rp72.525.259,00**

**2022**  
**Rp0,00**

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan dana BPJS yang terdapat pada delapan puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.525.259,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 63 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas**

*dalam rupiah*

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo 2023	Saldo 2022
			Bank	Bank
1	Cempae	1590071810/BPJS BOK	7.864.069,00	0,00
2	Lakessi	1590071821/BPJS BOK	21.934.593,00	0,00
3	Madising Na Mario	1590071763/BPJS BOK	1.051.069,00	0,00
4	Lumpue	1590071843/BPJS BOK	16.662.227,00	0,00
5	Lompoe	1590071774/BPJS BOK	9.265.233,00	0,00
6	Lapadde	1590071832/BPJS BOK	6.066.698,00	0,00
7	Lemoe	1590071809/BPJS BOK	9.594.563,00	0,00
8	Lauleng	1590071796/BPJS BOK	86.807,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>72.525.259,00</b>	<b>0,00</b>

**7.5.3.1.2 Piutang Pendapatan**

**2023**  
**Rp43.300.079.754,68**

**2022**  
**Rp33.691.068.109,02**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.300.079.754,68 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.691.068.109,02 yang terdiri dari Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 64 Rincian Piutang Pendapatan**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Piutang Pajak	10.553.487.873,40	8.791.482.189,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(5.757.612.367,35)	(5.131.935.363,85)
	Piutang Pajak Neto	4.795.875.506,05	3.659.546.825,25)
2	Piutang Retribusi	90.063.650,00	83.904.633,34
	Penyisihan Piutang Retribusi	(85.970.873,34)	(75.597.231,67)
	Piutang Retribusi Neto	4.092.776,66	8.307.401,67
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.911.493.144,28	6.226.779.221,58
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(46.019.414,26)	(31.133.896,11)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	13.865.473.730,02	6.195.645.325,47
4	Piutang Transfer Antar Daerah	18.745.035.087,00	18.588.902.065,00
	Penyisihan Piutang transfer Antar Daerah	(93.725.175,44)	(92.944.510,33)
	Piutang Transfer Antar Daerah Neto	18.651.309.911,56	18.495.957.554,67
<b>Jumlah</b>		<b>43.300.079.754,68</b>	<b>33.691.068.109,02</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.3.1.2.a Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp10.553.487.873,40</b>	<b>Rp8.791.482.189,10</b>

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.553.487.873,40 yang terdiri dari Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 65 Rincian Piutang Pajak Daerah**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Pajak	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pajak Hotel	123.740.738,80	82.114.323,00
2	Pajak Restoran	1.864.676.735,60	1.487.917.302,10
3	Pajak Hiburan	975.913.350,00	269.500.950,00
4	Pajak Reklame	666.900.900,00	588.113.900,00
5	Pajak Air Tanah	34.935.456,00	37.467.758,00
6	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	16.125.000,00	13.228.000,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.540.823,00	20.540.823,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.850.654.870,00	6.292.599.133,00
9	Penyisihan Piutang Pajak	(5.757.612.367,35)	(5.131.935.363,85)
10	Piutang Pajak Neto	4.795.875.506,05	3.659.546.825,25
<b>Jumlah</b>		<b>10.553.487.873,40</b>	<b>8.791.482.189,10</b>

Adapun Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

<b>7.5.3.1.2.c Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp90.063.650,00</b>	<b>Rp83.904.633,34</b>

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.063.650,00 merupakan saldo retribusi jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu dibayar oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5. 66 Rekapitulasi Piutang Retribusi**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	10.814.150,00	13.221.133,34
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	79.249.500,00	70.683.500,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(85.970.873,34)	(75.597.231,67)
4	Piutang Retribusi Neto	4.092.776,66	8.307.401,67
<b>Jumlah</b>		<b>90.063.650,00</b>	<b>83.904.633,34</b>

Adapun rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.3.1.2.c Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp13.911.493.144,28</b>	<b>Rp6.226.779.221,58</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.911.493.144,28. Terdiri dari Saldo Piutang BLUD RSUD Andi Makkasau sebesar Rp9.181.289.337,00, Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RS dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp4.730.102.246,00 dan Piutang Pendapatan Bunga TDF Remunerasi sebesar Rp101.561,28. Rincian piutang sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
<b>RSUD Andi Makkasau</b>			
1	Piutang BPJS	9.179.748.364,00	6.224.990.300,00
2	Piutang Lain-lain	1.540.973,00	1.183.787,00
<b>RS dr. Hasri Ainun Habibie</b>			
3	Piutang BPJS	4.626.540.200,00	0,00
4	Piutang Pasien BPJS Ketenagakerjaan	104.357,00	0,00
5	Piutang Layanan Lainnya	103.457.689,00	0,00
<b>Badan Keuangan Daerah</b>			
6	Piutang Pendapatan Bunga	101.561,28	605.134,58
7	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(46.019.414,26)	(31.133.896,11)
8	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto	13.865.473.730,02	6.195.645.325,47
<b>Jumlah</b>		<b>13.911.493.144,28</b>	<b>6.226.779.221,58</b>

<b>7.5.3.1.2.d Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp18.745.035.087,00</b>	<b>Rp18.588.902.065,00</b>

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.745.035.087,00 yang terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 68 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	15.909.646.587,00	18.588.902.065,00
2	Piutang Bantuan Keuangan	2.835.388.500,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(93.725.175,44)	(92.944.510,33)
4	Piutang Piutang Transfer Antar Daerah Neto	18.651.309.911,56	18.495.957.554,67
<b>Jumlah</b>		<b>18.745.035.087,00</b>	<b>18.588.902.065,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

1) Piutang Bagi Hasil Pajak	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp15.909.646.587,00</b>	<b>Rp18.588.902.065,00</b>

Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.909.646.587,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 69 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Pajak	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.542.442.552,00	5.788.677.151,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN - KB)	2.397.714.242,00	3.281.206.986,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	5.713.727.696,00	7.029.972.761,00
4	Pajak Air Permukaan	29.996.724,00	26.750.196,00
5	Pajak Rokok	2.225.765.373,00	2.462.294.971,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.909.646.587,00</b>	<b>18.588.902.065,00</b>

Adapun rincian Piutang Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil Provinsi sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 70 Piutang Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil Provinsi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Piutang	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)</b>		
	Oktober 2023	1.404.747.436,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 1828/XII/TAHUN 2023
	November 2023	1.555.277.213,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 135/II/TAHUN 2024
	Desember 2023	2.582.417.903,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 136/II/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH A</b>	<b>5.542.442.552,00</b>	
<b>2</b>	<b>BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)</b>		
	Oktober 2023	734.026.693,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 1828/XII/TAHUN 2023
	November 2023	702.859.961,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 135/II/TAHUN 2024
	Desember 2023	960.827.588,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 136/II/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH B</b>	<b>2.397.714.242,00</b>	
<b>3</b>	<b>PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR(PBB-KB)</b>		
	Oktober 2023	1.909.496.402,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 1828/XII/TAHUN 2023
	November 2023	1.886.348.120,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 135/II/TAHUN 2024
	Desember 2023	1.917.883.174,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 136/II/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH C</b>	<b>5.713.727.696,00</b>	
<b>4</b>	<b>PAJAK AIR PERMUKAAN</b>		
A	PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN		



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Piutang	Dasar Hukum
	Oktober 2023	4.192.503,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 1828/XII/TAHUN 2023
	November 2023	7.557.314,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 135/II/TAHUN 2024
	Desember 2023	15.192.235,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 136/II/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH I</b>	<b>26.942.052,00</b>	
B	PLTA BAKARU		
	Oktober 2023	949.641,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 1828/XII/TAHUN 2023
	November 2023	1.254.764,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 135/II/TAHUN 2024
	Desember 2023	850.267,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 136/II/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH II</b>	<b>3.054.672,00</b>	
	<b>JUMLAH D (I+II)</b>	<b>29.996.724,00</b>	
6	DBH PAJAK ROKOK		
	Triwulan IV	2.225.765.373,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No. 41/I/TAHUN 2024
	<b>JUMLAH E</b>	<b>2.225.765.373,00</b>	
	<b>JUMLAH A+B+C+D+E</b>	<b>15.909.646.587,00</b>	

2) Piutang Bantuan Keuangan	<u>2023</u> <b>Rp2.835.388.500,00</b>	<u>2022</u> <b>Rp0,00</b>
-----------------------------	--	------------------------------

Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.835.388.500,00. Piutang Bantuan Keuangan berasal dari Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi berupa bantuan keuangan kesehatan gratis, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 71 Rincian Piutang Bantuan Keuangan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Piutang	Dasar Hukum
1	Bantuan Pembayaran luran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya luran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Triwulan III	1.366.050.000,00	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor1737/XII/Tahun 2023
2	Bantuan Pembayaran luran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya luran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Triwulan IV	1.469.338.500,00	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1825/XII/Tahun 2023
	<b>Jumlah</b>	<b>2.835.388.500,00</b>	-

Adapun Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.3.1.3 Piutang Lainnya</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.639.816,00</b>	<b>Rp1.639.816,00</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.639.816,00 terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun rincian Piutang Lainnya sebagai berikut.

**Tabel 7.5. 72 Rekapitulasi Piutang Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.257.900,00	1.257.900,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	381.916,00	381.916,00
3	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.639.816,00)	(1.639.816,00)
4	Piutang Lainnya Neto	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.639.816,00</b>	<b>1.639.816,00</b>

<b>7.5.3.1.3.a Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.257.900,00</b>	<b>Rp1.257.900,00</b>

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.257.900,00 merupakan jumlah tunggakan piutang atas penjualan kendaraan dinas dan aset lainnya. Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan piutang di Tahun Anggaran 2023. Rincian piutang sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 73 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		
	A. Nur Alam /SK No. 171 Thn 2003	350.000,00	350.000,00
	Zainuddin Saat/SK No. 407 Thn 2004	345.400,00	345.400,00
2	Penjualan Aset Lainnya	562.500,00	562.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.257.900,00</b>	<b>1.257.900,00</b>

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tertera pada tabel diatas telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 15 Mei 2024.

<b>7.5.3.1.3.b Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp381.916,00</b>	<b>Rp381.916,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp381.916,00 merupakan saldo tunggakan kerugian daerah yang telah ditetapkan SKTJMnya atas nama CVAstaman Raya sebesar Rp381.916,00. Adapun rincian mengenai Piutang Lainnya dapat lihat pada **Lampiran 9**.

<b>7.5.3.1.4 Penyisihan Piutang</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp5.984.967.646,39)</b>	<b>(Rp5.333.250.817,96)</b>

Saldo akhir Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp5.984.967.646,39) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp5.333.250.817,96) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 74 Rincian Penyisihan Piutang**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.983.327.830,39)	(5.331.611.001,96)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.639.816,00)	(1.639.816,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(5.984.967.646,39)</b>	<b>(5.333.250.817,96)</b>

<b>7.5.3.1.4.a Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp5.983.327.830,39)</b>	<b>(Rp5.331.611.001,96)</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp5.983.327.830,39) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp5.331.611.001,96) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 75 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.757.612.367,35)	(5.131.935.363,85)
	a Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(45.023.452,88)	(36.118.892,97)
	b Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(709.754.605,54)	(471.732.220,58)
	c Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(180.186.318,75)	(146.169.269,25)
	d Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(520.206.619,50)	(412.309.654,50)
	e Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(15.827.866,19)	(13.239.172,68)
	f Penyisihan Piutang Pajak Burung walet	(6.195.625,00)	(6.181.140,00)
	g Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(19.554.390,60)	(17.725.044,60)
	h Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(4.260.863.488,89)	(4.028.459.969,27)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(85.970.873,34)	(75.597.231,67)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
a	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Menara Telekomunikasi	(6.898.483,34)	(6.610.566,67)
b	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(10.217.890,00)	(8.718.340,00)
c	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyewaan Tanah	(58.876.500,00)	(53.740.325,00)
d	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyewaan Bangunan	(9.978.000,00)	(6.528.000,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(46.019.414,26)	(31.133.896,11)
a	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	(507,81)	(3.025,67)
b	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(46.018.906,45)	(31.130.870,44)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(93.725.175,44)	(92.944.510,33)
a	Penyisihan Piutang Bagi Hasil- Pajak Kendaraan Bermotor	(27.712.212,76)	(28.943.385,75)
b	Penyisihan Piutang Bagi hasil- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(11.988.571,21)	(16.406.034,93)
c	Penyisihan Piutang Bagi hasil- Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(28.568.638,48)	(35.149.863,81)
d	Penyisihan Piutang Bagi hasil- Pajak Air Permukaan	(149.983,62)	(133.750,98)
e	Penyisihan Piutang Bagi hasil-Pajak Rokok	(11.128.826,87)	(12.311.474,86)
f	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	(14.176.942,50)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(5.983.327.830,39)</b>	<b>(5.331.611.001,96)</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp5.983.327.830,39) dan Tahun 2022 sebesar (Rp5.331.611.001,96) terjadi penurunan sebesar (Rp651.716.828,43) atau 12,22%.

**7.5.3.1.4.b Penyisihan Piutang Lainnya**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp1.639.816,00)</b>	<b>(Rp1.639.816,00)</b>

Saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.639.816,00). Atas Piutang Pajak tersebut di atas dilakukan penyisihan atas piutang pajak sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare yaitu pada Kebijakan Nomor 07 mengenai Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang. Rincian penyisihan piutang pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 76 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Lainnya**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(1.257.900,00)	(1.257.900,00)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	(381.916,00)	(381.916,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(Rp1.639.816,00)</b>	<b>(Rp1.639.816,00)</b>

**7.5.3.1.5 Beban Dibayar  
Di Muka**

2023	2022
<b>Rp81.498.430,00</b>	<b>Rp21.314.349,00</b>

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.498.430,00 merupakan realisasi belanja modal yang lebih besar dari bobot pekerjaan yang terdiri dari Dinas Pendidikan terdapat kelebihan bayar karena kekurangan vol pekerjaan sebesar Rp76.300.000,00, dan kelebihan bayar atas pekerjaan yang dikerjakan dan akan dikembalikan ke Kas Daerah, terdiri dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp500,00 dari pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase (penyetoran tanggal 6 Februari 2024), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.657.050,00 dari revitalisasi lapangan lompoe (penyetoran tanggal 8 Januari 2024) dan pada Sekretariat Daerah Kota terdapat kelebihan bayar sebesar Rp540.880,00 dari Pembangunan Kanopi Ruang Parkir TA 2019 (penyetoran tanggal 18 Maret 2024). Rincian Belanja dibayar dimuka disajikan pada **Lampiran 10**.

**7.5.3.1.6 Persediaan**

2023	2022
<b>Rp17.070.290.623,36</b>	<b>Rp21.542.375.060,46</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.070.290.623,36 merupakan nilai Persediaan Bahan Pakai Habis. Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 77 Rincian Persediaan**

*dalam rupiah*

No	Jenis Persediaan	Persediaan Per 31 Desember 2023	Persediaan Per 31 Desember 2022
1	Bahan Bakar dan Pelumas	13.840.000,00	0,00
2	Bahan Baku	43.436.686,50	36.167.587,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	21.590.000,00
4	Bahan Lainnya	4.341.603.014,92	5.448.802.294,33
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.760.000,00
6	Alat Tulis Kantor	71.491.739,00	96.534.526,81
7	Kertas dan Cover	18.053.615,00	7.281.040,00
8	Bahan Cetak	415.705.687,00	537.677.616,00
9	Benda Pos	516.000,00	504.100,00
10	Bahan Komputer	543.000,00	0,00
11	Perabot Kantor	448.100,00	303.000,00
12	Alat Listrik	14.433.417,80	13.260.220,90



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Persediaan	Persediaan Per 31 Desember 2023	Persediaan Per 31 Desember 2022
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.814.385,00	24.688.252,00
14	Obat	5.263.205.847,56	5.135.124.902,47
15	Obat-Obatan Lainnya	5.547.728.221,58	8.465.509.604,95
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.262.422.824,00	1.752.577.366,00
17	Natura	27.211.250,00	594.550,00
18	Natura dan Pakan lainnya	36.836.835,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.070.290.623,36</b>	<b>21.542.375.060,46</b>

Adapun rincian jenis persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Terdapat persediaan obat-obatan yang *expired* dan barang medis habis pakai pada RSUD Andi Makkasau sebesar Rp843.187.332,88, Dinas Kesehatan sebesar Rp720.992.545,84 dan RS dr.Hasri Ainun sebesar Rp88.811.392,98.

Terdapat rincian pemusnahan benda berharga (karcis) pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp42.617.855,00. Rincian obat-obatan *expired* per 31 Desember 2023 dan rincian pemusnahan benda berharga (karcis) disajikan pada **Lampiran 12**.

**7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp103.479.098.872,80</b>	<b>Rp93.074.231.741,80</b>

Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.479.098.872,80 dan tahun 2022 sebesar Rp93.074.231.741,80. Adapun Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

**7.5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 78 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

*dalam rupiah*

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Dana Bergulir	1.279.397.268,00	1.279.497.268,00
2	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(1.279.397.268,00)	(1.279.497.268,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**7.5.3.2.1.a Dana Bergulir**

**2023**  
**Rp1.279.397.268,00**

**2022**  
**Rp1.279.497.268,00**

Dana bergulir kepada masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.279.397.268,00. Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.279.497.268,00 merupakan pemberian kredit kepada Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) yang dikelola PT Bank Sulsel Cabang Parepare melalui pola *Executing* dan *Chanelling* serta dana bergulir UKMK yang disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja pada Bidang Koperasi, Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Parepare dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun rincian mutasi dari bagian lancar tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5. 79 Saldo Dana Bergulir**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dana Avalist pada Bank Sulsel				
	- Pola Executing(Dana Avalist)	160.980.854,00	0,00	0,00	160.980.854,00
	- Pola Chanelling	602.435.926,00	0,00	100.000,00	602.335.926,00
2	Dana Bergulir UKMK (Dinas Tenaga Kerja)				
	-Dana Bergulir Kaki Lima Pasar Lakessi	28.140.000,00	0,00	0,00	28.140.000,00
	-Dana Bergulir Sarana Industri Pendukung RT & Wirausaha Pemuda	73.199.500,00	0,00	0,00	73.199.500,00
3	Dana Bergulir UKMK (Bagian Ekonomi)	287.940.988,00	0,00	0,00	287.940.988,00
4	Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEK MAS)	126.800.000,00	0,00	0,00	126.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.279.497.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.279.397.268,00</b>

Rincian debitor Dana Avalist pada Bank Sulsel dan Dana Bergulir UKMK (Dinas Tenaga Kerja) poin 1 dan 2 dapat dilihat pada **Lampiran 13**, Dana Bergulir UKMK (Bagian Ekonomi) poin 3 dapat dilihat pada **Lampiran 14** & Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEK MAS) poin 4 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan dana bergulir per 31 Desember 2023. Dana Bergulir tersebut digulirkan dari Tahun 2002 s.d. 2009 sehingga per 31 Desember 2023 seluruh dana bergulir tersebut berumur lebih dari lima tahun. Adapun rincian dana bergulir sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir Pola Executing dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Parepare Nomor: 500/8/KB/VII/2004|Nomor: KK/01/PR/2004 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalist Pola Executing dan Chanelling Pemerintah Daerah Kota Parepare. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pihak Bank Sulselbar bertanggungjawab sepenuhnya



terhadap penyaluran dan penagihan pengembalian tunggakan kredit. Dengan demikian atas penagihan pada penerima pola Executing tidak dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, sehingga tidak terdapat dokumentasi surat penagihan kepada penerima dana bergulir. Atas Dana Bergulir Pola Executing tersebut Pemerintah Kota Parepare di Dinas Tenaga Kerja telah melakukan inventarisasi. Adapun saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.980.854,00. Jumlah total debitur Executing sebanyak 32 orang, sudah lunas sebanyak 14 orang dan sisa yang menunggak namun masih bisa ditagih dan potensial sebanyak 19 orang.

- b. Dana Bergulir Pola Chanelling dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Parepare Nomor:500/8/KB/VII/2004 Nomor:KK/01/PR/2004 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalist Pola Executing dan Chanelling Pemerintah Daerah Kota Parepare. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kota Parepare bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman dan berhak melakukan tindakan terhadap penerima yang belum mengembalikan dana bergulir yang diterima. Selama TA 2022, dana bergulir pola Chanelling Dinas Tenaga Kerja, jumlah tunggakan dana bergulir sebesar Rp602.435.926,00 dan terealisasi sebanyak Rp100.000,00 yang disetor pada tanggal 25 September 2023 dan tersisa sebesar Rp602.335.926,00 untuk TA 2023. Pengelompokan kualitas penerimaan dana bergulir yang terdiri dari 214 kelompok semuanya sudah macet dimana diantaranya sesuai hasil pendataan per 30 Desember 2014 terdapat enam kelompok yang telah meninggal dunia dengan nilai Rp17.531.198,00.
- c. Dana Bergulir UKMK dikelola oleh dua SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Dinas Tenaga Kerja mengelola dari Dana Bergulir Kaki Lima Pasar Lakessi dan Dana Bergulir Sarana Industri Pendukung RT serta Wirausaha Pemuda. Atas Dana Bergulir UKMK Dinas Perindagkop dan UKM yang waktu itu masih dikelola Dinas Perindagkop terdapat surat tagihan kepada penerima Dana Bergulir sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2015, 20 Mei 2015, dan 13 Oktober 2015. Namun pada tahun 2017 dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun pengelompokan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dikategorikan kualitas macet karena umurnya lebih dari 5 tahun. Dana Bergulir yang dikelola oleh Bagian Ekonomi memiliki saldo awal sebesar Rp287.940.988,00 dan di Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi jadi sisa Dana Bergulir yang dikelola oleh Bagian Ekonomi sebesar Rp287.940.988,00. Adapun total debitur yang dikelola oleh Bagian Ekonomi sebesar 289 orang, dari angka tersebut yang sudah lunas sebanyak 37 orang, tidak bisa ditagih 110 orang, pindah alamat sebanyak enam orang, meninggal sebanyak 17 orang, dan berpotensi untuk ditagih sebanyak 119 orang, namun belum dibuatkan penjadwalan ulang untuk ditagih. Dana bergulir di atas sudah tidak ditunjukkan untuk digulirkan kembali, sehingga penyetoran tunggakan dana bergulir langsung disetorkan ke Kas Daerah.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- d. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dagu PEK-MAS) didasarkan pada SK Walikota No. 375 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, merupakan pinjaman kepada masyarakat yang dikelola oleh tiga SKPD antara lain Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp254.000.000,00, Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp31.000.000,00 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan alokasi dana sebesar Rp215.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 80 Saldo Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dagu PEK-MAS dikelola Disperindag	89.100.000,00	0,00	0,00	89.100.000,00
2	Dagu PEK-MAS dikelola Disnaker	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00
3	Dagu PEK-MAS dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.450.000,00	0,00	0,00	28.450.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>126.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.800.000,00</b>

**7.5.3.2.1.b Penyisihan Investasi  
 Jangka Panjang Non  
 Permanen**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>(1.279.397.268,00)</b>	<b>(Rp1.279.497.268,00)</b>

Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.279.397.268,00) dengan rincian berikut:

**Tabel 7.5. 81 Rincian Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Penyisihan per 31 Desember 2023	Penyisihan per 31 Desember 2022
1	Dana Avalist pada Bank Sulsel		
	- Pola Executing(Dana Avalist)	(160.980.854,00)	(160.980.854,00)
	- Pola Channeling	(602.335.926,00)	(602.435.926,00)
2	Dana Bergulir UKMK (Dinas Tenaga Kerja)		
	-Dana Bergulir Kaki Lima Pasar Lakessi	(28.140.000,00)	(28.140.000,00)
	- Dana Bergulir Sarana IndustriPendukung RT & Wirausaha Pemuda	(73.199.500,00)	(73.199.500,00)
3	Dana Bergulir UKMK (Bagian Ekonomi)	(287.940.988,00)	(287.940.988,00)
4	Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEK MAS)	(126.800.000,00)	(126.800.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(1.279.397.268,00)</b>	<b>(1.279.497.268,00)</b>





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Parepare yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang merupakan bagian/hasil dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT PBM ditetapkan sebagai barang milik daerah dan dicatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Parepare dengan nilai Rp112.365.323,00. Dari nilai dalam SK tersebut, telah didistribusikan dan dicatat pada KIB SKPD sebesar Rp98.867.323,00 yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.867.323,00, Setdako sebesar Rp90.000.000,00. Sedangkan, sisanya sebesar Rp13.498.000,00 belum didistribusikan karena pertimbangan belum terdapat penetapan status pailit atas PT PBM.

- 2) Pemerintah Kota Parepare memiliki 100% kepemilikan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare, maka penyertaan Modal dinilai dengan menggunakan Metode Ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 pada Lampiran I.07 tentang Akuntansi Investasi paragraf 37 yang menyatakan bahwa kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Kota Parepare pada PAM Tirta Karajae sebesar 100%, maka dalam penghitungan investasi permanen menggunakan metode ekuitas. Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kota Parepare pada PAM Tirta Karajae per 31 Desember 2023 berdasarkan Neraca Audited PAM Tirta Karajae periode Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 83 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Parepare**

*dalam rupiah*

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
<b>Saldo Awal Ekuitas</b>	<b>58.177.231.741,80</b>	<b>56.663.208.480,40</b>
Penyertaan modal yang sudah ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Koreksi Penyertaan Modal	0,00	(0,60)
Laba (rugi) tahun berjalan	(5.128.132.869,00)	1.514.023.262,00
<b>Saldo Akhir Ekuitas</b>	<b>53.049.098.872,80</b>	<b>58.177.231.741,80</b>

Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PAM Tirta Karajae Tahun Anggaran 2023 dalam **Lampiran 38**.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Parepare pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.930.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.533.000.000,00 dari saldo per 31 Desember 2022. Penambahan tersebut merupakan kapitalisasi saham dari atribusi cadangan umum BPD Sulselbar menjadi modal disetor Pemerintah Kota Parepare sesuai dengan hasil RUPS LB tanggal 2 Desember 2020. Investasi ini dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Parepare kurang dari 20%. Terdapat penyertaan modal yang belum didukung dengan Surat Keputusan Wali Kota yang tersaji dalam **Lampiran 41**.

**7.5.3.3 Aset Tetap**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp2.093.584.538.238,04</b>	<b>Rp2.089.309.281.193,44</b>

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.093.584.538.238,04 dan sebesar Rp2.089.309.281.193,44.

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.093.584.538.238,04 merupakan rekapitulasi dari nilai Aset Tetap dalam Neraca SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 84 Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023**

					<i>dalam rupiah</i>
No	Aset Tetap	Saldo Awal 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
1	Tanah	589.113.386.201,22	17.752.830.983,22	9.031.549.002,81	597.834.668.181,63
2	Peralatan dan Mesin	695.296.901.324,30	106.436.442.491,84	93.815.009.328,17	707.918.334.487,97
3	Gedung dan Bangunan	1.076.245.841.496,38	196.242.354.677,00	158.484.257.985,12	1.114.003.938.188,26
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.080.696.516.331,02	131.749.413.786,97	42.619.805.224,16	1.169.826.124.893,83
5	Aset Tetap Lainnya	28.877.910.791,01	3.128.813.856,00	720.000,00	32.006.004.647,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.895.320.239,18	22.880.563.253,43	48.727.701.855,19	25.048.181.637,42
7	Akumulasi Penyusutan	(1.431.816.595.189,67)	29.224.089.010,84	150.460.207.619,25	(1.553.052.713.798,08)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.089.309.281.193,44</b>	<b>507.414.508.059,30</b>	<b>503.139.251.014,70</b>	<b>2.093.584.538.238,04</b>

Rincian mutasi aset tetap per jenis aset disajikan pada **Lampiran 16**. Adapun penjelasan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

**7.5.3.3.1 Aset Tetap Tanah**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp 597.834.668.181,63</b>	<b>Rp589.113.386.201,22</b>

Tanah Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp597.834.668.181,63 dan Rp589.113.386.201,22. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk Aset Tetap Tanah terdapat penambahan sebesar Rp17.752.830.983,22 dan pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.031.549.002,81.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

A. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.752.830.983,22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 85 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai
1	Belanja Modal	237.142.300,00
2	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	3.542.829.920,04
3	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset Yang Dikerjasamakan)	4.111.266.180,00
4	Hibah Masuk	3.900.093.800,00
5	Inventarisasi Aset	1.272.393.000,00
6	Mutasi Antar OPD	4.689.105.783,18
<b>Jumlah</b>		<b>17.752.830.983,22</b>

Adapun Penjelasan dari masing-masing penambahan Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal TA 2023  
Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan Belanja Modal dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan sebesar Rp237.142.300,00.
- 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan  
Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.542.829.920,04.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset Yang Dikerjasamakan)  
Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset yang Dikerjasamakan) dari Badan Keuangan Daerah sebesar Rp4.111.266.180,00
- 4) Hibah Masuk  
Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan Hibah Masuk pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan sebesar Rp. 3.900.093.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 86 Rincian Penambahan Hibah Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	Keterangan
1	Tanah Jalan	467.257.500 ,00	Hibah CV. Nanda Putra ABD. Rahman Latunrung
2	Drainase	45.030.000,00	Hibah CV. Nanda Putra ABD. Rahman Latunrung
3	Tanah dan Bangunan Mesjid	25.080.000,00	Hibah CV. Nanda Putra ABD. Rahman Latunrung



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	Keterangan
4	Tanah Ruang Terbuka Hijau	282.395.100,00	Hibah CV. Nanda Putra ABD. Rahman Latunrung
5	Tanah Jalan	2.383.840.000,00	CV. Timurama Hikmah Patompo, BS.c
6	Drainase	405.760.000,00	CV. Timurama Hikmah Patompo, BS.c
7	Tanah dan Bangunan Mesjid	85.680.000 ,00	CV. Timurama Hikmah Patompo, BS.c
8	Tanah peruntukan sekolah	47.419.200,00	CV. Timurama Hikmah Patompo, BS.c
9	Tanah Ruang Terbuka Hijau	157.632.000 ,00	CV. Timurama Hikmah Patompo, BS.c
<b>Jumlah</b>		<b>3.900.093.800,00</b>	

5) Inventarisasi Aset

Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan Inventarisasi Aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.072.177.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp200.216.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 87 Rincian Penambahan Inventarisasi Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nilai	SKPD
1	Jalan Lr. Jl. Andi Makkasau Timur 1	88.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Jalan Lr. Abubakar Lambogo-Panti Asuhan	217.415.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Jalan Lr. Messang Bau Massepe 1	133.632.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Jalan Souji Datuk Kanjenne 3	123.424.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Jalan Lr. Lasinrang 1	291.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Jalan Lr. Sazilia	51.040.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Jalan Lr. Dg. Pawero	34.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Jalan Lr. Badaruddin	50.112.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Jalan Lr. H. Baharuddin	81.664.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Taman A. Sulolipu	61.400.000 ,00	Dinas Lingkungan Hidup
11	Taman 3 (Dekat Polsek Ujung)	43.200.000 ,00	Dinas Lingkungan Hidup
12	Taman 4 (Depan Makam A.Mallarangeng)	18.912.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
13	Taman 5 (Dekat Kominfo)	45.704.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
14	Taman Kota Jalan Reformasi - Sudirman	31.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Jumlah</b>		<b>1.272.393.000,00</b>	

6) Mutasi Antar SKPD

Penambahan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan penambahan Mutasi Antar SKPD sebesar Rp4.689.105.783,18 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 88 Rincian Penambahan Mutasi Antar SKPD Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Rs. Dr. Hasry Ainun Habibie	Tanah Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie	782.339.864,00	Penambahan Aset tetap pada Tanah karena adanya mutasi dari Dinas Kesehatan
2	Dinas Tenaga Kerja	Tanah dan Bangunan Ex. Apotik Mario	108.486.000,00	Penambahan Aset tetap pada Tanah karena adanya mutasi dari Dinas Kesehatan
3	Dinas Tenaga Kerja	Tanah Pilihan (Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi) Waterpark UKM)	3.542.829.920,04	Penambahan Aset tetap pada Tanah karena adanya mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Badan Keuangan Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	255.449.999,14	Penambahan Aset tetap pada Tanah karena adanya mutasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
<b>Jumlah</b>			<b>4.689.105.783,18</b>	

B. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.031.549.002,80 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 89 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	Pengurangan Aset Tetap Tanah	Nilai
1	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.956.751,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usul Hapus)	4.288.486.468,62
3	Mutasi Antar OPD	4.689.105.783,18
<b>Jumlah</b>		<b>9.031.549.002,80</b>

Adapun Penjelasan masing-masing dari Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Pengurangan Aset Tetap Tanah disebabkan karena adanya Reklasifikasi KIB A (Tanah) ke KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) berupa Jasa Penilaian Jalan Akses Bukit Madani pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan sebesar Rp53.956.751,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usul Hapus)  
Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usul Hapus) sebesar Rp4.288.486.468,62 dengan rincian sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 90 Rincian Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Usul Hapus) Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nilai	SKPD
1	Tanah Tambak Ikan Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	Tanah Kantor ketahanan Pangan	500.000.000,00	Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	2.668.431.950,00	Badan Keuangan Daerah
4	Tanah Perumahan PNS	705.554.518,62	Badan Keuangan Daerah
5	Tanah Bangunan Sekolah	214.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Jumlah</b>		<b>4.288.486.468,62</b>	

3) Mutasi Antar SKPD

Pengurangan nilai Tanah yang disajikan di Neraca Tahun 2023 merupakan pengurangan Mutasi Antar SKPD sebesar Rp4.689.105.783,18 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 91 Rincian Pengurangan Mutasi antar SKPD Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Tanah Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie	782.339.864,00	Pengurangan Aset tetap pada tanah karena adanya mutasi ke Rs. Dr. Hasry Ainun Habibie
2	Dinas Kesehatan	Tanah dan Bangunan Ex. Apotik Mario	108.486.000,00	Pengurangan Aset tetap pada tanah karena adanya mutasi ke Dinas Tenaga Kerja
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah Pilihan (Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi) Waterpark UKM)	3.542.829.920,04	Pengurangan Aset tetap pada tanah karena adanya mutasi Dinas Tenaga Kerja
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	255.449.999,14	Pengurangan Aset tetap pada tanah karena adanya mutasi ke Badan Keuangan Daerah
<b>Jumlah</b>			<b>4.689.105.783,18</b>	

Terdapat Tanah yang tercatat pada dua entitas, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 7.5. 92 Rincian Tanah yang Tercatat pada Dua Entitas**

*dalam rupiah*

No	Uraian Tanah	Keterangan	Status Penggunaan	Nilai
1	Tanah untuk Kantor Dinas PKP	Tercatat di dua entitas yaitu Pemkot Parepare dan Pemprov SulSel. Sertipikat dimiliki oleh Pemprov Sulsel.	Belum ada perjanjian	500.000.000,00
2	Tanah Tambak Ikan Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang	Tercatat di dua entitas yaitu Pemkot Parepare dan Pemprov SulSel. Sertipikat dimiliki oleh Pemprov Sulsel	Belum ada perjanjian	200.000.000,00
3	Tanah Lapangan Sepak Bola Sumpang Minangae	Tercatat di dua entitas yaitu Pemkot Parepare dan TNI AD. Sertipikat dimiliki oleh TNI AD	Belum ada perjanjian	2.668.431.950,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Tanah	Keterangan	Status Penggunaan	Nilai
4	Tanah Bangunan Sekolah SDN 22	Tercatat di dua entitas yaitu Pemkot Parepare dan TNI AD. Sertipikat dimiliki oleh TNI AD	Belum ada perjanjian	214.500.000,00
5	Bangunan Gedung SDN 7 dan SDN 8	Tercatat pada Kib A Pemkot Parepare dan Sertipikat dimiliki oleh Masyarakat	Belum ada perjanjian	388.200.000,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

**7.5.3.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin**      2023      2022  
**Rp707.918.334.487,97**      **Rp695.296.901.324,30**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp695.296.901.324,30 dan Rp707.918.334.487,97. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp106.436.442.491,84 dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp93.815.009.328,17 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 93 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

Nama Bidang Barang	Saldo Awal 2022	Mutasi			Saldo Akhir 2023
		Tambah		Kurang	
		Belanja Modal 2023	Selain dari Belanja Modal		
1 Alat Besar	19.448.388.258,59	24.985.000,00	2.319.794.351,00	2.923.335.813,00	18.869.831.796,59
2 Alat Angkutan	77.449.843.646,74	210.443.100,00	8.407.026.236,75	11.141.710.883,76	74.925.602.099,73
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.310.905.257,29	26.058.025,00	149.155.721,65	129.928.636,65	3.356.190.367,29
4 Alat Pertanian	1.833.868.982,17	4.550.000,00	4.157.165,35	6.947.165,35	1.835.628.982,17
5 Alat Kantor dan RT	101.676.116.041,63	5.871.252.096,00	9.578.634.574,60	8.901.240.244,96	108.224.762.467,28
6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.226.794.142,26	278.100.780,00	317.744.000,00	160.085.250,00	11.662.553.672,26
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	391.140.408.368,00	16.280.396.798,00	55.580.121.841,00	71.103.075.929,52	391.897.851.077,48
8 Alat Laboratorium	30.154.236.354,71	939.565.250,00	2.706.313.658,00	2.029.132.020,50	31.770.983.242,21
9 Alat Peralatan	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
10 Komputer	51.273.961.254,25	4.798.580.895,00	2.751.296.100,00	1.463.199.684,95	57.360.638.564,30
11 Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
14 Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Alat Keselamatan Kerja	1.086.506.838,43	14.186.400,00	333.000,00	0,00	1.101.026.238,43
16 Alat Peraga	1.160.500,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	1.160.500,00
17 Peralatan Proses Produksi	99.734.270,05	0,00	131.954.000,00	89.600.000,00	142.088.270,05



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Nama Bidang Barang	Saldo Awal 2022	Mutasi			Saldo Akhir 2023
		Tambah		Kurang	
		Belanja Modal 2023	Selain dari Belanja Modal		
18 Rambu-rambu	4.747.767.558,00	141.858.000,00	0,00	141.858.000,00	4.747.767.558,00
19 Peralatan Olahraga	1.819.684.852,18	20.039.800,00	310.000.000,00	155.000.000,00	1.994.724.652,18
<b>Jumlah</b>	<b>695.296.901.324,30</b>	<b>28.624.066.144,00</b>	<b>82.256.530.648,35</b>	<b>98.259.163.628,69</b>	<b>707.918.334.487,97</b>

A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp106.436.442.491,86 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 94 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	27.520.214.103,00
2	Belanja Dana BOS Tahun Anggaran 2023	1.103.852.041,00
3	Utang Belanja	613.619.125,00
4	Mutasi SKPD masuk	74.708.681.022,84
5	Hibah Masuk	994.266.400,00
6	Reklas dari Aset lain-lain	264.095.000,00
7	Reklas dari Aset Belanja Hibah Uang (BOP)	66.110.000,00
8	Reklasifikasi	1.165.604.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>106.436.442.491,84</b>

Adapun Penjelasan dari masing-masing penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

1) Belanja Modal TA 2023

Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.520.214.103,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 95 Rincian Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.085.695.400,00
2	Dinas Kesehatan	2.033.357.195,00
3	RSUD Andi Makkasau	9.414.878.846,00
4	RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie	10.928.102.775,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	19.157.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.941.100,00
7	Dinas Tenaga Kerja	5.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	22.391.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	64.500.990,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	101.985.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	207.096.000,00
13	Dinas Perhubungan	399.128.070,00
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	186.966.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.818.200,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	35.000.000,00
17	Dinas Perpustakaan	412.503.216,00
18	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	300.259.700,00
19	Dinas Perdagangan	197.580.000,00
20	Sekretariat Daerah Kota	442.270.000,00
21	Sekretariat DPRD	308.075.200,00
22	Inspektorat Daerah	17.000.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	849.000,00
24	Badan Keuangan Daerah	796.064.911,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	138.360.500,00
26	Kecamatan Bacukiki Barat	25.375.000,00
27	Kecamatan Ujung	29.859.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.520.214.103,00</b>

2) Belanja Dana BOS Tahun Anggaran 2023

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Belanja Dana BOS pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.103.852.041,00.

3) Utang Belanja

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Utang Belanja sebesar Rp613.619.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 96 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Utang Belanja**

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Unit	Satuan	Nilai
<b>(+) Penambahan Alat kantor dan RT</b>				<b>18.500.000,00</b>
1	LCD Projector/Infocus	1	18.500.000	18.500.000,00
<b>(+) Penambahan Kedokteran</b>				<b>315.323.125,00</b>
1	Kursi Roda 3 in 1	1	4.800.000,00	4.800.000,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Nama Barang	Unit	Satuan	Nilai
2	Gelang Thermal Pasien Dewasa Pink dan anak biru	12.500	1.917,86	23.973.225,00
3	Timbangan GEA	1	222.000,00	222.000,00
4	Timbangan Digital Bayi	1	1.387.500,00	1.387.500,00
5	Tensi Aneroid ABN	2	499.500,00	999.000,00
6	Thermometer Infrared Yuwell	1	499.500,00	499.500,00
7	Penlight General Cave	2	133.200,00	266.400,00
8	Set GV	5	888.000,00	4.440.000,00
9	Tromol 15 cm	1	388.500,00	388.500,00
10	Stetoskop Lydman Clasic III	1	3.885.000,00	3.885.000,00
11	X-Ray Viewer Single	1	3.330.000,00	3.330.000,00
12	Stetoskop Lydman Bayi	1	3.885.000,00	3.885.000,00
13	Tensi Digital Adaptor Omron	1	1.665.000,00	1.665.000,00
14	Thermometer Digital Omron	4	122.100,00	488.400,00
15	Gelang Pasien Thermal Dewasa Blue	2.500	3.396,60	8.491.500,00
16	Nebulizer	2	1.250.000,00	2.500.000,00
17	Doppler LCD	2	2.150.000,00	4.300.000,00
18	Gelang Pasien Thermal Dewasa Perempuan Pink	2.500	3.396,60	8.491.500,00
19	Blender Obat 5 Tabung	2	4.995.000,00	9.990.000,00
20	Irrigator Huknah	1	388.500,00	388.500,00
21	Timbangan Biasa GEA	1	222.000,00	222.000,00
22	Thermometer Digital Omron	2	122.100,00	244.200,00
23	Stetoskop Litman	2	3.450.000,00	6.900.000,00
24	Sanitarian Kit (For-Hospital) GN-175 5	1	114.600.000,00	114.600.000,00
25	Copmpressor AD-II	1	66.807.000,00	66.807.000,00
26	Refraktor Mulut Gigi	1	466.200,00	466.200,00
27	Bein Osung 4EH301	3	1.942.500,00	5.827.500,00
28	Hand Piece Hole 3	4	2.403.150,00	9.612.600,00
29	Hand Piece Hole 2	2	1.642.800,00	3.285.600,00
30	Manual Hospital bed 3 crank + Foors Mattress	1	22.967.000,00	22.967.000,00
<b>(+) Penambahan Komputer</b>				<b>279.796.000,00</b>
1	Lap Top	5	8.953.000,00	44.765.000,00
2	P.C Unit	12	9.430.000,00	113.160.000,00
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	3.502.000,00	35.020.000,00
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	8.955.000,00	17.910.000,00
5	Telephone Mobile	1	21.995.000,00	21.995.000,00
6	Printer	2	3.400.500,00	6.801.000,00
7	Scaner portable	2	4.280.000,00	8.560.000,00
8	Scaner	1	8.450.000,00	8.450.000,00
9	Lap Top	1	17.550.000,00	17.550.000,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Nama Barang	Unit	Satuan	Nilai
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.585.000,00	5.585.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>613.619.125,00</b>

4) Mutasi Masuk

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Mutasi SKPD masuk dari SKPD lain sebesar Rp74.708.681.022,86 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 97 Rincian Penambahan Mutasi SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>RSUD dr. Hasri Ainun Hbibie</b>	<b>66.537.544.402,70</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	195.540.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Badan Keuangan Daerah
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	600.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan Aset tetap pada Alat Besar	1.477.757.100,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan Aset tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.999.575,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.768.920.153,70	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.459.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pengendalian Peremuan dan KB
	Penambahan Aset tetap pada Alat Studio Komunikasi Pemancar	78.139.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kedokteran	54.970.298.716,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan aset tetap pada alat laboratorium	1.012.563.708,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan aset tetap pada Komputer	1.285.267.150,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan aset tetap pada Peralatan Proses Produksi	89.600.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
<b>2</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.052.232.500,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	1.021.350.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup
	Penambahan Aset tetap pada Alat Besar	5.950.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup
	Penambahan aset tetap pada Komputer	11.337.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup
	Penambahan aset tetap pada Komputer	13.595.500,00	Karena adanya mutasi masuk dari RSUD Andi Makkasau
<b>3</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>164.569.000,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	164.569.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Badan Keuangan Daerah
<b>4</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>674.485.000,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	156.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Badan Keuangan Daerah
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	518.485.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Ketahanan Pangan
<b>5</b>	<b>Dinas Ketenaga Kerjaan</b>	<b>155.000.000,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada Peralatan Permainan	155.000.000,00	karena adanya mutasi masuk dari Sekretariat DPRD





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>6</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>674.485.000,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	156.000.000,00	karena adanya mutasi masuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	518.485.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Badan Keuangan Daerah
<b>7</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>2.241.613.669,40</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Besar	638.489.113,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan Aset tetap pada Alat angkutan	1.297.629.800,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan Aset tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	76.719.436,65	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan Aset tetap pada Alat Pertanian	1.827.165,35	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.875.754,40	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan Aset tetap pada Alat Studio Komunikasi Pemancar	33.400.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan aset tetap pada alat laboratorium	11.577.400,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penambahan aset tetap pada Komputer	60.095.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>8</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>12.685.970,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.685.970,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran
<b>9</b>	<b>Dinas PTSP</b>	<b>189.696.300,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	18.446.300,00	Karena adanya mutasi masuk dari Sekertariat Derah Kota
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	171.250.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari PUPR
<b>10</b>	<b>Sekretariat Daerah Kota</b>	<b>1.295.266.091,16</b>	
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	265.100.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari BKPSDM
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	266.100.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kesehatan
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	197.250.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari BAPEDA
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	192.377.045,58	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	192.377.045,58	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Perhubungan
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	182.062.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
<b>11</b>	<b>Badan Keuangan Derah</b>	<b>1.645.136.045,58</b>	
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	192.377.045,58	Karena adanya mutasi masuk dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	164.569.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	134.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari BKPSDM
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	156.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	156.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Perdagangan
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	156.000.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas PTSP
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	195.540.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Sekertariat Daerah Kota
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	230.300.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup
	Penambahan aset tetap pada Alat angkutan	260.350.000,00	Karena adanya mutasi masuk dari Inspektorat Daerah
<b>12</b>	<b>Kecamatan Bacukiki</b>	<b>12.685.970,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.685.970,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran
<b>13</b>	<b>Kecamatan Soreang</b>	<b>17.760.358,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.760.358,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran
<b>14</b>	<b>Kecamatan Soreang</b>	<b>20.297.552,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.297.552,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran
<b>15</b>	<b>Kecamatan Ujung</b>	<b>15.223.164,00</b>	
	Penambahan Aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.223.164,00	Karena adanya mutasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran
	<b>Jumlah</b>	<b>74.708.681.022,84</b>	

5) Hibah Masuk

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Hibah masuk sebesar Rp994.266.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 98 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>290.000.000,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada alat Kedokteran	290.000.000,00	Penambahan aset tetap Karena adanya Hibah masuk dari Kementrian Kesehatan
<b>2</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>526.250.000,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada alat Angkutan	526.250.000,00	Penambahan aset tetap Karena adanya Hibah masuk dari Kementrian Perhubungan
<b>3</b>	<b>Kecamatan Bacukiki</b>	<b>86.078.200,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada alat Kantor dan Rumah Tangga	15.478.080,00	Karena adanya Hibah masuk dari Perpustakaan Nasional
	Penambahan aset tetap pada Komputer	70.600.120,00	
<b>4</b>	<b>Kecamatan Bacukiki Barat</b>	<b>5.860.000,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada alat Kantor dan Rumah Tangga	5.860.000,00	Karena adanya Hibah masuk dari Perpustakaan Nasional



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	Keterangan
5	<b>Kecamatan Soreang</b>	<b>86.078.200,00</b>	
	Penambahan aset tetap pada alat Kantor dan Rumah Tangga	15.478.080,00	Karena adanya Hibah masuk dari Perpustakaan Nasional
	Penambahan aset tetap pada Komputer	70.600.120,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>994.266.400,00</b>	

6) Reklas Aset Lain-lain

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp264.095.000,00 pada RSUD Andi Makkasau.

7) Reklas Belanja Hibah (Dana BOP)

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Reklas dari Belanja Hibah (Dana BOP) sebesar Rp66.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 99 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Hibah (Dana BOP)**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>66.110.000,00</b>	
	Penambahan aset tetap Pada Alat kantor dan RT	31.960.000,00	Penambahan Aset tetap karena adanya Reklas dari Belanja Hibah (Dana BOP)
	Penambahan aset tetap Pada Komputer	34.150.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>66.110.000,00</b>	

8) Reklasifikasi

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Reklasifikasi di dalam satu Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.165.604.800,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp453.675.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp324.250.000,00, Dinas Perpustakaan sebesar Rp312.000.000,00, dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75.679.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 100 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi**

*dalam rupiah*

No.	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>453.675.000,00</b>	
	Meja Guru (uk. 120x60)	1.700.000,00	Penambahan alat Kantor dan Rumah Tangga karena adanya Reklas dari Gedung dan Bangunan
	Kursi Guru	500.000,00	
	Lemari	9.000.000,00	
	Meja Guru (uk. 120x60)	10.500.000,00	
	Kursi Guru	3.500.000,00	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Barang	Nilai	Keterangan
	Lemari	4.500.000,00	
	Meja Guru (uk. 120x60)	1.800.000,00	
	Kursi Guru	600.000,00	
	Lemari	10.000.000,00	
	Meja Siswa Tunggal	28.500.000,00	
	Kursi Siswa Tunggal	18.525.000,00	
	Meja Guru (uk. 120x60)	1.500.000,00	
	Kursi Guru	500.000,00	
	Lemari	6.500.000,00	
	Meja Siswa Tunggal	167.500.000,00	
	Kursi Siswa Tunggal	100.500.000,00	
	Meja Guru (uk. 120x60)	13.500.000,00	
	Kursi Guru	4.500.000,00	
	Papan Tulis	13.500.000,00	
	Lemari	28.800.000,00	
	Meja Guru (uk. 120x60)	13.500.000,00	
	Kursi Guru	4.500.000,00	
	Lemari	9.750.000,00	
<b>2</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>324.250.000,00</b>	
	AC Casette 8 Arah 3 PK (2 Unit)	68.000.000,00	Penambahan alat kantor dan Rumah Tangga karena adanya Reklas dari Gedung dan Bangunan
	AC Split 1 PK (13 Unit)	65.000.000,00	
	Meja Locket (3 Unit)	26.250.000,00	
	Permainan Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark (DID)	155.000.000,00	Penambahan Peralatan Olahraga karena adanya Reklas dari Gedung dan Bangunan
	Biaya Tender (Pengadaan Komputer 1 Unit)	10.000.000,00	Penambahan Komputer karena adanya reklas dari Instalasi
<b>3</b>	<b>Dinas Perpustakaan</b>	<b>312.000.000,00</b>	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	Penambahan alat Kantor dan Rumah Tangga karena adanya Reklas dari Gedung dan Bangunan
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Ceiling Casette 2 PK	19.500.000,00	
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Barang	Nilai	Keterangan
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	
	AC Split 1 PK	4.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
	AC Split 2 PK	8.500.000,00	
<b>4</b>	<b>Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>75.679.800,00</b>	
	Teralis	75.679.800,00	Penambahan alat Kantor dan Rumah Tangga karena adanya reklas dari Instalasi
	<b>Jumlah</b>	<b>1.165.604.800,00</b>	

- B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp93,815,009,328.17 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 101 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
<b>1</b>	<b>Realisasi Utang</b>	<b>575.517.325,00</b>
2	Mutasi SKPD keluar	74.708.681.022,84
3	Penghapusan	463.946.000,00
4	Reklasifikasi ke barang dan jasa	2.400.000,00
5	Kelebihan bayar karena kekurangan Vol. Pekerjaan	76.300.000,00
<b>6</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>17.188.687.738,85</b>
	a. Usul Hapus	17.101.147.737,85
	b. Hibah Keluar	87.540.000,00
<b>7</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>440.278.433,00</b>
<b>8</b>	<b>Extracomptable</b>	<b>359.198.809,48</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>93.815.009.328,17</b>

Adapun Penjelasan dari masing-masing pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

1) Realisasi Utang

Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Realisasi Utang sebesar Rp575,517,325.00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 102 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Realisasi Utang**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>233.255.400,00</b>	Pengurangan Aset tetap karena adanya Realisasi Utang
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor & RT	194.294.400,00	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Alat Laboratorium	38.961.000,00	
<b>2</b>	<b>RSUD Andi Makkasau</b>	<b>5.906.125,00</b>	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.598.625,00	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Komputer	4.307.500,00	
<b>3</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>156.558.000,00</b>	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor & RT	14.700.000,00	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Rambu-Rambu	141.858.000,00	
<b>4</b>	<b>Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan</b>	<b>179.797.800,00</b>	
	(-) Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor & RT	179.797.800,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>575.517.325,00</b>	

2) Mutasi Keluar

Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin berupa Mutasi SKPD keluar ke SKPD lain sebesar Rp74.708.681.022,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 103 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Mutasi SKPD**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>66.599.645.402,70</b>	Mutasi Keluar Ke RS Hasri Ainun Habibie
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Besar	1.477.757.100,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	600.000.000,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	266.100.000,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.999.575,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Kantor & RT	6.768.920.154,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	78.139.000,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Kedokteran	54.970.298.716,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Laboratorium	1.012.563.708,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Komputer	1.285.267.150,00	
	Pengurangan Aset Tetap pada Peralatan Proses/Produksi	89.600.000,00	
<b>2</b>	<b>RSUD Andi Makkasau</b>	<b>13.595.500,00</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Pengurangan Aset Tetap pada Komputer	13.595.500,00	Mutasi Keluar Ke Dinas PUPR
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang (PUPR)</b>	<b>2.436.863.669,40</b>	
	(-) Pengurangan aset tetap pada Alat Besar	638.489.113,00	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	(-) Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	1.178.629.800,00	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	76.719.436,65	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Pertanian	1.827.165,35	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kantor dan RT	121.875.754,40	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kantor dan RT	159.250.000,00	Mutasi Keluar Ke DPMPSTP
	Pengurangan aset tetap pada Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.400.000,00	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Laboratorium	11.577.400,00	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Komputer	60.095.000,00	Mutasi Keluar Ke Dinas Perhubungan
	Pengurangan aset tetap pada Peralatan Olahraga	155.000.000,00	Mutasi Keluar Ke Disnaker
<b>4</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan</b>	<b>182.062.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	182.062.000,00	Mutasi Keluar Ke Sekretariat Daerah Kota
<b>5</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>243.222.014,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	164.569.000,00	Mutasi Ke Badan Keuangan Daerah
	Pengurangan aset tetap pada alat Kantor dan RT	78.653.014,00	Mutasi Ke Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat, Dan DKOP
<b>6</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>	<b>156.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Mutasi Ke Badan Keuangan Daerah
<b>7</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)</b>	<b>192.377.045,58</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	192.377.045,58	Mutasi Keluar Ke Sekretariat Daerah
<b>8</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>518.485.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	518.485.000,00	Mutasi Keluar Ke BPBD
<b>9</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>1.268.937.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Besar	5.950.000,00	Mutasi Keluar Ke Dinas PUPR
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	1.251.650.000,00	Mutasi Keluar Ke Dinas PUPR
	Pengurangan aset tetap pada Komputer	11.337.000,00	Mutasi Keluar Ke Dinas PUPR
<b>10</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>8.459.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kantor dan RT	8.459.000,00	Mutasi Keluar Ke RS Hasri Ainun Habibie
<b>11</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>192.377.045,58</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	192.377.046,00	Mutasi Keluar Ke Setdako
<b>12</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)</b>	<b>156.000.000,00</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Mutasi Keluar Ke BKD
<b>13</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata</b>	<b>156.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Mutasi Keluar Ke BKD
<b>14</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	<b>156.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Mutasi Keluar Ke BKD
<b>15</b>	<b>Sekretariat Daerah Kota (Setdako)</b>	<b>344.986.300,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	332.986.300,00	Mutasi Keluar Ke Dishub Dan BKD
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kantor dan RT	12.000.000,00	Mutasi Keluar Ke DPMPSTP
<b>16</b>	<b>Inspektorat Daerah Kota</b>	<b>260.350.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	260.350.000,00	Mutasi Keluar Ke BKD
<b>17</b>	<b>Bappeda</b>	<b>197.250.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	197.250.000,00	Mutasi Keluar Ke Setdako
<b>18</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.034.594.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	518.485.000,00	Mutasi Keluar Ke BPBD
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	164.569.000,00	Mutasi Keluar Ke Satpol PP
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Mutasi keluar ke Dinas Ketahanan Pangan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	195.540.000,00	Mutasi keluar Ke RS Hasri Ainun Habibie
<b>19</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>399.100.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	134.000.000,00	Mutasi keluar ke BKD
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	265.100.000,00	Mutasi keluar ke Setdako
<b>20</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)</b>	<b>192.377.045,58</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	192.377.045,58	Mutasi keluar ke BKD
	<b>Jumlah</b>	<b>74.708.681.022,84</b>	

3) Penghapusan

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Penghapusan sebesar Rp463,946,000.00 pada Sekretariat Daerah Kota.

4) Reklas Ke Barang dan Jasa

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa komputer karena Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp2,400,000.00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5) Kelebihan bayar karena kekurangan Vol. Pekerjaan

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga karena adanya Kelebihan bayar karena kekurangan Vol. Pekerjaan





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp76,300,000.00 pada Dinas Pendidikan.

6) Aset Lain Lain

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Lain lain sebesar Rp17.188.687.738,85 dimana usul hapus sebesar Rp17,101,147,737.85 dan Hibah Keluar sebesar Rp87,540,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan Usul Hapus sebesar Rp17,101,147,737.85 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 104 Pengurangan Usul Hapus Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>288.300.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	288.300.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>118.675.575,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	118.675.575,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>3</b>	<b>RSUD Andi Makkasau</b>	<b>13.333.926.590,85</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Pertanian	1.320.000,00	Karena adanya Usul Hapus
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	151.338.187,38	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	950.000,00	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Kedokteran	13.135.014.898,52	
	Pengurangan aset tetap pada Komputer	45.303.504,95	
<b>4</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</b>	<b>703.869.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	703.869.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>5</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>14.314.472,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	14.314.472,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>6</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>169.400.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	169.400.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>7</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>12.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	12,000,000	Karena adanya Usul Hapus
<b>8</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>156.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	156.000.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>9</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>329.766.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	329.766.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>10</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>	<b>130.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	130.000.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>11</b>	<b>Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan</b>	<b>511.245.000,00</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	511.245.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>12</b>	<b>Sekretariat Daerah Kota</b>	<b>1.084.390.600,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Besar	801.139.600,00	Karena adanya Usul Hapus
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	283.251.000,00	
<b>13</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>9.900.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	9.900.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>14</b>	<b>Inspektorat Daerah Kota</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	3.000.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>15</b>	<b>Bappeda</b>	<b>12.000.000,00</b>	
	Pengurangan aset tetap pada Alat Angkutan	12.000.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>16</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>36.000.000,00</b>	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	36.000.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>17</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)</b>	<b>9.900.000,00</b>	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	9.900.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>18</b>	<b>Kecamatan Bacukiki Barat</b>	<b>38.638.000,00</b>	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	38.638.000,00	Karena adanya Usul Hapus
<b>19</b>	<b>Kecamatan Ujung</b>	<b>139.822.500,00</b>	
	Pengurangan Aset Tetap pada Alat Angkutan	139.822.500,00	karena adanya Usul Hapus
	<b>Jumlah</b>	<b>17.101.147.737,85</b>	

- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Hibah Keluar ke sekolah swasta berupa Alat Laboratorium sebesar Rp87,540,000.00 pada Dinas Pendidikan.

7) Reklasifikasi

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Reklasifikasi ke sesama aset Peralatan dan Mesin dan Reklasifikasi ke aset selain Peralatan dan Mesin (Reklas Antar KIB) sebesar Rp440,278,433.00 dengan rincian berikut:

**Tabel 7.5. 105 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>28.610.000,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Laboratorium	14.560.000,00	Pengurangan Alat Laboratorium karena adanya Reklas ke Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Peraga	14.050.000,00	Pengurangan Alat Peraga karena adanya Reklas ke Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
<b>2</b>	<b>RSUD Andi Makkasau</b>	<b>411.668.433,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor	404.898.500,00	Pengurangan alat kantor karena adanya Reklas ke instalasi
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor	6.769.933,00	Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga karena adanya REKLAS ke Bangunan Gedung
	<b>Jumlah</b>	<b>440.278.433,00</b>	

8) *Extracomptable*

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa *Extracomptable* sebesar Rp359,198,809.48 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 106 Rincian Pengurangan *Extracomptable* Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>5.028.000,02</b>	
	(Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	3.618.000,02	Pengurangan karena adanya <i>Extracomptable</i>
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Laboratorium	1.410.000,00	
<b>2</b>	<b>RSUD Andi Makkasau</b>	<b>152.973.894,46</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Bengkel dan Alat Ukur	611.000,00	Pengurangan karena adanya <i>Extracomptable</i>
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	70.025.379,46	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.793.250,00	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kedokteran	79.544.265,00	
<b>3</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	1.500.000,00	Pengurangan karena adanya <i>Extracomptable</i>
<b>4</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>355.500,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Laboratorium	355.500,00	Pengurangan karena adanya belanja modal yang termasuk <i>Extracomptable</i>
<b>5</b>	<b>Sekretariat Daerah Kota</b>	<b>168.405.315,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	168.405.315,00	Pengurangan karena adanya aset yang termasuk <i>Extracomptable</i>
<b>6</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>5.561.100,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	5.561.100,00	Pengurangan karena adanya aset yang termasuk <i>Extracomptable</i>
<b>7</b>	<b>Kecamatan Bacukiki Barat</b>	<b>25.375.000,00</b>	
	Pengurangan Aset tetap pada Alat Kantor dan RT	25.375.000,00	Pengurangan karena adanya aset yang termasuk <i>Extracomptable</i>
	<b>Jumlah</b>	<b>359.198.809,48</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Terdapat aset peralatan dan mesin yang dipinjampakaikan kepada beberapa Instansi Vertikal, Lembaga dan Organisasi, rincian daftar dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

<b>7.5.3.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.114.003.938.188,26</b>	<b>Rp1.076.245.841.496,38</b>

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare atas Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.114.003.938.188,26 dan Rp1.076.245.841.496,38. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan besar Rp196.242.354.677,00 dan pengurangan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp158.484.257.985,44 dengan rincian berikut:

A. Penambahan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp196.242.354.677,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 107 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Belanja Modal	39.639.645.218,00
2	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	6.769.933,00
3	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	8.235.513.616,09
4	Mutasi Antar OPD	145.288.367.276,26
5	Hibah Masuk	2.743.309.253,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023	328.545.377,73
7	Pendapatan Hibah pada Gedung dan Bangunan	204.002,92
<b>Jumlah</b>		<b>196.242.354.677,00</b>

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu:

1) Belanja Modal

Penambahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.639.645.218,00 yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 108 Rincian Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.670.441.985,00
2	RSUD A Makkassau	11.530.809.803,00
3	Rs. Hasry Ainun Habibie	198.457.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.041.784.750,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	378.709.800,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	197.955.674,00
8	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.804.748.369,00
9	Dinas Perpustakaan	10.272.323.368,00
10	Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan	770.153.436,00
11	Sekretariat DPRD	396.850.750,00
12	Badan Keuangan Daerah	211.410.283,00
13	Kecamatan Bacukiki	81.000.000,00
14	Kecamatan Bacukiki Barat	35.000.000,00
15	Kecamatan Soreang	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>39.639.645.218,00</b>

- 2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin  
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 pada Reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp6.769.933,00 berupa pintu dapur rangka hollow pada RSUD Andi Makkasau.
- 3) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan  
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 pada Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp8.235.513.616,09 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 109 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Reklasifikasi	SKPD	Keterangan
1	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	1.323.336.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
2	Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark	4.721.560.934,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
3	café container	459.861.900,00	Dinas Tenaga Kerja	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
4	Gedung PASAR WekkeE	366.05.080,00	Dinas Perdagangan	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
5	Bangunan Gedung Cagar Budaya	551.452.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
6	Asrama HIPMI Pare - Dg. Tata	243.179.902,09	Dinas Kepemudaan, Olahraga	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Reklasifikasi	SKPD	Keterangan
			dan Pariwisata	rekas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
7	Asrama HIPMI Pare - Perintis	357.581.350,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya rekas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
8	Perencanaan Teknis Revitalisasi Lapangan Lompoe	137.390.400,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya rekas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
9	GOR Lompoe	404.545.050,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya rekas dari Konstruksi dalam Pengerjaan
<b>Jumlah</b>		<b>8.235.513.616,09</b>		

4) Mutasi Antar SKPD

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Mutasi Antar SKPD sebesar Rp145.288.367.276,26 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 110 Rincian Penambahan Mutasi antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Rs. Hasry Ainun Habibie	134.977.073.063,30	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Kesehatan
2	Dinas Tenaga Kerja	3.771.876.413,96	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Tenaga Kerja	123.095.844,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Kesehatan
4	Dinas Lingkungan Hidup	569.425.000,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.332.281.600,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perdagangan	3.126.183.800,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Badan Keuangan Daerah	835.631.555,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8	Dinas Perhubungan	552.800.000,00	Penambahan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Jumlah</b>		<b>145.288.367.276,26</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- 5) Hibah Masuk  
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Hibah Masuk dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.743.309.253,00 pada Dinas Perdagangan.
- 6) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023  
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp328.545.378,05 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 111 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Utang Belanja Modal**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.945.600,00	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya utang belanja
2	Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan	305.430.377,73	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya utang belanja
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.800.000,00	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya utang belanja
4	Sekretariat DPRD	8.369.400,00	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya utang belanja
<b>Jumlah</b>		<b>328.545.377,73</b>	

- 7) Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan  
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp204.002,92 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 112 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pendapatan Hibah**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.000,00	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya Pendapatan hibah
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1,77	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya Pendapatan hibah
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,15	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan karena adanya Pendapatan hibah
<b>Jumlah</b>		<b>204.002,92</b>	

- B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp158.484.257.985,12 dengan rincian sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 113 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Tanah	3.542.829.920,04
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin	1.079.925.000,00
3	Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Jalan, Jaringan dan Irigasi	81.000.000,00
4	Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Konstruksi Dalam Pengerjaan	737.525.223,73
5	Extracomptable	62.626.054,00
6	Hibah Keluar	223.692.416,00
7	Reklasifikasi ke Barjas	46.343.073,00
8	Realisasi Utang	5.417.291.972,09
9	Piutang Tahun 2023	4.657.050,00
10	Mutasi Antar OPD	145.288.367.276,26
<b>Jumlah</b>		<b>158.484.257.985,12</b>

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu:

- 1) **Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Tanah**  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Tanah berupa Tanah Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark sebesar Rp3.542.829.920,04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) **Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin**  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.079.925.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 114 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453.675.000,00
2	Dinas Perpustakaan	312.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.079.925.000,00</b>

- 3) **Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 karena adanya reklasifikasi ke Aset Tetap pada Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp81.000.000,00 berupa Pembangunan Sarana Lorong Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang pada Kecamatan Bacukiki.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- 4) Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 Reklasifikasi ke Aset Tetap pada Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp737.525.223,73 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 115 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap pada Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Masjid Agung	50.910.000,00
2	Dinas PKP	Gedung Kantor Dinas PKP	640.854.513,73
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar SDN 58	45.760.710,00
<b>Jumlah</b>			<b>737.525.223,73</b>

- 5) *Extracomptable*  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari *Extracomptable* sebesar Rp62.626.054,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 116 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari *Extracomptable***

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	RSUD A Makkassau	Revitalisasi Poliklinik Lantai1	3.952.987,50
		Revitalisasi Poliklinik Lantai 2	3.952.987,50
		Revitalisasi IPAL & Melati	7.380.273,00
		Revitalisasi Laundry	7.771.544,00
		Revitalisasi WC Laundry	9.007.242,00
		Revitalisasi Farmasi Rawat Jalan, Farmasi IGD, Mawar, Gizi, Bougenville	13.791.087,00
		Pintu Dapur Rangka Hollow	6.769.933,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Patok	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>62.626.054,00</b>

- 6) Hibah Keluar  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Hibah Keluar sebesar Rp2.223.692.416,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 117 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah Keluar**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Polres	1.963.576.500,00	Hibah Keluar ke Polres Kota Parepare
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang UKS SMP Frater	260.115.916,00	Hibah ke SMP Frater
<b>Jumlah</b>			<b>2.223.692.416,00</b>	

- 7) Reklasifikasi ke Barjas  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Reklasifikasi ke Barjas sebesar Rp.46.343.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 118 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Pemeliharaan Gedung Kantor	8.500.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab. Ruang UKS SMPN 5	37.843.073,00
<b>Jumlah</b>			<b>46.343.073,00</b>

- 8) Realisasi Utang  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Realisasi Utang sebesar Rp5.417.291.972,09 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 119 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Adanya Realisasi Utang**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.121.106.950,00
2	Dinas Tenaga Kerja	297.557.700,00
3	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	365.329.300,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.509.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.464.568.452,09
6	Sekretariat DPRD	58.220.570,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.417.291.972,09</b>

- 9) Piutang 2023  
Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Piutang sebesar Rp4.657.050,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

10) Mutasi Antar SKPD

Pengurangan Bangunan Gedung yang disajikan di Neraca Tahun Anggaran 2023 dari Mutasi Antar SKPD sebesar Rp145.288.367.276,26 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 120 Rincian Pengurangan Mutasi antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	134.977.073.063,30	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Rs. Hasry Ainun Habibie
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.771.876.413,96	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Tenaga Kerja
3	Dinas Kesehatan	123.095.844,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Tenaga Kerja
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	569.425.000,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.332.281.600,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.126.183.800,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Perdagangan
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	835.631.555,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Badan Keuangan Daerah
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	552.800.000,00	Pengurangan Aset Tetap pada Bangunan Gedung karena adanya mutasi ke Dinas Perhubungan
<b>Jumlah</b>		<b>145.288.367.276,26</b>	

**Tabel 7.5. 121 Rincian Gedung Bangunan yang Didirikan di Tanah yang Tercatat pada Dua Entitas**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan	Didirikan di atas Tanah milik Pemprov Sulsel dan belum didukung perjanjian pinjam pakai	1.820.077.449,41
2	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Bacukiki Barat	Didirikan di atas Tanah milik Pemprov Sulsel dan telah didukung perjanjian pinjam pakai	854.394.017,99
3	Bangunan Gedung SDN 17	Didirikan di atas Tanah milik TNI AD dan belum didukung perjanjian pinjam pakai	696.187.648,19
4	Bangunan Gedung SDN 22	Didirikan di atas Tanah milik TNI AD dan belum didukung perjanjian	1.636.638.181,69
5	Bangunan Gedung SDN 7	Gedung didirikan di atas tanah yang tercatat oleh Pemkot Parepare dan sertifikat dimiliki oleh masyarakat	1.008.728.526,57
6	Bangunan Gedung SDN 8	Gedung didirikan di atas tanah yang tercatat oleh Pemkot Parepare dan sertifikat dimiliki oleh masyarakat	765.626.274,48

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Terdapat aset Gedung dan Bangunan yang dipinjam pakaikan kepada beberapa instansi vertikal, lembaga dan organisasi, rincian daftar dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

<b>7.5.3.3.4 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp1.169.826.124.893,83</b>	<b>Rp1.080.696.516.331,02</b>

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare atas Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.169.826.124.893,83 dan Rp1.080.696.516.331,02. Aset tersebut terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan Pada Tahun Anggaran 2023 terjadi penambahan sebesar Rp131.749.413.786,97 dan pengurangan sebesar Rp42.619.805.224,16 dengan rincian berikut:

- A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp131.749.413.786,97 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 122 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	73.898.362.333,00
2	Reklasifikasi Aset	40.978.086.739,10
a	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	404.898.500,00
b	b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	81.000.000,00
c	c. Reklasifikasi dari KDP	40.492.188.239,10
3	Mutasi masuk antar SKPD	3.783.197.951,00
4	Utang Tahun 2023	13.089.766.760,91
5	Pendapatan Hibah	2,96
	<b>Jumlah</b>	<b>131.749.413.786,97</b>

- 1) Belanja Modal

Penambahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.898.362.333,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 123 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	665.000.000,00
2	RS dr. Hasri Ainun Habibie	198.723.325,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.350.621.158,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	10.993.493.046,00
5	Dinas Perhubungan	199.151.790,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai
6	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	75.679.800,00
7	Kecamatan Bacukiki	72.000.000,00
8	Kecamatan Bacukiki Barat	75.452.493,00
9	Kecamatan Soreang	268.240.721,00
<b>Jumlah</b>		<b>73.898.362.333,00</b>

2) Reklasifikasi Aset

- Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Instalasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp404.898.500,00 pada RSUD Andi Makkasau;
- Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan dan jembatan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Tugu/Titik Kontrol Pasti dalam pembangunan Sarana Lorong Kelurahan Galung Maloang dan Kelurahan Lompoe sebesar Rp81.000.000,00 pada Kecamatan Bacukiki;
- Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.492.188.239,10 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 124 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.337.879.257,84	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3.154.308.981,26	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
<b>Jumlah</b>		<b>40.492.188.239,10</b>	

- Penambahan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.337.879.257,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 125 Rincian Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Pembangunan Jembatan Kembar	1.165.650.000,00	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan (Jalan dan Jembatan) sebesar Rp37.188.890.219,73 karena adanya reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2	Pembangunan Jalan Lapangape Lumpue	1.415.750.947,79	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
3	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Tahun 2023	93.573.000,00	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Bangunan Air) sebesar Rp148.989.038,10 karena adanya reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
4	Rehabilitasi Jalan (DAU)	9.005.704.042,35	
5	Perbaikan Jalan Sibali RT.1/RW.11	118.883.248,75	
6	Rehabilitasi Jalan BTN Pepabri	187.571.221,57	
7	Perbaikan Jalan Lorong Armada Jalan Andi Sinta	350.830.717,20	
8	Pembangunan Jembatan Kembar	21.452.970.842,00	
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lorong dan Lingkungan III dan IV	365.402.803,00	
10	Pembangunan Trotoar Islamic Center	641.109.023,16	
11	Pembangunan Trotoar Jalan H. A. Arsyad perbatasan Pinrang	576.022.954,31	
12	Pembangunan Trotoar Jalan Jend. A. Yani (pertigaan Jalan Industri Kecil - pertigaan Jalan Jend. Sudirman)	1.815.421.419,61	
13	Pembangunan Bronjong - Lemoe Jalan Tani	148.989.038,10	
<b>Jumlah</b>		<b>37.337.879.257,84</b>	

(2) Penambahan Aset pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan sebesar Rp3.154.308.981,26 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 126 Rincian Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase Lapadde - Jln. Jenderal Sudirman (Samping SK 55)	4.381.485,30	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bangunan Air) sebesar Rp96.136.569,20 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
2	Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase Lapadde - Jln. Poros Parepare Sidrap	91.755.083,90	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Galung Maloang - Jln. M. Yusuf	140.260.346,60	
4	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 1 (Jl. Padi (Lorong))	80.792.048,60	
5	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 2 (Jl. ...)	112.602.155,60	





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Lingkar Lrg. (Jl. Pekuburan Masuk)		
6	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 3 (l. Poros Bilalalangnge (Lorong)	49.782.006,00	
7	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 4 (Jl. M. P. Remmang ( Lr. Masuk )	98.675.046,60	
8	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 1 (Jl. M. Yusur Kullange Belakang terminal)	34.609.388,60	
9	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 2 (Jl. Lingkar Lrg)	60.879.009,80	
10	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 3 (Jl. Gunung tolong Lrg)	117.437.575,60	
11	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 4 (Jl. Pesangrahan Lrg)	177.678.337,00	
12	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 5 (Jl. Bau Massepe lrg depan Hotel Graha)	125.371.484,20	
13	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 1 (Jl. Atletik Lrg)	73.962.108,30	
14	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 2 (Jl. Syamsul Bahri Lrg tembus Jl Reformasi)	58.813.241,40	
15	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 3 (Jl Langsung Lrg tembus Jl. Durian Lrg)	92.008.350,60	
16	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 4 (Jl. Agussalim Lrg samping Kopersi BHS)	37.121.085,00	
17	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 5 (Jl Atletik Lrg)	100.822.698,50	
18	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 1 (Jl. Industri kecil Lrg)	51.548.150,00	
19	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 2 (Jl. Takkalao Lrg)	130.921.962,00	
20	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 3 (Jl. Bukit Indah Lrg)	41.299.344,00	
21	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 4 ( Jl. Muspika LRg)	71.848.084,50	
22	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 5 (Bukit Indah Lrg)	34.487.082,00	
23	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 1 (Jl. Andi Laitong Lrg)	160.993.971,60	
24	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 2 (Jl. Pelita Tenggara Lrg tembus Jl. Ganggawa)	50.862.968,50	
25	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 3	172.400.118,00	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	(Jl. Kijang masuk tembus BTN Hilal Residence)		
26	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 1 (Jl. Andi Mappangara Lrg)	161.368.967,35	
27	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 2 (Jl. Ambo Matti Lrg 1 masuk)	344.627.897,34	
28	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 3 (Jl. Bukit Madani Lrg)	77.550.124,95	
29	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 4 (Jl. Wisata Raya depan mesjid Al Madinah masuk)	198.677.959,01	
30	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 5 (Jl. Ambo Matti Lrg masuk)	90.562.770,86	
31	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 6 (Jl. Wirabuana)	67.135.961,26	
32	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde-Segmen 7 (Jl. Atletik Lrg)	43.072.168,29	
<b>Jumlah</b>		<b>3.154.308.981,26</b>	

3) Mutasi masuk antar OPD

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya mutasi masuk antar OPD sebesar Rp3.783.197.951,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 127 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Mutasi Masuk**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	RS dr. Hasri Ainun Habibie	1.260.710.000,00	Mutasi masuk dari Dinas Kesehatan (Pembangunan IPAL RS dr. Hasri Ainun Habibie)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.358.561,00	Mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup (Pembuatan IPAL)
		199.093.500,00	Mutasi masuk dari Dinas Lingkungan Hidup (Pembangunan IPLT – Instalasi Pengolahan Lumpue Tinja)
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	46.000.000,00	Penambahan Jalan dan Jembatan Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Bacukiki (Pembangunan Sarana Lorong Kelurahan Lompoe - Jl. Lasangga RT.02 RW. 02 Sebelah Timur Akbid)
		35.000.000,00	Penambahan Jalan dan Jembatan Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Bacukiki (Pembangunan Sarana Lorong Kelurahan Galung Maloang - Jl. Jend. Yusuf Laccoling RT 02 RW. 01)
		30.000.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Bacukiki (Pembangunan Drainase Kelurahan Galung Maloang - Jl. Bumi Galoang RT. 02 / RW. 06)
		42.000.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Bacukiki (Pembangunan Drainase Kelurahan Lompoe-Jl. Gelora Mandiri RT. 01 RW. 06)
		10.000.000,00	Penambahan Jalan dan Jembatan Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Lorong RW. 007 Kelurahan Bukit Harapan - Jl. Taebe RT.3 RW.7)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
		32.500.000,00	Penambahan Jalan dan Jembatan Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Lorong RW. 007 Kelurahan Bukit Indah - Jl. Andi Mappagulung RT.01 RW.07)
		16.500.000,00	Penambahan Jalan dan Jembatan Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Lorong RW. 004 Kelurahan Ujung Lare - Jl. Kebun Sayur RT.001 RW.004)
		26.000.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Drainase RW. 005 Kelurahan Bukit Harapan - Jl. Laupe Kampung Duri RT.1 RW.5)
		12.000.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Drainase RW. 003 RT 003 Kelurahan Lakessi - Jl. Lasinrang Lorong Pertamina RT.1 RW.03)
		31.800.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Pembangunan Drainase RW. 006, RT 002 Kelurahan Kampung Pisang - Jl. Pelabuhan Rakyat)
		19.600.000,00	Penambahan Bangunan Air Karena adanya mutasi masuk dari Kecamatan Soreang (Rehabilitasi Drainase RW. 003 RT 001 Kelurahan Kampung Pisang - Jl. Baharuddin)
4	Dinas Perhubungan	1.935.635.890,00	Mutasi masuk dari Dinas PUPR
<b>Jumlah</b>		<b>3.783.197.951,00</b>	

4) Utang Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp13.089.766.760,92 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 128 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Utang Belanja Modal**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Jalan dan Jembatan	8.789.329.154,65	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Utang Belanja Modal.
		Bangunan Air	387.013.526,35	
<b>Jumlah I</b>			<b>9.176.342.681,00</b>	
2	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan</b>	Jalan dan Jembatan	3.306.523.763,91	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Utang Belanja Modal.
		Instalasi	606.900.316,00	
<b>Jumlah II</b>			<b>3.913.424.079,91</b>	
<b>Jumlah I+II</b>			<b>13.089.766.760,91</b>	

5) Pendapatan Hibah 2023 sebesar Rp2,96.

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya Pendapatan Hibah sebesar Rp2,96 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 129 Rincian Penambahan Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya Pendapatan Hibah**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	RS dr.Hasri Ainun Habibie	Jalan Khusus Lainnya	0,44	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya pendapatan hibah.
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bukit Harapan	1,02	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya pendapatan hibah.
		Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Kel. Lapadde	0,52	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya pendapatan hibah.
		Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Kel.Bukit Indah	0,98	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena adanya pendapatan hibah.
<b>Jumlah</b>			<b>2,96</b>	

B. Pengurangan Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp84.090.702.330,50 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 130 Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*dalam rupiah*

No	Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1.	Reklasifikasi Aset	<b>22.128.532.820,57</b>
a	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	85.679.800,00
b	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.042.853.020,57
2.	<i>Extracomptable</i>	4.827.285,00
3.	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	10.246.300,00
4.	Reklas ke Persediaan	546.483.261,27
5.	Realisasi Utang	12.176.062.272,32
6.	Piutang	500,00
7.	Mutasi Antar SKPD	3.783.197.951,00
8.	Penyertaan Modal	3.970.454.834,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.619.805.224,16</b>

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu:

1) Reklasifikasi Aset

Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya reklasifikasi Aset sebesar Rp22.128.532.820,57 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 131 Rincian Pengurangan Aset tetap Jalan, irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	<b>Reklas ke KIB B (Peralatan dan Mesin)</b>	<b>85.679.800,00</b>	
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	Pengurangan aset tetap pada Instalasi karena adanya Reklas ke Peralatan dan Mesin
b	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	75.679.800,00	Pengurangan aset tetap pada Instalasi karena adanya Reklas ke Peralatan dan Mesin
2.	<b>Reklas ke KIB F (KDP)</b>	<b>22.042.853.020,57</b>	
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.441.880.986,57	Pengurangan Aset Tetap Jalan dan Jembatan karena adanya reklas ke KDP 2023
b	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.600.972.034,00	Pengurangan Aset Tetap Jalan dan Jembatan karena adanya reklas ke KDP 2024
	<b>Jumlah</b>	<b>22.128.532.820,57</b>	

Adapun Penjelasan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya reklasifikasi antar KIB sebagai berikut:

- a) Reklas Ke KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp85.679.800,00 terdiri dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.000.000,00 dan SKPD Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebesar 75.679.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan berupa Instalasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat adanya reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.000.000,00; dan
  - (2) Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75.679.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
- b) Reklas Ke KIB F (KDP) sebesar Rp22.042.853.020,57 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan karena adanya Pengurangan aset tetap jaringan yang di reklas ke KDP, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat adanya reklas sebesar Rp13.441.880.986,57 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 132 Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Pembangunan Akses Jalan Swaka Alam Lestari (Dua Jalur/Jl. Lingkar Tengah)	4.822.769.411,60	Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan (Jalan dan Jembatan)
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	74.563.500,00	
3	Rekonstruksi Jl. Akses Laupe Depan Masjid Al Munawir	876.967.578,90	
4	Rekonstruksi Jl. Akses Tassiso	490.006.784,00	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan	
5	rekonstruksi Jl. Handayani Barat	212.169.687,80	Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan (Bangunan Air)	
6	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan 2024	97.902.000,00		
7	Rehabilitasi Jalan (DAU) 12 Paket	5.786.210.317,92		
8	Rehabilitasi Jalan (BANPROV)	107.762.190,00		
9	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jembatan Pasca Bencana	364.307.636,00		
10	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Permukaan Tahun 2022	89.736.800,00		
11	Pembangunan Talud, Pengerukan dan Duikker Akses Pekuburan Rw. 03 Sumpang Minangae	301.994.480,35		
12	Rehabilitasi Tanggul Sungai Jawi-Jawi (SMA 5)	13.171.400,00		
13	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	124.657.300,00		
14	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	50.076.400,00		
15	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	29.585.500,00		
<b>Jumlah</b>		<b>13.441.880.986,57</b>		

- (2) Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp8.600.972.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 133 Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Lompoe (30%)	502.182.484,00	Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan (Jalan dan Jembatan)
2	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bumi Harapan (30%)	368.837.907,00	
3	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Lumpue (30%)	274.594.283,00	
4	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bukit Harapan (30%)	671.528.492,00	
5	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bukit Indah (30%)	529.051.363,00	
6	Betonisasi Dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Lapadde (30%)	562.794.241,00	
7	Pembangunan Jalan Dan Drainase DAK Integrasi	5.458.915.609,00	
8	Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Drainase Bukit Indah (30%)	233.067.655,00	
<b>Jumlah</b>		<b>8.600.972.034,00</b>	Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan (Instalasi)

2) *Extracomptable*

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya reklas ke *Extracomptable* sebesar Rp4.827.285,00 pada Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan;



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

- 3) Reklasifikasi Ke Barang dan Jasa  
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp10.246.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Reklasifikasi Ke Persediaan  
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya reklas ke Persediaan sebesar Rp546.483.261,27 pada Dinas Perhubungan;
- 5) Realisasi Utang  
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya realisasi utang sebesar Rp12.176.062.272,32 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 134 Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Realisasi Utang**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	668.704.924,10	Pengurangan karena adanya realisasi utang Bangunan Air
		15.137.800,00	Pengurangan karena adanya realisasi utang Instalasi
		7.970.992.668,17	Pengurangan karena adanya realisasi utang Jalan dan Jembatan
		616.546.436,00	Pengurangan karena adanya realisasi utang Jaringan
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.544.316.655,85	Pengurangan karena adanya realisasi utang Jalan dan Jembatan
		360.363.788,20	Pengurangan karena adanya realisasi utang Instalasi
<b>Jumlah</b>		<b>12.176.062.272,32</b>	

- 6) Piutang  
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 karena adanya Piutang sebesar Rp500,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 7) Mutasi Keluar  
Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 karena adanya mutase keluar sebesar Rp Rp3.783.197.951,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 135 Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Adanya Penyertaan Modal**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.260.710.000,00	Mutasi Keluar ke RS dr. Hasri Ainun Habibie
2	Dinas Lingkungan Hidup	285.452.061,00	Mutasi Keluar ke Dinas Pekerjaan Umum





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
			dan Penataan Ruang
2	Kecamatan Bacukiki	153.000.000,00	Mutasi Keluar ke Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan
3	Kecamatan Soreang	148.400.000,00	Mutasi Keluar ke Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.935.635.890,00	Mutasi keluar ke Dinas Perhubungan
<b>Jumlah</b>		<b>3.783.197.951,00</b>	

8) Penyertaan Modal

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Tahun Anggaran 2023 karena adanya Penyertaan Modal sebesar Rp3.970.454.834,00 Ke PAM Tirta Karajae.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

<b>7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp32.006.004.647,01</b>	<b>Rp28.877.910.791,01</b>

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp32.006.004.647,01 dan Rp28.877.910.791,01. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp3.128.813.856 dan pengurangan nilai aset sebesar Rp720.000 terdiri dari:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.128.813.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 136 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Lainnya	Nilai
1	Belanja Modal TA. 2023 (Dana BOS)	3.100.203.856,00
2	Reklasifikasi Aset dari Peralalatan & Mesin	28.610.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.128.813.856,00</b>

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Lainnya yaitu:

1) Belanja Modal (Dana BOS)

Penambahan Belanja Modal (Dana BOS) Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.100.203.856,00 pada Dinas Pendidikan.

2) Reklasifikasi

Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 137 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>Alat Laboratorium</b>		
		Tannox Drum	2.100.000,00	(+ Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Barang Bercorak Kesenian karena adanya reklasifikasi dari Alat Laboratorium sebesar Rp14.560.000,00
		Alat Musik/Band	5.400.000,00	
		Drum Quarto	4.750.000,00	
		Dram ( Marching Band )	980.000,00	
		Dram ( Simbal kuningan )	980.000,00	
		Dram ( Harnes )	350.000,00	
		<b>Alat Peraga</b>		
		Alat Musik/Band	800.000,00	Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Barang Bercorak Kesenian karena adanya reklasifikasi dari Alat Peraga sebesar Rp14.050.000,00.
		Drum	3.900.000,00	
		Alat Musik/Band	350.000,00	
		Tannox Drum	3.900.000,00	
		Drum	2.700.000,00	
		Alat Musik/Band	2.400.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>28.610.000,00</b>		

B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp720.000,00 karena adanya Reklasifikasi ke Persediaan.

Adapun penjelasan dari pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya, yaitu:

1) Persediaan

Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp720.000,00 berupa Buku Amaliah Ramadhan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

**7.5.3.3.6 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp25.048.181.637,42</b>	<b>Rp50.895.320.239,18</b>

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp25.048.181.637,42 dan Rp50.895.320.239,18. Terdapat mutasi masuk sebesar Rp22.880.563.253,42 dan mutasi keluar sebesar Rp48.727.701.855,19.

A. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp22.880.563.253,42 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 138 Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Lainnya	Nilai
1	Reklasifikasi Aset	22.834.334.995,30
a	Reklasifikasi dari Tanah	53.956.751,00
b	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	737.525.223,73
c	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22.042.853.020,57
2	Utang 2023	46.228.258,13
<b>Jumlah</b>		<b>22.880.563.253,43</b>

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, yaitu:

1) Reklasifikasi Aset

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan karena adanya reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp53.956.751,00 pada Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan; dan
- b) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp737.525.223,73.

**Tabel 7.5. 139 Rincian Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>45.760.710,00</b>	
	Pagar SDN 58	45.760.710,00	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>50.910.000,00</b>	
	Rehabilitasi Masjid Agung	50.910.000,00	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
3	<b>Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan</b>	<b>640.854.513,73</b>	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	418.561.107,78	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	89.206.740,91	
	Bangunan Taman Permanen	133.086.665,04	
<b>Jumlah</b>		<b>737.525.223,73</b>	

- c) Reklasifikasi dari Aset Tetap pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp22.042.853.020,57;



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 140 Rincian Penambahan Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan	
1	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>13.441.880.986,57</b>		
	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Permukaan Tahun 2022	89.736.800,00	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp609.221.880,35 karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Air	
	Pembangunan Talud, Pengerukan dan Duikker Akses Pekuburan Rw.	301.994.480,35		
	Rehabilitasi Tanggul Sungai Jawi-Jawi (SMA 5)	13.171.400,00		
	Dokumen Lingkungan, Perencanaan, dan Pengawasan Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman	124.657.300,00		
	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	50.076.400,00		
	Perencanaan dan biaya umum Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	29.585.500,00		
	Pembangunan Akses Jalan Swaka Alam Lestari (Dua Jalur/Jl. Lingkar	4.822.769.411,60		Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.832.659.106,22 karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan dan Jembatan
	Rekonstruksi Jl. Akses Laupe Depan Masjid Al Munawir	876.967.578,90		
	Rekonstruksi Jl. Akses Tassiso	490.006.784,00		
	Rekonstruksi Jl. Handayani Barat	212.169.687,80		
	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan 2024	97.902.000,00		
	Rehabilitasi Jalan (DAU) 13 Paket	5.786.210.317,92		
	Rehabilitasi Jalan (BANPROV)	107.762.190,00		
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jembatan Pasca Bencana	364.307.636,0		
	Perencanaan Teknis dan biaya umum Pembangunan Jembatan	74.563.500,00		
2	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan</b>	<b>8.600.972.034,00</b>		
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan LOMPOE	502.182.484,00	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.367.904.379,00 karena adanya reklasifikasi dari Jalan dan Jembatan	
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bumi Harapan	368.837.907,00		
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Lumpue	274.594.283,00		
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bukit Harapan	671.528.492,00		
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Bukit Indah	529.051.363,00		
	Betonisasi dan Revitalisasi Jalan Lingkungan Lapadde	562.794.241,00		
	Pembangunan Jalan dan Drainase DAK Integrasi	5.458.915.609,00	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi dari Instalasi	
	Saluran Drainase JL. Takkalao Lr. Jalan Mappangulung Jompie RT 1/ RW 7	233.067.655,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>22.042.853.020,57</b>		



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

2) Utang Tahun Anggaran 2023

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya Utang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.228.258,13 berupa Pembangunan Pagar SDN 58 pada Dinas Pendidikan.

B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp48.727.701.855,19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 141 Rincian Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	Penambahan Aset Tetap Lainnya	Nilai
1	Reklasifikasi Aset	48.727.701.855,19
a	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	8.235.513.616,09
b	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.492.188.239,10
<b>Jumlah</b>		<b>48.727.701.855,19</b>

1) Reklasifikasi

a) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.235.513.616,09 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 142 Rincian pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>551.452.900,00</b>	
	Rehabilitasi Bangunan Gedung Cagar Budaya (Kantor Dinas Pendidikan)	551.452.900,00	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>6.044.897.034,00</b>	
	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	1.323.336.100,00	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.
	Pembangunan Pelataran UKM Mattirotasi Waterpark (DID)	4.721.560.934,00	
3	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>459.861.900,00</b>	
	Cafe Container	459.861.900,00	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.
4	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata</b>	<b>1.142.696.702,09</b>	
	Pekerjaan Fisik Rehab. Asrama HIPMI Pare - Dg. Tata	243.179.902,09	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.
	Pekerjaan Fisik Rehab. Asrama HIPMI Pare – Perintis	357.581.350,00	
	Revitalisasi Lapangan Lompoe	137.390.400,00	
	Rehabilitasi GOR Lompoe	404.545.050,00	
5	<b>Dinas Perdagangan</b>	<b>36.605.080,00</b>	



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen PASAR WEKKE'E (Biaya Administrasi)	36.605.080,00	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.
	<b>Jumlah</b>	<b>8.235.513.616,09</b>	

- b) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp40.492.188.239,10 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 143 Rincian Pengurangan Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Nilai	Keterangan
<b>1</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>37.337.879.257,84</b>	
	Pembangunan Jembatan Kembar	1.165.650.000,00	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp37.188.890.219,74 karena adanya reklasifikasi ke Jalan dan Jembatan.
	Pembangunan Jalan Lapangape Lumpue	1.415.750.947,79	
	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Tahun 2023	93.573.000,00	
	Rehabilitasi Jalan (DAU)	9.005.704.042,35	
	Perbaikan Jalan Sibali RT.1/RW.11	118.883.248,75	
	Rehabilitasi Jalan BTN Pepabri	187.571.221,57	
	Perbaikan Jalan Lorong Armada Jalan Andi Sinta	350.830.717,20	
	Pembangunan Jembatan Kembar	21.452.970.842,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lorong dan Lingkungan III dan IV	365.402.803,00	
	Pembangunan Trotoar Islamic Center	641.109.023,16	
	Pembangunan Trotoar Jalan H. A. Arsyad perbatasan Pinrang	576.022.954,31	
	Pembangunan Trotoar Jalan Jend. A. Yani (pertigaan Jalan Industri Kecil - pertigaan Jalan Jend. Sudirman)	1.815.421.419,61	
	Pembangunan Bronjong - Lemoe Jalan Tani	148.989.038,10	
<b>2</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang</b>	<b>3.154.308.981,26</b>	
	Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase Lapadde - Jln. Jenderal Sudirman (Samping SK 55)	4.381.485,30	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp96.136.569,20 karena adanya reklasifikasi ke Bangunan Air.
	Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase Lapadde - Jln. Poros Parepare Sidrap	91.755.083,90	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Galung Maloang - Jln. M. Yusuf	140.260.346,60	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.058.172.412,06 karena adanya reklasifikasi ke Jalan dan Jembatan.
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 1 Jl. Padi ( Lorong )	80.792.048,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 2 (J. Lingkar Lrg. (Jl. Pekuburan Masuk )	112.602.155,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 3 (l. Poros Bilalalangnge (Lorong)	49.782.006,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lemoe - Segmen 4 (J. M. P. Remmang (Lr. Masuk)	98.675.046,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 1 (Jl. M. Yusur Kullange Belakang terminal)	34.609.388,60	





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 2 (Jl. Lingkar Lrg)	60.879.009,80	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 3 (Jl. Gunung tolong Lrg)	117.437.575,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 4 (Jl. Pesangrahan Lrg)	177.678.337,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lumpue - Segmen 5 (Jl. Bau Massepe lrg depan Hotel Graha)	125.371.484,20	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 1 (Jl. Atletik Lrg)	73.962.108,30	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 2 (Jl. Syamsul Bahri Lrg tembus Jl Reformasi)	58.813.241,40	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 3 (Jl Langsung Lrg tembus Jl. Durian Lrg)	92.008.350,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 4 (Jl. Agussalim Lrg samping Kopersi BHS)	37.121.085,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Kampung Baru - Segmen 5 (Jl Atletik Lrg)	100.822.698,50	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 1 (Jl. Industri kecil Lrg)	51.548.150,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 2 (Jl. Takkalao Lrg)	130.921.962,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 3 (Jl. Bukit Indah Lrg)	41.299.344,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 4 ( Jl. Muspika LRg)	71.848.084,50	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Bukit Indah - Segmen 5 (Bukit Indah Lrg)	34.487.082,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 1 (Jl. Andi Laitong Lrg)	160.993.971,60	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 2 (Jl. Pelita Tenggara Lrg tembus Jl. Ganggawa)	50.862.968,50	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Ujung Bulu - Segmen 3 (Jl. Kijang masuk tembus BTN Hilal Residence)	172.400.118,00	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 1 (Jl. Andi Mappangara Lrg)	161.368.967,35	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 2 (Jl. Ambo Matti Lrg 1 masuk)	344.627.897,34	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 3 (Jl. Bukit Madani Lrg)	77.550.124,95	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 4 (Jl. Wisata Raya depan mesjid Al Madinah masuk)	198.677.959,01	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 5 (Jl. Ambo Matti Lrg masuk)	90.562.770,86	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 6 (Jl. Wirabuana)	67.135.961,26	
	Peningkatan kawasan permukiman (betonisasi) Lapadde - Segmen 7 (Jl. Atletik Lrg)	43.072.168,29	
	<b>Jumlah</b>	<b>40.492.188.239,10</b>	

Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 22.**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**7.5.3.3.7 Akumulasi**

**Penyusutan Aset Tetap**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>(Rp1.553.052.713.798,08)</b>	<b>(Rp1.431.816.595.189,67)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.553.052.713.798,08) Rincian Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

**Tabel 7.5. 144 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(571.228.896.716,36)	(526.903.750.537,55)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(202.982.411.633,03)	(180.773.359.525,87)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(778.077.149.700,02)	(723.528.336.085,92)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(764.255.748,67)	(611.149.040,33)
<b>Jumlah</b>		<b>(1.553.052.713.798,08)</b>	<b>(1.431.816.595.189,67)</b>

**a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>(Rp571.228.896.716,36)</b>	<b>(Rp526.903.750.537,55)</b>

Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 145 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(16.283.384.925,44)	(16.185.309.989,09)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(67.149.547.936,72)	(65.260.343.349,66)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.063.843.568,18)	(2.981.032.333,12)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1.778.480.311,32)	(1.748.040.194,65)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(88.975.767.510,34)	(81.146.409.889,35)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(8.978.558.625,92)	(7.855.780.122,27)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(310.048.981.292,34)	(285.826.922.184,78)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(23.941.044.590,86)	(21.668.501.572,32)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(2.268.750,00)	(1.512.500,00)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(43.914.590.247,74)	(37.755.529.009,70)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(18.375.000,00)	(15.925.000,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(882.079.682,01)	(815.084.867,68)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(1.160.500,00)	(1.160.500,00)
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(32.590.144,31)	(19.147.553,64)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
15	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(4.351.576.428,98)	(4.067.130.455,22)
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1.806.647.202,20)	(1.555.921.016,07)
	<b>Jumlah</b>	<b>(571.228.896.716,36)</b>	<b>(526.903.750.537,55)</b>

<b>b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp202.982.411.633,03)</b>	<b>(Rp180.773.359.525,87)</b>

Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp202.982.411.633,03) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 146 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(198.468.061.426,07)	(176.791.966.982,05)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.151.433.744,45)	(1.022.033.754,73)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(196.886.372,25)	(164.071.976,88)
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(3.166.030.090,26)	(2.795.286.812,21)
	<b>Jumlah</b>	<b>(202.982.411.633,03)</b>	<b>(180.773.359.525,87)</b>

<b>c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp778.077.149.700,02)</b>	<b>(Rp723.528.336.085,92)</b>

Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp778.077.149.700,02) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 147 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(661.954.608.801,34)	(615.532.311.232,60)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(111.874.984.828,57)	(104.595.092.821,84)
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(3.803.017.744,25)	(3.079.358.317,90)
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(444.538.325,86)	(321.573.713,58)
	<b>Jumlah</b>	<b>(778.077.149.700,02)</b>	<b>(723.528.336.085,92)</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp764.255.748,67)</b>	<b>(Rp611.149.040,33)</b>

Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp764.255.748,67) yang berasal dari Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

Rincian akumulasi penyusutan disajikan pada **Lampiran 23**.

<b>7.5.3.4 Properti Investasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp348.193.571.289,22</b>	<b>Rp0,00</b>

Properti Investasi merupakan Properti milik Pemerintah Kota Parepare untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aturan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi. Di Tahun Anggaran 2023 Properti Investasi mulai disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntan Pemerintah Daerah.

Adapun terkait dengan Aset Properti yang dikelola oleh Pemerintah Kota Parepare yang merupakan bagian dari Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 148 Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Aset Properti			Total
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan bangunan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	10.158.357.865,88	10.158.357.865,88
2	Dinas Kesehatan	221.686.962,66	0,00	4.487.722.403,72	4.709.409.366,38
3	RSUD Andi Makkasau	0,00	0,00	2.116.657.000,00	2.116.657.000,00
4	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	0,00	1.195.379.729,00	1.715.747.200,00	2.911.126.929,00
5	Dinas Ketenega Kerjaan	3.542.829.920,04	0,00	3.538.407.608,00	7.081.237.528,04
6	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00-	0,00	5.457.809.875,00	5.457.809.875,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	20.567.038.037,75	1.156.685.650,00	41.035.658.659,00	62.759.382.346,75
8	Dinas Lingkungan Hidup	748.652.095,67	0,00	8.913.713.248,00	9.662.365.343,67



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Aset Properti			Total
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan bangunan	
9	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1.039.855.000,00	1.718.691.000,00	0,00	2.758.546.000,00
10	Dinas Perdagangan	75.497.117.030,00	0,00	133.686.305.351,00	209.183.422.381,00
11	Badan Keuangan Daerah	24.267.485.299,50	0,00	3.431.998.000,00	27.699.483.299,50
12	Sekretariat Daerah Kota	0,00	0,00	3.695.773.354,00	3.695.773.354,00
<b>Total</b>		<b>125.884.664.345,62</b>	<b>4.070.756.379,00</b>	<b>218.238.150.564,60</b>	<b>348.193.571.289,22</b>

Rincian Properti Investasi dapat di lihat pada **Lampiran 24**

**7.5.3.5 Aset Lainnya**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp57.797.665.737,10</b>	<b>Rp50.754.350.112,75</b>

Nilai Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp57.797.665.737,10 dan Rp50.754.350.112,75. Aset tersebut terdiri dari, Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp13.754.475.163,48 dan mutasi pengurangan sebesar 6.711.159.539,15. Penjelasan mutasi masing-masing jenis aset lainnya sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 149 Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>7.271.958.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.339,00</b>	<b>7.270.904.332,28</b>
	Belanja yang Harus Dipertanggungjawabkan	3.149.173.595,00	0,00	0,00	3.149.173.595,00
	Kekurangan Kas	4.122.785.076,28	0,00	1.054.339,00	4.121.730.737,28
2	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>24.361.466.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.266.180,00</b>	<b>20.250.200.000,00</b>
	Pasar Gerbang	10.307.700.000,00	0,00	0,00	10.307.700.000,00
	Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni	5.200.000.000,00	0,00	0,00	5.200.000.000,00
	Kolam Renang Ujung Lare	4.742.500.000,00	0,00	0,00	4.742.500.000,00
	Pemanfaatan Perumahan PNS	4.111.266.180,00	0,00	4.111.266.180,00	0,00
3	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>470.680.635,83</b>	<b>(219.082.109,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>251.598.525,84</b>
	Aset Tak Berwujud	2.294.676.112,18	0,00	0,00	2.294.676.112,18
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.823.995.476,35)	(219.082.109,99)	0,00	(2.043.077.586,34)
4	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>23.427.115.883,92</b>	<b>11.592.698.273,47</b>	<b>103.751.607,13</b>	<b>27.644.103.878,98</b>
	<b>Aset Usul Hapus</b>	<b>16.078.512.999,64</b>	<b>11.592.698.273,47</b>	<b>103.751.607,13</b>	<b>27.567.459.665,98</b>
	Aset Usul Hapus	63.029.910.531,52	27.671.321.456,47	264.095.000,00	89.614.502.387,99
	Penyusutan Aset Usul Hapus	(46.951.397.531,88)	(16.078.623.183,00)	(160.343.392,87)	(62.047.042.722,01)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	<b>Piutang yang akan dihapuskan</b>	<b>76.644.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.644.213,00</b>
	Piutang CVKilat	56.094.963,00	0,00	0,00	56.094.963,00
	Piutang CV Lima Utama	20.549.250,00	0,00	0,00	20.549.250,00
<b>5</b>	<b>Dana Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>2.495.087.413,00</b>	<b>2.380.859.000,00</b>	<b>2.495.087.413,00</b>	<b>2.380.859.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>50.754.350.112,75</b>	<b>13.754.475.163,48</b>	<b>6.711.159.539,15</b>	<b>57.797.665.737,10</b>

**7.5.3.5.1 Tagihan Jangka Panjang**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp7.270.904.332,28</b>	<b>Rp0,00</b>

Tagihan Jangka Panjang merupakan reklasifikasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.270.904.332,28. Tagihan Jangka Panjang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan belanja yang harus dipertanggungjawabkan dan kekurangan kas berdasarkan LHP BPK RI dan LHP Inspektorat Kota Parepare. Berdasarkan Buletin Teknis No 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah yang menyatakan “Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara dari jumlah semestinya menjadi asset lainnya”.

Adapun penjelasan aset lainnya sebagai berikut:

- 1) Belanja yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.149.173.595,00.  
 Belanja yang harus dipertanggungjawabkan merupakan belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kepada yang berhak sesuai hasil temuan LHP BPK atas Pemeriksaan LKPD TA 2018 No.31/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp3.149.173.595,00 pada Dinas Kesehatan.  
 Rincian Belanja yang Harus Dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada **Lampiran 26**.
- 2) Kekurangan kas sebesar **Rp4.121.730.737,28**  
 Kekurangan kas merupakan hasil temuan LHP BPK dan Inspektorat berikut ini.

**Tabel 7.5. 150 Rincian Kekurangan Kas Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Nomor LHP BPK/ Inspektorat	Tanggal	Jumlah Kekurangan Kas	Jumlah Pembayaran	Jumlah Setelah Pembayaran	SKPD	Nama/ Inisial	Keterangan
1	66/LHP/XIX.M KS/12/2010	30 Desember 2010	397.802.652,28	1.054.339,00	396.748.313,28	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	MT	Tuntutan Perbendaharaan
2	50/LHP/XIX.M KS/08/2011	21 Agustus 2011	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	MT	Tuntutan Perbendaharaan



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Nomor LHP BPK/ Inspektorat	Tanggal	Jumlah Kekurangan Kas	Jumlah Pembayaran	Jumlah Setelah Pembayaran	SKPD	Nama/ Inisial	Keterangan
3	780/02/Insp	14 Mei 2012	31.982.424,00	0,00	31.982.424,00	Badan Pemberday aan Masyarakat dan Kelurahan	S	Tuntutan Perbendaharaan
4	31/LHP/XIX.M KS/05/2019	16 Mei 2019	2.901.000.000,00	0,00	2.901.000.000,00	Dinas Kesehatan	MY	Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
			700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	Dinas Kesehatan	MY	Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
<b>Jumlah</b>			<b>4.122.785.076,28</b>	<b>1.054.339,00</b>	<b>4.121.730.737,28</b>	-	-	-

Atas kekurangan kas saudara MT dan S masih berproses di Kaditama Binbankum PKN BPK RI. Sebelumnya pernah ditetapkan SKTJM atas inisial MT tanggal 27 Juli 2012 dan tidak didukung dengan jaminan serta tidak pernah ditindaklanjuti oleh saudara MT. Sedangkan kasus saudara inisial S juga sudah ditetapkan SKTJM Nomor 01/SKTJM/TPKD/2022 tanggal 11 Januari 2022. Kasus ini juga sudah diproses di Kaditama Binbankum PKN BPK RI dan telah diserahkan beberapa persyaratan termasuk LHP Inspektorat tahun 2012.

Atas kekurangan kas MY, pada tahun 2019 masih dalam proses penyidikan peradilan dan telah ditetapkan beberapa tersangka, salah satunya Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sdri SN dan yang bersangkutan sudah ditahan (Tingkatan Penuntutan) Kejaksaan Negeri Parepare Nomor. Print. 141/P.4.11/Ft.2/2020 tanggal 6 Februari 2020. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Parepare telah dilaksanakan proses sidang majelis TPTGR atas ketiadaan fisik uang dengan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya atas putusan tersebut, Majelis TPTGR menerbitkan Surat Keputusan pembebanan oleh Walikota Parepare masing-masing Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang Pembebanan Pengantian Kerugian Daerah kepada Dr. Muhammad Yamin, M.Kes, Keputusan Walikota Parepare Nomor 422 Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pembebanan Pengantian Kerugian Daerah kepada Dr. Muhammad Yamin, M.Kes, Keputusan Walikota Parepare Nomor 420 Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pembebanan Pengantian Kerugian Daerah kepada Dr. Muhammad Yamin, M.Kes, Keputusan Walikota Parepare Nomor 425 Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pembebanan Pengantian Kerugian Daerah kepada Dr. Muhammad Yamin, M.Kes, selain itu Badan Keuangan Daerah telah melakukan penagihan kepada Dr. Muhammad Yamin, M.Kes sesuai Surat Tagih Kerugian Daerah Nomor 900/04/TPTGR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp3.110.512.858,00 dan Surat Tagih Nomor 900/05/TPTGR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp704.359.231,00. Selanjutnya Kekurangan Kas dan pengakuan realisasi belanja yang tidak sesuai pertanggungjawabannya telah dilaporkan ke





Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada BPK RI dan sesuai dengan surat Kaditama Binbangkum BPK RI selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan No. 117/S/XIII/12/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perihal Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Parepare antara lain dinyatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyusunan pertimbangan hukum sebagai bahan pertimbangan sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan.

Pada tahun 2020, Pemkot Parepare telah bersurat kepada Kepala KPKNL Parepare sesuai Surat Nomor 900/187/BKD tanggal 16 Maret 2020 dengan melaporkan daftar kekayaan Dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Parepare untuk diproses sesuai ketentuan. Namun harta kekayaan Dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang terdaftar di LHKPN hanya kendaraan dan rumah tinggal yang nilainya belum mencukupi untuk dijadikan jaminan.

Pada tahun 2021, belum terdapat perkembangan atas penyelesaian atas kasus tersebut. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan No. PRINT- 133/P.4.11/Fu.1/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 memerintahkan Faisah,SH.,MH jaksa madya, melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Makassar No. 77/Pidsus-TPK/2019/ PN.MKS tanggal 16 Januari 2020 an. Dr.M.Y. Berdasarkan petikan putusan pengadilan Negeri Makassar No. 16/Pidsus-TPK/2020/PN.MKS tanggal 16 Juli 2020 menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa inisial S binti Sarullah (S) mengadili terdakwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa inisial S dan karena itu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penyeteroran pengembalian sebesar Rp1.054.339,00 yang terdiri dari Rp856.765 disetor 26 Juli 2023 dan Rp197.574,00 disetor tanggal 20 november 2023 dari jumlah kekurangan kas sebesar Rp497.802.652,28 berdasarkan LHP 66/LHP/XIX.MKS/12/2010 Runeg ID 87511 atas nama M.T sehingga jumlah sisa yang harus disetorkan ke kas pada bendahara pengeluaran DPKD sebesar Rp396.748.313,28.

#### 7.5.3.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp20.250.200.000,00</b>	<b>Rp24.361.466.180,00</b>

Saldo

kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp20.250.200.000,00 dan Rp24.361.466.180,00 merupakan nilai aset milik Pemerintah Kota Parepare berupa tanah dan bangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan aset.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 151 Rincian Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga  
Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Des 2022
1	Pasar Gerbang Niaga	10.307.700.000,00	10.307.700.000,00
2	Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
3	Pemanfaatan Kolam Renang Ujung Lare	4.742.500.000,00	4.742.500.000,00
4	Pemanfaatan Perumahan PNS	0,00	4.111.266.180,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.250.200.000,00</b>	<b>24.361.466.180,00</b>

Penjelasan kerja sama pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Parepare di atas sebagai berikut:

**a. Pasar Gerbang Niaga**

Kerja sama pemanfaatan Pasar Gerbang Niaga Kota Parepare didasarkan pada Perjanjian Bersama Bersyarat Pembangunan Pasar Gerbang Niaga Parepare antara Pemerintah Kota Parepare dengan PT Era Persada Nomor 03/SP/II/94 tanggal 17 Februari 1994. Dalam perjanjian yang berpola Bangun Guna Serah (BGS) tersebut Pemerintah Kota Parepare menyerahkan tanah seluas 15.858 m<sup>2</sup> senilai Rp852.367.500,00 kepada PT Era Persada untuk dilakukan pembangunan di atasnya berupa bangunan Pasar Gerbang Niaga. PT Era Persada berhak memanfaatkan seluruh aset dan mengoperasikan Pasar Gerbang Niaga selama 30 tahun. Pemerintah Kota Parepare akan memperoleh kembali haknya berupa tanah dan bangunan setelah jangka waktu 30 tahun. Perjanjian kerja sama tersebut diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Bersama Bersyarat Pembangunan pasar gerbang Niaga Parepare Nomor 03/SP/II/94 tanggal 8 Juli 1996. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Bersama Bersyarat Pembangunan Pasar Gerbang Niaga Parepare Nomor 180.4/11/Hkm. PT Era Persada menyerahkan sebagian tanah ke Pemerintah Kota Parepare seluas 2.454,19 m<sup>2</sup> yang perjanjiannya berakhir pada tanggal 17 Februari 2025.

Berdasarkan hasil appraisal PT Indoprofita Konsultan pada tahun 2005, Bangunan Pasar Gerbang Niaga Kota Parepare dinilai kembali menjadi sebesar Rp10.307.700.000,00.

**b. Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni**

Kerja sama pemanfaatan lahan Eks Pasar Seni didasarkan pada Perjanjian Kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kota Parepare dengan PT Fajar Ajattappareng Hotel Nomor 180.2/20/HK dan Nomor EAH-II/XII/12 tanggal 12 Desember 2012. Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Kota Parepare menyerahkan tanah hak pakai nomor 00166 eks Pasar Seni seluas 6.303 m<sup>2</sup> senilai Rp5.200.000.000,00 kepada PT Fajar Ajattappareng Hotel. Selanjutnya PT Fajar Ajattappareng Hotel wajib membangun bangunan di atas tanah tersebut bangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya termasuk pusat perbelanjaan yang kemudian dikelola dalam jangka waktu BGS selama



30 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pengelolaan. Selama jangka waktu pengelolaan tersebut, PT Fajar Ajattappareng Hotel diwajibkan untuk membayar kepada Pemerintah Kota Parepare kontribusi tetap sebesar Rp2.000.000.000,00 dan kontribusi tidak tetap sebesar 10% dari laba bersih operasional sebelum pajak penghasilan badan. Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, Pemerintah Kota Parepare berhak atas pengalihan tanah, gedung dan fasilitas pendukung lainnya kecuali barang bergerak. Isi penjelasan secara lengkap mengenai perjanjian kerja sama tersebut dapat dibaca pada dokumen perjanjian dimaksud.

Perkembangan terakhir tentang pemanfaatan lahan eks pasar seni telah digugat atau diklaim dari salah seorang masyarakat yang dikabulkan sesuai dengan keputusan tata usaha Negara Nomor 19/6/2014/PTUN MKS tanggal 15 September 2014, selanjutnya atas munculnya hasil gugatan tersebut maka Pemerintah Kota Parepare melakukan pertemuan dengan pihak PT Fajar Ajattappareng Hotel pada tanggal 5 Januari 2015 bertempat di Makassar untuk membahas solusi terbaik mengenai kelanjutan kerja sama tersebut. Dari hasil pertemuan kedua belah pihak disepakati solusi alternatif antara lain apakah diadakan revisi perjanjian atau menerbitkan perjanjian baru dengan objek perjanjian lokasi yang lain, selanjutnya pertemuan tersebut oleh Pemerintah Kota Parepare menindaklanjuti dengan menyurat pada PT Fajar Ajattappareng Hotel tanggal 8 Januari 2015 tentang perihal solusi kelanjutan kerja sama tersebut, dan surat penyampaian Pemerintah Kota Parepare telah mendapat balasan dari Pihak PT Fajar Ajattappareng Hotel tertanggal 15 Januari 2015 yang intinya tetap mengapresiasi dan akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemegang saham. Pemerintah Kota Parepare selaku Tergugat II Intervensi melakukan upaya banding atas Keputusan Tata Usaha Negara nomor 19/G/2014/PTUN/MKS tanggal 15 September 2014 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar. Atas upaya banding tersebut telah diputus dengan Keputusan nomor 192/B/2014/PTTUN MKS tanggal 12 Februari 2015 yang menguatkan keputusan PTUN.

**c. Pemanfaatan Kolam Renang Ujung Lare**

Dalam perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Parepare menyerahkan pengelolaan aset berupa tanah seluas 3.480m<sup>2</sup> senilai Rp3.550.000.000,00, bangunan kolam renang dan fasilitas pendukungnya seluas 1.728 m senilai Rp2.548.800.000,00 kepada CV Abadi Megah Grup. Dan berdasarkan hasil apresial Nomor 0333/PNL-C/MBPRU-JKT/PWT/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010 oleh kantor jasa penilai publik Muttaqin Bambang Purwanto dan rekan atas nilai aset Pemda yang dikerjakan samakan dinilai sebesar Rp4.742.500.000,00. Selanjutnya kerja sama pengelolaan Kolam Renang Ujung Lare Kota Parepare didasarkan pada Adendum Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Parepare dengan CV Abadi Megah Grup dengan akte notaris Nomor 03 tanggal 10 Mei 2011. Pemerintah Kota Parepare menyerahkan pengelolaan kolam renang Ujung Lare kepada CV Abadi Megah



Grup dengan perjanjian bahwa CV Abadi Megah Grup wajib memberikan kontribusi tetap kepada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap tahunnya dan memberikan pembagian hasil keuntungan kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare yang dimulai pada tahun pertama sebesar Rp5.000.000,00. Jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali dan adendum perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan adendum kedua dan/atau selanjutnya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**d. Pemanfaatan Perumahan PNS**

Tanah tersebut telah dilepaskan berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor 371 Tahun 2004 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Pegawai Negeri Binalipu Dalam Bentuk Guna Bangunan Untuk Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Parepare, dengan luas tanah seluas 76.587 m<sup>2</sup>.

Sertifikat tanah saat ini telah dibalik nama, dari semula Sertifikat Tanah Nomor 00550 atas nama Pemerintah Kota Parepare menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama KPN Binalipu dengan Nomor Sertifikat 1074 Tahun 2004. Luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Nomor 1074 tersebut seluas 81.578 m<sup>2</sup>. KPN Binalipu pada saat ini sudah tidak aktif lagi, penambahan nilai sebesar Rp32.366.180,00 merupakan pembayaran Biaya sertifikat untuk tanah perumahan PNS.

Pengurangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikarenakan adanya reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (usul hapus) sebesar Rp705.554.518,62 dan Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp3.405.711.661,38. Pemanfaatan Perumahan PNS tidak memungkinkan lagi dicatat pada rekening Kemitraan dengan Pihak Ketiga karena tidak memberikan kontribusi sewa pada Pemerintah Daerah Kota Parepare.

<b>7.5.3.5.3 Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.294.676.112,18</b>	<b>Rp2.294.676.112,18</b>

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.294.676.112,18. Aset Tak Berwujud berisi Software.

<b>7.5.3.5.4 Aset Lain-Lain</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp90.513.781.200,99</b>	<b>Rp70.378.513.415,80</b>

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp97.784.685.533,27 dan Rp70.378.513.415,80 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 152 Rincian Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
<b>Aset Usul Hapus</b>					
1	Aset Usul Hapus	63.029.910.531,52	27.671.321.456,47	264.095.000,00	90.437.136.987,99
<b>Piutang yang akan dihapuskan</b>					
2	Piutang CVKilat	56.094.963,00	0,00	0,00	56.094.963,00
3	Piutang CV Lima Utama	20.549.250,00	0,00	0,00	20.549.250,00
<b>Total</b>		<b>70.378.513.415,80</b>	<b>27.671.321.456,47</b>	<b>264.095.000,00</b>	<b>90.513.781.200,99</b>

<b>a. Aset Usul Hapus</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u>Rp90.437.136.987,99</u>	<u>Rp63.029.910.531,52</u>

Aset usul hapus terdiri dari aset Pemerintah Daerah yang dihibahkan dan aset yang diusul oleh SKPD untuk dilakukan penghapusan.

Adapun rincian aset usul hapus dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

<b>b. Piutang yang Akan Dihapuskan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u>Rp76.644.213,00</u>	<u>Rp76.644.213,00</u>

Piutang yang Akan Dihapuskan merupakan kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV Kilat dan CV Lima Utama namun tidak dapat tertagih oleh Pemkot Parepare karena identitas penyedia tidak diketahui dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo piutang CV Kilat sebesar Rp56.094.963,00. Nilai saldo piutang tersebut telah dicatat secara *Extracomptable* pada tahun 2012, namun dicatat kembali sebagai aset lain-lain pada tahun 2013. Sampai dengan tahun 2023 wajib setor belum melakukan penyetoran atas piutang tersebut.
- 2) Saldo piutang CV Lima Utama sebesar Rp20.549.250,00. Nilai saldo piutang tersebut telah dicatat secara *Extracomptable* pada Tahun 2012, namun dicatat kembali sebagai aset lain-lain pada Tahun 2013. Sampai dengan tahun 2023 wajib setor belum melakukan penyetoran atas piutang tersebut.

<b>7.5.3.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u>(Rp2.043.077.586,34)</u>	<u>(Rp1.823.995.476,35)</u>

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.043.077.586,34) dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.823.995.476,35).

Rincian aset tidak berwujud dan rincian amortisasi aset tak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 28**.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.3.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>2023</b> <b>(Rp62.869.677.322,01)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp46.951.397.531,88)</b>
--	---	---

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp62.869.677.322,01) dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp46.951.397.531,88). Rincian Aset Lain-lain dan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

<b>7.5.3.5.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>2023</b> <b>Rp2.380.859.000,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp2.495.087.413,00</b>
--	--	--

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.380.859.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil TDF yang sudah masuk pada Rekening Penampungan dan per 31 Desember 2023 belum diterima di RKUD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 153 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	DBH PPh Pasal 21	1.394.379.000,00	956.242.056,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	12.537.000,00	52.950.987,00
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	99.980.000,00	537.083.766,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	5.730,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	78.896.793,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	681.834.000,00	631.954.947,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	192.129.000,00	3.609.721,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	211.753.211,00
9	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	22.590.202,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.380.859.000,00</b>	<b>2.495.087.413,00</b>

<b>7.5.3.5 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>2023</b> <b>Rp41.144.152.562,50</b>	<b>2022</b> <b>Rp37.857.312.401,71</b>
--	---	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 Rp41.144.152.562,50 dan Rp37.857.312.401,71. Kewajiban Jangka Pendek Tahun



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.286.840.160,79 atau lebih tinggi 8,68% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 154 Rincian Kewajiban Jangka Panjang**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.844.562,00	55.080.956,14	(85,76)
2	Utang Bunga	259.055.500,76	285.431.835,85	(9,24)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.765.857.030,74	2.765.857.030,74	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	628.027.102,35	737.171.556,88	(14,81)
5	Utang Belanja	37.483.368.366,65	34.013.771.022,10	10,20
<b>Jumlah</b>		<b>41.144.152.562,50</b>	<b>37.857.312.401,71</b>	<b>8,68</b>

**7.5.3.5.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp7.844.562,00</b>	<b>Rp55.080.956,14</b>

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 31 Desember 2023 sebesar Rp7.844.562,00 terdiri dari PPh Pusat dan Utang PPN Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Utang PPh Pusat**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp3.263.433,00</b>	<b>Rp48.191.228,53</b>

Utang PPh Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.263.433,00 dan Rp48.191.228,53. Utang PPh Pusat Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan tahun 2023 sebesar Rp45.917.394,43 atau lebih rendah 96,75% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.155 Rincian Utang PPh Pusat di Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang PPh 21	1.540.500,00	47.457.894,43	(96,75)
2	Utang PPh 22	116.837,00	224.107,00	(47,87)
3	Utang PPh 23	1.606.096,00	509.227,10	215,40
<b>Jumlah</b>		<b>3.263.433,00</b>	<b>48.191.228,53</b>	<b>(96,75)</b>

**b. Utang PPN Pusat**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp4.581.129,00</b>	<b>Rp6.889.727,61</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Utang PPN Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.581.129,00 dan Rp6.889.727,61. Utang PPN Pusat Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.308.598,61 atau lebih rendah 33,51%. Telah dilakukan pembayaran utang pajak PPh Pusat dan PPN Pusat sesuai daftar terlampir pada **Lampiran 30**.

<b>7.5.3.5.2 Utang Bunga</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp259.055.500,76</b>	<b>Rp285.431.835,85</b>

Saldo utang bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp259.055.500,76 merupakan biaya bunga atas utang jangka panjang (Bunga Pasar Lakessi) per 31 Desember 2023 (*accrued interest*) atas pinjaman SLA-1205/DP3/2006 yang setiap tahunnya Pemerintah Kota Parepare berkewajiban untuk membayar Bunga ke Bank Indonesia (BI). Utang Bunga Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp26.376.335,09 atau lebih rendah 9,24%.

<b>7.5.3.5.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.765.857.030,74</b>	<b>Rp2.765.857.030,74</b>

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.765.857.030,74 adalah utang SLA-1205/DP3/2006 yang merupakan Bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan selama 25 tahun yang berakhir pada tahun 2025.

<b>7.5.3.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp628.027.102,35</b>	<b>Rp737.171.556,88</b>

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp628.027.102,35 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp737.171.556,88. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp109.144.454,53) atau lebih rendah 14,81% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 156 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	596.527.102,17	664.671.556,78	(10,25)
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III	31.500.000,18	72.500.000,10	(56,55)
<b>Jumlah</b>		<b>628.027.102,35</b>	<b>737.171.556,88</b>	<b>(14,81)</b>

<b>a. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp596.527.102,17</b>	<b>Rp664.671.556,78</b>





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp596.527.102,17 dan Rp664.671.556,78. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp68.144.454,61 atau lebih rendah 10,25%.

Daftar Rincian Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III pada **Lampiran 31**.

<b>b. Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp31.500.000,18</b>	<b>Rp72.500.000,10</b>

Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III merupakan sewa lahan ATM pada BLUD RSUD Andi Makkasau per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.500.000,18 dan Rp72.500.000,10. Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.999.999,92 atau lebih rendah 56,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 157 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka RSUD A. Makkasau**

*dalam rupiah*

No	Nama Wajib Pajak	Jenis Penerimaan	Setoran Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III
1	Bank Sulselbar	Sewa Lahan Kantor Sulselbar	22.000.000,04
2	Bank BRI	Sewa lahan ATM BRI	9.500.000,14
<b>Jumlah</b>			<b>31.500.000,18</b>

<b>7.5.3.5.5 Utang Belanja</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp37.483.368.366,65</b>	<b>Rp34.013.771.022,10</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.483.368.366,65 terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal. Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan Rp3.469.597.344,55 atau lebih tinggi 10,20% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.158 Rekapitulasi Utang Belanja Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Bertambah	Berkurang	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	707.908.036,00	746.879.554,00	707.908.036,00	746.879.554,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.324.554.330,32	104.523.718.776,08	96.991.199.537,08	21.857.073.569,32



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Bertambah	Berkurang	Saldo Per 31 Desember 2023
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.517.325,00	1.632.127.788,00	1.594.025.988,00	613.619.125,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.877.135.352,09	374.773.635,85	5.428.472.962,09	823.436.025,85
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.528.655.978,69	13.154.405.706,72	12.240.701.592,93	13.442.360.092,48
<b>Jumlah</b>		<b>34.013.771.022,10</b>	<b>120.431.905.460,65</b>	<b>116.962.308.116,10</b>	<b>37.483.368.366,65</b>

Rincian penambahan pengurangan Utang Belanja terdapat pada **Lampiran 32**.

<b>a. Utang Belanja Pegawai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp746.879.554,00</b>	<b>Rp707.908.036,00</b>

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp746.879.554,00 merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang berada pada Badan Keuangan Daerah. Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.971.518,00 atau lebih tinggi sebesar 5,51%.

<b>b. Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp21.857.073.569,32</b>	<b>Rp14.324.554.330,32</b>

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.857.073.569,32. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.532.519.239,00 atau lebih tinggi 52,58% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 159 Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang Belanja Barang	9.599.659.991,32	4.790.794.440,32	100,38
2	Utang Belanja Jasa	8.847.252.151,00	6.027.550.018,00	46,78
3	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.037.500,00	236.436.277,00	(51,77)
4	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.614.082,00	117.600.000,00	(22,10)
5	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.201.509.845,00	3.149.173.595,00	1,66
<b>Jumlah</b>		<b>21.857.073.569,32</b>	<b>14.324.554.330,32</b>	<b>52,58</b>

Rekapitulasi Utang Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 33**.



<b>c. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp613.619.125,00</b>	<b>Rp575.517.325,00</b>

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp613.619.125,00. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.101.800,00 atau lebih tinggi 6,62% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 160 Rekapitulasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	1.598.625,00	(100,00)
2	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	27.084.000,00	(100,00)
3	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.500.000,00	75.679.800,00	(75,55)
4	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga – Mebel	0,00	249.509.400,00	(100,00)
5	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	36.519.000,00	(100,00)
6	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	315.323.125,00	0,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	0,00	38.961.000,00	(100,00)
8	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	279.796.000,00	4.307.500,00	6395,55
9	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	141.858.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>613.619.125,00</b>	<b>575.517.325,00</b>	<b>6,62</b>

<b>d. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp823.436.025,85</b>	<b>Rp5.877.135.352,09</b>

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp823.436.025,85. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.053.699.326,24 atau lebih 85,99% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 161 Rekapitulasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	756.655.777,73	5.313.777.310,00	(85,76)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00	462.239.052,09	(99,35)
4	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00
5	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	57.305.848,12	94.644.590,00	(39,45)
<b>Jumlah</b>		<b>823.436.025,85</b>	<b>5.877.135.352,09</b>	<b>85,99</b>

**e. Utang Belanja Modal  
 Jalan, Jaringan dan  
 Irigasi**

2023	2022
<b>Rp13.442.360.092,48</b>	<b>Rp12.528.655.978,69</b>

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.442.360.092,48 mengalami kenaikan sebesar RpRp913.704.113,79 atau lebih tinggi 7,29% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 162 Rekapitulasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2023**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan	12.248.243.141,13	10.671.439.921,11	14,78
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air	565.235.136,35	837.070.534,10	(32,47)
3	Utang Belanja Modal Instalasi	628.595.151,00	387.787.195,52	62,10
4	Utang Belanja Modal Jaringan	286.664,00	632.358.327,96	(99,95)
<b>Jumlah</b>		<b>13.442.360.092,48</b>	<b>12.528.655.978,69</b>	<b>7,29</b>

Rincian Utang Belanja Modal dan Retensi pada masing-masing SKPD sebesar Rp14.879.415.243,33 dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

**7.5.3.6 Kewajiban Jangka Panjang**

2023	2022
<b>Rp2.765.857.032,68</b>	<b>Rp5.531.714.062,68</b>

Kewajiban Jangka Panjang atas Utang Pemerintah Pusat merupakan Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.765.857.032,68 adalah kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Parepare kepada pemerintah pusat berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor SLA-1205/DP3/2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Pinjaman luar negeri tersebut diadakan untuk pembangunan Pasar Sentral Lakessi. Penerusan pinjaman ini memiliki plafon pinjaman sebesar Rp41.200.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama 20 tahun dengan masa tenggang 5 Tahun sejak naskah perjanjian ditandatangani 10 Agustus 2006. Pemerintah Kota Parepare wajib membayar biaya komitmen sebesar 0,75% dari jumlah pinjaman yang belum ditarik dari waktu ke waktu. Bunga, biaya pinjaman komitmen, dan jasa bank serta denda dihitung berdasarkan hari sebenarnya, sebesar tingkat bunga pinjaman IBRD kepada Pemerintah Pusat



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

---

ditambah 5,02% per tahun sejak penarikan pinjaman, termasuk jasa bank sebesar 0,25% per tahun. Pembayaran utang pokok pinjaman, bunga dan biaya komitmen dilakukan pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahunnya.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>7.5.3.7 Ekuitas</b>	<b>Rp 2.278.319.720.413,00</b>	<b>Rp2.256.870.664.135,65</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Total saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.278.319.720.413,00.



#### 7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

##### Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 menyajikan akun Pendapatan-LO, Beban-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

<b>7.5.4.1 Pendapatan Daerah - LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp921.007.028.277,07</b>	<b>Rp912.610.940.617,70</b>

Saldo Pendapatan Daerah-LO Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp921.007.028.277,07 dan Rp912.610.940.617,70. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Saldo Surplus Non Operasional-LO Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

**Tabel 7.5.163 Rincian Pendapatan Daerah-LO**

*dalam rupiah*

No.	Pendapatan-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	206.289.738.035,14	157.538.611.762,89
2	Pendapatan Transfer-LO	699.420.305.454,25	718.008.031.679,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	15.296.984.787,68	35.550.273.913,81
4	Surplus Non Operasional-LO	0,00	1.514.023.262,00
<b>Jumlah</b>		<b>921.007.028.277,07</b>	<b>912.610.940.617,70</b>

<b>7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp206.289.738.035,14</b>	<b>Rp157.538.611.762,89</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2023 senilai Rp206.289.738.035,14. dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 164 Rincian Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LO**

*dalam rupiah*

No	Pendapatan-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	44.159.260.036,68	39.010.359.552,35	13,20
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	7.395.077.915,44	7.057.697.524,40	4,78
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.850.373.578,00	8.943.966.033,00	(1,05)
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	145.885.026.505,02	102.526.588.653,14	42,29
<b>Jumlah</b>		<b>206.289.738.035,14</b>	<b>157.538.611.762,89</b>	<b>30,95</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.751.126.272,25 atau lebih tinggi 30,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan hal-hal berikut :

- a. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 13,20% disebabkan oleh:
  - 1) Diadakan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait sosialisasi kepada masyarakat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak daerah;
  - 2) Melakukan digitalisasi dalam pembayaran Pajak Daerah;
  - 3) Melakukan uji petik pada masing-masing objek pajak; dan
  - 4) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap objek pajak
- b. Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan 4,78% dibabkan oleh:
  - 1) Peningkatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran;
  - 2) Melakukan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah;
  - 3) Meningkatnya pembangunan perumahan sehingga pengurusan retribusi persetujuan bangunan gedung mengalami kenaikan.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan 1,05% disebabkan karena dikarenakan pemerintah tidak melakukan penempatan deposito di Tahun Anggaran 2023.
- d. Lain-Lain PAD yang Sah-LO mengalami kenaikan 42,29% disebabkan oleh :
  - 1) Meningkatkan realisasi piutang BPJS Kesehatan;
  - 2) Adanya sewa lahan ATM;
  - 3) Adanya pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkutan; dan
  - 4) Meningkatnya pendapatan Jasa Giro dikarenakan transaksi pada rekening kas daerah lancar.

**7.5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah - LO**

2023	2022
<b>Rp44.159.260.036,68</b>	<b>Rp39.010.359.552,35</b>

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak Laporan Operasional disajikan





dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun Anggaran 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 senilai Rp44.159.260.036,68 yang merupakan akumulasi atas sepuluh jenis Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5.148.900.484,33 atau lebih tinggi 13,20%. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 165 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO***dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Pajak Hotel – LO	1.241.108.960,80	1.014.599.511,00	22,33
2	Pajak Restoran – LO	8.530.151.199,50	7.067.993.514,00	20,69
3	Pajak Hiburan – LO	1.173.753.758,00	924.539.219,00	26,96
4	Pajak Reklame – LO	1.861.162.753,83	1.428.605.123,67	30,28
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	14.113.223.384,00	13.114.982.206,00	7,61
6	Pajak Air Tanah – LO	156.512.654,00	152.973.223,00	2,31
7	Pajak Sarang Burung Walet – LO	43.848.900,00	69.270.400,00	(36,70)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	5.785.185.479,00	5.732.842.667,00	0,91
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.254.312.947,55	9.504.553.688,68	18,41
<b>Jumlah</b>		<b>44.159.260.036,68</b>	<b>39.010.359.552,35</b>	<b>13,20</b>

**Tabel 7.5. 166 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO***dalam rupiah*

No	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2023		Jumlah
			Lunas	Piutang	
1	Pajak Hotel – LO	15.251.700,00	1.184.230.845,00	56.878.115,80	1.241.108.960,80
2	Pajak Restoran – LO	324.025.372,00	7.829.366.394,00	700.784.805,50	8.530.151.199,50
3	Pajak Hiburan – LO	3.626.350,00	463.715.008,00	710.038.750,00	1.173.753.758,00
4	Pajak Reklame – LO	65.826.900,00	1.716.548.853,83	144.613.900,00	1.861.162.753,83
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	0,00	14.113.223.384,00	14.113.223.384,00
6	Pajak Air Tanah – LO	4.316.900,00	154.728.056,00	1.784.598,00	156.512.654,00
7	Pajak Sarang Burung Walet – LO	228.000,00	40.723.900,00	3.125.000,00	43.848.900,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	551.250.270,00	4.667.070.982,00	1.118.114.497,00	5.785.185.479,00
10	Bea Perolehan Hak Atas	0,00	11.254.312.947,55	0,00	11.254.312.947,55



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

	Tajah dan Bangunan (BPHTB) – LO				
S	<b>Jumlah</b>	<b>964.525.492,00</b>	<b>27.310.696.986,38</b>	<b>16.848.563.050,30</b>	<b>44.159.260.036,68</b>

rk

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Kota Parepare pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sepuluh jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketentuan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

<b>7.5.4.1.1.b Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Retribusi Daerah-LO</b>	<b>Rp7.395.077.915,44</b>	<b>Rp7.057.697.524,40</b>

Pendapatan Retribusi Daerah–LO Kota Parepare adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.395.077.915,44 merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Parepare. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit pengelola/penghasil retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun Anggaran 2023 mengalami Rp337.380.391,04 atau lebih tinggi 4,78%. Pendapatan retribusi diperoleh dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 167 Rincian Retribusi Daerah-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>4.026.767.983,44</b>	<b>4.415.322.278,80</b>	<b>(8,80)</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.373.441.800,00	1.414.812.962,24	(2,92)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	576.097.000,00	1.029.303.000,00	(44,03)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	770.558.000,00	831.035.400,00	(7,28)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	784.634.000,00	781.739.000,00	0,37
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	77.925.000,00	85.835.000,00	(9,22)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	31.135.000,00	15.105.000,00	106,12
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	36.400.000,00	36.800.000,00	(1,09)
8	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang – LO	75.856.800,00	75.017.600,00	1,12
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	300.720.383,44	145.674.316,56	106,43
<b>B</b>	<b>Jasa Usaha</b>	<b>1.324.568.600,00</b>	<b>1.086.351.249,60</b>	<b>21,93</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	832.338.100,00	581.378.250,00	43,17
2	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%
3	Retribusi Terminal – LO	4.810.000,00	10.853.000,00	(55,68)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	100.850.000,00	124.475.000,00	(18,98)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	108.366.000,00	107.304.000,00	0,99
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	208.204.500,00	192.340.999,60	8,25
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.043.741.332,00</b>	<b>1.556.023.996,00</b>	<b>31,34</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	1.556.023.996,00	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	2.043.741.332,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.395.077.915,44</b>	<b>7.057.697.524,40</b>	<b>4,78</b>

Uraian perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.5. 168 Perhitungan Retribusi Daerah-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Ketetapan 2023		Jumlah
				Lunas	Piutang	
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.238.316,67</b>	<b>61.188.050,00</b>	<b>4.018.936.650,11</b>	<b>7.831.333,33</b>	<b>4.026.767.983,44</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	0,00	1.373.441.800,00	0,00	1.373.441.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0,00	0,00	576.097.000,00	0,00	576.097.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	0,00	0,00	770.558.000,00	0,00	770.558.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	0,00	784.634.000,00	0,00	784.634.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00	77.925.000,00	0,00	77.925.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	0,00	0,00	31.135.000,00	0,00	31.135.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	0,00	0,00	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang – LO	0,00	0,00	75.856.800,00	0,00	75.856.800,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	10.238.316,67	61.188.050,00	292.889.050,11	7.831.333,33	300.720.383,44
<b>B</b>	<b>Jasa Usaha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.568.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.568.600,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	0,00	832.338.100,00	0,00	832.338.100,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
3	Retribusi Terminal – LO	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	0,00	0,00	100.850.000,00	0,00	100.850.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	0,00	108.366.000,00	0,00	108.366.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	0,00	0,00	208.204.500,00	0,00	208.204.500,00
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.741.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.741.332,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Ketetapan 2023		Jumlah
				Lunas	Piutang	
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0,00	0,00	2.043.741.332,00	0,00	2.043.741.332,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.238.316,67</b>	<b>61.188.050,00</b>	<b>7.387.246.582,11</b>	<b>7.831.333,33</b>	<b>7.395.077.915,44</b>

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Kota Parepare pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.5. 169 Rincian SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	SKPD Pengelola
<b>A Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Dinas Perdagangan
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	Dinas Perhubungan
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	Dinas Pemadam Kebakaran
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	Dinas Lingkungan Hidup
8	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang – LO	Dinas Perdagangan
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>B Jasa Usaha</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Keuangan Daerah
2	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
3	Retribusi Terminal – LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	Badan Keuangan Daerah
5	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
<b>C Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**7.5.4.1.1.c Pendapatan Hasil  
 Pengelolaan Kekayaan  
 Daerah yang Dipisahkan-  
 LO**

	2023	2022
	<b>Rp8.850.373.578,00</b>	<b>Rp8.943.966.033,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.850.373.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.592.455,00 atau lebih rendah 1,05%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pembagian deviden atas penyertaan Modal pada Bank Sulselbar berdasarkan Berita Acara RUPS Tahun Buku 2023 Nomor 03. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

**7.5.4.1.1.d Lain-lain PAD  
Yang Sah-LO**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp145.885.026.505,02</b>	<b>Rp102.526.588.653,14</b>

Lain-lain PAD yang Sah-LO Kota Parepare adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp145.885.026.505,02 mengalami kenaikan Rp43.358.437.851,88 atau lebih tinggi 42,29% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 170 Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	608.652.400,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	46.636.892,00	(100,00)
3	Jasa Giro – LO	1.479.758.595,00	1.270.111.780,84	16,51
4	Pendapatan Bunga – LO	60.794.198,70	638.139.372,58	(90,47)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	533.187.759,06	821.540.494,23	(35,10)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	7.175.000,00	11.145.200,00	(35,62)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.390.457.696,32	4.535.370.540,84	(69,34)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	244.636.475,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.520.360,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian – LO	3.820,00	0,00	0,00
11	Pendapatan BLUD – LO	132.561.365.761,74	87.545.471.755,95	51,42
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	8.630.307.615,00	7.046.732.739,00	22,47
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	367.166.824,20	611.439.877,70	(39,95)
<b>Jumlah</b>		<b>145.885.026.505,02</b>	<b>102.526.588.653,14</b>	<b>42,29</b>

**7.5.4.1.2 Pendapatan  
Transfer – LO**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp699.420.305.454,25</b>	<b>Rp718.008.031.679,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.420.305.454,25 mengalami penurunan sebesar Rp18.587.726.224,75 atau lebih rendah 2,59%. Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Transfer Antar Daerah-LO.

**Tabel 7.5. 171 Rincian Pendapatan Transfer-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	632.640.145.326,00	626.922.903.431,00	0,91
2	Transfer Antar Daerah – LO	66.780.160.128,25	91.085.128.248,00	(26,68)
	<b>Jumlah</b>	<b>699.420.305.454,25</b>	<b>718.008.031.679,00</b>	<b>2,59</b>

<b>7.5.4.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp632.640.145.326,00</b>	<b>Rp626.922.903.431,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp632.640.145.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.717.241.895,00 atau lebih tinggi 0,91%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kota Parepare merupakan Pendapatan atas Transfer Dana Perimbangan LO dan Dana Insentif Daerah –LO, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>7.5.4.1.2.a.1) Dana Perimbangan - LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp604.377.652.326,00</b>	<b>Rp606.209.286.431,00</b>

Dana Perimbangan – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar merupakan Rp604.377.652.326,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.831.634.105,00 atau lebih rendah 0,30%. Dana Perimbangan – LO merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Terdiri dari:

**Tabel 7.5. 172 Rincian Dana Perimbangan-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	445.268.434.128,00	428.796.588.152,00	3,84
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	144.020.057.038,00	147.694.736.921,00	(2,49)
3	Dana Bagi Hasil Pajak	12.708.302.160,00	29.717.961.358,00	(57,24)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	568.462.000,00	6.018.904.502,00	(90,56)
b	DBH PPh Pasal 21-LO	7.560.347.000,00	9.046.258.832,00	(16,43)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	1.007.535.661,00	(100,00)
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	265.225.160,00	207.263.464,00	27,97
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	0,00	156.017,00	(100,00)
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	212.760.000,00	808.540.793,00	(73,69)
g	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.817.705.000,00	10.401.460.687,00	(72,91)
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	13.802.000,00	57.777.191,00	(76,11)
i	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LO	1.270.001.000,00	2.170.064.211,00	(41,48)
<b>Jumlah</b>		<b>601.996.793.326,00</b>	<b>606.209.286.431,00</b>	<b>0,30</b>

<b>7.5.4.1.2.a.2) Dana Insentif Daerah- LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp28.262.493.000,00</b>	<b>Rp20.713.617.000,00</b>

Dana Insentif Daerah- LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.262.493.000,00 mengalami kenaikan sebesar RpRp7.548.876.000,00 atau lebih tinggi 36,44%. Dana Insentif Daerah tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

<b>7.5.4.1.2.b Transfer Antar Daerah - LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp66.780.160.128,25</b>	<b>Rp91.085.128.248,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya Kota Parepare merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.780.160.128,25 mengalami penurunan sebesar Rp62.822.635.248,00 atau lebih rendah 68,97% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 173 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah- LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
<b>A</b>	<b>Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>60.948.564.628,25</b>	<b>57.137.617.248,00</b>	<b>6,67</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.792.168.681,25	14.920.234.942,00	12,55
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.340.149.610,00	9.459.018.189,00	(1,26)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	21.587.980.110,00	19.167.658.388,00	12,63
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	89.654.724,00	78.063.152,00	14,85
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	13.138.611.503,00	13.512.642.577,00	(2,77)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
<b>B</b>	<b>Bantuan Keuangan – LO</b>	<b>5.831.595.500,00</b>	<b>33.947.511.000,00</b>	<b>(82,82)</b>
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO	0,00	28.830.000.000,00	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO	5.831.595.500,00	5.117.511.000,00	13,95
	<b>Jumlah</b>	<b>66.780.160.128,25</b>	<b>91.085.128.248,00</b>	<b>68,97</b>

<b>7.5.4.1.2.b.1) Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp60.948.564.628,25</b>	<b>Rp57.137.617.248,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.948.564.628,25 mengalami kenaikan sebesar Rp3.810.947.380,25 atau lebih tinggi 6,67%. Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO.

<b>7.5.4.1.2.b.2) Bantuan Keuangan -LO</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp5.831.595.500,00</b>	<b>Rp33.947.511.000,00</b>

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.831.595.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.115.915.500,00 atau lebih rendah 82,82%. Bantuan Keuangan -LO terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO.

<b>7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp15.296.984.787,68</b>	<b>Rp35.550.273.913,81</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.296.984.787,68. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.253.289.126,13 atau 56,97%.

<b>7.5.4.1.3.a Pendapatan Hibah -LO</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
	<b>Rp15.296.984.787,68</b>	<b>Rp35.550.273.913,81</b>

Pendapatan Hibah Kota Parepare merupakan Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.296.984.787,68 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 174 Rincian Pendapatan Hibah - LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	10.858.323.217,00	34.727.094.454,71	(68,73)
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	932.400,44	23.166.849,10	(95,98)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	4.437.729.170,24	800.012.610,00	454,71
<b>Jumlah</b>		<b>15.296.984.787,68</b>	<b>35.550.273.913,81</b>	<b>(56,97)</b>

- 1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.707.849.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 175 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO**

*dalam rupiah*

No	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No.HK.02.02/D.I/9124/2022 tentang Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam bentuk uang untuk prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada RS dr.Hasri Ainun Habibie, Vaksin imunisasi rutin dan vaksin penanggulangan COVID-19 pada Dinas Kesehatan	0,00	8.640.682.844,00
	Obat Program Hibah Provinsi	5.175.694.460,49	0,00
	Bahan Medis Habis Pakai Program Hibah Provinsi dan kemenkes	950.013.999,50	0,00
	Hibah alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2023, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1036/2023 Tanggal 22 Desember 2023 dan Berita Acara Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 Tanggal 15 Desember 2023	290.000.000,00	0,00
	Hibah Alat Kesehatan RS dr.Hasri Ainun pada Dinas Kesehatan	0,00	1.640.049.800,00
	Hibah berupa Throat Swab COVID-19 pada RS dr.Hasri Ainun	60.000.000,00	0,00
2	Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No.HK.02.02/D.I/9124/2022 tentang Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam bentuk uang untuk prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada RSUD Andi Makkasau	0,00	7.395.649.500,00
	Hibah berupa Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Andi Makkasau Parepare	2.723.740,00	213.346.829,60
	Hibah berupa Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (Program Pemerintah pada RSUD Andi Makkasau Parepare	655.919.011,01	1.120.636.081,40
3	Hibah Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.105.769.600,00
4	Hibah Bantuan Peralatan dan Mesin untuk operasional kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.782.333.400,00
5	Hibah Pelayanan Kependudukan berupa blangko KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198.815.816,00	235.486.622,00
6	Hibah berupa obat-obatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	446.531.175,00	398.237.918,00
7	Hibah Bantuan Peralatan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	17.858.500,00
8	Hibah dari Perpustakaan Nasional RI berupa peralatan dan mesin serta buku untuk peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social pada Dinas Perpustakaan	0,00	166.080.359,71



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
9	Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan	2.743.309.253,00	3.815.963.000,00
10	Hibah Sanitasi pada Badan Keuangan Daerah	0,00	195.000.000,00
11	Hibah berupa Komputer, Modem, Printer, Server, TV dan Rak Buku pada Kecamatan Soreang	86.078.200,00	0,00
12	Hibah Pada Bacukiki	98.764.170,00	0,00
13	Hibah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat berupa natura	150.473.392,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.858.323.217,00</b>	<b>34.727.094.454,71</b>

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

- 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp932.400,44 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 176 Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO**

*dalam rupiah*

No	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Hibah berupa obat-obatan pada RSUD Andi Makkasau	932.400,00	10.246.399,10
2	Hibah atas kekurangan bayar utang belanja modal dari pihak ketiga pada RSUD Andi Makkasau	0,00	7.000,00
3	Hibah berupa Pembangunan Jalan Koridor pada RS dr. Hasri Ainun Habibie oleh CVNirwih Persada	0,44	0,00
4	Hibah dari pihak ketiga berupa pengawasan belanja modal bangunan gedung kantor pada Badan Keuangan Daerah	0,00	385.000,00
5	Hibah dari pihak ketiga atas perencanaan pengawasan rehab posyandu, jalan setapak, poskeskel KB dan poskamling pada Kecamatan Bacukiki Barat	0,00	12.528.450,00
<b>Jumlah</b>		<b>932.400,44</b>	<b>23.166.849,10</b>

- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.437.729.170,24, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 177 Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO**

*dalam rupiah*

No	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penghapusan utang belanja modal Pengawasan Teknis Pembangunan Cerobong Asap, Nomor Kontrak 085/893/PPK_PENGAW CEROBONG/DINKES, Tanggal 19 Desember 2019, dengan penyedia CVNadya Arsytec	3.608.550,00	0,00
2	Hibah dari pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.900.094.177,32	789.547.610,00





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Beban Operasional-LO Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp768.516.047.835,55 merupakan akumulasi dari beban selama Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 179 Rincian Beban Operasional-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Pegawai	337.812.071.998,00	337.869.043.491,00
2	Beban Barang dan Jasa	410.773.793.616,81	349.046.434.296,92
3	Beban Bunga	883.080.479,91	607.467.100,44
4	Beban Hibah	18.105.980.834,00	27.469.489.435,36
5	Beban Bantuan Sosial	284.074.000,00	1.749.962.500,00
6	Beban Penyisihan Piutang	657.046.906,83	294.013.868,92
<b>Jumlah</b>		<b>768.516.047.835,55</b>	<b>717.036.410.692,64</b>

**7.5.4.2.1.a Beban Pegawai-LO**

<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Rp337.812.071.998,00</b>	<b>Rp337.869.043.491,00</b>

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp337.812.071.998,00 merupakan akumulasi beban pegawai di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 180 Rincian Beban Pegawai**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	241.181.879.266,00	246.827.975.565,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	33.418.273.293,00	30.110.175.921,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	52.151.279.244,00	50.091.439.700,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	10.265.040.195,00	9.714.913.840,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	0,00	364.938.465,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	795.600.000,00	759.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>337.812.071.998,00</b>	<b>337.869.043.491,00</b>

<b>1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp241.181.879.266,00</b>	<b>Rp246.827.975.565,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO .per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp241.181.879.266,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp246.827.975.565,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 181 Rincian Beban Pegawai**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Gaji Pokok ASN	180.421.121.861,00	185.907.158.106,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	14.569.570.724,00	15.794.248.085,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.331.147.736,00	5.423.817.029,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.201.708.767,00	13.534.415.040,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.223.262.319,00	2.906.765.038,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	9.531.976.329,00	9.894.269.991,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	959.712.831,00	1.024.028.313,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.496.127,00	10.919.827,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.458.665.022,00	11.032.039.383,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.482.217.550,00	1.300.314.753,00
<b>Jumlah</b>		<b>241.181.879.266,00</b>	<b>246.827.975.565,00</b>

<b>2) Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp33.418.273.293,00</b>	<b>Rp30.110.175.921,00</b>

Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp33.418.273.293,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp30.110.175.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 182 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.418.273.293,00	29.523.482.742,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	586.693.179,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.418.273.293,00</b>	<b>30.110.175.921,00</b>

<b>3) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp52.151.279.244,00</b>	<b>Rp50.091.439.700,00</b>

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Rp52.151.279.244,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp50.091.439.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 183 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.674.062.004,00	1.052.209.417,00
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	213.074.688,00	222.181.743,00
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	46.400.325.404,00	46.533.148.262,00
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	457.840.000,00	633.865.000,00
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.970.506.566,00	447.095.710,00
6	Beban Honorarium	1.387.647.702,00	1.109.643.088,00
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	47.822.880,00	93.296.480,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.151.279.244,00</b>	<b>50.091.439.700,00</b>

<b>4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp10.265.040.195,00</b>	<b>Rp9.714.913.840,00</b>

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp10.265.040.195,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp9.714.913.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 184 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Uang Representasi DPRD	558.390.000,00	38.010.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	46.683.000,00	3.303.300,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	58.877.460,00	58.805.040,00
4	Beban Uang Paket DPRD	47.817.000,00	47.292.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	809.665.500,00	802.053.000,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.325.750,00	86.599.800,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.129.000.000,00	3.108.000.000,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	777.000.000,00
9	Beban Pembulatan Gaji DPRD	16.285,00	16.300,00
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.204.730.000,00	2.221.560.000,00
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.546.535.200,00	2.565.974.400,00
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	6.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.265.040.195,00</b>	<b>9.714.913.840,00</b>





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp364.938.465,00</b>

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp364.938.465,00 yang terdiri dari Beban Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

<b>6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp795.600.000,00</b>	<b>Rp759.600.000,00</b>

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp795.600.000,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp759.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 185 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	159.600.000,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	594.000.000,00	600.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>795.600.000,00</b>	<b>759.600.000,00</b>

<b>7.5.4.2.1.b Beban Barang dan Jasa-LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp410.773.793.616,81</b>	<b>Rp349.046.434.296,92</b>

Beban Barang dan Jasa Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp410.773.793.616,81 merupakan akumulasi beban barang dan jasa di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 186 Rincian Beban Barang dan Jasa**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Barang-LO	131.005.389.424,36	100.373.805.440,23
2	Beban Jasa-LO	187.087.786.986,00	157.322.146.658,00
3	Beban Pemeliharaan-LO	14.718.588.899,45	16.237.344.705,69
4	Beban Perjalanan Dinas-LO	45.883.746.916,00	43.845.693.962,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	17.976.641.960,00	13.436.634.677,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	14.101.639.431,00	14.487.211.370,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	0,00	3.343.597.484,00
<b>Jumlah</b>		<b>410.773.793.616,81</b>	<b>349.046.434.296,92</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

1) <b>Beban Barang</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp131.005.389.424,36</b>	<b>Rp100.373.805.440,23</b>

Beban Barang Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp131.005.389.424,36, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 187 Rincian Beban Barang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Barang Pakai Habis-LO	130.786.560.810,37	100.373.805.440,23
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	218.828.613,99	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>131.005.389.424,36</b>	<b>100.373.805.440,23</b>

2) <b>Beban Jasa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp187.087.786.986,00</b>	<b>Rp157.322.146.658,00</b>

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp187.087.786.986,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 188 Rincian Beban Jasa**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Jasa Kantor – LO	152.782.711.163,00	129.668.752.192,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi – LO	20.605.915.460,00	17.086.735.125,00
3	Beban Sewa Tanah – LO	0,00	1.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin – LO	6.025.340.303,00	2.981.758.321,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO	2.706.848.722,00	2.076.842.959,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi – LO	149.344.950,00	611.276.575,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi – LO	210.000.000,00	284.960.550,00
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) – LO	888.571.500,00	989.037.699,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS – LO	30.000.000,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan – LO	3.689.054.888,00	3.621.783.237,00
<b>Jumlah</b>		<b>187.087.786.986,00</b>	<b>157.322.146.658,00</b>

3) <b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp14.718.588.899,45</b>	<b>Rp16.237.344.705,69</b>

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp14.718.588.899,45 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 189 Rincian Beban Pemeliharaan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Pemeliharaan Tanah – LO	136.292.123,00	179.906.850,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO	7.067.352.176,46	8.050.793.141,19
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO	4.265.391.553,00	5.928.103.109,50
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi – LO	3.249.553.046,99	2.078.541.605,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.718.588.899,45</b>	<b>16.237.344.705,69</b>

<b>a) Beban Pemeliharaan Tanah</b>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp136.292.123,00</b>	<b>Rp179.906.850,00</b>

Beban Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare merupakan Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO sebesar Rp136.292.123,00

<b>b) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp7.067.352.176,46</b>	<b>8.050.793.141,19</b>

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp7.067.352.176,46 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 190 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	81.350.000,00	74.932.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	1.000.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.600.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	49.804.800,00	22.020.500,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	34.947.850,00	12.000.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.781.150,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.084.222.749,00	1.037.324.039,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	887.832.500,00	947.380.250,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	317.705.050,00	323.188.350,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11.000.000,00	20.428.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.092.133.000,00	1.345.969.523,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	611.000,00	3.085.478,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	32.765.650,00	20.929.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.459.500,00	1.950.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	66.421.000,00	60.179.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.965.000,00	6.020.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	99.325.935,00	18.179.500,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	288.666.379,00	473.451.613,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	423.369.216,00	1.221.847.896,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	587.894.939,00	565.710.661,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.500.000,00	16.005.572,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	174.610.312,46	245.061.627,84
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	640.500,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	105.666.172,00	37.304.050,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	47.115.250,00	131.620.080,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	1.000.000,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	3.922.000,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	89.474.431,35
29	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	5.000.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	917.902.405,00	752.090.270,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	-	3.000.000,00
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	64.676.000,00	134.529.000,00
33	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	346.919.500,00	222.337.000,00
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	94.841.050,00	97.610.500,00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
35	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.500.000,00	22.369.000,00
36	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	119.590.000,00	76.024.500,00
37	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	39.400.000,00	18.440.000,00
38	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	16.775.769,00	39.768.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.067.352.176,46</b>	<b>8.050.793.141,19</b>

<b>c) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp4.265.391.553,00</b>	<b>Rp5.928.103.109,50</b>

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp4.265.391.553,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 191 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.466.202.000,00	2.597.165.669,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	4.569.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.286.204.742,00	2.598.899.374,50
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	147.923.759,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.843.073,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.000.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	15.290.000,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	116.765.000,00	96.500.419,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	183.154.238,00	159.731.888,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	145.653.500,00	312.592.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.265.391.553,00</b>	<b>5.928.103.109,50</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>d) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp3.249.553.046,99</b>	<b>Rp2.078.541.605,00</b>

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp3.249.553.046,99 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 192 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	409.030.000,00	859.607.000,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	10.246.299,99	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	90.960.000,00	146.500.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	47.831.800,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	197.088.000,00	145.983.800,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	199.827.285,00	201.839.205,00
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	153.418.532,00	50.452.000,00
8	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	95.000.000,00
9	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	9.347.200,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.179.635.730,00	531.327.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.249.553.046,99</b>	<b>2.078.541.605,00</b>

<b>4) Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp45.883.746.916,00</b>	<b>Rp43.845.693.962,00</b>

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare merupakan Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri-LO sebesar Rp45.883.746.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 193 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38.479.756.436,00	37.863.969.932,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.403.990.480,00	5.981.724.030,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.883.746.916,00</b>	<b>43.845.693.962,00</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**5) Beban Uang dan/atau  
Jasa Untuk  
Diberikan Kepada  
Pihak Ketiga/Pihak  
Lain/ Masyarakat**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp17.976.641.960,00</b>	<b>Rp13.436.634.677,00</b>

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp17.976.641.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 194 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO	4.245.480.500,00	2.124.360.000,00
2	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO	13.731.161.460,00	11.312.274.677,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.976.641.960,00</b>	<b>13.436.634.677,00</b>

**a) Beban  
Uang yang  
diberikan Kepada  
Pihak  
Ketiga/Pihak  
Lain/Masyarakat-  
LO**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<b>Rp4.245.480.500,00</b>	<b>Rp2.124.360.000,00</b>

Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp4.245.480.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 195 Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.245.180.500,00	1.307.810.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.083.300.000,00	105.600.000,00
3	Beban Beasiswa	57.000.000,00	345.950.000,00
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.860.000.000,00	360.000.000,00
5	Beban Santunan Kematian	0,00	5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.245.480.500,00</b>	<b>2.124.360.000,00</b>





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>b) Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp13.731.161.460,00</b>	<b>Rp11.312.274.677,00</b>

Beban Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp13.731.161.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 196 Beban Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.055.262.907,00	1.505.712.177,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.675.898.553,00	9.806.562.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.731.161.460,00</b>	<b>11.312.274.677,00</b>

<b>6) Beban Barang dan Jasa BOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp14.101.639.431,00</b>	<b>Rp14.487.211.370,00</b>

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp14.101.639.431,00 dan Pada Tahun 2022 sebesar Rp14.487.211.370,00.

<b>7) Beban Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp3.343.597.484,00</b>

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp0,00. Dikarenakan adanya reklas ke rekening masing-masing belanja sesuai dengan peruntukannya.

<b>7.5.4.2.1.c Beban Bunga-LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp883.080.479,91</b>	<b>Rp607.467.100,44</b>

Beban Bunga-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp883.080.479,91 merupakan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO dengan nomor dokumen pinjaman SLA-1205/DP3/2006.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

7.5.4.2.1.d Beban Hibah-LO	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp18.105.980.834,00</b>	<b>Rp27.469.489.435,36</b>

Beban Hibah-LO Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp18.105.980.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 197 Rincian Beban Hibah-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Hibah dalam Bentuk Uang	17.965.768.506,00	7.470.740.135,00
2	Beban Hibah dalam Bentuk Barang	140.212.328,00	19.998.749.300,36
<b>Jumlah</b>		<b>18.105.980.834,00</b>	<b>27.469.489.435,36</b>

Realisasi Beban Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp17.965.768.506,00 terdiri dari:

**Tabel 7.5. 198 Rincian Beban Hibah dalam Bentuk Uang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	9.636.600.000,00	0,00
2	Hibah Uang kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.506.890.000,00	54.390.000,00
3	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial kepada Masyarakat	905.000.000,00	5.045.000.000,00
4	Hibah Uang kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	1.492.219.231,00
5	Hibah Dana BOS	2.088.147.602,00	0,00
6	Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	879.130.904,00	879.130.904,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.965.768.506,00</b>	<b>7.470.740.135,00</b>

Rincian Beban Hibah dalam Bentuk Uang tersaji dalam **Lampiran 36**.

Nilai Beban Hibah dalam bentuk barang sebesar Rp140.212.328,00 merupakan Beban Hibah yang bersumber dari pos Belanja Barang dan Jasa-Barang yang akan Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain yaitu:

**Tabel 7.5. 199 Rincian Beban Hibah dalam Bentuk Barang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	0,00	3.627.446.774,45
2	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	0,00	16.371.302.525,91
3	Dinas Sosial	140.212.328,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>140.212.328,00</b>	<b>19.998.749.300,36</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.4.2.1.e</b>	<b>Beban Bantuan Sosial-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp284.074.000,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp1.749.962.500,00</b>
--------------------	--------------------------------	--	--

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp284.074.000,00 yang diperuntukan pada perlengkapan pemakaman (jenazah) seperti pembelian peti jenazah, batu nisan, kain kafan dll.

<b>7.5.4.2.1.f</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp657.046.906,83</b>	<b>2022</b> <b>Rp294.013.868,92</b>
--------------------	------------------------------------	--	--

Beban Penyisihan Piutang-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp657.046.906,83 merupakan beban atas penyisihan piutang yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 200 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah – LO	631.007.081,90	389.616.218,47
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah – LO	10.373.641,67	12.505.817,17
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.885.518,15	(80.838.223,88)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	780.665,11	(23.389.942,84)
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(3.880.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>657.046.906,83</b>	<b>294.013.868,92</b>

<b>1)</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2023</b> <b>Rp631.007.081,90</b>	<b>2022</b> <b>Rp389.616.218,47</b>
-----------	--	--	--

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada TA 2023 sebesar Rp631.007.081,90 merupakan beban atas penyisihan piutang pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 201 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	8.904.559,91	3.900.269,67
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	238.022.384,96	74.185.863,27
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	34.017.049,50	76.214.676,75
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	107.896.965,00	43.732.619,50
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	(492.306,19)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2.588.693,51	1.386.227,04



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	14.485,00	4.961.140,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.829.346,00	2.087.675,42
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	237.733.598,02	183.640.053,01
<b>Jumlah</b>		<b>631.007.081,90</b>	<b>389.616.218,47</b>

<b>2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u><b>Rp10.373.641,67</b></u>	<u><b>Rp12.505.817,17</b></u>

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada TA 2023 sebesar Rp10.373.641,67 merupakan beban atas penyisihan piutang retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 202 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	287.916,67	6.610.552,17
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	10.085.725,00	5.895.265,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.373.641,67</b>	<b>12.505.817,17</b>

<b>3) Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u><b>Rp14.885.518,15</b></u>	<u><b>(Rp80.838.223,88)</b></u>

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.885.518,15, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 203 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	(2.517,86)	3.025,67
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	14.888.036,01	(80.841.249,55)
<b>Jumlah</b>		<b>14.885.518,15</b>	<b>(80.838.223,88)</b>

<b>4) Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<u><b>Rp780.665,11</b></u>	<u><b>(Rp23.389.942,84)</b></u>

Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp780.665,11 dengan rincian sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.565.328.551,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 207 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Beban Penyusutan Alat Besar	863.472.572,38	1.142.733.276,58
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.635.494.543,58	5.788.013.218,04
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	89.711.530,57	125.965.237,48
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	33.414.441,67	34.978.911,66
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.972.284.780,79	7.829.209.936,06
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.160.209.791,31	1.164.245.392,35
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.501.146.963,49	40.528.867.519,84
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.348.952.310,63	2.175.620.096,92
9	Beban Penyusutan	756.250,00	1.512.500,00
10	Beban Penyusutan Komputer	6.137.315.802,38	5.791.947.666,83
11	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.450.000,00	2.450.000,00
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	61.624.480,67	104.986.445,32
13	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	13.442.590,67	13.343.258,59
14	Beban Penyusutan Rambu-rambu	284.445.973,77	371.810.267,80
15	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	250.726.186,12	246.175.174,72
<b>Jumlah</b>		<b>60.355.448.218,03</b>	<b>65.321.858.902,19</b>

<b>7.5.4.2.2.b Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp22.444.171.162,97</b>	<b>Rp21.718.982.655,47</b>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.444.171.162,97, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 208 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Bangunan Gedung	21.819.521.877,78	21.017.816.167,53
2	Monumen	116.308.940,31	163.291.631,99
3	Bangunan Menara	32.814.395,37	32.814.395,38
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	475.525.949,51	505.060.460,57
<b>Jumlah</b>		<b>22.444.171.162,97</b>	<b>21.718.982.655,47</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.4.2.2.c</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp52.214.105.813,87</b>	<b>2022</b> <b>Rp42.305.055.030,77</b>
--------------------	--	---	---

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.214.105.813,87, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 209 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Jalan dan Jembatan	44.080.507.373,55	34.519.457.414,50
2	Bangunan Air	7.271.003.392,19	6.970.096.366,87
3	Instalasi	739.630.435,85	732.227.052,96
4	Jaringan	122.964.612,28	83.274.196,44
<b>Jumlah</b>		<b>52.214.105.813,87</b>	<b>42.305.055.030,77</b>

<b>7.5.4.2.2.d</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp153.519.208,34</b>	<b>2022</b> <b>Rp143.933.791,66</b>
--------------------	---	--	--

Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp153.519.208,34 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

<b>7.5.4.2.2.e</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp219.082.109,99</b>	<b>2022</b> <b>Rp344.897.024,98</b>
--------------------	--	--	--

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.082.109,99. merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software.

<b>7.5.4.2.3</b>	<b>Beban Tak Terduga</b>	<b>2023</b> <b>Rp4.608.158.362,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp328.486.273,00</b>
------------------	--------------------------	--	--

Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.608.158.362,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp328.486.273,00. Beban Tak Terduga merupakan beban yang diperuntukkan untuk Bantuan kepada Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor, Bantuan Kepada Korban Bencana Angin Kencang dan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Tahun Anggaran 2023 .

<b>7.5.4.2.4</b>	<b>Defisit Non Operasional-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp5.260.688.869,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp805.383.333,33</b>
------------------	-----------------------------------	--	--





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.260.688.869,00 dan Rp805.383.333,33.

<b>7.5.4.2.4.a Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp132.556.000,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp0,00</b>
--	--	------------------------------

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit Penjualan Atas Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor penumpang pada Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp132.556.000,00.

<b>7.5.4.2.4.b Defisit dari kegiatan Non Operasional -LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp5.128.132.869,00</b>	<b>2022</b> <b>Rp805.383.333,33</b>
--	--	--

Defisit dari kegiatan Non Operasional -LO merupakan Defisit PAM Tirta Karajae sebesar Rp5.128.132.869,00.

<b>7.5.4.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>2023</b> <b>Rp7.235.806.697,32</b>	<b>2022</b> <b>Rp64.605.932.913,66</b>
-----------------------------------	--	---

Surplus (Defisit)-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.235.806.697,32 dan Rp64.605.932.913,66 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 210 Perhitungan Surplus (Defisit) - LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	206.289.738.035,14	157.538.611.762,89
2	Pendapatan Transfer-LO	699.420.305.454,25	718.008.031.679,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	15.296.984.787,68	35.550.273.913,81
4	Surplus Non Operasional-LO	0,00	1.514.023.262,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>921.007.028.277,07</b>	<b>912.610.940.617,70</b>
5	Beban Operasional-LO	768.516.047.835,55	717.036.410.692,64
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	135.386.326.513,20	129.834.727.405,07
7	Beban Tak Terduga	4.608.158.362,00	328.486.273,00
8	Defisit Non Operasional-LO	5.260.688.869,00	805.383.333,33
<b>Jumlah Beban</b>		<b>908.510.532.710,75</b>	<b>848.005.007.704,04</b>
9	<b>Surplus/(Defisit) - LO (Pendapatan - Beban)</b>	<b>7.235.806.697,32</b>	<b>64.605.932.913,66</b>

Terdapat selisih Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dapat dilihat pada **Lampiran 37**.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

### 7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

<b>7.5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp143.409.708.553,20</b>	<b>Rp201.195.956.474,05</b>

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Parepare dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp143.409.708.553,20 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan pengurangan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp895.508.549.347,20 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp752.098.840.794,00. Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp201.195.956.474,05 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp57.786.247.920,85 atau 28,72%.

<b>7.5.5.1.1 Arus Kas Masuk</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp895.508.549.347,20</b>	<b>Rp906.540.019.393,66</b>

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 211 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.384.557.470,55	38.817.569.022,58
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.347.758.332,00	7.149.830.207,84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.850.373.578,00	8.943.966.033,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137.547.459.121,40	118.847.071.795,24
5	Dana Perimbangan	604.491.880.739,00	603.714.199.018,00
6	Dana Insentif Fiskal	28.262.493.000,00	20.713.617.000,00
7	Pendapatan Bagi Hasil	63.627.820.106,25	61.815.605.817,00
8	Bantuan Keuangan	2.996.207.000,00	33.947.511.000,00
9	Pendapatan Hibah	0,00	12.590.649.500,00
10	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>895.508.549.347,20</b>	<b>906.540.019.393,66</b>

<b>7.5.5.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp42.384.557.470,55</b>	<b>Rp38.817.569.022,58</b>

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.384.557.470,55 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp38.817.569.022,58 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.566.988.447,97 atau 9,19%.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.5.1.1.b Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Rp7.347.758.332,00</b>	<b>Rp7.149.830.207,84</b>

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.347.758.332,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp7.149.830.207,84 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp197.928.124,16 atau 2,77%.

<b>7.5.5.1.1.c Pendapatan Hasil</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Pengelolaan Kekayaan</b>	<b>Rp8.850.373.578,00</b>	<b>Rp8.943.966.033,00</b>
<b>Daerah yang</b>		
<b>Dipisahkan</b>		

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp8.850.373.578,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp8.943.966.033,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp93.592.455,00 atau 1,05 %.

<b>7.5.5.1.1.d Lain-Lain</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan Asli</b>	<b>Rp137.547.459.121,40</b>	<b>Rp118.847.071.795,24</b>
<b>Daerah yang Sah</b>		

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.547.459.121,40 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp118.847.071.795,24 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp18.700.387.326,16 atau 15,73 %.

<b>7.5.5.1.1.e Dana</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Perimbangan</b>	<b>Rp604.491.880.739,00</b>	<b>Rp603.714.199.018,00</b>

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp604.491.880.739,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp603.714.199.018,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 777.681.721,00 atau 0,13 %.

<b>7.5.5.1.1.f Dana Insentif</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fiskal</b>	<b>Rp28.262.493.000,00</b>	<b>Rp20.713.617.000,00</b>

Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.262.493.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp20.713.617.000,00 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp 7.548.876.000,00 atau 36,44 %.

<b>7.5.5.1.1.g Pendapatan Bagi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Hasil</b>	<b>Rp63.627.820.106,25</b>	<b>Rp61.815.605.817,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.627.820.106,25 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp61.815.605.817,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 1.812.214.289,25 atau 2,93 %.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.5.1.1.h Bantuan Keuangan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.996.207.000,00</b>	<b>Rp33.947.511.000,00</b>

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.996.207.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp33.947.511.000,00 sehingga terdapat Penurunan sebesar Rp30.951.304.000,00 atau 91,17 %.

<b>7.5.5.1.1.i Pendapatan Hibah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp12.590.649.500,00</b>

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp12.590.649.500,00 sehingga terdapat Penurunan sebesar Rp12.590.649.500,00 atau 100,00%.

<b>7.5.5.1.2 Arus Kas Keluar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp752.098.840.794,00</b>	<b>Rp705.344.062.919,61</b>

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 212 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Belanja Pegawai	337.773.100.480,00	337.161.135.455,00
2	Belanja Barang dan Jasa	390.492.172.631,00	353.802.391.174,00
3	Belanja Bunga	909.456.815,00	765.454.390,61
4	Belanja Hibah	18.031.878.506,00	7.522.550.135,00
5	Belanja Bantuan Sosial	284.074.000,00	1.780.772.500,00
6	Belanja Tak Terduga	4.608.158.362,00	4.311.759.265,00
	<b>Jumlah</b>	<b>752.098.840.794,00</b>	<b>705.344.062.919,61</b>

<b>7.5.5.1.2.a Belanja Pegawai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp337.773.100.480,00</b>	<b>Rp337.161.135.455,00</b>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp337.773.100.480,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp337.161.135.455,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 611.965.025,00 atau 0,18 %.

<b>7.5.5.1.2.b Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp390.492.172.631,00</b>	<b>Rp353.802.391.174,00</b>

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp390.492.172.631,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp353.802.391.174,00 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp 36.689.781.457,00 atau 10,37 %.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.5.1.2.c Belanja Bunga</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp909.456.815,00</b>	<b>Rp765.454.390,61</b>

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp909.456.815,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp765.454.390,61 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp144.002.424,39 atau 18,81 %.

<b>7.5.5.1.2.d Belanja Hibah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp18.031.878.506,00</b>	<b>Rp7.522.550.135,00</b>

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.031.878.506,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp7.522.550.135,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp10.509.328.371,00 atau 139,70 %.

<b>7.5.5.1.2.e Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp284.074.000,00</b>	<b>Rp1.780.772.500,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp284.074.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp1.780.772.500,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.496.698.500,00 atau 84,05 %.

<b>7.5.5.1.2.f Belanja Tak Terduga</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp4.608.158.362,00</b>	<b>Rp4.311.759.265,00</b>

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.608.158.362,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp4.311.759.265,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 296.399.097,00 atau 6,87 %.

<b>7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp144.890.769.951,00)</b>	<b>(Rp199.082.473.360,05)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan perbandingan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Parepare di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp144.890.769.951,00) merupakan pengurangan dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp608.649.900,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp145.499.419.851,00. Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp199.082.473.360,05), sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp54.191.703.409,05 atau 27,22%. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat arus kas masuk sebesar Rp608.649.900,00, sedangkan Tahun



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Anggaran 2022 tidak terdapat arus kas masuk sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp608.649.900,00 atau 100,00%.

<b>7.5.5.2.1 Arus Kas Masuk</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp608.649.900,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.

<b>7.5.5.2.2 Arus Kas Keluar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp145.499.419.851,00</b>	<b>Rp199.082.473.360,05</b>

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 213 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Belanja Modal – Tanah	237.142.300,00	667.419.796,00
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	28.624.066.144,00	56.762.798.742,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	39.639.645.218,00	56.543.087.027,00
4	Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.898.362.333,00	85.004.417.795,05
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	3.100.203.856,00	104.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>145.499.419.851,00</b>	<b>199.082.473.360,05</b>

<b>7.5.5.2.2.a Belanja Modal - Tanah</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp237.142.300,00</b>	<b>Rp667.419.796,00</b>

Belanja Modal - Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp237.142.300,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp667.419.796,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp430.277.496,00 atau 64,47 %.

<b>7.5.5.2.2.b Belanja Modal - Peralatan dan Mesin</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp28.624.066.144,00</b>	<b>Rp56.762.798.742,00</b>

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.624.066.144,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp56.762.798.742,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp28.138.732.598,00 atau 49,57 %.

<b>7.5.5.2.2.c Belanja Modal – Gedung dan Bangunan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp39.639.645.218,00</b>	<b>Rp56.543.087.027,00</b>

Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.639.645.218,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp56.543.087.027,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp16.903.441.809,00 atau 29,89 %.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.5.2.2.d Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>Rp73.898.362.333,00</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp85.004.417.795,05</b>
--	---	---

Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.898.362.333,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp85.004.417.795,05 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp11.106.055.462,05 atau 13,07 %.

<b>7.5.5.2.2.e Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>Rp 3.100.203.856,00</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp104.750.000,00</b>
---	---	--

Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.100.203.856,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp104.750.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.995.453.856,00 atau 2.859,62%.

<b>7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>(Rp2.765.857.030,00)</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>(Rp2.765.857.030,37)</b>
--	--	--

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp2.765.857.030,00) yang merupakan pengurangan dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp2.765.857.030,00 Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp2.765.857.030,00), sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp0,37 atau 0,00%.

<b>7.5.5.3.1 Arus Kas Masuk</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>Rp0,00</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp0,00</b>
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

<b>7.5.5.3.2 Arus Kas Keluar</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>Rp2.765.857.030,00</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp2.765.857.030,37</b>
----------------------------------	--	--

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.765.857.030,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.765.857.030,37 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp0,37 atau 0,00%. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan adalah sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 214 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.765.857.030,00	2.765.857.030,37
2	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.765.857.030,00</b>	<b>2.765.857.030,37</b>

**7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp47.236.394,14)</b>	<b>Rp14.552.497,14</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran berupa potongan yang dipungut dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Parepare terdiri dari PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan dan Perhitungan Pihak Ketiga lainnya serta Iuran Wajib Pemda atas Askes yang pembayarannya dianggarkan pada Belanja Pegawai. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp47.236.394,14) yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp50.660.991.071,00 dikurangi Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp50.708.227.465,14. Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp14.552.497,14, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp61.788.891,28 atau 424,59%. Karena adanya pembayaran utang PFK sebesar Rp50.708.227.465,14 dan terdapat penambahan utang PFK Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.844.562,00. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 215 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

*dalam rupiah*

Uraian	TA 2023	TA 2022
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.660.991.071,00	30.620.008.755,14
Penerimaan Kembali UP dari Bendahara	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>50.660.991.071,00</b>	<b>30.620.008.755,14</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	50.708.227.465,14	30.605.456.258,00
Pemberian UP Kepada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>50.708.227.465,14</b>	<b>30.605.456.258,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(47.236.394,14)</b>	<b>14.552.497,14</b>

**7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp50.660.991.071,00</b>	<b>Rp30.620.008.755,14</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp50.660.991.071,00 yang merupakan hasil penerimaan atas potongan yang dipungut dari PNS berupa PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai dan Tabungan Perumahan serta pungutan pihak ketiga berupa PPh (Pasal 22 dan 23) dan PPN selama Tahun Anggaran 2023. Sedangkan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp50.708.227.465,14 merupakan pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran serta PFK 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (47.236.394,14).

<b>7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp50.708.227.465,14</b>	<b>Rp30.605.456.258,00</b>

Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.708.227.465,14 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp30.605.456.258,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp20.102.771.207,14 atau 65,68%.

<b>7.5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp4.294.154.821,94)</b>	<b>(Rp637.821.419,23)</b>

Kenaikan (penurunan) kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan. Pada Tahun Anggaran 2023 kenaikan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar (Rp4.294.154.821,94). Perhitungan kenaikan (penurunan) bersih kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 216 Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas**

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	143.409.708.553,20	201.195.956.474,05
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(144.890.769.951,00)	(199.082.473.360,05)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(2.765.857.030,00)	(2.765.857.030,37)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(47.236.394,14)	14.552.497,14
	<b>Kenaikan (Penurunan Kas)</b>	<b>(4.294.154.821,94)</b>	<b>(637.821.419,23)</b>

<b>7.5.5.6 Saldo Awal Kas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp17.196.059.004,53</b>	<b>Rp17.836.191.051,76</b>

Saldo Awal Kas TA 2023 merupakan penjumlahan dari Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya TA 2023 sebesar Rp17.196.059.004,53



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

sedangkan saldo awal kas TA 2022 sebesar Rp17.836.191.051,76 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp640.132.047,23 atau 3,59%. Rincian Saldo Awal Kas sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 217 Rincian Saldo Awal Kas**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Kas Daerah	966.132.412,93	156.296.358,93
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	57.615.259,00	361.753.541,00
4	Kas di BLUD	15.978.886.369,46	16.624.740.810,83
5	Kas di Bendahara FKTP	25.953.046,00	9.153.776,00
6	Kas di Bendahara BOS	91.617.492,00	641.407.478,00
7	Kas Lainnya	78.476.456,14	42.839.087,00
8	Beban dibayar dimuka rsud hasri ainun	20.773.469,00	0,00
9	Kurang bayar pajak pusat dan daerah Dana BOS	(28.386.790,14)	0,00
10	Kurang saji pencatatan atas potongan pajak dana BOS	4.991.290,14	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.196.059.004,53</b>	<b>17.836.191.051,76</b>

**7.5.5.7 Koreksi SiLPA  
Tahun Lalu**

**2023**  
**(Rp2.018.000,00)**

**2022**  
**Rp(Rp2.310.628,00)**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu merupakan Koreksi SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.018.000,00) merupakan Koreksi SILPA, kesalahan Transfer Bank Sulselbar yang masuk ke RKUD Parepare berupa Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 dan di kembalikan pada bulan Februari 2023 ke RKUD Provinsi Sulawesi Selatan.

**7.5.5.8 Saldo Akhir Kas**

**2023**  
**Rp12.899.886.182,59**

**2022**  
**Rp17.196.059.004,53**

Saldo Akhir Kas TA 2023 merupakan penjumlahan dari Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya dikurangi Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar (Rp2.018.000,00) ditambah Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.899.886.182,59, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp17.196.059.004,53, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.296.172.821,94 atau 24,98%. Rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

**Tabel 7.5. 218 Rincian Saldo Akhir Kas**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	(4.294.154.821,94)	(637.821.419,23)
2	Saldo Awal Kas	17.196.059.004,53	17.836.191.051,76
3	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(2.018.000,00)	(2.310.628,00)
4	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) – Terkait PFK	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>12.899.886.182,59</b>	<b>17.196.059.004,53</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

### 7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Parepare pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Parepare dan apabila terdapat kesalahan/perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 219 Laporan Perubahan Ekuitas**

*dalam rupiah*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>	<b>2.190.061.652.653,56</b>
2	<b>Surplus/(Defisit) LO</b>	<b>7.235.806.697,32</b>	<b>64.605.932.913,66</b>
3	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>	<b>14.213.249.580,03</b>	<b>2.203.078.568,43</b>
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(2.018.000,00)	(2.310.628,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(13.063.894,00)	(98.461.235,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	(257.021.639,00)	355.000,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	15.533.000.000,00	(0,60)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	11.270.591.469,43	2.282.769.703,83
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	(12.323.568.434,80)	0,00
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	0,00	20.725.728,20
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	5.330.078,40	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>2.278.319.720.413,00</b>	<b>2.256.870.664.135,65</b>

#### 7.5.6.1 Ekuitas Awal

	2023	2022
	<u>Rp2.256.870.664.135,65</u>	<u>Rp2.190.061.652.653,56</u>

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.256.870.664.135,65 dan Rp2.190.061.652.653,56.

#### 7.5.6.2 Surplus/(Defisit) LO

	2023	2022
	<u>Rp7.235.806.697,32</u>	<u>Rp64.605.932.913,66</u>

Surplus/Defisit - LO Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.235.806.697,32 merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.6.3 Dampak Kumulatif</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</b>	<b>Rp14.213.249.580,03</b>	<b>Rp2.203.078.568,43</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14.213.249.580,03 dan Rp2.203.078.568,43 dengan rincian sebagai berikut:

<b>7.5.6.3.1 Koreksi Nilai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>(Rp2.018.000,00)</b>	<b>(Rp2.310.628,00)</b>
<b>Kas</b>		

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.018.000,00) merupakan Koreksi SILPA, kesalahan Transfer Bank Sulselbar yang masuk ke RKUD Parepare berupa Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 dan di kembalikan pada bulan Februari 2023 ke RKUD Provinsi Sulawesi Selatan.

<b>7.5.6.3.2 Koreksi Nilai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>(Rp13.063.894,00)</b>	<b>(Rp98.461.235,00)</b>
<b>Piutang</b>		

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.063.894,00) merupakan Piutang Pendapatan BLUD berupa piutang BPJS Tahun 2022 pada RSUD Andi Makassar, piutang PBBP2 dan piutang pajak penerangan jalan pada Badan Keuangan Daerah.

<b>7.5.6.3.3 Koreksi Nilai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>(Rp257.021.639,00)</b>	<b>Rp355.000,00</b>
<b>Persediaan</b>		

**Tabel 7.5. 220 Rincian Koreksi Nilai Ekuitas Persediaan**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Keterangan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Bahan Lainnya	(2.304.789.769,87)
		Koreksi Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(20.997.604,00)
2	RS Hasri Ainun Habibie	Koreksi Bahan Bakar dan Pelumas	8.685.000,00
		Koreksi Bahan Lainnya	1.945.526.640,87
		Koreksi Alat Tulis Kantor	5.418.350,00
		Koreksi Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.089.894,00
		Koreksi Natura	46.045.850,00
<b>Jumlah</b>			<b>(Rp257.021.639,00)</b>



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

<b>7.5.6.3.4 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi</b>	<b>2023</b> <b>Rp15.533.000.000,00</b>	<b>2022</b> <b>(Rp0,60)</b>
---	---	--------------------------------

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.533.000.000,00 merupakan koreksi penyertaan modal Bank Sulselbar pada Badan Keuangan Daerah.

<b>7.5.6.3.5 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap</b>	<b>2023</b> <b>Rp11.270.591.469,43</b>	<b>2022</b> <b>Rp2.282.769.703,83</b>
--	---	--

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.270.591.469,43 merupakan koreksi tetap dan koreksi penyusutan pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 7.5. 221 Rincian Koreksi Aset Tetap**

*dalam rupiah*

No	SKPD	Penambahan	Pengurangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(589.650,00)	2.774.975,52
2	Dinas Kesehatan	0,00	(180.749.754.015,66)
3	RS dr. Hasri Ainun Habibie	180.554.978.906,04	0,00
4	RSUD Andi Makkasau	( 235.867.596,72)	12.489.192.926,77
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(727.628.545,22)	(13.176.857.528,45)
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	204.983.672,19	0,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	(13.319.713,75)	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	(179.167.195,83)	1.586.988,19
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(50.816.071,43)	34.271.875,00
10	Dinas Sosial	( 17.226.514,40)	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja	7.662.495.393,62	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	( 3.790.600,00)	(538.454.272,56)
13	Dinas Ketahanan Pangan	(70.399.043,87)	92.629.849,58
14	Dinas Lingkungan Hidup	762.557.104,13	(876.685.295,73)
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(14.473.134,71)	(2.537.700,00)
17	Dinas Perhubungan	1.701.786.049,57	0,00
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	67.217.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.498.778.360,71	(838.658.417,59)
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	(1.332.477,67)	174.876.773,72
21	Dinas Perpustakaan	(137.500,00 )	0,00
22	Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	(1.107.636,80)	60.519.140,76
23	Dinas Perdagangan	2.942.621.625,26	0,00





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Penambahan	Pengurangan
24	Sekretariat Daerah Kota	0,00	(6.675.223,14)
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
26	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	393.939,33
28	Badan Keuangan Daerah	838.658.417,59	0,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00
30	Kecamatan Bacukiki	(8.034.447,66)	(153.000.000,00)
31	Kecamatan Bacukiki Barat	(13.402.316,59)	0,00
32	Kecamatan Soreang	7.442.435,76	(148.400.000,00)
33	Kecamatan Ujung	1.140.933,47	0,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00

<b>7.5.6.3.6 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>(Rp12.323.568.434,80)</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp0,00</b>
--	---	------------------------------------

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.323.568.434,80) merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain (Usul Hapus) sebesar Rp12.483.911.827,66 dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Usul Hapus) ke Aset Tetap sebesar Rp160.343.392,86.

**Tabel 7.5. 222 Rincian Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Nilai
1	Akum. Penyusutan Alat Pertanian	825.000,00
2	Akum. Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	150.598.437,37
3	Akum. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	950.000,00
4	Akum. Penyusutan Alat Kedokteran	12.286.234.885,34
5	Akum. Penyusutan Komputer	45.303.504,95
<b>Jumlah</b>		<b>12.483.911.827,66</b>

<b>7.5.6.3.7 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban</b>	<b>2023</b> <hr/> <b>Rp0,00</b>	<b>2022</b> <hr/> <b>Rp20.725.728,20</b>
---	------------------------------------	---

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau Nihil.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022

---

<b>7.5.6.3.8 Koreksi Nilai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp5.330.078,40</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Penyisihan</b>		
<b>Piutang</b>		

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.330.078,40 merupakan koreksi penyisihan piutang PBBP2 pada Badan Keuangan Daerah.

<b>7.5.6.4 Ekuitas Akhir</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Rp2.278.319.720.413,00</b>	<b>Rp2.256.870.664.135,65</b>

Ekuitas Akhir pada Laporan Ekuitas Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.278.319.720.413,00 dan Rp2.256.870.664.135,65.



## **7.6 INFORMASI NON KEUANGAN**

### **7.6.1 Informasi Penting**

Pada Tahun Anggaran 2016 terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur tersebut mengakibatkan perubahan jumlah Laporan Keuangan entitas akuntansi pada TA 2016 dibandingkan jumlah Laporan Keuangan entitas pada Tahun Anggaran 2015 dari 31 SKPD menjadi 33 SKPD. Selain itu, terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Kota Parepare dalam Bidang Pendidikan, Bidang Kehutanan dan Bidang Perhubungan sebagai dampak penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengakibatkan mobilisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan dari Pemerintah Kota Parepare ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan pengalihan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Khusus, Bidang Kehutanan dan Bidang Perhubungan, dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan dasar hukum pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **7.6.2 Gambaran Umum Entitas**

Kota Parepare adalah sebuah daerah di Sulawesi Selatan yang posisinya tepat di pesisir Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sebagai kota pelabuhan, Parepare memiliki Pelabuhan Nusantara sebagai pelabuhan penumpang dan barang, terutama pengangkutan hasil bumi yang berasal dari daerah-daerah tetangga seperti Sidrap, Pinrang, Enrekang, Barru dan beberapa daerah tetangga lainnya yang hendak didistribusikan ke wilayah lain, baik di Sulawesi Selatan, Jawa, maupun Kalimantan.



Secara geografis Kota Parepare terletak antara  $3^{\circ} 57' 39''$  -  $4^{\circ} 04' 49''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 36' 24''$  -  $119^{\circ} 43' 40''$  Bujur Timur, di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Pinrang, di sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Sidrap, disebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Barru dan sebelah barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat  $99,33 \text{ km}^2$  dan secara administrasi pemerintahan Kota Parepare yang terdiri atas 4 kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan Bacukiki dengan luas wilayah  $66,70 \text{ km}^2$ , Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas wilayah  $13,00 \text{ km}^2$ , Kecamatan Ujung dengan luas wilayah  $11,30 \text{ km}^2$  dan Kecamatan Soreang dengan luas wilayah  $8,33 \text{ km}^2$  dan membawahi 22 kelurahan yang terdiri dari; Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang berada di wilayah kecamatan Bacukiki. Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappagalung, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Kampung Baru berada di wilayah kecamatan Bacukiki Barat. Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Lapadde berada di wilayah kecamatan Ujung. Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan berada di wilayah kecamatan Soreang.

Jumlah penduduk Kota Parepare mengalami peningkatan/penurunan dari tahun ketahun pada Tahun Anggaran 2023 jumlah penduduk Kota Parepare mencapai 160.309 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kecamatan Soreang sebanyak 48.673 jiwa, kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 47.733 jiwa, kemudian Kecamatan Ujung sebanyak 36.479 jiwa dan terendah adalah Kecamatan Bacukiki sebanyak 27.424 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk usia kerja di Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 117.578 orang. Angkatan kerja sebanyak 77.036 orang. Dari jumlah tersebut 72.522 orang diantaranya bekerja sedangkan sisanya yakni sebanyak 4.514 orang adalah pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan Angkatan kerja (Sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebanyak 40.542 orang. Dari segi lapangan usaha sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja disektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor jasa perseorangan dan kemasyarakatan. *(Berdasarkan data BPS Kota Parepare 2023)*

Dalam program pembangunan daerah kota Parepare sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Parepare tahun 2018-2023 ditegaskan bahwa Visi Kota Parepare adalah Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter sedangkan Misi Kota Parepare adalah Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri



jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan, Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Pada tahun 2018 Kota Parepare telah melakukan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung untuk periode tahun 2018 – 2023 per 31 Oktober dan pada saat ini, Pemerintah Kota Parepare saat ini dipimpin oleh:

Pj. Walikota : Dr. DRS AKBAR ALI, A.P.,M.Si  
Sekretaris Daerah : H. MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH

Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2023 sebanyak 3.425 orang sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2022 sebanyak 3.633 orang, sehingga terjadi penurunan jumlah pegawai sebanyak 208 orang, disebabkan adanya mutasi, meninggal dunia, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

Adapun rincian jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 7.6.1 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Parepare Per 31 Desember 2023**

Golongan	Eselon				Non-Eselon		Total
	I	II	III	IV	Fungsional	Staf	
Golongan IV	0	34	104	17	991	25	1171
Golongan III	0	0	37	244	1121	573	1975
Golongan II	0	0	0	0	58	211	269
Golongan I	0	0	0	0	0	10	10
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>141</b>	<b>261</b>	<b>2170</b>	<b>819</b>	<b>3425</b>

### 7.6.3 Pemeriksaan RSUD Andi Makkasau dan RS dr. Hasri Ainun Habibie oleh KAP

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Andi Makkasau mengungkapkan total aset sebesar Rp223.089.129.854,69, total pendapatan sebesar Rp150.120.192.107,00 dan total beban sebesar Rp172.412.009.829,74 pada tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP Asri dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00008/2.148/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024 dengan Opini Wajar.

Laporan Keuangan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengungkapkan total aset sebesar Rp183.738.958.357.67, total pendapatan sebesar Rp16.839.067.274,00 dan total beban sebesar Rp43.719.694.915,64. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik S. Kristiaji dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00001/2.1019/AU.5/11/1005-1/1/II/2024 dengan Opini Wajar.

Laporan Auditor Independen RSUD Andi Makkasau dan RS dr. Hasri Ainun Habibie dalam Lampiran 39 dan 40.

### 7.7 PENUTUP

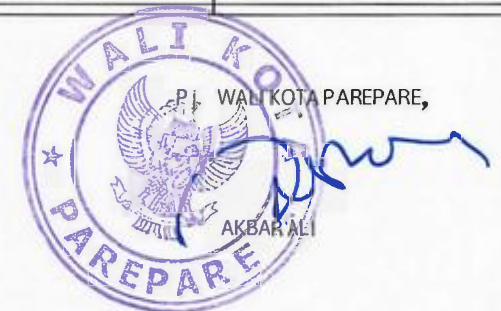
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.



Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Pajak Daerah	8.791.482.189,10	2.735.339.666,30	(973.333.982,00)	10.553.487.873,40
		Piutang Retribusi Daerah	70.683.500,00	10.761.000,00	(2.195.000,00)	79.249.500,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	605.134,58	101.561,28	(605.134,58)	101.561,28
		Piutang Transfer Antar Daerah	18.588.902.065,00	18.745.035.087,00	(18.588.902.065,00)	18.745.035.087,00
		Piutang Lainnya	1.639.816,00			1.639.816,00
2	RSU HASRI AINUN	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		4.730.102.246,00		4.730.102.246,00
3	RSUD. A. MAKKASAU	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.226.174.087,00	93.651.125.530,00	(90.696.010.280,00)	9.181.289.337,00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Piutang Retribusi Daerah	13.221.133,34	7.831.333,33	(10.238.316,67)	10.814.150,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>33.692.707.925,02</b>	<b>119.880.296.423,91</b>	<b>(110.271.284.778,25)</b>	<b>43.301.719.570,68</b>





Lampiran IX  
Nomor  
Tanggal

: Peraturan Daerah Kota Parepare  
: 1 TAHUN 2024  
: 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH TIDAK TERTAGIH**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5=3+4
1	Piutang Pajak Daerah	10.553.487.873,40	(5.757.612.367,35)	4.795.875.506,05
2	Piutang Retribusi Daerah	90.063.650,00	(85.970.873,34)	4.092.776,66
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.911.493.144,28	(46.019.414,26)	13.865.473.730,02
4	Piutang Transfer Antar Daerah	18.745.035.087,00	(93.725.175,44)	18.651.309.911,56
5	Piutang Lainnya	1.639.816,00	(1.639.816,00)	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.301.719.570,68</b>	<b>(5.984.967.646,39)</b>	<b>37.316.751.924,29</b>


Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
AKBAR ALI

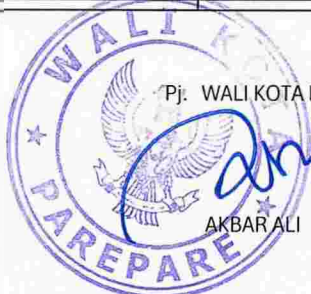


Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal :19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5= 3+4
1	DINAS TENAGA KERJA	864.656.280,00	(864.656.280,00)	-
2	SEKRETARIAT DAERAH KOTA (BAGIAN EKONOMI)	414.740.988,00	(414.740.988,00)	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.279.397.268,00</b>	<b>(1.279.397.268,00)</b>	-

Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
AKBAR ALI



Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belom Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2004	PT Pares Bandar Madani	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004, tanggal 22 April 2004	SAHAM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
2	1975	PAM Tirta Karajae Kota Parepare	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975, tanggal 23 Mei 1975 (di undangkan dalam Lembar Daerah Kota Parepare No. 1 tahun 1975 Seri C No. 1 Tanggal 13 Februari 1976)	PENYERTAAN MODAL	58.177.231.741,80	58.177.231.741,80	(5.128.132.869,00)	53.049.098.872,80	5.128.132.869,00			53.049.098.872,80
3	2005	Bank Sulselbar		SAHAM	33.397.000.000,00	33.397.000.000,00	15.533.000.000,00	48.930.000.000,00	(15.533.000.000,00)	8.850.373.578,00		48.930.000.000,00
				JUMLAH	93.074.231.741,80	93.074.231.741,80	10.404.867.131,00	103.479.098.872,80	(10.404.867.131,00)	8.850.373.578,00	-	103.479.098.872,80

  
 Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI

KOTA PAREPARE  
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASETTETAP DAERAH  
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDOAWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDOAKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	347.719.849.609,89	12.152.030.150,13	(2.393.609.999,02)	357.478.269.761,01
2	DINAS KESEHATAN	371.032.567.231,23	2.988.357.195,00	(203.970.025.749,00)	170.050.898.677,23
3	RSUD ANDI MAKKASAU	466.419.717.348,69	21.913.808.207,00	(13.970.696.597,31)	474.362.828.958,39
4	RS dr. HASRY AINUN HABIBIE		215.138.767.430,44	-	215.138.767.430,44
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.380.141.645.465,82	141.731.406.948,45	(95.777.884.904,12)	1.426.095.167.510,15
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	137.889.987.993,78	31.207.758.994,69	(14.910.807.995,31)	154.186.938.993,16
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.423.979.188,86	164.569.000,00	(703.869.000,00)	3.884.679.188,86
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8.220.757.493,57	-	(243.222.014,00)	7.977.535.479,57
9	BPBD	8.980.055.237,00	744.426.100,00	(156.000.000,00)	9.568.481.337,00
10	DINAS SOSIAL	6.053.455.939,00	-	(14.314.472,00)	6.039.141.467,00
11	DINAS TENAGA KERJA	15.437.684.667,82	8.544.859.878,00	(957.419.600,00)	23.025.124.945,82
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.899.890.111,08	31.000.000,00	(763.302.045,58)	10.167.588.065,51
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.080.000.349,02	696.876.000,00	(518.840.500,00)	3.258.035.849,02
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80.880.965.383,77	834.141.990,00	(1.723.789.061,00)	79.991.318.312,77
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.086.681.539,90	101.985.000,00	(12.000.000,00)	2.176.666.539,90
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	8.846.908.326,73	405.051.675,77	(172.959.000,00)	9.079.001.002,50
17	DINAS PERHUBUNGAN	13.155.057.528,90	5.854.579.419,40	(1.225.184.306,85)	17.784.452.641,44
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	7.586.354.464,00	186.966.000,00	(2.400.000,00)	7.770.920.464,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	21.316.237.647,15	1.769.796.100,00	(1.377.081.554,14)	21.708.952.193,01
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	91.445.440.292,20	3.041.566.042,24	(2.767.922.204,18)	91.719.084.130,26
21	DINAS PERPUSTAKAAN	9.731.692.762,13	10.996.826.584,00	(312.000.000,00)	20.416.519.346,13
22	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	59.680.981.669,23	2.168.057.627,46	(2.272.906.413,73)	59.576.132.882,96
23	DINAS PERDAGANGAN	210.493.521.704,66	6.103.678.133,00	(192.605.080,00)	216.404.594.757,66
24	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	89.622.488.984,32	1.737.536.091,16	(2.061.728.215,00)	89.298.296.860,49
25	SEKRETARIAT DPRD	25.082.759.374,57	713.295.350,00	(73.681.670,00)	25.722.373.054,57
26	INSPEKTORAT KOTA PAREPARE	2.113.139.305,41	17.000.000,00	(263.350.000,00)	1.866.789.305,41
27	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.427.218.742,09	849.000,00	(209.250.000,00)	3.218.817.742,09
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	88.257.494.020,21	7.854.958.973,72	(4.444.560.468,63)	91.667.872.525,30
29	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SDM	4.866.982.980,67	138.360.500,00	(409.000.000,00)	4.596.343.480,67
30	KECAMATAN BACUKIKI	8.513.050.691,62	332.764.170,00	(234.000.000,00)	8.611.814.861,62
31	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	9.118.660.493,41	159.447.851,00	(64.013.000,00)	9.214.115.344,41
32	KECAMATAN SOREANG	11.408.394.282,47	414.616.473,00	(148.400.000,00)	11.674.610.755,47
33	KECAMATAN UJUNG	10.602.548.191,83	45.082.164,00	(139.822.500,00)	10.507.807.855,83
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.589.687.362,03	-	(192.377.045,58)	2.397.310.316,45
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.431.816.595.189,67)	29.224.089.010,84	(150.460.207.619,25)	(1.553.052.713.798,08)
	JUMLAH	2.089.309.281.193,43	507.414.508.059,30	(503.139.251.014,70)	2.093.584.538.238,04





Lampiran XIII

: Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor

: 1 TAHUN 2024

Tanggal

: 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022	MUTASI		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	589.113.386.201,22	17.752.830.983,22	9.031.549.002,81	597.834.668.181,63
2	PERALATAN DAN MESIN	695.296.901.324,30	106.436.442.491,84	93.815.009.328,17	707.918.334.487,97
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.076.245.841.496,38	196.242.354.677,00	158.484.257.985,12	1.114.003.938.188,26
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.080.696.516.331,02	131.749.413.786,97	42.619.805.224,16	1.169.826.124.893,83
5	ASET TETAP LAINNYA	28.877.910.791,01	3.128.813.856,00	720.000,00	32.006.004.647,01
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	50.895.320.239,18	22.880.563.253,43	48.727.701.855,18	25.048.181.637,42
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.431.816.595.189,67)	29.224.089.010,84	150.460.207.619,25	(1.553.052.713.798,08)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.089.309.281.193,44</b>	<b>507.414.508.059,30</b>	<b>503.139.251.014,70</b>	<b>2.093.584.538.238,04</b>



Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

KOTA PAREPARE  
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN  
 PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI										REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH					BERKURANG						
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	551.452.900,00		91.988.968,12									(551.452.900,00)	91.988.968,12
2	DINAS KESBHATAN	114.633.400,00												114.633.400,00
3	RSUD ANDI MAKKASAU	-												-
4	RS dr. HASRY AINUN HABIBIE	-												-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG	45.133.526.355,83		50.910.000,00	13.441.880.986,57					(6.044.897.034,00)	(37.337.879.257,83)			15.243.541.050,57
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	3.154.308.981,27			8.600.972.034,00			53.956.751,00				(3.154.308.981,27)		8.654.928.785,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-												-
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-												-
9	BPBD	-												-
10	DINAS SOSIAL	-												-
11	DINAS TENAGA KERJA	459.861.900,00								(459.861.900,00)				-
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-												-
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	-												-
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	295.500.000,00												295.500.000,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-												-
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-												-
17	DINAS PERHUBUNGAN	-												-
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-												-
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-												-
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	1.147.341.622,09											(1.142.696.702,09)	4.644.920,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN	-												-
22	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	-		640.854.513,73										640.854.513,73
23	DINAS PERDAGANGAN	36.605.080,00								(36.605.080,00)				-
24	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	-												-
25	SEKRETARIAT DPRD	-												-
26	INSPEKTORAT KOTA PAREPARE	-												-
27	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	-												-
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	-												-
29	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SDM	-												-
30	KECAMATAN BACUKIKI	-												-
31	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	-												-
32	KECAMATAN SOREANG	2.090.000,00												2.090.000,00
33	KECAMATAN UJUNG	-												-
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PD LITIK	-												-
	JUMLAH	50.895.320.239,18	-	783.753.481,85	22.042.853.020,57	-		53.956.751,00	-	(6.541.364.024,00)	(40.492.188.239,10)		(1.694.149.602,09)	25.048.181.637,42

PI. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI



Lampiran XV  
Nomor  
Tanggal

: Peraturan Daerah Kota Parepare  
: 1 TAHUN 2024  
: 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDOAKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	4.126.448.150,14	850.455.916,00	-	4.976.904.066,14
2	DINAS KESEHATAN	10.738.024.347,81	118.675.575,00	-	10.856.699.922,81
3	RSUD ANDI MAKKASAU	28.743.178.570,70	13.333.926.590,84	264.095.000,00	41.813.010.161,54
4	RS dr. HASRY AINUN HABIBIE	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.392.755.698,56	5.934.031.334,00	-	15.326.787.032,56
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	45.443.526,78	-	-	45.443.526,78
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	211.620.773,00	703.869.000,00	-	915.489.773,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
9	BPBD	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL	99.845.900,00	14.314.472,00	-	114.160.372,00
11	DINAS TENAGA KERJA	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	125.226.500,00	-	-	125.226.500,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	237.450.000,00	-	-	237.450.000,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.125.239.948,44	169.400.000,00	-	1.294.639.948,44
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	109.900.000,00	12.000.000,00	-	121.900.000,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	371.687.542,81	156.000.000,00	-	527.687.542,81
17	DINAS PERHUBUNGAN	163.470.066,67	329.766.000,00	-	493.236.066,67
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	67.397.500,00	-	-	67.397.500,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	719.093.935,40	130.000.000,00	-	849.093.935,40
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	98.302.000,00	-	-	98.302.000,00



NO	SKPD	SALDOAWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
21	DINAS PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.914.764.949,01	1.011.245.000,00	-	2.926.009.949,01
23	DINAS PERDAGANGAN	48.870.000,00	-	-	48.870.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	23.853.170.298,32	1.084.390.600,00	-	24.937.560.898,32
25	SEKRETARIAT DPRD	356.417.000,00	9.900.000,00	-	366.317.000,00
26	INSPEKTORAT KOTA PAREPARE	142.245.000,00	3.000.000,00	-	145.245.000,00
27	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	131.154.379,73	12.000.000,00	-	143.154.379,73
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	15.867.326.038,61	13.061.749.800,90	13.557.625.478,54	15.371.450.360,98
29	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SDM	111.430.000,00	9.900.000,00	-	121.330.000,00
30	KECAMATAN BACUKIKI	462.664.832,49	-	-	462.664.832,49
31	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	-	38.638.000,00	-	38.638.000,00
32	KECAMATAN SOREANG	76.970.000,00	-	-	76.970.000,00
33	KECAMATAN UJUNG	18.997.450,00	139.822.500,00	-	158.819.950,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	125.648.712,50	-	-	125.648.712,50
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(48.775.393.008,23)	(16.297.705.292,99)	160.343.392,87	(65.233.441.694,09)
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.754.350.112,75</b>	<b>21.025.379.495,76</b>	<b>13.982.063.871,41</b>	<b>57.797.665.737,10</b>


  
 Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASARHUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDOAWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDOAKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

  
Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
AKBAR ALI

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	SALDOAWAL	MUTASI		SALDOAKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.080.956,14	7.844.562,00	(55.080.956,14)	7.844.562,00
2	Utang Bunga	285.431.835,85	259.055.500,76	(285.431.835,85)	259.055.500,76
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.765.857.030,74	2.765.857.030,00	(2.765.857.030,00)	2.765.857.030,74
4	Pendapatan Diterima Dimuka	737.171.556,88	596.527.102,17	(705.671.556,70)	628.027.102,35
5	Utang Belanja	34.013.771.022,10	120.431.905.460,65	(116.962.308.116,10)	37.483.368.366,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.857.312.401,71</b>	<b>124.061.189.655,58</b>	<b>(120.774.349.494,79)</b>	<b>41.144.152.562,50</b>

  
Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
AKBAR ALI

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

KOTA PAREPARE  
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  
PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDOAWAL	MUTASI		SALDOAKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Pinjaman Dalam Negeri (Perjanjian Pinjaman Nomor SLA-1205/DP3/2006 tanggal 10 Agustus 2006.)	5.531.714.062,68		(2.765.857.030,00)	2.765.857.032,68
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.531.714.062,68</b>	-	<b>(2.765.857.030,00)</b>	<b>2.765.857.032,68</b>

Pj. -WALI KOTA PAREPARE,  
  
AKBAR ALI



Lampiran XIX : Peraturan Daerah KotaParepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal :19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2023 DAN DIANGGARAKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN BERIKUTNYA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMASKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASARHUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	DINAS PENDIDIKAN						65.400.674,00	
		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA					7.467.500,00	
		Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Bacukiki Barat						
		Retensi	74.700.000,00	70.965.000,00	(3.735.000,00)	95,00	3.735.000,00	
		Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Bacukiki						
		Retensi	74.650.000,00	70.917.500,00	(3.732.500,00)	95,00	3.732.500,00	
		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (SD)					52.229.084,00	
		Pekerjaan Pagar SD Neg. 64						
		Retensi	32.500.000,00	30.875.000,00	(1.625.000,00)	95,00	1.625.000,00	
		Pekerjaan Pembangunan Pagar SD Negeri 56 Parepare					-	
		Retensi	49.970.000,00	47.471.500,00	(2.498.500,00)	95,00	2.498.500,00	
		Pekerjaan Pembangunan Pagar UPTD SD Negeri 58						
		Termyn 100%	91.521.419,00	45.760.710,00	(45.760.709,00)	50,00	45.760.709,00	
		Pengawasan Teknls	2.344.875,00	0,00	(2.344.875,00)	0,00	2.344.875,00	
		REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD					5.704.090,00	
		Perencanaan teknis	3.129.090,00	0,00	(3.129.090,00)	0,00	3.129.090,00	
		Pengawasan Teknls	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	0,00	2.575.000,00	



NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
2	RS HASRI AINUN HABIBIE						494.354.678,00	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit					454.365.162,00	
		Bahan cetak rekam medik	103.174.500,00	0,00	(103.174.500,00)	0,00	103.174.500,00	
		Pengadaan Kantongan	5.359.080,00	0,00	(5.359.080,00)	0,00	5.359.080,00	
		Pemeliharaan AC	21.367.500,00	0,00	(21.367.500,00)	0,00	21.367.500,00	
		Pemasangan Ralling dan Dinding PVC IGD	26.112.750,00	0,00	(26.112.750,00)	0,00	26.112.750,00	
		Pemasangan Dinding PVC	15.119.000,00	0,00	(15.119.000,00)	0,00	15.119.000,00	
		Pemeliharaan eskalator dan lift	50.382.332,00	0,00	(50.382.332,00)	0,00	50.382.332,00	
		Pengadaan Notebook/Laptop	44.765.000,00	0,00	(44.765.000,00)	0,00	44.765.000,00	
		Pengadaan PC Unit All In One	113.160.000,00	0,00	(113.160.000,00)	0,00	113.160.000,00	
		Tablet Samsusng Mobile	21.995.000,00	0,00	(21.995.000,00)	0,00	21.995.000,00	
		Printer dan Scanner	52.930.000,00	0,00	(52.930.000,00)	0,00	52.930.000,00	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					22.967.000,00	
		Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	22.967.000,00	0,00	(22.967.000,00)	0,00	22.967.000,00	
		Pengadaan Obat, Vaksin					17.022.516,00	
		Belanja Obat-Obatan	17.022.516,00	0,00	(17.022.516,00)	0,00	17.022.516,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM						11.233.403.520,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR					378.950.160,00	
		KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					304.950.160,00	
		SUB KEGIATAN :					-	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					140.678.660,00	
		- Pembangunan Talud Jalan Nusa Karya Lembah Harapan	84.208.000,00	41.993.500,00	(42.214.500,00)	49,87	41.993.500,00	
		- Pembangunan Talud Jalan Singa	187.946.000,00	178.098.400,00	(9.847.600,00)	94,76	9.373.600,00	
		- Pembangunan Talud, Pengerukan dan Duikker Akses Pekuburan RW. 03 Sumpang Minangae	333.564.000,00	268.719.740,00	(64.844.260,00)	80,56	58.987.260,00	
		- Pembangunan Talud Tiro Sompe	187.946.000,00	178.187.700,00	(9.758.300,00)	94,81	9.378.300,00	
		- Pengawasan Teknis	21.960.000,00	0,00	(21.960.000,00)	0,00	20.946.000,00	
		PEMBANGUNAN TALUD PERMUKIMAN TERSEBAR					77.969.500,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		- Pembangunan Talud Kelurahan Ujung Bulu	139.572.000,00	69.755.500,00	(69.816.500,00)	49,98	69.755.500,00	
		- Perencanaan Teknis	4.880.000,00	0,00	(4.880.000,00)	0,00	4.773.000,00	
		- Pengawasan Teknis	3.480.000,00	0,00	(3.480.000,00)	0,00	3.441.000,00	
		REHABILITASI SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA					86.302.000,00	
		- Perencanaan Teknis	86.850.000,00	0,00	(86.850.000,00)	0,00	86.302.000,00	
		- Dokumen Lingkungan	18.990.000,00	18.081.900,00	(908.100,00)	95,22	-	
		KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.000.000,00	
		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN					74.000.000,00	
		- Perencanaan Teknis Tahun 2024	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	0,00	74.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					221.094.760,00	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA					221.094.760,00	
		SUB KEGIATAN :						
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					58.528.150,00	
		- Pembangunan Drainase Jl. A. Abu Bakar RT.04 RW.05 Kota Parepare Bacukiki Barat Tiro Sompe	88.500.000,00	83.868.850,00	(4.631.150,00)	94,77	4.414.150,00	
		- Pembangunan Drainase Jl. Jend. Sudirman RT.01/RW.02	50.000.000,00	24.943.000,00	(25.057.000,00)	49,89	24.943.000,00	
		- Pembangunan Drainase Jl. Reformasi samping Perumahan Mutiara, Kota Parepare, Bacukiki Barat, Tiro Sompe	88.500.000,00	83.942.000,00	(4.558.000,00)	94,85	4.418.000,00	
		- Pengawasan Teknis	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	0,00	24.753.000,00	
		PEMBANGUNAN DRAINASE (UTANG 2022)					37.906.000,00	
		- Pengawasan Teknis	31.635.000,00	0,00	(31.635.000,00)	0,00	31.635.000,00	



NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		- Dokumen Lingkungan	6.271.000,00	0,00	(6.271.000,00)	0,00	6.271.000,00	
		PEMBANGUNAN KOLAM TUNGGU PASAR SENI (UTANG 2021)					9.856.000,00	
		- Pengawasan Teknis	9.856.000,00	0,00	(9.856.000,00)	0,00	9.856.000,00	
		PEMBANGUNAN PENGENDALI BANJIR LUMPUR (UTANG 2021)					2.837.160,00	
		- Pengawasan Teknis	2.837.160,00	0,00	(2.837.160,00)	0,00	2.837.160,00	
		PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN (UTANG 2022)					42.513.000,00	
		- Perencanaan Teknis	22.644.000,00	0,00	(22.644.000,00)	0,00	22.644.000,00	
		- Pengawasan Teknis	16.650.000,00	0,00	(16.650.000,00)	0,00	16.650.000,00	
		- Dokumen Lingkungan	3.219.000,00	0,00	(3.219.000,00)	0,00	3.219.000,00	
		REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN (UTANG 2022)					48.664.450,00	
		- Rehabilitasi Drainase Geddonge RT-2/RW-2	4.764.450,00	0,00	(4.764.450,00)	0,00	4.764.450,00	
		- Pengawasan Teknis	36.630.000,00	0,00	(36.630.000,00)	0,00	36.630.000,00	
		- Dokumen Lingkungan	7.270.000,00	0,00	(7.270.000,00)	0,00	7.270.000,00	
		REHABILITASI SALURAN DRAINASE (UTANG 2021)					20.790.000,00	
		- Pengawasan Teknis	20.790.000,00	0,00	(20.790.000,00)	0,00	20.790.000,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					69.652.000,00	
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					69.652.000,00	
		REHABILITASI MASJID AGUNG						
		- Rehabilitasi Masjid Agung						
		- Perencanaan Teknis	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0,00	69.652.000,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					9.945.600,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan					9.945.600,00	
		PEMBANGUNAN MESJID TERAPUNG						
		- Pembangunan Mesjid Terapung						
		- Perencanaan Teknis	50.000.000,00	39.782.400,00	(10.217.600,00)	79,56	9.945.600,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					10.553.761.000,00	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					10.553.761.000,00	
		SUB KEGIATAN :						

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Jalan					2.498.401.120,00	
		PEMBANGUNAN AKSES JALAN SWAKA ALAM LESTARI (DUA JALUR/JL.LINGKAR TENGAH)					-	
		- Pembangunan Akses Jalan Swaka Alam Lestari (Dua Jalur/Jl. Lingkar Tengah)	4.799.150.000,00	2.342.029.300,00	(2.457.120.700,00)	48,80	2.398.920.700,00	
		- Pengawasan Teknis	116.000.000,00	-	(116.000.000,00)	0,00	99.480.420,00	
		PEMBANGUNAN JALAN					621.004.355,00	
		- Pekerjaan Jalan Setapak dan Saluran Kelurahan Bukit Harapan, Kec. Soreang	135.064.000,00	66.918.500,00	(68.145.500,00)	49,55	66.918.500,00	
		- Pembangunan Akses SMAN 2 - Jl. Bau Massepe	136.003.000,00	6.759.195,00	(129.243.805,00)	4,97	128.424.705,00	
		- Pembangunan Jalan Akses Andi Dewang	187.595.000,00	173.517.500,00	(14.077.500,00)	92,50	9.132.500,00	
		- Pembangunan Jalan Akses Lapadde	187.591.000,00	172.712.850,00	(14.878.150,00)	92,07	9.090.150,00	
		- Pembangunan Jalan Akses Tegal - Masjid	454.906.000,00	127.200.000,00	(327.706.000,00)	27,96	296.800.000,00	
		- Pembangunan Jl. Swaka Alam Lestari Lorong RT 004 RW 005	32.828.000,00	16.164.000,00	(16.664.000,00)	49,24	16.164.000,00	
		- Pembangunan Jl. Syamsul Alam Bulu Lorong RT 001 RW 003	42.207.000,00	20.715.000,00	(21.492.000,00)	49,08	20.715.000,00	
		- Supervisi Teknis	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	0,00	73.759.500,00	
		PEMBANGUNAN JALAN TERSEBAR (UTANG/LANJUTAN 2022)					68.742.000,00	
		- Supervisi Teknis	68.742.000,00	0,00	(68.742.000,00)	0,00	68.742.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					39.282.900,00	
		PEMBANGUNAN TROTOAR						
		- Pembangunan Trotoar Jl. Bandar Madani					-	
		- Pembangunan Trotoar Jl. Khalid (sisi utara Taman Makam Pahlawan)					-	
		- Perencanaan Teknis	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	39.282.900,00	
		REHABILITASI TROTOAR					21.088.890,00	
		- Rehabilitasi Trotoar Jl. Karaeng Burane						
		- Perencanaan Teknis	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	0,00	21.088.890,00	
		REKONSTRUKSI JALAN (DAU)					2.132.695.500,00	
		- Perbaikan Jalan Syamsul Alam Bulu RT 01 RW 03	84.614.000,00	41.816.000,00	(42.798.000,00)	49,42	41.816.000,00	
		- Rekonstruksi Jalan Akses Bukit Madani	940.115.000,00	270.036.900,00	(670.078.100,00)	28,72	630.086.100,00	
		- Rekonstruksi Jl. Laupe depan Masjid Al Munawwir	1.088.879.000,00	0,00	(1.088.879.000,00)	0,00	1.072.488.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		- Rekonstruksi Jl. Akses Tassiso	507.661.000,00	407.424.600,00	(100.236.400,00)	80,26	69.095.400,00	
		- Rekonstruksi Jl. Handayani Barat	210.256.000,00	61.899.000,00	(148.357.000,00)	29,44	144.431.000,00	
		- Supervisi Teknis	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	174.779.000,00	
		REKONSTRUKSI JALAN (UTANG 2021)					3.710.000,00	
		- Supervisi Teknis Paket 2	3.710.000,00	0,00	(3.710.000,00)	0,00	3.710.000,00	
		REKONSTRUKSI JALAN (UTANG/LANJUTAN 2022)					81.030.000,00	
		- Supervisi Teknis	81.030.000,00	0,00	(81.030.000,00)	0,00	81.030.000,00	
		Rehabilitasi Jalan					149.406.000,00	
		- Survey Kondisi Jalan (DD1)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	99.678.000,00	
		- Survey Kondisi Jembatan (DD2)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	49.728.000,00	
		REHABILITASI JALAN					4.715.419.795,00	
		PAKET I						
		- Rehabilitasi Akses Jalan Jend. M. Yusuf	6.305.962.000,00	1.775.327.985,00	(4.530.634.015,00)	28,15	4.453.893.015,00	
		- Rehabilitasi Jalan Akses SMP 11					-	
		- Rehabilitasi Jalan Abdul Kadir					-	
		- Rehabilitasi Jalan Andi Sapada					-	
		- Rehabilitasi Jalan Bambu Runcing					-	
		- Rehabilitasi Jalan Bukit Madani					-	
		- Rehabilitasi Jalan Jati Putih					-	
		- Rehabilitasi Jalan Lawang					-	
		- Rehabilitasi Jalan Pancamarga					-	
		- Rehabilitasi Jl. Perumahan Sawerigading					-	
		- Rehabilitasi Jl. Pesanggerahan - Sumpang Minangae					-	
		- Rehabilitasi Jalan UMPAR					-	
		- Rehabilitasi Jalan Alun-alun Lapangan Andi Makkasau	417.513.000,00	392.099.200,00	(25.413.800,00)	93,91	20.636.800,00	
		- Supervisi Teknis	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	240.889.980,00	
		REHABILITASI JALAN (BANPROV)					95.769.690,00	
		- Rehabilitasi Jalan A. Akrab (BANPROV)					-	
		- Rehabilitasi Jalan Ambo Matti (Tegal) (BANPROV)					-	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		- Rehabilitasi Jalan Drs. H. M. Yoesoef Madjid (BANPROV)					-	
		- Rehabilitasi Jalan Latsitardanus (BANPROV)					-	
		- Rehabilitasi Jalan Persatuan (BANPROV)					-	
		- Rehabilitasi Jalan Tassiso I (BANPROV)					-	
		- Rehabilitasi Jalan Tentara Pelajar (BANPROV)					-	
		- Perencanaan Teknis	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	95.769.690,00	
		REHABILITASI JALAN (UTANG/LANJUTAN 2022)					29.748.000,00	
		Dokumen Lingkungan	29.748.000,00	0,00	(29.748.000,00)	0,00	29.748.000,00	
		Pembangunan Jembatan					97.462.750,00	
		PEMBANGUNAN JEMBATAN BILALANGNGE						
		- Pembangunan Jembatan Bilalangnge	187.229.000,00	93.550.000,00	(93.679.000,00)	49,97	93.550.000,00	
		- Supervisi Teknis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	3.912.750,00	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						4.386.187.158,50	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh					22.259.835,00	
		[#] Peningkatan Kawasan Permukiman (Betonisasi)						
		Kel. Lemoe	19.770.000,00	0,00	(19.770.000,00)	0,00	19.770.000,00	
		[#] Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase					-	
		Kel. Mallusetasi	2.489.835,00	0,00	(2.489.835,00)	0,00	2.489.835,00	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh					4.000.516.183,50	
		[#] PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN					200.230.483,50	
		Kelurahan Lompoe	200.000.000,00	189.238.736,41	(10.761.263,59)	94,62	9.959.933,50	
		Kelurahan Lumpue	150.000.000,00	74.679.600,00	(75.320.400,00)	49,79	74.679.600,00	
		Kelurahan Lapadde	185.656.168,00	92.436.350,00	(93.219.818,00)	49,79	92.436.350,00	
		Tenaga Pengawasan/ Supervisi	23.270.320,00	0,00	(23.270.320,00)	0,00	23.154.600,00	
		[#] PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN (BETONISASI)					3.003.097.800,00	
		Kecamatan Bacukiki						
		Kel. Galung Maloang	200.000.000,00	189.301.750,00	(10.698.250,00)	94,65	9.963.250,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Kel. Lompoe	614.240.000,00	181.770.000,00	(432.470.000,00)	29,59	424.130.000,00	
		Kecamatan Bacukiki Barat						
		Kel. Sumpang Minangae	153.582.225,00	76.450.000,00	(77.132.225,00)	49,78	76.450.000,00	
		Kel. Lumpue	450.000.000,00	133.200.000,00	(316.800.000,00)	29,60	310.800.000,00	
		Kel. Bumi Harapan	400.000.000,00	118.470.000,00	(281.530.000,00)	29,62	276.430.000,00	
		Kecamatan Soreang						
		Kel. Bukit Harapan	700.000.000,00	190.416.000,00	(509.584.000,00)	27,20	444.304.000,00	
		Kel. Bukit Indah	650.000.000,00	192.600.000,00	(457.400.000,00)	29,63	449.400.000,00	
		Kel. Wattang Soreang	300.000.000,00	87.720.000,00	(212.280.000,00)	29,24	204.680.000,00	
		Kecamatan Ujung						
		Kel. Ujung Bulu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	49.665.000,00	
		Kel. Labukkang	220.000.000,00	65.100.000,00	(154.900.000,00)	29,59	151.900.000,00	
		Kel. Lapadde	766.012.000,00	192.887.100,00	(573.124.900,00)	25,18	450.069.900,00	
		Tenaga Pengawasan/Supervisi						
		Tenaga Pengawasan/Supervisi Kec. Bacukiki dan Bacukiki Barat	93.438.825,00	0,00	(93.438.825,00)	0,00	93.129.000,00	
		Tenaga Pengawasan/Supervisi Kec. Ujung dan Soreang	62.292.550,00	0,00	(62.292.550,00)	0,00	62.176.650,00	
		[#] PEMBANGUNAN DAN KEMAMPUAN SALURAN DRAINASE					797.187.900,00	
		Kecamatan Bacukiki						
		Kel. Lompoe	130.000.000,00	64.448.500,00	(65.551.500,00)	49,58	64.448.500,00	
		Kel. Galung Maloang	130.000.000,00	64.358.000,00	(65.642.000,00)	49,51	64.358.000,00	
		Kecamatan Bacukiki Barat						
		Kel. Lumpue	149.000.000,00	0,00	(149.000.000,00)	0,00	147.700.000,00	
		Kecamatan Soreang						
		Kel. Bukit Indah	375.500.000,00	110.100.000,00	(265.400.000,00)	29,32	256.900.000,00	
		Kel. Bukit Harapan	154.000.000,00	76.284.000,00	(77.716.000,00)	49,54	76.284.000,00	
		Kecamatan Ujung						
		Kel. Ujung Bulu	150.000.000,00	74.350.000,00	(75.650.000,00)	49,57	74.350.000,00	
		Kel. Labukkang	100.000.000,00	49.500.000,00	(50.500.000,00)	49,50	49.500.000,00	
		Tenaga Pengawasan/Supervisi	63.803.900,00	0,00	(63.803.900,00)	0,00	63.647.400,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha					329.600.140,00	
		Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	8.209.325.773,00	2.316.202.110,00	(5.893.123.663,00)	28,21	257.355.790,00	
		Pengawasan Teknis Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	72.385.500,00	0,00	(72.385.500,00)	0,00	72.244.350,00	
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTORATAU BANGUNAN LAINNYA					33.811.000,00	
		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	23.823.000,00	0,00	(23.823.000,00)	0,00	23.811.000,00	
		Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	
5	DINAS TENAGA KERJA						317.748.600,00	
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan					317.748.600,00	
		Paket Pekerjaan : Bantuan Peralatan Sablon, Salon, dan tenda	98.923.200,00	0,00	(98.923.200,00)	0,00	98.923.200,00	
		Paket Pekerjaan : Bantuan Peralatan Usaha Etalase	192.407.400,00	0,00	(192.407.400,00)	0,00	192.407.400,00	
		Paket Pekerjaan : Bantuan Usaha Fotografer	26.418.000,00	0,00	(26.418.000,00)	0,00	26.418.000,00	
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						57.285.400,00	
		Sub Kegiatan : Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif					4.965.400,00	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Pengembangan / Revitalisasi Monumen Cinta	4.965.400,00	0,00	(4.965.400,00)	0,00	4.965.400,00	
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota					5.885.000,00	
		Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Jati Diri	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	0,00	3.465.000,00	
		Paket Pekerjaan : Perencanaan Lapangan Panjat Tebing	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	0,00	2.420.000,00	
		PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI					4.800.000,00	
		Pengawasan Revitalisasi Lapangan Lompoe	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	4.800.000,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.500.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pengadaan alat kantor lainnya	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	0,00	18.500.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					23.135.000,00	
		Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	23.135.000,00	0,00	(23.135.000,00)	0,00	23.135.000,00	
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						24.094.400,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.475.000,00	
		Pengawasan Rehab Gedung Kantor Paket 2 (Utang 2021)	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	2.475.000,00	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati					9.904.400,00	
		Pengawasan - Pembangunan Lanjutan Taman Mattirotasi (DID) (Utang 2021)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	4.965.400,00	
		Pengawasan Rehab Taman Kota (Utang 2021)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	4.939.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					11.715.000,00	
		Perencanaan Jaringan Pipa Gas (Utang 2021)	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	6.875.000,00	
		Pengawasan Jaringan Pipa Gas (Utang 2021)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	4.840.000,00	
8	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN						487.946.728,68	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASAKAN HASIL PERIKANAN					2.500.000,00	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					2.500.000,00	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.500.000,00	
		Paket Pekerjaan : Perbaikan Rumah Produksi Pengolahan Perikanan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					319.831.591,68	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					319.831.591,68	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					286.859.673,00	



NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Paket Pekerjaan : Tambahan Gedung Kantor Dinas PKP	396.000.000,00	117.117.117,00	(278.882.883,00)	29,58	273.273.273,00	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Tambahan Gedung Kantor Dinas PKP	13.860.000,00	0,00	(13.860.000,00)	0,00	13.586.400,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					32.971.918,68	
		Paket Pekerjaan : Lanjutan Bangunan Gedung Pertemuan	92.000.000,00	78.539.017,00	(13.460.983,00)	85,37	13.319.576,00	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Bangunan Gedung Pertemuan	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	0,00	3.163.500,00	
		Paket Pekerjaan : Tambahan Pelataran dan Taman Dinas PKP	124.772.000,00	112.362.102,00	(12.409.898,00)	90,05	12.138.842,68	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Tambahan Pelataran dan Taman Dinas PKP	4.375.000,00	0,00	(4.375.000,00)	0,00	4.350.000,00	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					165.615.137,00	
		Pembangunan Prasarana Pertanian					165.615.137,00	
		Pembangunan, Kenyamanan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					4.995.000,00	
		Caramele (Paket 2)	100.000.000,00	94.905.000,00	(5.095.000,00)	94,91	4.995.000,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					3.750.000,00	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembuatan Sumur Bor	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	3.750.000,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					3.915.000,00	
		Paket Pekerjaan : Rehab Gedung BPP Bacukiki Barat	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	500.000,00	
		Bacukiki Barat	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	250.000,00	
		Gerbang BPP Ujung dan Bacukiki Barat	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	1.250.000,00	
		Paket Pekerjaan : Rehab BPP Soreang	38.500.000,00	36.385.000,00	(2.115.000,00)	94,51	1.915.000,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					9.705.000,00	
		Paket Pekerjaan : Pembuatan Embung Calo-Calo Ambe	64.900.000,00	61.465.000,00	(3.435.000,00)	94,71	3.235.000,00	
		Paket Pekerjaan : Pembuatan Embung Bujung Limbang	64.900.000,00	61.465.000,00	(3.435.000,00)	94,71	3.235.000,00	

NO	NAMASKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASARHUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
		Paket Pekerjaan : Pembuatan Bujung Lemo-Calo Ambe	64.900.000,00	61.465.000,00	(3.435.000,00)	94,71	3.235.000,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					143.250.137,00	
		Paket Pekerjaan : Gudang Pakan	185.000.000,00	52.580.363,00	(132.419.637,00)	28,42	131.912.137,00	
		Paket Pekerjaan : Pengawasan Gudang Pakan	6.475.000,00	0,00	(6.475.000,00)	0,00	6.438.000,00	
		Paket Pekerjaan : Pengadaan Kandang	98.000.000,00	93.100.000,00	(4.900.000,00)	95,00	4.900.000,00	
9	SEKRETARIAT DPR						8.369.400,00	
		REHABILITASI LANTAI DAN TANGGA RUANG LANTAI 3					8.369.400,00	
		-Perencanaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	4.884.000,00	
		-Pengawasan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	3.485.400,00	
		<b>JUMLAH</b>					<b>17.074.790.559,18</b>	





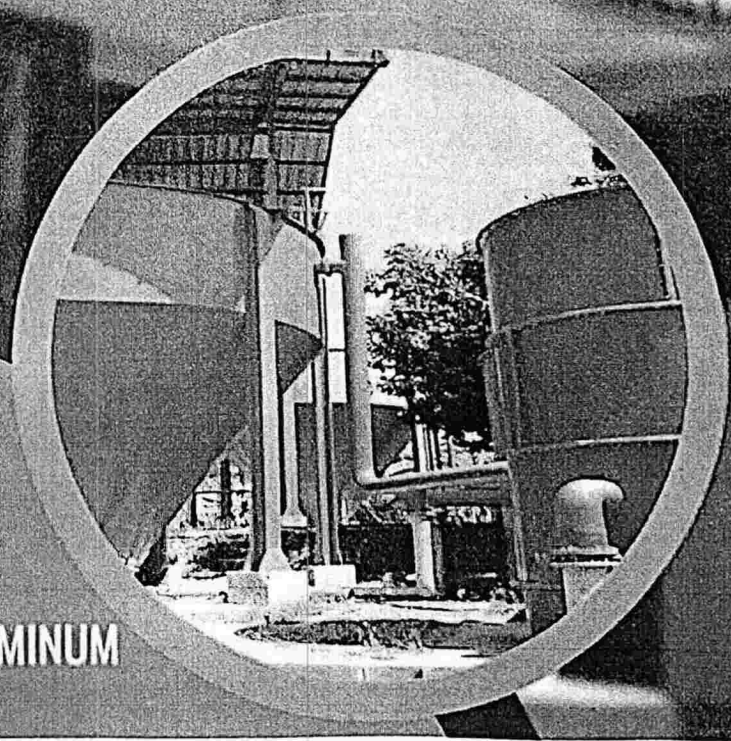
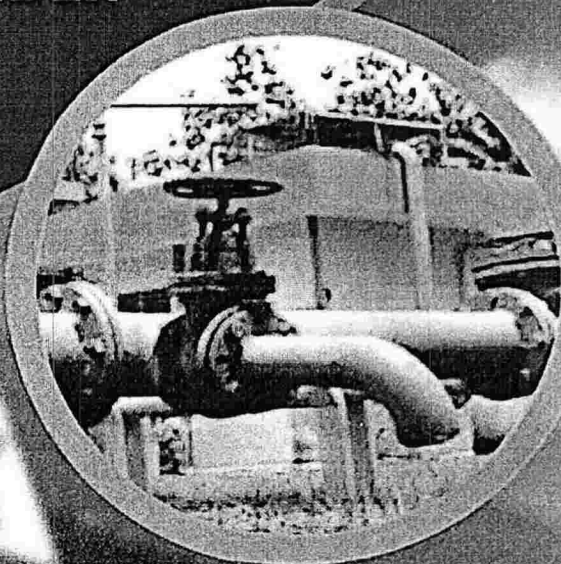
Lampiran XX : Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor : 1 TAHUN 2024

Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

# LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



PAM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE  
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal Tersebut**

---

**DAFTAR ISI**

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 18

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
PAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Nama   | : | Andi Firdaus Djollong, S.E., M.Si        |
| NPP   | : | 191.070.157                              |
| Alamat kantor   | : | Jl. Tirta Dharma No. 1 Parepare          |
| Alamat domisili sesuai KTP atau<br>Kartu identitas lain | : | Jl. Andi Sinta Selatan                   |
| Nomor Telepon   | : | 0811464567                               |
| Jabatan   | : | Direktur PAM Tirta Karajae Kota Parepare |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PAM Tirta Karajae Kota Parepare;
2. Laporan keuangan PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PAM Tirta Karajae Kota Parepare tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Parepare, 20 Februari 2024

Direktur,  
PAM Tirta Karajae Kota Parepare



Andi Firdaus Djollong, S.E., M.Si.  
NPP. 191.070.157



**Drs. CHAERONI & REKAN**

Registered Public Accountants  
Assurance, Tax & Advisory  
Licence No. 9/KM.1/2007

Nomor: 00023/2.0713/AU.2/11/0163-1/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hai Lain**

Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No:00191/2.1308/AU.2/11/1253-1/1/III/2023, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian pada tanggal 31 Maret 2023.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.





**Drs. CHAERONI & REKAN**

Registered Public Accountants  
Assurance, Tax & Advisory  
Licence No. 9/KM.1/2007

Nomor : 00023/2.0713/AU.2/11/0163-1/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

**BasisOpini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Lain**

Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No:00191/2.1308/AU.2/11/1253-1/1/III/2023, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian pada tanggal 31 Maret 2023.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang disarankan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP. DR. MOCH CHAERONI & REKAN



Drs. Moch Chaeroni, Ak, CA, CPA, BKP  
NRAP: AP. 0163

Jakarta, 20 Februari 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

KOTA PAREPARE

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	16.912.044.854	17.748.634.759
Piutang Usaha	4	6.652.163.164	5.894.300.930
Piutang Lain - Lain	5	354.436.123	211.218.613
Persediaan	6	2.083.275.436	1.660.912.465
Uang Muka	7	33.300.000	67.595.714
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>26.035.219.577</b>	<b>25.582.662.481</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap	8		
Nilai Perolehan		112.395.342.938	106.651.796.001
Akumulasi Penyusutan		(73.554.057.856)	(63.123.799.699)
Nilai Buku Aset Tetap		38.841.285.082	43.527.996.303
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>38.841.285.082</b>	<b>43.527.996.303</b>
Aset Lain	9		
Nilai Perolehan		23.325.956	23.325.956
Akumulasi Penyusutan		(23.325.956)	(23.325.956)
Nilai Buku Aset Lain		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>64.876.504.659</b>	<b>69.110.658.784</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Usaha	10	411.566.722	84.649.544
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	11	829.510.931	513.875.808
Utang Pajak	12	40.407.082	394.136.188
Utang Jangka Pendek Lainnya	13	2.004.050	9.559.500
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>1.283.488.785</b>	<b>1.002.221.041</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Kewajiban Imbalan Kerja	14	10.543.917.000	9.931.206.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>10.543.917.000</b>	<b>9.931.206.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Pemerintah Kota	15	75.748.396.222	31.002.013.039
Modal Yang Belum Ditentukan Statusnya		-	44.746.383.183
Saldo Defisit		(22.699.297.348)	(17.571.164.479)
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>53.049.098.873</b>	<b>58.177.231.743</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>64.876.504.659</b>	<b>69.110.658.784</b>

Parepare, 20 Februari 2024



Andi Firdaus Djollong, SE. M. Si  
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE  
LAPORAN LABA RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	16		
Penjualan Air		37.140.016.580	35.175.528.679
Pendapatan Non Air		2.906.340.130	3.315.103.898
Pendapatan Lain-lain		304.750.590	774.828.999
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<b>40.351.107.300</b>	<b>39.265.461.576</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	17		
Beban Pegawai		15.046.357.365	11.062.203.094
Beban Penyusutan dan Amortisasi		9.954.468.431	9.449.698.036
Beban Listrik		5.360.428.756	5.174.597.921
Beban Umum		5.323.245.569	2.247.428.146
Beban Pemeliharaan		1.686.700.295	1.290.267.480
Beban Bahan Kimia		1.633.200.144	2.169.563.663
Beban Penyisihan Piutang Air dan Non Air		1.620.072.757	1.328.122.900
Beban BBM		1.145.026.286	686.371.234
Beban Kantor		851.843.723	631.463.923
Beban Penelitian dan Pengembangan		87.732.354	99.122.000
Beban Operasi Lainnya		2.033.435.534	2.868.399.509
Beban Lain-lain		736.728.955	350.064.221
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>45.479.240.169</b>	<b>37.357.302.126</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK</b>		<b>(5.128.132.869)</b>	<b>1.908.159.450</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	18	-	<b>(394.136.188)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>(5.128.132.869)</b>	<b>1.514.023.262</b>

Parepare, 20 Februari 2024

  
**Andi Firdaus Djollong, SE. M. Si**  
 Direktur  
 PAM TIRTA KARAJAE  
 KOTA PAREPARE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021	31.002.013.039	44.746.383.183	(19.085.187.741)	56.663.208.481
Laba Tahun Berjalan	-	-	1.514.023.262	1.514.023.262
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>31.002.013.039</b>	<b>44.746.383.183</b>	<b>(17.571.164.479)</b>	<b>58.177.231.743</b>
Tambahan (Pengurangan) Modal Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya	44.746.383.183	(44.746.383.183)	-	-
Rugi Tahun Berjalan	-	-	(5.128.132.869)	(5.128.132.869)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>75.748.396.222</b>	<b>-</b>	<b>(22.699.297.348)</b>	<b>53.049.098.873</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE**  
**KOTA PAREPARE**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(5.128.132.869)	1.514.023.262
Penyesuaian Untuk :		
Beban Penyisihan Piutang	1.620.072.757	1.328.122.900
Beban Penyusutan Aset Tetap	9.954.468.432	9.449.698.036
Koreksi Penyusutan Aset Tetap	475.789.727	-
Beban Imbalan Kerja	612.711.000	(157.791.001)
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>7.534.909.046</u>	<u>12.134.053.197</u>
Perubahan Modal Kerja :		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(2.377.934.991)	(1.480.751.172)
(Kenakan) Penurunan Piutang Lain-lain	(143.217.510)	117.989.863
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(422.362.972)	(472.309.461)
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian	34.295.714	89.456.786
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	326.917.178	84.649.544
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	315.635.123	41.191.199
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(353.729.106)	380.482.449
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Pendek Lainnya	(7.555.450)	(2.158.435)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	<u>(2.627.952.011)</u>	<u>(1.241.449.227)</u>
<b>KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<u>4.906.957.035</u>	<u>10.892.603.970</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
(Kenaikan) Penurunan Perolehan Aset Tetap	<u>(5.743.546.941)</u>	<u>(5.826.446.561)</u>
<b>KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>	<u>(5.743.546.941)</u>	<u>(5.826.446.561)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan (Penurunan) Modal Disetor	-	-
<b>KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	(836.589.905)	5.066.157.409
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>17.748.634.759</u>	<u>12.682.477.350</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><b>16.912.044.854</b></u>	<u><b>17.748.634.759</b></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare didirikan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 1975, tanggal 23 Mei 1975. Tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum yang di sahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan No. 562/XI / 1975, tanggal 23 Juli 1975 yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 1975 seri C No. 1 tanggal 13 Februari 1976.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare didirikan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 1975, tanggal 23 Mei 1975. Tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum yang di sahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan No. 562/XI / 1975, tanggal 23 Juli 1975 yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 1975 seri C No. 1 tanggal 13 Februari 1976.

Kemudian pada tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare beralih status menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Karajae Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare.

**b. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (*Perumda*) Tirta Karajae Kota Parepare adalah :

- a. Untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum dalam memenuhi tanggungjawab guna menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap air minum dan akses air minum;
- b. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
- c. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare adalah :

- a. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan air bersih secara efisien dalam menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan; dan
- d. Memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (LANJUTAN)**

**c. Kegiatan Usaha**

Kegiatan Usaha PAM Tirta Karajae Kota Parepare adalah penjualan air yang bersumber dari Air Permukaan (Sungai Karajae) dan Air Bawah Tanah (Sumur Dalam). Kapasitas terpasang produksi air sebanyak 342 liter/detik yang berasal dari 13 (tiga belas) Sumur Dalam, 1 (satu) Sumur Dangkal dan 5 (lima) Instalasi pengolahan Air (IPA). Jumlah air yang diproduksi selama tahun 2023 sebanyak 7.321.635 M<sup>3</sup> sedangkan jumlah air yang di distribusikan sebanyak 7.254.529 M<sup>3</sup>. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.609.626 M<sup>3</sup> terjual kepada pelanggan, 4.752 M<sup>3</sup> merupakan air yang digunakan untuk bantuan kepada pelanggan yang tidak dapat air dan akibat bencana banjir, untuk Pemadam Kebakaran dan Pengurusan Pipa sebanyak 45.148 M<sup>3</sup> sedangkan jumlah air yang tidak terjual (kehilangan air/kebocoran) sebanyak 2.595.003 atau 35,77%.

Jumlah sambungan langganan yang terpasang sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 27.467 Sambungan pelanggan dan meliputi 4 kecamatan yang terdiri dari:

Jenis Pelanggan	Awal Tahun		Tutup	Penyambungan		Berubah Kelompok		Akhir Tahun	
	Aktif	Tidak		Kembali	Baru	Tambah	Kurang	Aktif	Tidak
Kelompok I	132	25	1	-	5	2	2	26	136
Kelompok II	16	8	-	-	2	1	-	8	19
Kelompok III A	342	1.015	2	1	-	-	1	1.016	340
Kelompok III B	17.059	1.494	56	29	924	17	6	1.521	17.967
Kelompok III C	4.885	179	10	3	30	8	10	186	4.906
Kelompok IV A	978	73	6	1	5	-	8	78	970
Kelompok IV B	127	10	-	-	-	-	1	10	126
Kelompok V Khusus	3	2	-	-	-	-	-	2	3
Jumlah	23.542	2.806	75	34	966	28	28	2.847	24.467
	26.348							27.314	

Jumlah pelanggan sambungan baru tahun 2023 bertambah sebanyak 1.000 sambungan, 34 sambungan diantaranya merupakan penyambungan kembali. Sedangkan sambungan yang ditutup selama tahun 2023 sebanyak 75 sambungan.

Pendapatan air yang bersumber dari penggunaan air oleh pelanggan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare No 3 tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare. Besarnya tarif air minum untuk masing-masing kelompok pelanggan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Penetapan Tarif / Blok Konsumsi (Rp)					
	0 - 10 m <sup>3</sup>		11 s/d 20 m <sup>3</sup>		> 20 m <sup>3</sup>	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
Kelompok I	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Kelompok II	1.100	1.650	1.100	1.650	1.100	1.650
Kelompok III a	2.300	3.500	2.800	4.000	3.900	4.500
Kelompok III b	3.900	5.500	4.700	6.500	6.600	8.000
Kelompok III c	4.700	7.000	5.200	7.500	6.600	8.500
Kelompok IV a	5.200	8.500	6.600	10.000	7.000	11.000
Kelompok IV b	6.600	12.000	7.000	14.000	7.500	15.000
Kelompok V	17.000	31.000	20.000	31.000	-	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (LANJUTAN)**

**d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur Organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Parepare No. : 23 Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare Nomor : 26/Per-PAM-TK/IV/2022 Tentang Susunan Organisasi Manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare tanggal 1 April 2022.

Badan Pengawas

- Pengawas : Suriani, SH

Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare, 1 (satu) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Parepare No. 888 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 periode 2020 – 2024.

Direksi

- Direktur : Andi Firdaus Djollong, SE, M.Si

Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare adalah 1 (satu) orang Direktur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Parepare No.1196 tahun 2019 tanggal 26 Nopember 2019 periode 2020– 2024.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare membawahi 4 (empat) Manager, yaitu :

- Manager Keuangan : Maprani, ST
- Manager Teknik dan Operasi : La Odi, ST., MT.
- Manager Hubungan Langgan : Rahman, SE.
- Manager Umum : Sukarno Banda

Karyawan

Jumlah personil Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare per 31 Desember 2023 sebanyak 140 orang dengan status sebagai berikut :

Jabatan / Bagian	2023		2022	
	Pegawai		Pegawai	
	Tetap	Tidak	Tetap	Tidak Tetap
Direktur	1 orang	-	1 orang	-
Bidang Teknik dan Operasi				
Manager Teknik dan Operasi	1 orang	-	1 orang	-
Produksi dan Pengolahan	13 orang	3 orang	14 orang	3 orang
Transmisi / Distribusi	14 orang	5 orang	15 orang	7 orang
Perencanaan dan Pengawasan Teknik	3 orang	1 orang	3 orang	-
Pemeliharaan & Perbaikan Meter	5 orang	-	6 orang	3 orang
Pemeliharaan Kualitas Air & Laboratorium	4 orang	-	4 orang	-
Jumlah Bidang Teknik dan Operasi	<b>40 orang</b>	<b>9 orang</b>	<b>43 orang</b>	<b>13 orang</b>
Bidang Hubungan Langgan				
Manager Hubungan Langgan	1 orang	-	1 orang	-
Pelayanan Langgan	3 orang	2 orang	2 orang	3 orang
Pembaca Meter	17 orang	4 orang	8 orang	7 orang

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (LANJUTAN)**

**d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lanjutan)**

Jabatan / Bagian	2023		2022	
	Pegawai		Pegawai	
	Tetap	Tidak	Tetap	Tidak Tetap
<b>Bidang Hubungan Langgan (Lanjutan)</b>				
Rekening	1 orang	-	1 orang	-
Pelayanan Mobil Tangki	3 orang	1 orang	1 orang	2 orang
Penggantian Meter	8 orang	-	7 orang	1 orang
<b>Jumlah Bidang Hubungan Langgan</b>	<b>33 orang</b>	<b>7 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>13 orang</b>
<b>Bidang Keuangan</b>				
Manager Keuangan	1 orang	-	1 orang	-
Pembukuan dan Akuntansi	3 orang	-	3 orang	-
Pengelolaan Kas	2 orang	-	2 orang	-
Penagihan	12 orang	4 orang	11 orang	4 orang
PDE & Pajak	1 orang	-	1 orang	-
Perenc. Keuangan & Asset	1 orang	1 orang	2 orang	-
<b>Jumlah Bidang Keuangan</b>	<b>20 orang</b>	<b>5 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>4 orang</b>
<b>Bidang Umum</b>				
Manager Umum	1 orang	-	1 orang	-
Adm & Pengemb. SDM.	8 orang	3 orang	3 orang	11 orang
Logistik & Peralatan	3 orang	-	3 orang	-
SDM dan Rumah Tangga	-	-	1 orang	-
Pembelian	1 orang	-	1 orang	1 orang
Humas dan Protokoler	1 orang	1 orang	1 orang	-
Workshop dan Pengembangan Usaha	1 orang	-	-	-
<b>Jumlah Bidang Umum</b>	<b>15 orang</b>	<b>4 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>12 orang</b>
<b>Fungsional</b>				
Satuan Pengawasan Internal	3 orang	1 orang	2 orang	1 orang
Sekretaris Dewan Pengawas	1 orang	-	1 orang	-
<b>Jumlah Bidang Keuangan dan Akuntansi</b>	<b>4 orang</b>	<b>1 orang</b>	<b>3 orang</b>	<b>1 orang</b>
<b>Jumlah Pegawai Tetap / Tidak Tetap</b>	<b>113 orang</b>	<b>26 orang</b>	<b>96 orang</b>	<b>43 orang</b>
<b>Total Jumlah Pegawai</b>	<b>139 orang</b>		<b>140 orang</b>	



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Sebagai sarana informasi manajemen PAM Tirta Karajae Kota Parepare, maka pencatatan, penggolongan dan penyajian informasi dalam Laporan Keuangan PAM Tirta Karajae Kota Parepare disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK-ETAP ) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**c. Piutang Usaha**

Piutang Usaha yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai wajar yang dapat direalisasikan. Estimasi kerugian piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan pengalaman dan data historis kolektabilitas piutang selama tiga tahun terakhir. Piutang air dikelompokkan sebagai berikut :

Kelompok I	:	(Sosial 1)
Kelompok II	:	(Sosial 2)
Kelompok III A	:	(Rumah Tangga 1 / RT 1)
Kelompok III B	:	(Rumah Tangga 2 / RT 2)
Kelompok III C	:	(Rumah Tangga 3 / RT 3)
Kelompok IV A	:	(Niaga / RT 4)
Kelompok IV B	:	(Industri / RT 5)
Kelompok V	:	(Khusus / Pelabuhan)

**d. Persediaan**

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- Barang Cetakan / ATK
- Bahan Instalasi / Kimia

Persediaan bahan dicatat berdasarkan harga perolehan dan dinilai dengan metode pertama masuk pertama keluar atau metode FIFO (*First In First Out*). Sedangkan persediaan lainnya menggunakan metode *Physical Inventory Methode* yaitu pembelian dan penerimaan barang dibukukan langsung sebagai biaya sesuai dengan harga perolehannya

Pada akhir tahun dilakukan opname fisik guna menetapkan saldo yang nyata dapat direalisasikan. Selanjutnya dilakukan koreksi kredit terhadap pos biaya yang sudah dibebankan sebelumnya dari pembelian / penerimaan barang pada awal tahun buku, nilai persediaan tersebut dibukukan kembali menjadi biaya.

Atas persediaan yang telah rusak atau tidak digunakan lagi perusahaan menghitung penurunan nilai persediaan dengan metode *market sales comparison approach*.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**e. Aset Tetap**

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan sampai aset tersebut siap untuk digunakan sedangkan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi yang digunakan adalah Garis Lurus (*Straight Line Methode*) sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1994 dan telah diperbaharui sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Kelompok Harta Berwujud		
a. Bukan Bangunan		
Kelompok I	4 tahun	25,00%
Kelompok II	8 tahun	12,50%
Kelompok III	16 tahun	6,25%
Kelompok IV	20 tahun	5,00%
b. Bangunan		
Permanen	20 tahun	5,00%
Tidak Permanen	10 tahun	10,00%
Kelompok Harta Tidak Berwujud		
Kelompok I	4 tahun	25,00%
Kelompok II	8 tahun	12,50%
Kelompok III	16 tahun	6,25%
Kelompok IV	20 tahun	5,00%

**f. Imbalan Pasca Kerja**

PDAM Kota Pare pare mulai mengakui Kewajiban Imbalan Pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja" pada tahun 2017. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya Imbalan Pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Metode pencatatan atas pendapatan penjualan air terdiri dari, administrasi rekening dan beban tetap serta diakui, dicatat dan dilaporkan setiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, sedangkan untuk transaksi penjualan air tunai, seperti melalui mobil tangki diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat penerimaan uang.

Pengakuan pendapatan sambungan baru atau pendapatan non air lainnya, diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan dengan ketentuan:

- Sambungan baru yang dibayar tunai, pendapatannya diakui pada saat pembayaran.
- Sambungan baru yang dibayar secara angsuran, pendapatannya diakui pada saat terjadi transaksi atau ditandatangani perjanjian sambungan baru. Jumlah angsuran sambungan baru sebagai piutang non air.
- Pendapatan non air lainnya seperti balik nama, ganti meter, buka kembali, dan denda diakui pada saat terjadi pembayaran.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Kas</b>		
Kas Tunai	59.149.850	67.911.359
Kas Kecil	7.773.800	5.287.000
<b>Jumlah Kas</b>	<b>66.923.650</b>	<b>73.198.359</b>
<b>Bank</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.630.131.591	7.144.826.558
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.823.033.214	5.122.088.800
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	795.732.697	1.120.775.236
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	794.021.651	677.581.132
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	652.202.050	1.460.164.673
<b>Jumlah Bank</b>	<b>14.695.121.204</b>	<b>15.525.436.400</b>
<b>Deposito</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	440.000.000	440.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	110.000.000	110.000.000
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>2.150.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>16.912.044.854</b>	<b>17.748.634.759</b>

**4. PIUTANG USAHA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Piutang Rekening Air</b>	<b>19.138.838.909</b>	<b>16.766.063.040</b>
<b>Piutang Rekening Non Air</b>	<b>27.761.635</b>	<b>22.602.512</b>
	19.166.600.543	16.788.665.552
<b>Penyisihan Rekening Air</b>	<b>(12.514.437.379)</b>	<b>(10.894.364.622)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6.652.163.164</b>	<b>5.894.300.930</b>

**5. PIUTANG LAIN-LAIN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Pinjaman Pegawai</b>	<b>354.436.123</b>	<b>211.218.613</b>
<b>Jumlah</b>	<b>354.436.123</b>	<b>211.218.613</b>

**6. PERSEDIAAN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Bahan Instalasi / Kimia</b>	<b>2.083.096.686</b>	<b>1.660.403.715</b>
<b>Persediaan ATK / Cetak</b>	<b>178.750</b>	<b>508.750</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.083.275.436</b>	<b>1.660.912.465</b>

**7. UANG MUKA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Uang Muka Pembelian</b>	<b>33.300.000</b>	<b>67.595.714</b>
<b>Jumlah</b>	<b>33.300.000</b>	<b>67.595.714</b>







**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. ASET LAIN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Harga Perolehan	23.325.956	23.325.956
Akumulasi Penyusutan	(23.325.956)	(23.325.956)
Nilai Buku	-	-

**10. UTANG USAHA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
CV Pasifik Intan Jaya	191.625.680	-
CV Rezki Tirta Bangunindo	74.925.000	-
Toko Mega Baru	58.314.067	-
Toko Mandiri Teknik	41.422.800	-
PT DES Teknologi Informasi	29.020.450	-
PT Rajawali Jaya Sakti	16.258.725	-
PT Varsindo Kimia Abadi	-	54.750.000
Beban lembur, Bimtek dll	-	29.899.544
Jumlah	411.566.722	84.649.544

**11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Gaji karyawan	829.510.931	513.875.808
Jumlah	829.510.931	513.875.808

**12. Utang Pajak**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Utang PPh Pasal 21	37.907.082	-
Utang PPh Pasal 25	2.500.000	-
Utang PPh Pasal 29	-	394.136.188
Jumlah	40.407.082	394.136.188

**13. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lebih Setoran	2.004.050	9.559.500
Jumlah	2.004.050	9.559.500

**14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Perusahaan memberi imbalan kerja bagi Karyawan dan Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban Imbalan Kerja dan Beban Tahun Berjalan dihitung oleh aktuaris independen sesuai dengan laporan No. 171/RAZ-PTKP/II/2024 tanggal 19 Februari 2024. Rincian Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
a. Manfaat pensiun melalui Dapenmapamsi		
Biaya jasa kini	1.508.992.000	1.128.015.000
Bunga neto	521.630.000	563.287.000
Iuran Karyawan	(232.886.000)	(214.086.000)
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	1.797.736.000	1.477.216.000

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (LANJUTAN)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
b. Manfaat Pesangon dan Uang Duka bagi pegawai PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan Uang Jasa Pengabdian bagi Direktur		
Biaya jasa kini	101.756.000	86.584.000
Bunga neto	86.636.000	124.312.000
Iuran Karyawan	-	-
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	<u>188.392.000</u>	<u>210.896.000</u>
Pengukuran Kembali Kewajiban/(Aset) yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a. Manfaat pensiun melalui Dapenmapamsi		
(Keuntungan)/ Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi keuangan	1.015.817.000	937.665.000
(Keuntungan)/ Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi demografik	-	-
Penyesuaian pengalaman atas kewajiban	(222.330.000)	(1.032.833.000)
Imbal hasil atas aset program, yang tidak termasuk dalam bunga neto	(73.144.000)	73.060.000
Total diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>720.343.000</u>	<u>(22.108.000)</u>
b. Manfaat Pesangon dan Uang Duka bagi pegawai PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan Uang Jasa Pengabdian bagi Direktur		
(Keuntungan)/ Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi keuangan	223.387.000	15.652.000
(Keuntungan)/ Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi demografik	-	-
Penyesuaian pengalaman atas kewajiban	532.641.000	(211.524.000)
Dampak atas implementasi IFRID AD	-	(68.036.000)
Total diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>756.028.000</u>	<u>(263.908.000)</u>
Perubahan Kewajiban/(Aset) yang diakui dalam Neraca:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a. Manfaat pensiun melalui Dapenmapamsi		
Kewajiban/(Aset) pada awal periode	8.430.404.000	8.259.793.000
Beban/(Pendapatan)	1.797.736.000	1.477.216.000
Total diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	720.343.000	(22.108.000)
Iuran Perusahaan	(2.238.134.000)	(1.284.497.000)
Kewajiban/(Aset) pada akhir periode	<u>8.710.349.000</u>	<u>8.430.404.000</u>
b. Manfaat Pesangon dan Uang Duka bagi pegawai PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan Uang Jasa Pengabdian bagi Direktur		
Kewajiban/(Aset) pada awal periode	1.500.802.000	1.829.205.000
Beban/(Pendapatan)	188.392.000	210.896.000
Total diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	756.028.000	(263.908.000)
Realisasi pembayaran manfaat	(611.654.000)	(275.391.000)
Kewajiban/(Aset) pada akhir periode	<u>1.833.568.000</u>	<u>1.500.802.000</u>
Jumlah Kewajiban/(Aset) pada akhir periode	<u>10.543.917.000</u>	<u>9.931.206.000</u>

Perusahaan menghitung dan mencatat estimasi imbalan kerja karyawan menggunakan metode Valuasi Aktuarial yang harus dipergunakan adalah "Projected Unit Credit". Berdasarkan metode ini, manfaat/imbalan diakui secara prorata sesuai periode jasa, atau dengan kata lain manfaat/imbalan dibagi total masa kerja. Metode ini menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan manfaat/imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (LANJUTAN)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan untuk valuasi ini adalah:		
Tingkat Diskonto	7,00%	7,25%
Tingkat Kenaikan Gaji ke depan	4,50%	4,50%
Usia Pensiun Normal (UPN)	56 tahun	56 tahun
Tingkat Mortalita	TMI IV	TMI IV
Tingkat Cacat/Sakit Berkepanjangan	3%	3%
Tingkat Pengunduran Diri	2%	2%

**15. EKUITAS**

Modal Pemerintah Kota Parepare terdiri dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 888 tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Investasi Milik Pemerintah Kota Parepare dari Daftar Barang Inventaris dan Barang Lainnya Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Hibah Non Kas 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2013. Sedangkan Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah yang disahkan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Modal Pemerintah Kota Parepare		
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebelum tahun 2011	10.662.519.352	10.662.519.352
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2014	6.074.836.000	6.074.836.000
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2015	8.098.045.000	8.098.045.000
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Hibah Non Kas 2016	4.477.099.000	4.477.099.000
- Penyertaan Modal	1.689.513.686	1.689.513.686
- SK Walikota No. 1399 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 28 Desember 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/50/DPUPR tanggal 07 Januari 2017.	11.564.544.253	-
- SK Walikota No. 1289 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2018 serta Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Sebagai Penyertaan Modal No. 005/09/KEU/2018, tanggal 8 Januari 2018.	177.980.250	-
- SK Walikota No. 1289 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2018 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/92 A/DPUPR tanggal 07 Februari 2018.	23.870.595.446	-
- SK Walikota No. 1362 Tahun 2019 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2019 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/44 A/DPUPR tanggal 07 Januari 2019.	3.855.424.038	-
- SK Walikota No. 83 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 25 Februari 2021 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/391/DPUPR tanggal 06 Juli 2020.	2.865.716.894	-
- SK Walikota No. 1135 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 13 Desember 2021 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/758/DPUPR tanggal 21 September 2021.	2.412.122.300	-
Jumlah Modal Pemerintah Kota Parepare	<u>75.748.396.222</u>	<u>31.002.013.039</u>



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. EKUITAS (LANJUTAN)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya		
- SK Walikota No. 1399 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 28 Desember 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/50/DPUPR tanggal 07 Januari 2017.	-	11.564.544.253
- SK Walikota No. 1289 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2018 serta Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Sebagai Penyertaan Modal No. 005/09/KEU/2018, tanggal 8 Januari 2018.	-	177.980.250
- SK Walikota No. 1289 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2018 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/92 A/DPUPR tanggal 07 Februari 2018.	-	23.870.595.446
- SK Walikota No. 1362 Tahun 2019 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 31 Desember 2019 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/44 A/DPUPR tanggal 07 Januari 2019.	-	3.855.424.038
- SK Walikota No. 83 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 25 Februari 2021 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/391/DPUPR tanggal 06 Juli 2020.	-	2.865.716.894
- SK Walikota No. 1135 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda Kota Parepare tanggal 13 Desember 2021 serta Berita Acara Serah Terima Barang No.600/758/DPUPR tanggal 21 September 2021.	-	2.412.122.300
Jumlah Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	<u>-</u>	<u>44.746.383.183</u>
Laba Ditahan		
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(17.571.164.479)	(19.085.187.741)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(5.128.132.869)	1.514.023.262
Jumlah Laba Ditahan	<u>(22.699.297.348)</u>	<u>(17.571.164.479)</u>
Jumlah	<u>53.049.098.873</u>	<u>58.177.231.743</u>

**16. PENDAPATAN USAHA**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penjualan Air		
Harga Air	33.667.226.975	31.861.073.293
Pendapatan Jasa Administrasi	3.340.481.250	3.206.411.750
Pendapatan Penjualan Air Lainnya		
Pendapatan Penjualan Air Mobil Tangki	132.308.355	108.043.636
Jumlah Penjualan Air	<u>37.140.016.580</u>	<u>35.175.528.679</u>
Penjualan Non Air		
Pendapatan Sambungan Baru	1.681.387.321	1.810.359.672
Pendapatan Denda Administrasi	876.004.259	943.975.767
Pendapatan Pemeriksaan Persil	124.050.000	208.500.000
Pendapatan Pendaftaran	118.650.000	194.100.000
Pendapatan Non Air Lain-lain	54.170.889	79.168.703
Pendapatan Penyambungan Kembali	48.177.660	76.449.756
Pendapatan Ganti Nama	3.900.000	2.550.000
Jumlah Penjualan Non Air	<u>2.906.340.130</u>	<u>3.315.103.898</u>
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	225.117.074	205.020.222
Pendapatan Bunga Deposito	47.634.264	51.339.315
Pendapatan lainnya	31.959.831	518.469.461
Pendapatan Bunga Dana Penslun	39.421	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>304.750.590</u>	<u>774.828.999</u>
Jumlah	<u>40.351.107.300</u>	<u>39.265.461.576</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. BEBAN USAHA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Pegawai	15.046.357.365	11.062.203.094
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.954.468.431	9.449.698.036
Beban Listrik	5.360.428.756	5.174.597.921
Beban Umum	5.323.245.569	2.247.428.146
Beban Pemeliharaan	1.686.700.295	1.290.267.480
Beban Bahan Kimia	1.633.200.144	2.169.563.663
Beban Penyisihan Piutang Air dan Non Air	1.620.072.757	1.328.122.900
Beban BBM	1.145.026.286	686.371.234
Beban Kantor	851.843.723	631.463.923
Beban Penelitian dan Pengembangan	87.732.354	99.122.000
Beban Operasi Lainnya	2.033.435.534	2.868.399.509
Beban Lain-lain	736.728.955	350.064.221
<b>Jumlah</b>	<b>45.479.240.169</b>	<b>37.357.302.126</b>
<b>a. Beban Operasi Sumber Air</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.658.935.904	4.208.321.548
Beban Listrik	2.785.650.665	2.518.407.333
Beban Pegawai	541.888.014	465.924.653
Beban Pemeliharaan	502.077.000	165.837.350
Beban Operasi Lainnya	186.254.166	180.425.691
<b>Jumlah</b>	<b>7.674.805.749</b>	<b>7.538.916.575</b>
<b>b. Beban Operasi Pengolahan Air</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Listrik	2.312.731.983	2.449.115.177
Beban Pegawai	1.868.469.594	1.226.221.270
Beban Bahan Kimia	1.633.200.144	2.169.563.663
Beban Penyusutan dan Amortisasi	928.962.161	746.313.588
Beban Pemeliharaan	475.061.885	420.289.160
Beban Operasi Lainnya	296.896.728	294.429.690
<b>Jumlah</b>	<b>7.515.322.495</b>	<b>7.305.932.548</b>
<b>c. Beban Operasi Transmisi dan Distribusi</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.305.407.422	3.878.259.925
Beban Pegawai	2.700.113.398	2.481.538.122
Beban Pemeliharaan	393.267.056	435.674.019
Beban BBM	71.900.530	92.121.536
Beban Listrik	21.036.501	19.170.749
Beban Operasi Lainnya	537.897.375	547.413.834
<b>Jumlah</b>	<b>8.029.622.282</b>	<b>7.454.178.185</b>
<b>d. Beban Administrasi dan Umum</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Pegawai	9.935.886.359	6.888.519.049
Beban Umum	5.323.245.569	2.247.428.146
Beban Penyisihan Piutang Air dan Non Air	1.620.072.757	1.328.122.900
Beban BBM	1.073.125.756	594.249.698
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.061.162.945	616.802.974
Beban Operasi Lainnya	1.012.387.265	1.846.130.294
Beban Kantor	851.843.723	631.463.923
Beban Listrik	241.009.607	187.904.662
Beban Pemeliharaan	316.294.354	268.466.951
Beban Penelitian dan Pengembangan	87.732.354	99.122.000
Beban Lain-lain	736.728.955	350.064.221
<b>Jumlah</b>	<b>22.259.489.644</b>	<b>15.058.274.818</b>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

KOTA PAREPARE

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	2023	2022
Laba (Rugi) Komersial	(5.128.132.869)	1.908.159.450
Koreksi Fiskal Positif:		
Perbedaan temporer		
Beban Penyisihan piutang	1.620.072.757	-
Beban Imbalan Kerja	1.269.485.490	-
Beban Iklan, layanan cetak, beban telepon	103.474.000	-
Beban Bantuan dan sumbangan	68.077.000	-
Beban Lainnya	6.095.000	-
	<u>3.067.204.247</u>	<u>-</u>
Koreksi Fiskal Negatif:		
Pendapatan Jasa Giro	225.117.074	-
Pendapatan Bunga Deposito	47.634.264	-
	<u>272.751.338</u>	<u>-</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>(2.333.679.960)</u>	<u>394.136.188</u>
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	<u>(2.333.679.000)</u>	<u>394.136.000</u>
Beban Pajak Kini	-	394.136.188
Kredit Pajak PPh Pasal 25	-	-
Pajak yang masih harus dibayar (PPh 29)	<u>-</u>	<u>394.136.188</u>

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Parepare bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2024.



Pj. WALI KOTA PAREPARE,

AKBAR ALI

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Parepare  
 Nomor : 1 TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

KOTA PAREPARE  
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BAOAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	BUHD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN 2023	SUMBER a)	STATUS b)	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN NYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
1	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE			26.035.219.577,00	38.841.285.082,00	-	64.876.504.659,00	1.283.488.785,00	10.543.917.000,00	11.827.405.785,00	75.748.396.222,00	-	(22.699.297.349,20)	-	-	53.049.098.872,80	100,00%	53.049.098.872,80
	JUMLAH			26.035.219.577,00	38.841.285.082,00	-	64.876.504.659,00	1.283.488.785,00	10.543.917.000,00	11.827.405.785,00	75.748.396.222,00	-	(22.699.297.349,20)	-	-	53.049.098.872,80	100,00%	53.049.098.872,80

Pj. WALI KOTA PAREPARE,  
  
 AKBAR ALI





Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kota Parepare  
Nomor : 1 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 AGUSTUS 2024

**KOTA PAREPARE**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN 2023	SUMBER a)	STATUSb)	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DILUAR USAHA	BEBAN DILUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE			40.351.107.300,00	45.479.240.169,00	(5.128.132.869,00)	-	-	(5.128.132.869,00)
	<b>JUMLAH</b>			<b>40.351.107.300,00</b>	<b>45.479.240.169,00</b>	<b>(5.128.132.869,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.128.132.869,00)</b>

  
Pi. WALI KOTA PAREPARE,  
*(Signature)*  
AKBAR ALI